



BUPATI BADUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 - 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum dan perubahan kebijakan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016–2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing daerah
- 2.5 Standar Pelayanan Minimal

- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.3 Kerangka Pendanaan
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
 - 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.2 Isu Strategis Daerah
 - 4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 - 5.1 Visi
 - 5.2 Misi
 - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB IX : PENUTUP
 - 9.1 Pedoman Transisi
 - 9.2 Kaidah Pelaksanaan

2. Ketentuan Lampiran dalam Bab I Pendahuluan, Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan, Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan, Bab VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah, Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah, dan Bab X Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2019



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 11.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(11, 95 /2019).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 pada tanggal 16 Agustus 2016 dan telah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung. RPJMD Semesta Berencana tersebut dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud telah memuat Urusan Pemerintah Daerah yang baru sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun masih mencantumkan Perangkat Daerah yang lama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Setelah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diimplementasikan beberapa waktu, terjadi perubahan regulasi dan perkembangan kondisi daerah, sehingga Pemerintah Daerah melakukan Perubahan (Pertama) terhadap RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 pada tanggal 22 Agustus 2017.

Pada awal Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sampai dengan

Tahun 2018. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana dimaksud menunjukkan bahwa :

1. Sebagian substansi yang dirumuskan dalam Perubahan (Pertama) RPJMD Semesta Berencana dimaksud tidak sesuai dengan regulasi yang baru (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah), mengingat pada saat penyusunan Perubahan (Pertama) RPJMD, kita masih berpedoman pada regulasi yang berlaku saat itu (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
2. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 dan 2018 belum mampu memenuhi target yang dirancang dalam APBD dan RPJMD dimaksud.
3. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Makro Ekonomi Daerah pada RPJMD Tahun 2017 dan 2018, ada yang capaiannya dibawah target, sama dengan target dan diatas target RPJMD dimaksud.

Disamping itu pula bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Badung, maka RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Perubahan Kedua terhadap RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Perubahan Kedua RPJMD Semesta Berencana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Selanjutnya dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian berarti bahwa Perubahan RPJMD dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 11

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021**

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-16
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-31
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-36
2.5 Standar Pelayanan Minimal	II-74
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-11
3.3 Kerangka Pendanaan	III-22
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2 Isu Strategis Daerah.....	IV-7
4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	IV-17
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi	V-1
5.2 Misi	V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1

BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
	9.1 Pedoman Transisi	IX-1
	9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan	II-1
Tabel 2.2	Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2015	II-5
Tabel 2.3	Proyeksi Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2011-2021 (Ribuan Jiwa).....	II-11
Tabel 2.4	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.....	II-12
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.....	II-13
Tabel 2.6	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung Tahun 2015.....	II-15
Tabel 2.7	Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015	II-16
Tabel 2.8	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Badung.....	II-19
Tabel 2.9	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung.....	II-20
Tabel 2.10	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan ADHK).....	II-22
Tabel 2.11	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Badung	II-24
Tabel 2.12	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung.....	II-29
Tabel 2.13	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung	II-29
Tabel 2.14	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung	II-30
Tabel 2.15	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	II-30
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung.....	II-31
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	II-32

Tabel 2.18 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d .2015	
Kabupaten Badung	II-32
Tabel 2.19 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015	
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	II-33
Tabel 2.20 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar	
Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung	II-33
Tabel 2.21 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015	
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	II-34
Tabel 2.22 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Badung	II-35
Tabel 2.23 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015	
Kabupaten Badung	II-35
Tabel 2.24 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2015	
Kabupaten Badung	II-36
Tabel 2.25 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Badung.....	II-37
Tabel 2.26 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2015	
Kabupaten Badung	II-37
Tabel 2.27 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2011 s.d 2015	
Kabupaten Badung	II-38
Tabel 2.28 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 s.d 2015	
Kabupaten Badung	II-38
Tabel 2.29 Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Badung.....	II-39
Tabel 2.30 Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Badung.....	II-40
Tabel 2.31 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian	
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung	II-41
Tabel 2.32 Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	
Badung Tahun 2016-2021	II-77
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Badung	III-2
Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Badung.....	III-4
Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011 - 2015	
Kabupaten Badung	III-5

Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Badung	III-6
Tabel 3.5	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Badung	III-10
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Badung.....	III-16
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Badung	III-17
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Badung.....	III-18
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2011-2015 Kabupaten Badung	III-19
Tabel 3.10	Defisit Riil Tahun 2011-2015 Kabupaten Badung	III-20
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Badung	III-21
Tabel 3.12	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 - 2021	III-23
Tabel 3.13	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.....	III-24
Tabel 3.14	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2021.....	III-25
Tabel 3.15	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah.....	III-27
Tabel 4.1	Identifikasi Program Prioritas.....	IV-18
Tabel 4.2	Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh.....	IV-20
Tabel 4.3	Analisis Pengaruh Negatif Program 1	IV-21
Tabel 4.4	Analisis Pengaruh Negatif Program 2	IV-22
Tabel 4.5	Analisis Pengaruh Negatif Program 3	IV-23
Tabel 4.6	Analisis Pengaruh Negatif Program 4	IV-24
Tabel 4.7	Analisis Pengaruh Negatif Program 5	IV-25
Tabel 4.8	Analisis Pengaruh Negatif Program 6	IV-26
Tabel 4.9	Analisis Pengaruh Negatif Program 7	IV-27
Tabel 4.10	Analisis Pengaruh Negatif Program 8	IV-28
Tabel 4.11	Analisis Pengaruh Negatif Program 9	IV-29

Tabel 4.12	Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD	IV-32
Tabel 4.13	Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021	
	Kabupaten Badung	IV-34
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Badung.....	V-6
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Badung	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung.....	VI-8
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif	
	Kabupaten Badung	VI-16
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2021	
	Kabupaten Badung	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan Kebutuhan	
	Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Badung	VII-3
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai dengan Kebutuhan	
	Pendanaan Tahun 2016 Kabupaten Badung.....	VII-36
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Badung.....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung	VIII-4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.....	II-11
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, 2010 dan BPS Tahun 2015	II-14
Grafik 2.3	Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015	II-16
Grafik 2.4	PDRB Kabupaten Badung ADHB Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah) ...	II-17
Grafik 2.5	PDRB Perkapita Kabupaten Badung ADHB Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	II-18
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2011-2015 (%)	II-24
Grafik 2.7	Indeks Gini Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2009-2015.....	II-26
Grafik 2.8	Pemerataan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2011-2015 (Persen).....	II-27
Grafik 2.9	Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015	II-28
Grafik 2.10	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Badung Tahun 2015	II-31
Grafik 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2015	II-58
Grafik 2.12	Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK	II-58
Grafik 2.13	Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. Badung, Tahun 2010 – 2015	II-61
Grafik 2.14	Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kab. Badung, Tahun 2011 – 2015	II-61
Grafik 2.15	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2011-2015	II-63
Grafik 2.16	Distribusi Pendapatan Pada Kelompok 40% Penduduk Berpendapatan Rendah di Kabupaten Badung Tahun 2011-2015.....	II-64
Grafik 2.17	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung, Bali dan Nasional Tahun 2011-2013.....	II-65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Implementasi PPNSB dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	I-3
Gambar 1.2 Diagram Alir Penyusunan RPJMD	I-4
Gambar 1.3 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah.....	I-8
Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya	IV-22
Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan	IV-24
Gambar 4.3 Potensi Agribisnis sekaligus daerah resapan Petang	IV-27

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR
13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Mengingat RPJMD mencakup berbagai dimensi pembangunan daerah serta merupakan subsistem dari pembangunan provinsi dan nasional, maka proses penyusunan RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan yakni : teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Melalui keempat pendekatan tersebut maka secara substansi dokumen RPJMD dapat diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional serta memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, menyebutkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, dalam Surat Edaran tersebut disebutkan pula

bahwa perodesasi Peraturan Daerah tentang RPJMD pasca pemilu adalah Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tahapan penyusunan RPJMD meliputi : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode Tahun 2016-2021 pada tanggal 17 Pebruari 2016 oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-758 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Badung Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-759 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Badung Provinsi Bali, wajib menyusun RPJMD yang merupakan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.

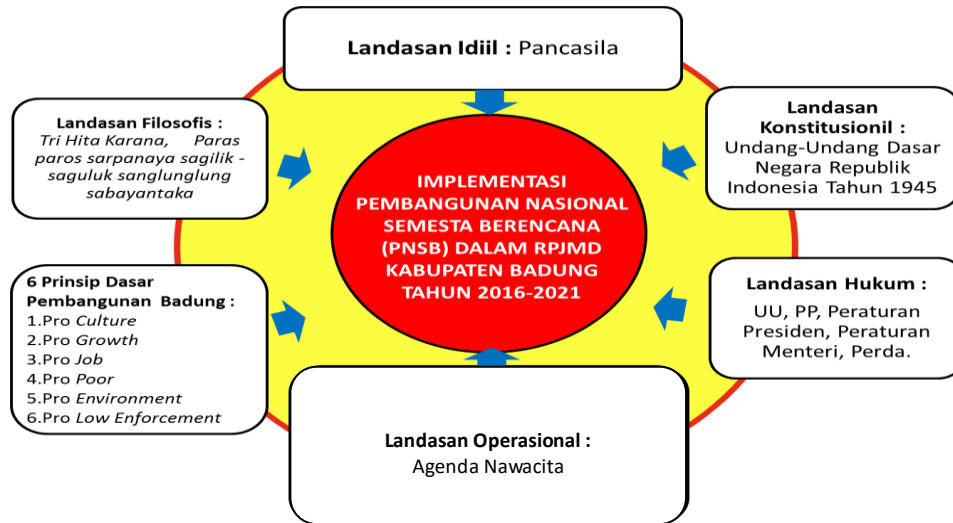
Adapun sasaran pokok dari RPJMD periode ketiga tersebut yakni meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjabarkan visi-misi dan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD, secara substansi berpedoman pada prinsip-prinsip **Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB)** yang merupakan implementasi dari **Ajaran Tri Sakti** yaitu : **berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan**. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga mengadopsi filosofis kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karna* serta *Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*.

Pembangunan bersifat **Semesta** merupakan pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kewilayahan pada semua jenjang yang dilaksanakan secara terpimpin. Sedangkan pembangunan secara **Berencana** merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpola, dapat dilaksanakan tahap demi tahap namun tuntas sesuai dengan irama dan dinamika perubahan lokal, nasional dan global.

Implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

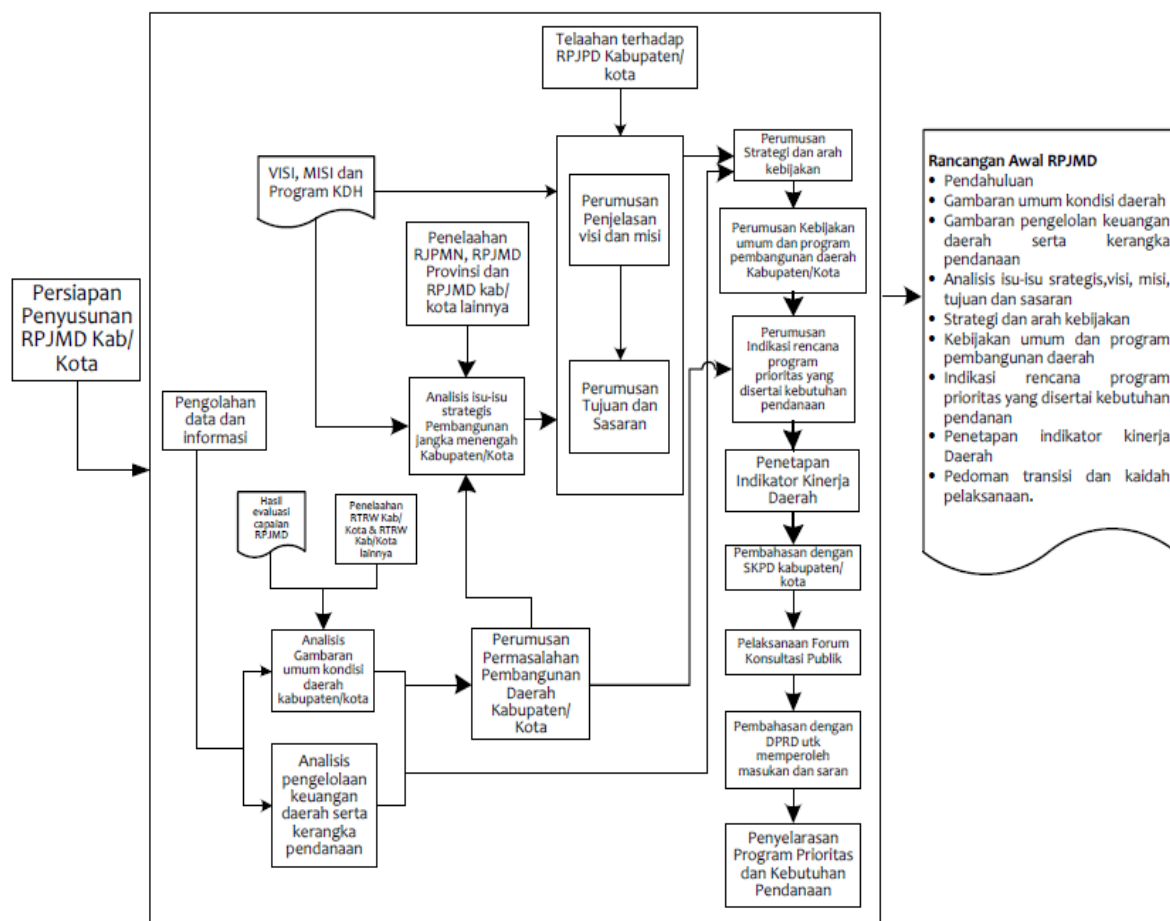
Implementasi PPNSB dalam RPJMD Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Mengacu pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dimaksud, maka substansi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, lebih difokuskan pada pencapaian terhadap 5 (lima) bidang prioritas meliputi : 1). Bidang pangan, sandang dan papan; 2). Bidang pendidikan dan kesehatan; 3). Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan; 4) Bidang adat, agama dan budaya; serta 5) Bidang pariwisata. Kelima bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan pada bidang Infrastruktur, Legislasi serta Anggaran. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain memuat 5 (lima) bidang prioritas tersebut, pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga dirancang program-program yang merupakan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah dengan target dan indikator kinerja yang terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan program-program sesuai prioritas dan urusan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjangkaran aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dari berbagai unsur, sebagaimana termuat dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Diagram Alir Penyusunan RPJMD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 pada tanggal 16 Agustus 2016 dan telah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung. RPJMD Semesta Berencana tersebut dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud telah memuat Urusan Pemerintah Daerah yang baru sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun masih mencantumkan Perangkat Daerah yang lama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Setelah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diimplementasikan beberapa waktu, terjadi perubahan regulasi dan perkembangan kondisi daerah, sehingga Pemerintah Daerah melakukan Perubahan (Pertama) terhadap RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 pada tanggal 22 Agustus 2017.

Pada awal Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Badung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun

2016-2021 sampai dengan Tahun 2018. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana dimaksud menunjukkan bahwa :

1. Sebagian substansi yang dirumuskan dalam Perubahan (Pertama) RPJMD Semesta Berencana dimaksud tidak sesuai dengan regulasi yang baru (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah), mengingat pada saat penyusunan Perubahan (Pertama) RPJMD, kita masih berpedoman pada regulasi yang berlaku saat itu (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
2. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 dan 2018 belum mampu memenuhi target yang dirancang dalam APBD dan RPJMD dimaksud.
3. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Makro Ekonomi Daerah pada RPJMD Tahun 2017 dan 2018, ada yang capaiannya dibawah target, sama dengan target dan diatas target RPJMD dimaksud.

Disamping itu pula bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Badung, maka RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Perubahan Kedua terhadap RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Perubahan Kedua RPJMD Semesta Berencana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Selanjutnya dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD. Dengan demikian berarti bahwa Perubahan RPJMD dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

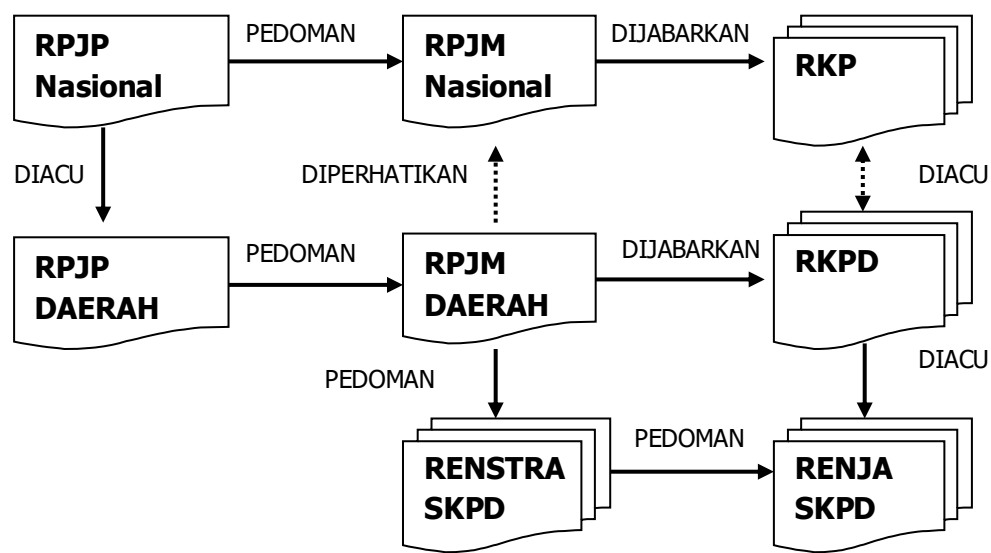
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pembangunan daerah adalah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selanjutnya RPJPD menjadi pedoman untuk menyusun RPJMD. Hubungan antar dokumen perencanaan dimaksud disajikan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3.

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.

Keterangan :

- Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
- Renja-PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- RKA-PD (Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Stuan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang

terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Badung.

serta memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota tetangga sebagaimana tercantum dalam RPJMD masing-masing. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Bali yang perlu diperhatikan yaitu : RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Provinsi Bali, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Bali, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Bali, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Bali, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Provinsi Bali.

Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kabupaten Badung yang perlu diperhatikan yaitu : RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Kabupaten Badung, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Badung.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi-misi dan program-program unggulan daerah dengan memperhatikan kondisi terkini dan isu-isu strategis serta kemampuan keuangan daerah guna mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, yaitu:

- a. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang meliputi : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD serta perencanaan anggaran pembangunan;
- b. Menyediakan landasan formal bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menetapkan kebijakan serta mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui program-program prioritas sesuai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Sebagai instrumen untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh seluruh Perangkat Daerah dalam bentuk program/kegiatan yang terukur dan berorientasi kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;

- d. Pedoman sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah antar bidang, antar wilayah dan antar jenjang pemerintahan secara terpadu dan sinergis; dan
- e. Pedoman untuk mengukur kinerja dan evaluasi capaian program-program pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Kedua RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud Dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1 Aspek Geografi Dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5 Standar Pelayanan Minimal

Bab III : Gambaran Keuangan Daerah

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

Bab IV : Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis Daerah
- 4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs)

Bab V : Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan Dan Sasaran

Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab IX : Penutup

- 9.1 Pedoman Transisi
- 9.2 Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lahan dan Wilayah

A. Luas Wilayah Batas Administratif

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali. Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20" - 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" dan 115°26'51" Bujur Timur. Bentuk bentangan wilayah Kabupaten Badung menyerupai sebilah keris yang membujur dari utara ke selatan, yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di utara, Samudera Indonesia di sisi selatan, Kabupaten Bangli, Gianyar dan Kota Denpasar di sisi timur dan Kabupaten Tabanan di sisi barat.

Luas wilayah Kabupaten Badung yaitu seluas 418,52 km² (7,43% dari luas daratan Pulau Bali), dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Petang yaitu 115 km² atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil terdapat di Kecamatan Kuta, yaitu seluas 17,52 km² atau 4,19 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung per kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Prosentase Luas Wilayah (%)
1	Kuta Selatan	101,13	24,16
2.	Kuta	17,52	4,19
3.	Kuta Utara	33,86	8,09
4.	Mengwi	82,00	19,59
5.	Abiansemal	69,01	16,49
6.	Petang	115	27,48
BADUNG		418,52	100

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

B. Keadaan Iklim

Kabupaten Badung merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau (April-Oktober) dan musim penghujan (Nopember-Maret), hal ini dipengaruhi oleh adanya arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya kandungan uap air. Curah hujan di bawah normal terjadi pada bulan Pebruari, Maret, April, September dan Oktober. Sedangkan curah hujan di atas normal terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, Nopember, dan Desember. Curah hujan rata-rata per tahun antara 893,4 - 2.702,6 mm.

Suhu minimum terjadi pada bulan Agustus mencapai 23,4°C dan maksimum pada bulan Oktober mencapai 31,5 °C, sedangkan suhu rata-rata 26,1 °C – 27,9°C. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Agustus, September dan Oktober mencapai 77% sedangkan tertinggi pada bulan Januari mencapai 84%. Ditinjau dari penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Desember mencapai 53% sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Oktober mencapai 95%.

C. Topografi

Ditinjau dari topografi wilayah, Kabupaten Badung berada pada ketinggian antara 0 – 2.075 meter Diatas Permukaan Laut (DPL). Wilayah Kecamatan Petang memiliki topografi paling tinggi antara 275-2.075 DPL, sedangkan terendah berada di wilayah Kecamatan Mengwi 0-350 meter DPL.

Berdasarkan kondisi topografi tersebut, wilayah Kabupaten Badung memiliki kemiringan lereng antara 0 - >40%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kemiringan lereng 0 – 5%, merupakan daerah landai, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi Kelurahan Tanjung Benoa, sebagian Kelurahan Benoa dan Jimbaran, serta Kelurahan Kuta, Tuban dan Kedonganan, sebagian Kelurahan Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak dan Kelurahan Kerobokan Kelod, dengan luas daerah ± 4.733 Ha atau 11,3% dari luas daerah;
- b. Kemiringan lereng 5 – 15%, merupakan daerah bergelombang umumnya merupakan daerah perbukitan bergelombang, penyebarannya meliputi daerah : sebaian Kecamatan Kuta Utara, sebagian Kecamatan Mengwi, dan sebagian Kecamatan Abiansemal dengan luas daerah ± 20.540 Ha atau 49,1 % dari luas daerah;

- c. Kemiringan lereng 15 – 40%, merupakan daerah miring. Penyebarannya meliputi Sebagian Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta sebagian Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan dengan luas daerah ± 15.813 Ha atau 37,8% dari luas daerah;
- d. Kemiringan lereng > 40%, merupakan daerah yang sampai curam. Penyebarannya meliputi sebagian Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta daerah puncak G. Catur Desa Pelaga, dengan luas daerah ± 766 Ha atau 1,8% dari luas daerah.
- e. Ketinggian di atas permukaan laut adalah 0 – 2.075 Meter

D. Kondisi Morfologi

Pembagian satuan morfologi Kabupaten Badung didasarkan pada bentuk bentang alam dan kemiringan lereng, yang dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi yaitu :

a. Dataran

Merupakan daerah dataran alluvium dan pantai, bentuk lereng datar hingga landai dengan kemiringan lereng umumnya 0-2%, terletak pada ketinggian 0 – 50 m di atas permukaan laut. Sungai yang mengalir pada satuan morfologi ini kondisi keairannya bersifat permanen (mengalir sepanjang tahun). Bentuk sungai melebar ke arah horizontal dengan tebing yang landai dan dangkal. Batuan penyusun terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan liat.

Penyebarannya di bagian tengah-selatan dengan luas daerah lebih kurang 11,56% dari luas wilayah, meliputi Kuta, Legian, Tuban, Benoa, dan Nusa Dua. Daerah ini umumnya dipergunakan sebagai daerah permukiman, industri, perkantoran, pertokoan, dan obyek wisata.

b. Perbukitan Berelief Halus

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng umumnya antara 2–5% dan berada pada ketinggian 100 – 500 m di atas permukaan laut.

Bentuk morfologi dipengaruhi oleh adanya torehan alur-alur sungai yang membentuk pola aliran sejajar (pararel) dengan lembah yang cukup lebar dan agak dalam serta bentuk sungai mulai mengarah ke bentuk “U”. Erosi lateral sudah mulai berjalan lebih intensif dibandingkan dengan erosi vertikal. Batuan penyusun terdiri dari tufa dan lahar yang berasal dari batuan gunung api kelompok Buyan – Bratan dan Batur (Qpbb).

Penyebarannya terdapat di bagian tengah dengan luas lebih kurang 43,38% dari luas wilayah yaitu sekitar daerah Mengwi, Kapal, Abiansemal, Blahkiuh, Lukluk dan Sangeh. Penggunaan lahan di daerah ini digunakan untuk kawasan permukiman, pertanian dan obyek wisata.

c. Perbukitan Berelief Sedang

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng umumnya 5–15% dan berada pada ketinggian 7 - 213 meter di atas permukaan laut.

Penyebarannya di bagian selatan wilayah dengan luas lebih kurang 23,94% dari luas daerah, meliputi daerah Pecatu, Petang, Kutuh dan Uluwatu. Penggunaan lahan pada satuan ini umumnya berupa daerah alang-alang, tegalan dan permukiman.

d. Perbukitan Berelief Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang kasar dengan kemiringan lereng 15-40% dan berada pada ketinggian 500 – 1000 m di atas permukaan laut. Pola aliran sungainya umumnya membentuk pola aliran sejajar (pararel) dengan kenampakan tebing-tebing sungai cukup dalam. Keadaan ini menunjukkan bahwa erosi vertikal lebih intensif dibandingkan dengan erosi lateral. Batuan penyusun terdiri dari tufa dan lahar yang berasal dari batuan gunung api kelompok Buyan – Bratan dan Batur (Qpbb).

Sebarannya terdapat di bagian utara dengan luas lebih kurang 19,58% dari luas daerah yaitu sekitar daerah Pangsan, Petang, Sandakan, Nungnung Kiadan dan Pelaga. Penggunaan lahan di daerah ini adalah untuk kawasan perkebunan, permukiman setempat dan persawahan.

e. Perbukitan Berelief Sangat Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sangat kasar dengan kemiringan lereng umumnya > 40% dan berada pada ketinggian 1500 – 2096 m di atas permukaan laut. Pola aliran sungai menunjukkan pola memancar (radial) dengan lembah dalam dan sempit. Sifat sungai umumnya musiman (intermittent) artinya hanya berair pada musim penghujan. Batuannya terbentuk dari hasil kegiatan gunung api kelompok Buyan – Bratan Purba berupa lava dan Breksi (Qvbb).

Sebarannya menempati bagian utara dengan luas lebih kurang 1,53% dari luas daerah, yang meliputi daerah sekitar G. Catur yang umumnya masih ditutupi oleh hutan tropik.

E. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan wilayah Kabupaten Badung terdiri dari 2 (dua) klasifikasi, yakni lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian dimaksud berupa lahan sawah dan lahan bukan sawah seluas 18.126 hektar (43,31%) , sedangkan lahan bukan pertanian berupa jalan, permukiman, perkantoran, sungai dan hutan negara seluas 13.720 hektar (32,78%).

Sebaran penggunaan lahan pertanian sawah yang terluas terdapat di Kecamatan Mengwi mencapai 4.597 hektar dan terkecil terdapat di Kecamatan Kuta mencapai 30 hektar, sedangkan di Kecamatan Kuta Selatan tidak terdapat lahan pertanian sawah. Sementara untuk lahan bukan sawah berupa : tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, lahan yang tidak diusahakan sementara waktu, dan lainnya (tambak, kolam, empang dan hutan yang diusahakan) terluas terdapat Kecamatan Petang mencapai 8.939 hektar, dan terkecil terdapat di Kecamatan Kuta mencapai 164 hektar. Secara rinci pola penggunaan lahan Kabupaten Badung dimuat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Badung
Tahun 2015

No	Penggunaan Lahan	Luas (Hektar)	Persen (%)
1	Lahan Pertanian	28.132	67,22
1.1	Lahan Sawah (irigasi teknis)	10.006	23,91
1.2	Lahan bukan sawah	18.126	43,31
	a. Tegal/Kebun	8.028	19,18
	b. Perkebunan	6.337	15,14
	c. Hutan Rakyat	2.122	5,07
	d. Sementara tidak diusahakan	235	0,56
	e.Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan yang diusahakan)	1.404	3,35
2	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, Hutan Negara)	13.720	32,78
Jumlah		41.852	100

Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2015

F. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Rawan Bencana Alam

Berdasarkan Aspek Geologi Kabupaten Badung dapat dijelaskan gambaran mengenai karakteristik lokasi wilayah dan kerentanan rawan bencana.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :

1. Kawasan Lindung dan
2. Kawasan Budidaya

Kawasan Lindung dengan luas kurang lebih 2.882,57 Ha atau 6,89% dari luas wilayah Kabuapten Badung meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan bawahannya ;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
4. Kawasan rawan bencana alam;
5. Kawasan lindung geologi;
6. Kawasan lindung lainnya

A. Kawasan rawan bencana alam

1. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas :
 - a. Kawasan potensi rawan bencana angin kencang;
 - b. Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor;
 - c. Kawasan potensi rawan bencana kekeringan;
 - d. Kawasan potensi rawan gelombang pasang; dan
 - e. Kawasan potensi rawan bencana banjir.
2. Kawasan potensi rawan bencana angin kencang dengan luas kurang lebih 7.098 ha (tujuh ribu sembilan puluh delapan hektar), meliputi :
 - a. Kawasan rawan bencana angin kencang potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.271 ha (dua ribu dua ratus tujuh puluh satu hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 297 ha (dua ratus sembilan puluh tujuh hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1.203 ha (seribu dua ratus tiga hektar) dan Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 771 ha (tujuh ratus tujuh puluh satu hektar); dan
 - b. Kawasan rawan bencana angin kencang potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 4.826 ha (empat ribu delapan ratus dua puluh enam hektar) yang tersebar di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 508 ha (lima ratus delapan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 1.078 ha (seribu tujuh puluh delapan hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 979 ha (sembilan ratus tujuh puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 952 ha (sembilan ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 1.310 ha (seribu tiga ratus sepuluh hektar).
3. Kawasan potensi rawan bencana tanah longsor dengan luas kurang lebih 98 ha (sembilan puluh delapan hektar), meliputi :

- a. Kawasan rawan bencana tanah longsor potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 70 ha (tujuh puluh hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 54 ha (lima puluh empat hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 9 ha (sembilan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 0,2 ha (nol koma dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 6 ha (enam hektar); dan
 - b. Kawasan rawan bencana tanah longsor potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 27 ha (dua puluh tujuh hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 26 ha (dua puluh enam hektar) dan Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar).
4. Kawasan potensi rawan bencana kekeringan termasuk klasifikasi rendah dengan luas potensial kurang lebih 11,2 ha (sebelas koma dua hektar) terdapat di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 0,2 ha (nol koma dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 11 ha (sebelas hektar).
 5. Kawasan potensi rawan gelombang pasang tersebar pada sepanjang Kawasan pesisir pantai di Wilayah Kabupaten.
 6. Kawasan potensi rawan bencana banjir terdiri dari Kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan Kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas potensial kurang lebih 2.011 ha (dua ribu sebelas hektar), meliputi :
 - a. Kawasan rawan bencana banjir potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 182 ha (seratus delapan puluh dua hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 167 ha (seratus enam puluh tujuh hektar); dan
 - b. Kawasan rawan bencana banjir potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.829 ha (seribu delapan ratus dua puluh sembilan hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 56 ha (lima puluh enam hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 239 ha (dua ratus tiga puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 952 ha (sembilan ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 583 ha (lima ratus delapan puluh tiga hektar).

B. Kawasan Lindung geologi

1. Kawasan Lindung geologi terdiri atas:
 - a. Kawasan cagar alam geologi
 - b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
2. Kawasan cagar alam geologi tersebar di Kawasan Semenanjung Bukit, Kecamatan Kuta Selatan.
3. Kawasan rawan bencana alam geologi meliputi :
 - a. Kawasan rawan gempa bumi;
 - b. Kawasan rawan gerakan tanah;
 - c. Kawasan rawan tsunami;
 - d. Kawasan rawan abrasi pantai; dan
 - e. Kawasan rawan intrusi air laut.
4. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:
 - a. Kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. Kawasan Sekitar Mata Air.

Kawasan cagar alam geologi adalah Kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam karst yang dicirikan dengan adanya sumber air yang mengalir sebagai sungai bawah tanah dan adanya goa bawah tanah yang tersebar di Kawasan Semenanjung Bukit, Kecamatan Kuta Selatan.

Kawasan rawan gempa bumi dengan luas potensial kurang lebih 7.250,3 ha (tujuh ribu dua ratus lima puluh koma tiga hektar), meliputi :

- a. Kawasan rawan gempa bumi potensi rendah dengan luas keseluruhan kurang lebih 6.294,5 ha (enam ribu dua ratus sembilan puluh empat koma lima hektar) yang tersebar di Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 1.392,9 ha (seribu tiga ratus sembilan puluh dua koma sembilan hektar), Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 1.668,2 ha (seribu enam ratus enam puluh delapan koma dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 978,6 ha (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma enam hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 950,7 ha (sembilan ratus lima puluh koma tujuh hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 1.304,2 ha (seribu tiga ratus empat koma dua hektar); dan

- b. Kawasan rawan gempa bumi potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 955,8 ha (sembilan ratus lima puluh lima koma delapan hektar) yang tersebar di Kecamatan Petang seluas kurang lebih 456,7 ha (empat ratus lima puluh enam koma tujuh hektar), Kecamatan Abiansemal seluas kurang lebih 318,2 ha (tiga ratus delapan belas koma dua hektar) dan Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 181 ha (seratus delapan puluh satu hektar).

Kawasan rawan gerakan tanah mencakup Kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada Kawasan perbukitan terjal di Wilayah Kecamatan Petang.

Kawasan rawan terdiri dari Kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan Kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas potensial kurang lebih 1.561,5 ha (seribu lima ratus enam puluh satu koma lima hektar) meliputi :

- a. Kawasan rawan tsunami potensi sedang dengan luas keseluruhan kurang lebih 394,5 ha (tiga ratus sembilan puluh empat koma lima hektar) yang tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 8,5 ha (delapan koma lima hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 39,2 ha (tiga puluh sembilan koma dua hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 104,7 ha (seratus empat koma tujuh hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas keseluruhan kurang lebih 242,3 ha (dua ratus empat puluh dua koma tiga hektar); dan
- b. Kawasan rawan tsunami potensi tinggi dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.167 ha (seribu seratus enam puluh tujuh hektar) yang tersebar di Kecamatan Mengwi seluas kurang lebih 2,2 ha (dua koma dua hektar), Kecamatan Kuta Utara seluas kurang lebih 24 ha (dua puluh empat hektar), Kecamatan Kuta seluas kurang lebih 827,1 ha (delapan ratus dua puluh tujuh koma satu hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan seluas kurang lebih 313,7 ha (tiga ratus tiga belas koma tujuh hektar).

Kawasan rawan abrasi pantai sebarannya berada pada Kawasan pesisir pantai selatan sepanjang kurang lebih 12,1 km (dua belas koma satu kilometer) meliputi Pantai Mengening, Pantai Seseh, Pantai Munggu, Pantai Pererenan, Pantai Batu Mejan, Pantai Batu Bolong, Pantai Berawa, Pantai Petitengget, Pantai Oberoi, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Kuta, Pantai Jerman, Pantai Pemelisan, Pantai Kedonganan, Pantai Jimbaran, Pantai Sawangan, Pantai Geger, Pantai Nusa Dua, Pantai Samuh dan Pantai Tanjung Bena.

Kawasan rawan intrusi air laut sebarannya berada pada Kawasan pesisir Pantai Petitenget, Pantai Oberoi, Pantai Seminyak, Pantai Legian, Pantai Kuta, Pantai Jerman, Pantai Pemelisan, Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, Pantai Jimbaran, Pantai Nusa Dua, Pantai Samuh dan Pantai Tanjung Benoa.

2.1.2 Demografi

C. Perkembangan dan Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, maka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2016 mencapai sekitar 466.945 ribu jiwa, Tahun 2017 mencapai sekitar 471.911 ribu jiwa, Tahun 2018 mencapai sekitar 476.933 ribu jiwa, Tahun 2019 mencapai sekitar 482.012 ribu jiwa, Tahun 2020 mencapai sekitar 487.151 ribu jiwa, dan pada Tahun 2021 mencapai sekitar 492.348 ribu jiwa. Sedangkan apabila dilihat dari komposisinya, penduduk Kabupaten Badung didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan. Kondisi ini tentu perlu segera diantisipasi mengingat jumlah penduduk yang padat akan berkonsekwensi pada peningkatan sumberdaya penunjang kehidupan antara lain mencakup pangan, sandang dan papan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Badung dari Tahun 2011-2021 dimuat pada Tabel 2.3.

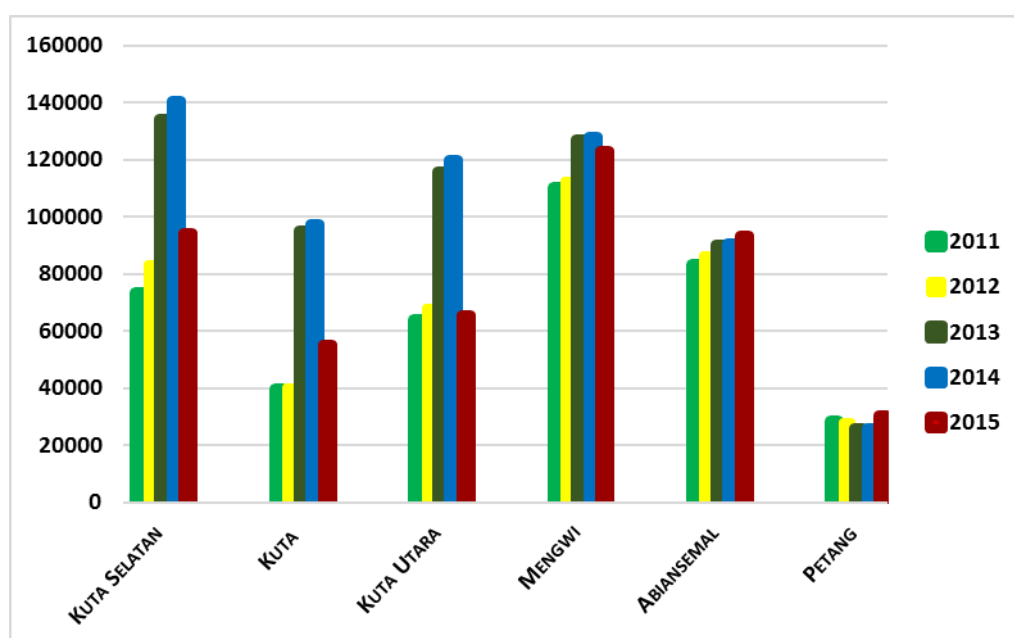
Tabel 2.3
 Proyeksi Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Badung
 Tahun 2011-2021 (Ribu Jiwa)

Jenis Kelamin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laki - Laki	220,483	231,081	232,820	231,553	232,302	234,080	235.872	237.677	239.496	241.329	243.176
Perempuan	212,346	223,821	225,580	229,831	229,734	232,865	236.039	239.256	242.516	245.822	249.172
Kab.Badung	432,829	454,902	458,400	461,384	462,036	466,945	471.911	476.933	482.012	487.151	492.348

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Selanjutnya grafik perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Badung per kecamatan pada tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1.
 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Badung
 Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015

D. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan pariwisata dunia memiliki berbagai lapangan usaha sehingga menjadi salah satu tujuan migran di Provinsi Bali. Hal ini membawa dampak terhadap tingginya kepadatan penduduk Kabupaten Badung yakni mencapai 1.104 jiwa/km² pada Tahun 2015. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kuta yang mencapai 3.144 jiwa/km², sementara kepadatan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Petang yang hanya sebesar 263 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Kuta tidak dapat dihindari mengingat Kuta merupakan pusat aktivitas kepariwisataan sehingga lapangan usaha juga terkonsentrasi di wilayah tersebut.

Wilayah yang memiliki perkembangan kepadatan penduduk cukup tinggi setelah Kecamatan Kuta yakni Kecamatan Kuta Utara yang mencapai 1.937 jiwa/km². Hal ini disebabkan oleh perkembangan sarana kepariwisataan dan permukiman di wilayah Kecamatan Kuta Utara yang berfungsi sebagai *hinterland* dari pusat pariwisata Kuta meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, di tahun 2015 mengalami sedikit penurunan. Tingginya kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Kuta Utara perlu dikendalikan mengingat berdampak pada meningkatnya beban lingkungan, serta rawan timbulnya permasalahan sosial kemasyarakatan.

Secara rinci kepadatan penduduk Kabupaten Badung dari Tahun 2010-2015 dimuat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Badung
Tahun 2010-2015

NO	KECAMATAN	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kuta Selatan	709	729	826	1.330	1.389	933
2	Kuta	2.272	2.287	2.301	5.428	5.576	3.144
3	Kuta Utara	1.829	1.890	2.021	3.429	3.538	1.937
4	Mengwi	1.328	1.349	1.377	1.550	1.562	1.502
5	Abiansemal	1.191	1.211	1.254	1.306	1.313	1.356
6	Petang	248	248	247	228	227	263
BADUNG		939	957	1.004	1.408	1.440	1.104

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015

E. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk sering digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha – usaha pemerintah di bidang kependudukan. Semakin kecil laju pertumbuhan penduduk, maka usaha pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk semakin berhasil. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung selama 5 tahun terakhir rata-rata 3,28% dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.104 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk tertinggi mulai Tahun 2011-2015 terjadi di Kecamatan Kuta Selatan yang mencapai 12,34%, disusul Kecamatan Kuta mencapai 6,92%, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan kuta utara yaitu 2,12%.

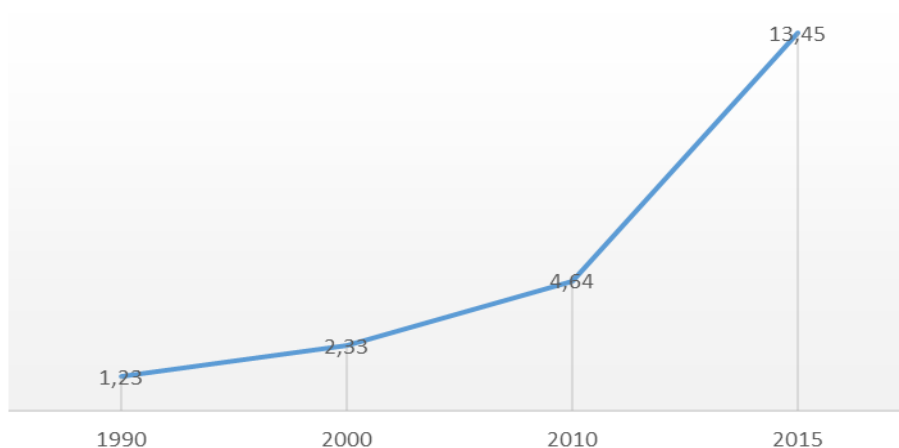
Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung perlu dikendalikan secara komprehensif dan lintas wilayah, mengingat fenomena aglomerasi penduduk dan ekonomi semakin menguat yang akan membawa berbagai dampak terhadap lingkungan, prasarana wilayah dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung ditunjukkan pada Tabel 2.5. dan Grafik 2.2.

Tabel 2.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung
Tahun 2010-2015

NO	KECAMATAN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)				RATA-RATA
		2010-2011	2011-2012	2013-2014	2014-2015	
1	Kuta Selatan	2,79	13,31	4,46	32,86	12,34
2	Kuta	0,63	0,64	2,73	43,68	6,92
3	Kuta Utara	3,34	6,92	3,19	45,31	2,12
4	Mengwi	1,54	2,09	0,79	3,85	3,45
5	Abiansemal	1,71	3,50	0,55	3,33	6,60
6	Petang	0,05	0,34	0,38	16,41	3,43
	BADUNG	1,89	4,90	2,33	23,35	3,28

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015

Grafik 2.2.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, 2010 dan
BPS Tahun 2015



Sumber : Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, dan 2010
Badung Dalam Angka Tahun 2015

F. Rata – rata Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup (*life expectancy rate*) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Rata-rata usia harapan hidup menjadi salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah dan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Oleh sebab itulah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dilaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas kehidupan.

Seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, rata-rata usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan. Usia rata-rata harapan hidup masyarakat Kabupaten Badung pada Tahun 2015 mencapai 74,30 tahun sehingga berada di atas rata – rata umur harapan hidup Bali sebesar 71,35 tahun dan nasional sebesar 70,1 tahun.

G. Indikator Ketenagakerjaan

Berdasarkan indikator ketenagakerjaan Tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Badung mencapai sekitar 463.227 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak sekitar 338.816 orang di antaranya bekerja dan sebanyak 1150 menganggur. Berdasarkan kondisi tersebut maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2015 mencapai 92,00% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 0,34 sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung
Tahun 2015

NO	URAIAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Penduduk Usia Kerja (Orang)	236.952	226.275	463.227
2	Angkatan Kerja (Orang)	198.964	141.003	339.967
3	Bekerja (Orang)	198.885	139.931	338.816
4	Pengangguran Terbuka (Orang)	79	1.071	1.150
5	Bukan Angkatan Kerja (Orang)	37.988	88.273	126.261
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83,97	61,50	92,00
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,04	0,76	0,34

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

H. Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Distribusi penduduk Kabupaten Badung berdasarkan lapangan usaha Tahun 2015, menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Badung sebagian besar bergerak pada lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan hotel yaitu mencapai 41,90%, disusul jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan mencapai 16,30%, sedangkan yang paling rendah pada lapangan pertambangan dan penggalian yaitu 0,04%.

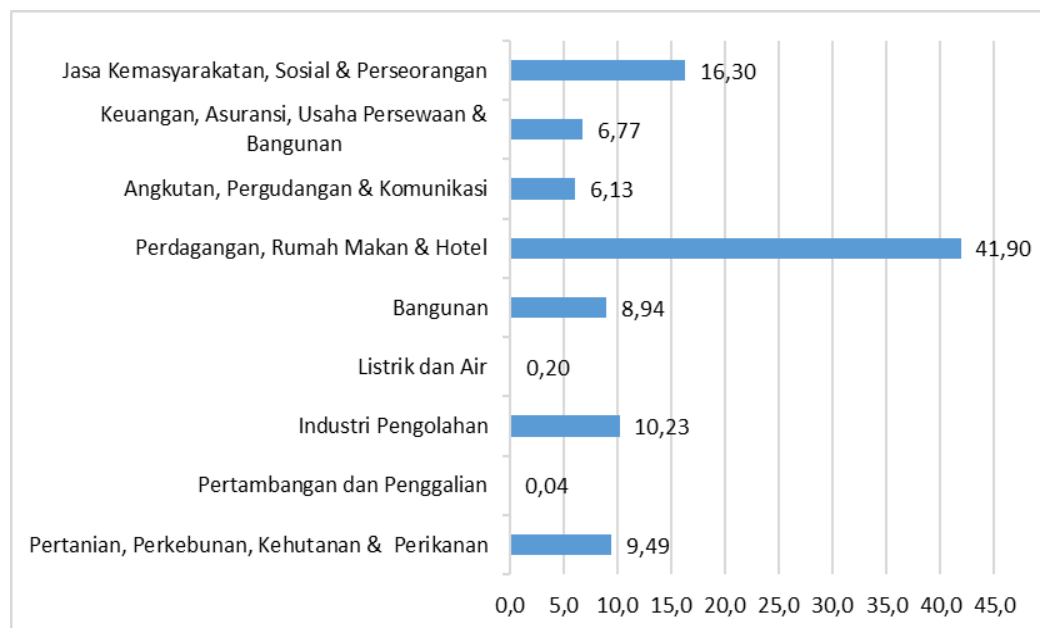
Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Badung dominan bergerak pada lapangan usaha sektor tersier, dan paling sedikit pada lapangan usaha sektor primer. Secara rinci distribusi penduduk berdasarkan lapangan usaha ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2015

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH	PERSEN
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan & Perikanan	32.161	9,49
2	Pertambangan dan Penggalian	121	0,04
3	Industri Pengolahan	34.663	10,23
4	Listrik dan Air	661	0,20
5	Bangunan	30.304	8,94
6	Perdagangan, Rumah Makan & Hotel	141.975	41,90
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	20.778	6,13
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan & Bangunan	22.937	6,77
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perseorangan	55.216	16,30
Total		338.816	100,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Grafik 2.3.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2015



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

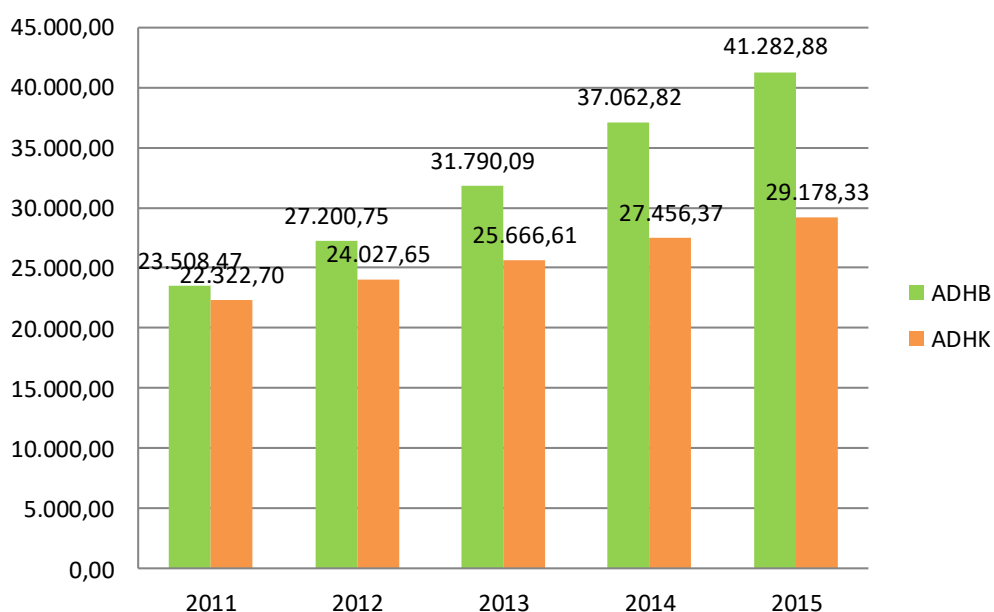
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

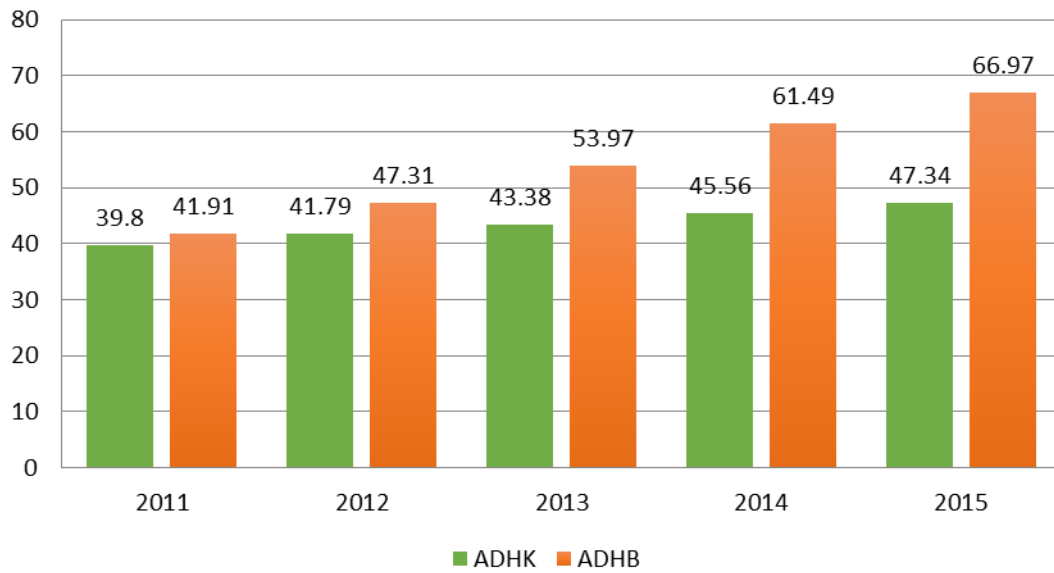
Grafik 2.4
PDRB Kabupaten Badung ADHB
Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Badung terus meningkat yang diindikasikan dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada Tahun 2011, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku baru mencapai Rp.23.508,47 milyar, meningkat menjadi Rp.41.282,88 milyar pada Tahun 2015. Peningkatan juga terlihat pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) yaitu dari Rp.22.322,70 milyar pada Tahun 2011 meningkat menjadi Rp.29.178,33 milyar pada Tahun 2015.

Grafik 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Peningkatan juga terlihat dari hasil perhitungan PDRB perkapita Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2011, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2011) Kabupaten Badung baru mencapai Rp.39,80 juta meningkat pada Tahun 2015 menjadi Rp.47,34 juta lebih. Sedangkan pada PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku meningkat dari Rp.41,91 juta pada Tahun 2011 menjadi Rp.66,97 juta pada Tahun 2015.

Tabel 2.8
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung
 Tahun 2011 s.d 2015
 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010
 (Dalam milyar Rupiah)

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.836,40	8,23	1.954,37	8,13	1.982,15	7,72	2.087,31	7,60	2.182,15	7,48
2	Pertambangan dan Penggalian	84,58	0,38	98,02	0,41	105,14	0,41	106,35	0,39	102,08	0,35
3	Industri Pengolahan	1.024,52	4,59	1.074,57	4,47	1.163,28	4,53	1.283,50	4,67	1.387,24	4,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	46,21	0,21	51,32	0,21	55,45	0,22	57,75	0,21	57,94	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	72,21	0,32	74,59	0,31	78,64	0,31	85,52	0,31	88,57	0,30
6	Konstruksi	2.074,42	9,29	2.478,05	10,31	2.623,08	10,22	2.705,93	9,86	2.817,43	9,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.649,39	7,39	1.749,22	7,28	1.905,69	7,42	2.073,02	7,55	2.238,23	7,67
8	Transportasi dan Pergudangan	4.292,63	19,23	4.552,04	18,95	4.826,61	18,81	4.985,18	18,16	5.093,13	17,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.657,14	25,34	6.117,81	25,46	6.631,28	25,84	7.132,96	25,98	7.640,25	26,18
10	Informasi dan Komunikasi	1.685,97	7,55	1.824,27	7,59	1.927,37	7,51	2.092,93	7,62	2.276,90	7,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	601,69	2,70	653,92	2,72	737,53	2,87	819,73	2,99	890,63	3,05
12	Real Estate	888,02	3,98	945,47	3,93	1.010,17	3,94	115,70	0,42	1.202,30	4,12
13	Jasa Perusahaan	181,36	0,81	185,23	0,77	202,08	0,79	220,51	0,80	236,10	0,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	988,89	4,43	999,98	4,16	998,01	3,89	1.122,02	4,09	1.229,68	4,21
15	Jasa Pendidikan	766,14	3,43	768,88	3,20	873,74	3,40	981,17	3,57	1.062,45	3,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	286,94	1,29	304,44	1,27	343,02	1,34	391,44	1,43	432,65	1,48
17	Jasa Lainnya	186,18	0,83	195,49	0,81	203,37	0,79	222,35	0,81	240,60	0,82
	PDRB	22.322,70	100,00	24.027,65	100,00	25.666,61	100,00	27.456,37	100,00	29.178,33	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Tabel 2.9
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung
 Tahun 2011 s.d 2015
 atas Dasar Harga Berlaku

(Dalam milyar Rupiah)

No	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.894,34	8,06	2.100,22	7,72	2.352,69	7,40	2.516,30	6,79	2.767,48	6,70
2	Pertambangan dan Penggalian	88,15	0,37	105,55	0,39	120,37	0,38	128,27	0,35	128,19	0,31
3	Industri Pengolahan	1.077,02	4,58	1.186,71	4,36	1.339,29	4,21	1.487,96	4,01	1.684,86	4,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	40,37	0,17	39,91	0,15	39,06	0,12	48,85	0,13	65,06	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,82	0,31	74,26	0,27	79,65	0,25	84,48	0,23	93,68	0,23
6	Konstruksi	2.186,85	9,30	2.802,29	10,30	3.121,73	9,82	3.216,49	8,68	3.451,42	8,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.771,43	7,54	1.926,01	7,08	2.152,45	6,77	2.413,11	6,51	2.659,12	6,44
8	Transportasi dan Pergudangan	4.769,00	20,29	5.610,46	20,63	6.913,40	21,75	8.831,24	23,83	10.263,82	24,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.948,21	25,30	7.186,66	26,42	8.807,67	27,71	10.815,28	29,18	11.787,94	28,55
10	Informasi dan Komunikasi	1.682,45	7,16	1.833,38	6,74	1.940,83	6,11	2.065,23	5,57	2.298,39	5,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	628,09	2,67	753,08	2,77	896,70	2,82	997,52	2,69	1.096,99	2,66
12	Real Estate	915,48	3,89	999,50	3,67	1.124,15	3,54	1.239,79	3,35	1.354,24	3,28
13	Jasa Perusahaan	182,86	0,78	198,61	0,73	224,19	0,71	247,84	0,67	283,09	0,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	999,95	4,25	1.025,89	3,77	1.043,15	3,28	1.149,85	3,10	1.299,01	3,15
15	Jasa Pendidikan	766,55	3,26	818,67	3,01	1.004,17	3,16	1.120,14	3,02	1.240,78	3,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	296,16	1,26	329,96	1,21	390,76	1,23	435,44	1,17	511,78	1,24
17	Jasa Lainnya	296,16	1,26	329,96	1,21	390,76	1,23	435,44	1,17	297,03	0,72
	PDRB	23.508,47	100,00	27.200,75	100,00	31.790,09	100,00	37.062,82	100,00	41.282,88	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Potret kinerja perekonomian Kabupaten Badung periode Tahun 2011-2015 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai PDRB Kabupaten Badung yang dihasilkan oleh masing-masing lapangan usaha. PDRB atas dasar harga konstan

memiliki pola yang hampir sama dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada Tahun 2015 besaran PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga konstan sebesar Rp. 29,18 trilyun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 27,46 trilyun. Total nilai tambah yang terbentuk (PDRB atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2015 sebesar Rp. 41,28 trilyun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 37,06 trilyun.

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembentukan besarnya nilai tambah ini, termasuk keberadaan DTW (Daya Tarik Wisata) turut memberi sumbangan besar terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Badung. Hal ini dapat terlihat dari besarnya nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai Rp. 11,79 trilyun. Dari seluruh nilai tambah pada lapangan usaha ini, sub kategori penyediaan akomodasi memberikan kontribusi sebesar 73,42 persen, sedangkan sub kategori penyediaan makan minum memberikan kontribusi sebesar 26,58 persen.

Selain lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha yang memiliki nilai tambah cukup besar yakni transportasi dan pergudangan yang mencapai Rp. 10,3 trilyun pada Tahun 2015. Meningkatnya kontribusi lapangan usaha ini disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisman maupun wisdom ke Bali. Keberadaan Bandara Ngurah Rai mampu menghasilkan nilai tambah hampir 90 persen terhadap nilai tambah di lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Di posisi ketiga terdapat lapangan usaha konstruksi yang menghasilkan nilai tambah terbesar mencapai Rp. 3,45 trilyun pada Tahun 2015. Diposisi selanjutnya ditempati oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan juga lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.10
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung
Tahun 2011 s.d 2015
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

No	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		ABHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06	8,23	7,72	8,13	7,40	7,72	6,79	7,60	6,70	7,48
2	Pertambangan dan Penggalian	0,37	0,38	0,39	0,41	0,38	0,41	0,35	0,39	0,31	0,35
3	Industri Pengolahan	4,58	4,59	4,36	4,47	4,21	4,53	4,01	4,67	4,08	4,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,21	0,15	0,21	0,12	0,22	0,13	0,21	0,16	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	0,32	0,27	0,31	0,25	0,31	0,23	0,31	0,23	0,30
6	Konstruksi	9,30	9,29	10,30	10,31	9,82	10,22	8,68	9,86	8,36	9,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,54	7,39	7,08	7,28	6,77	7,42	6,51	7,55	6,44	7,67
8	Transportasi dan Pergudangan	20,29	19,23	20,63	18,95	21,75	18,81	23,83	18,16	24,86	17,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,30	25,34	26,42	25,46	27,71	25,84	29,18	25,98	28,55	26,18
10	Informasi dan Komunikasi	7,16	7,55	6,74	7,59	6,11	7,51	5,57	7,62	5,57	7,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	2,70	2,77	2,72	2,82	2,87	2,69	2,99	2,66	3,05
12	Real Estate	3,89	3,98	3,67	3,93	3,54	3,94	3,35	0,42	3,28	4,12
13	Jasa Perusahaan	0,78	0,81	0,73	0,77	0,71	0,79	0,67	0,80	0,69	0,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,25	4,43	3,77	4,16	3,28	3,89	3,10	4,09	3,15	4,21
15	Jasa Pendidikan	3,26	3,43	3,01	3,20	3,16	3,40	3,02	3,57	3,01	3,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,29	1,21	1,27	1,23	1,34	1,17	1,43	1,24	1,48
17	Jasa Lainnya	1,26	0,83	1,21	0,81	1,23	0,79	1,17	0,81	0,72	0,82
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Selama periode Tahun 2011 – 2015, struktur perekonomian Badung masih didominasi oleh lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum serta lapangan usaha transportasi. Sarana kepariwisataan di Kabupaten Badung yang cukup banyak memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Badung. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional

Ngurah Rai di Kabupaten Badung, mampu memberikan sumbangan terbesar di lapangan usaha transportasi disamping transportasi darat.

Selanjutnya lapangan usaha konstruksi menempati posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 8,36 persen pada Tahun 2015, diikuti oleh lapangan usaha pertanian sebesar 6,70 persen dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang menyumbang sebesar 6,44 persen.

Jenis-jenis investasi yang memberi pengaruh signifikan terhadap PDRB disebabkan oleh pembangunan hotel, restoran, toko, ruko dan jasa lainnya. Demikian pula dampak pembangunan mega proyek pada Tahun 2012 diantaranya perluasan Bandara Ngurah Rai, pembangunan jalan tol diatas perairan, serta *underpass* Dewa Ruci memberi kontribusi mencapai 10,30 persen terhadap total PDRB Badung.

Pembangunan irigasi dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan gedung yang bersumber dari belanja pemerintah daerah turut menjadi stimulan dalam perkembangan lapangan usaha konstruksi. Pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan nilai tambah lapangan usaha ini bertambah dari sebesar Rp. 2,19 triliyun pada tahun 2011 menjadi Rp. 3,45 triliyun pada tahun 2015. Setelah tahun 2012 peranan sektor ini mulai mengalami penurunan yaitu sebesar 8,68 persen pada Tahun 2014 dan menjadi 8,36 persen pada Tahun 2015.

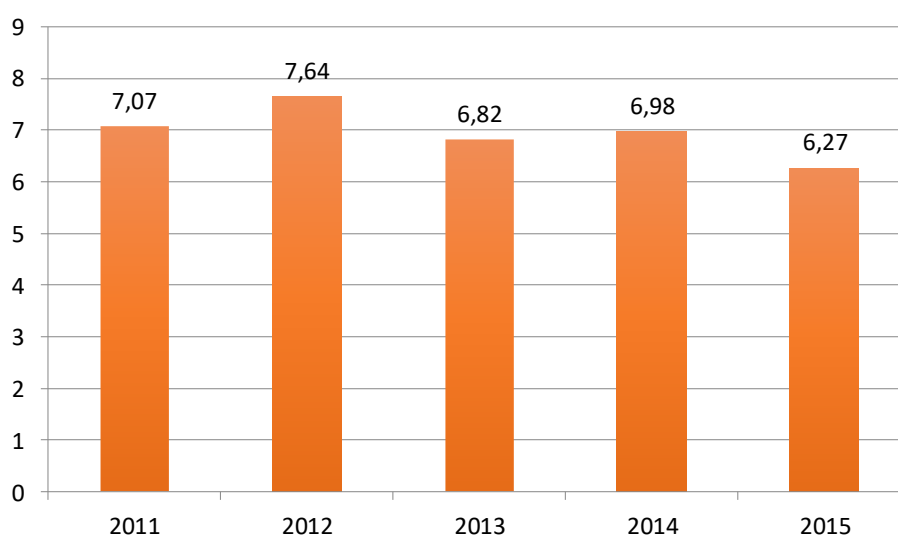
Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, menempati posisi kelima pada Tahun 2015 dengan kontribusi mencapai 6,44 persen. Besarnya keterkaitan antara industri pariwisata dan lapangan usaha perdagangan mengakibatkan nilai tambah di lapangan usaha ini cukup signifikan mencapai Rp. 12,94 triliyun. Peranan atau distribusi masing-masing lapangan usaha ditunjukkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.11
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011 - 2015
 Kabupaten Badung

No	Sektor	Pertumbuhan	
		ADHB %	ADHK %
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-16,81	-9,09
2	Pertambangan dan Penggalian	-17,20	-7,67
3	Industri Pengolahan	-10,92	3,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-8,22	-4,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-25,72	-6,16
6	Konstruksi	-10,13	3,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-14,52	3,82
8	Transportasi dan Pergudangan	22,56	-9,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,85	3,32
10	Informasi dan Komunikasi	-22,21	3,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,54	13,24
12	Real Estate	-15,76	3,58
13	Jasa Perusahaan	-11,84	-0,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-26,02	-4,87
15	Jasa Pendidikan	-7,83	6,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,60	15,35
17	Jasa Lainnya	-10,85	-1,13
	PDRB	-164,76	13,6

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Grafik 2.6
 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung
 Tahun 2011-2015 (%)



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, seiring

perkembangan perekonomian nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya kondisi perekonomian global (ekonomi global yang belum pulih dari krisis dalam 3 tahun terakhir, perekonomian nasional yaitu akibat kenaikan BBM) dan isu-isu lainnya yang berpengaruh terhadap kepariwisataan di Kabupaten Badung.

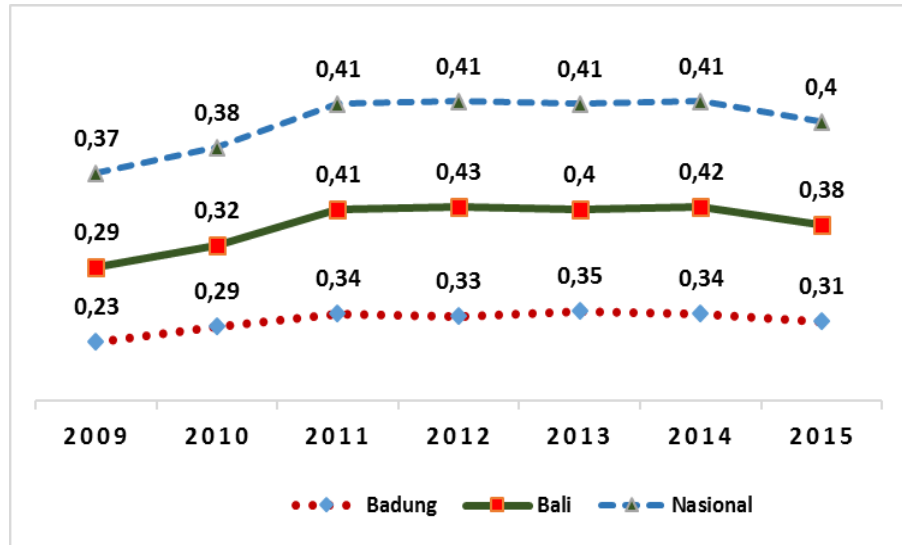
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami puncaknya pada Tahun 2012 yaitu mencapai 7,64%. Kondisi ini didorong oleh pelaksanaan proyek/investasi skala besar di sektor bangunan pada Tahun 2012 diantaranya proyek *Underpass*, Jalan di atas Perairan (JDP) dan perluasan Bandara Ngurah Rai. Selain hal tersebut kondisi ini dipicu oleh adanya berbagai *event* yang berskala internasional yang bertempat di Nusa Dua, Kuta Selatan antara lain KTT *APEC*, KTT *ASEAN*, *Bali Democracy Forum* serta *World Trade Organization (WTO)*. Sedangkan pada Tahun 2013 hingga Tahun 2015 terjadi perlambatan yang disebabkan proyek investasi skala besar telah berakhir pelaksanaannya serta dampak dari perekonomian nasional dan global mengalami perlambatan.

Di samping dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan di suatu daerah juga perlu dilihat dari sisi lain, antara lain aspek kesenjangan pendapatan antar penduduk yang diukur dengan gini rasio. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Kisaran nilai indeks gini rasio dari 0 - < 0,35 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran 0,35 - 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio > 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2009 hingga Tahun 2015 menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung masih dalam tingkat ketimpangan sedang, namun trennya menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Tentu hal ini yang perlu diantisipasi melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi. Perbandingan gini rasio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan nasional Tahun 2009 - 2015 dapat dilihat pada Grafik 2.7 berikut.

Grafik 2.7

Indeks Gini Rasio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2009-2015



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Selain gini rasio, indikator lain yang juga dapat digunakan untuk mengetahui dimensi lain dari kesenjangan adalah indikator distribusi pendapatan pada kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah. Kondisi yang diharapkan adalah agar distribusi pendapatan yang dinikmati kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah menerima > 17% dari total pendapatan. Kriteria distribusi pendapatan ini disusun oleh Bank Dunia sebagai berikut:

- 40% penduduk berpendapatan terendah menerima < 12% total pendapatan: pemerataan rendah/ketimpangan distribusi pendapatan tinggi
- 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12% - 17% total pendapatan: pemerataan sedang/ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
- 40% penduduk berpendapatan terendah menerima > 17% total pendapatan: pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Badung pada Tahun 2011 - 2015 ditunjukkan pada grafik 2.8 berikut:

Grafik 2.8
Pemerataan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung
Tahun 2011-2015 (Persen)



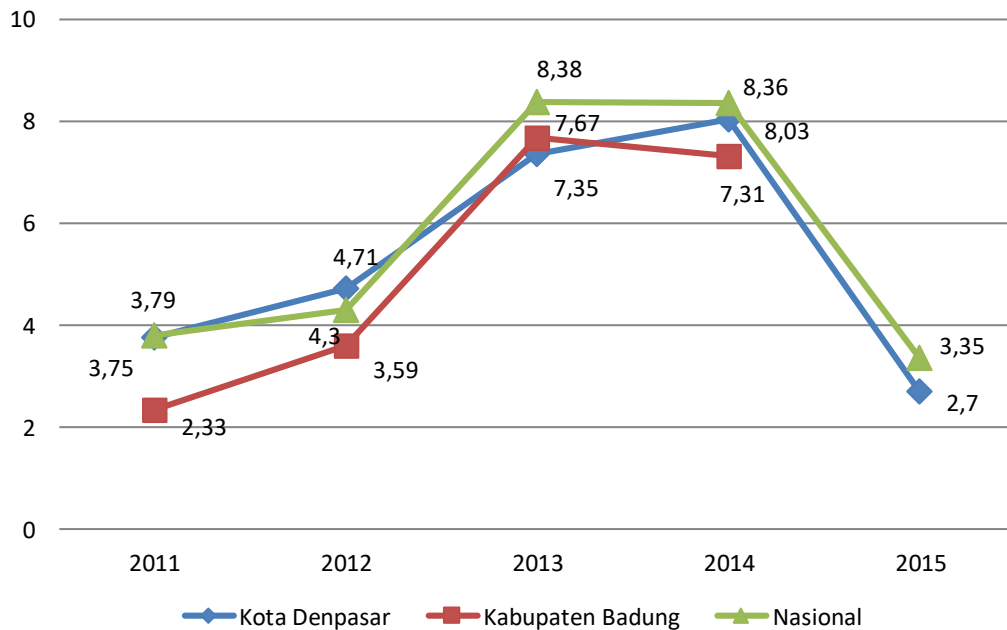
Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada Tahun 2015 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 20,70 persen dari total pendapatan sehingga pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Adapun Laju Inflasi Kabupaten Badung dari Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Grafik 2.9 berikut ini :

Grafik 2.9
Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Dalam kurun waktu Tahun 2011 hingga Tahun 2014, tingkat inflasi Kabupaten Badung selalu berada di bawah inflasi Kota Denpasar dan Nasional. Namun pada Tahun 2013 tingkat inflasi Kabupaten Badung berada di atas inflasi Kota Denpasar yang juga merupakan kondisi puncak inflasi Kabupaten Badung yang mencapai 7,67 persen. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dan ketahanan perekonomian khususnya ketersediaan dan distribusi barang komponen pembentuk inflasi di Kabupaten Badung telah berjalan cukup baik sehingga membuat harga-harga cukup stabil. Dalam empat tahun terakhir puncak inflasi terjadi pada Tahun 2013 dimana mencapai 7,67 persen. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang telah mendorong peningkatan harga-harga komoditas dan biaya transportasi. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada Tahun 2011 yang mencapai 2,33%.

Mulai Tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung tidak lagi melakukan perhitungan terhadap laju inflasi di Kabupaten Badung sehingga nilai yang digunakan sebagai acuan laju inflasi adalah pendekatan laju inflasi Kota Denpasar dengan nilai laju inflasi pada Tahun 2015 sebesar 2,70%, lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi nasional sebesar 3,35%.

Tabel 2.12
 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d .2015
 Kabupaten Badung

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Inflasi
Inflasi	2,33	3,59	7,67	7,31	2,70	4,72

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2011-2015

Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2011 mencapai 2,33%, dan juga lebih rendah bila dibanding dengan inflasi nasional sebesar 3,79%. Sedangkan untuk Tahun 2014 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,31%, lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 8,36%. Hal ini terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada Desember 2014 sehingga memicu kenaikan harga-harga barang secara umum. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya untuk mempertahankan agar laju inflasi relatif stabil dengan mengarahkan sektor produksi untuk terus melakukan peningkatan kuantitas dan pemantauan distribusi barang, dapat dilihat pada tabel 2.12.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah siswa Kabupaten Badung pada Tahun 2011-2015 untuk jenjang pendidikan SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA/SMK selama 3 tahun. Dengan demikian mulai jenjang SD sampai SMA/SMK angka rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun. Secara rinci rata-rata lama sekolah ditunjukkan pada tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.13
 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d .2015
 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD	6	6	6	6	6
2	SMP	3	3	3	3	3
3	SMA/SMK	3	3	3	3	3
	Jumlah	12	12	12	12	12

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga mempunyai kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas dan kemampuan daya saing masyarakat. Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Badung dalam kurun waktu Tahun 2011 - 2015 dapat dilihat dari keberadaan sekaa-sekaa kesenian/ grup kesenian, gedung kesenian, klub olahraga dan sarana olahraga. Kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan seni budaya dan olahraga mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya tersebut.

Perkembangan seni, budaya dan olahraga yang terdapat di wilayah Kabupaten Badung dapat dilihat dalam tabel 2.14 dan tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.14
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2011 s.d .2015
Kabupaten Badung

No	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	150	152	152	155	155
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	-	1	1	1	1
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	89	89	89	89	89
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	6	6	6	6	6

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

Tabel 2.15
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kecamatan Petang	50	-	2	-
2	Kecamatan Abiansemal	200	-	24	2
3	Kecamatan Mengwi	200	-	24	2
4	Kecamatan Kuta Utara	150	-	25	2
5	Kecamatan Kuta	150	1	8	1
6	Kecamatan Kuta Selatan	150	1	6	-
	Jumlah	900	2	89	7

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

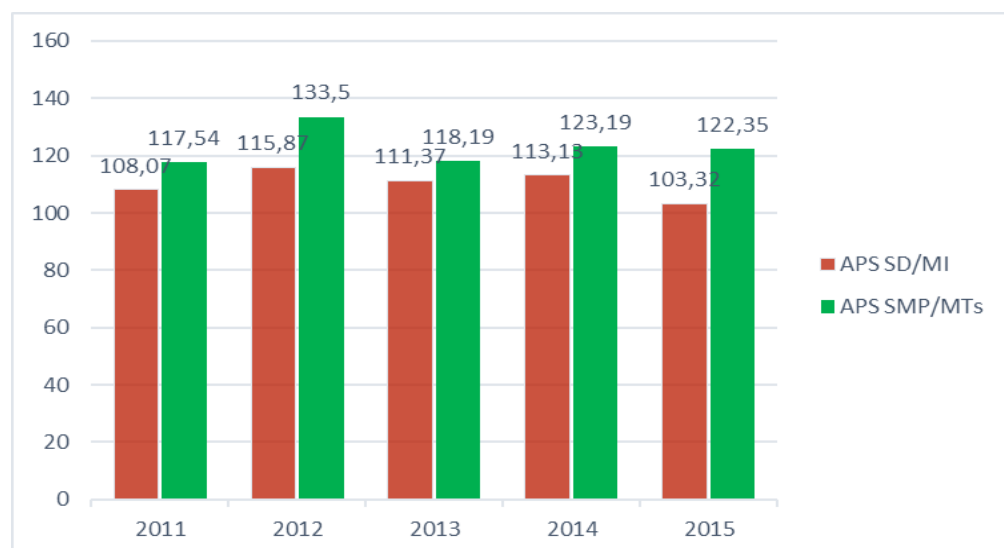
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2011 s.d .2015
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	59.502	60.265	60.884	61.266	56.758
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	55.059	52.009	54.669	54.156	53.890
1.3.	APS SD/MI	108,07	115,87	111,37	113,13	103,32
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	23.930	24.909	25.506	26.791	29.090
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.359	18.659	21.581	21.748	23.776
2.3.	APS SMP/MTs	117,54	133,50	118,19	123,19	122,35

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

Grafik 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP
Kabupaten Badung
Tahun 2015



Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

Angka partisipasi sekolah memberikan informasi tentang daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Kondisi angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Badung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami sedikit dinamika namun tetap berada diatas target yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan capaian angka partisipasi sekolah pada tiap-tiap kecamatan sebagai unsur pembentuk capaian tingkat kabupaten, telah menunjukkan capaian melampaui target yang ditetapkan. Adapun angka partisipasi sekolah masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel 2.17 berikut :

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kecamatan Petang	2.445	2.588	94,57	1.511	1.327	113,87
2	Kecamatan Abiansemal	8.414	8.078	104,16	4.733	3.967	119,31
3	Kecamatan Mengwi	11.444	10.823	105,74	6.633	5.574	119,00
4	Kecamatan Kuta Utara	11.740	11.139	105,40	5.253	3.986	131,79
5	Kecamatan Kuta	9.220	8.458	109,01	4.110	3.398	120,95
6	Kecamatan Kuta Selatan	13.495	12.804	105,40	6.850	5.524	124,00
	Jumlah	56.758	53.890	105,32	29.090	23.776	122,35

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015

a. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Tabel 2.18
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2011 s.d .2015
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	269	271	272	274	275
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	55.059	52.009	54.669	54.156	53.890
1.3.	Rasio	49	52	50	51	51
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	47	50	50	50	52
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.359	18.659	21.581	21.748	23.776
2.3.	Rasio	23	27	23	23	22

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

Tabel 2.19
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan Petang	27	2.588	104	4	1.327	30
2	Kecamatan Abiansemal	64	8.078	79	6	3.967	15
3	Kecamatan Mengwi	72	10.823	67	13	5.574	23
4	Kecamatan Kuta Utara	34	11.139	31	10	3.986	25
5	Kecamatan Kuta	27	8.458	32	6	3.398	18
6	Kecamatan Kuta Selatan	51	12.804	40	13	5.524	24
	Jumlah	274	53.890	51	52	23.776	22

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015

Rasio ketersediaan sekolah sebagaimana dalam Tabel 2.18 dan Tabel 2.19 diatas mencerminkan ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar per 10.000 orang penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan dasar sesuai dengan jenjang usia tertentu.

Di kabupaten Badung rasio ketersediaan sekolah pada masing-masing kecamatan sangat berfluktuasi, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk usia pendidikan dasar pada wilayah kecamatan tertentu dengan kisaran untuk tingkat sekolah dasar yaitu terendah kecamatan Kuta Utara dan tertinggi Kecamatan Petang serta untuk jenjang SMP, terendah Kecamatan Abiansemal dan tertinggi Kecamatan Petang.

b. Rasio guru/murid

Tabel 2.20
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2011 s.d .2015
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.505	3.523	3.530	3.623	3.674
1.2.	Jumlah Murid	60.586	61.290	61.400	61.284	61.203
1.3.	Rasio	58	57	57	59	60
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.663	1.748	1.765	1.831	1.907
2.2.	Jumlah Murid	24.955	25.828	27.002	27.868	29.282
2.3.	Rasio	67	68	65	66	65

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

Rasio guru terhadap murid merupakan perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini memberikan informasi ketersediaan tenaga pengajar dan dapat juga dipergunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu orang guru agar tercapai mutu pengajaran.

Perkembangan antar waktu rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Badung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang cukup statis yaitu antara kisaran 57 sampai dengan 60 per 1000 jumlah murid. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan jumlah guru dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah siswa, namun belum signifikan.

Demikian juga halnya dengan perkembangan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang berkisar pada angka 67 per 1000 jumlah murid pada tahun 2011 menjadi 65 per 1000 jumlah murid pada tahun 2015. Kondisi ini menggambarkan adanya penurunan jumlah guru pada jenjang sekolah menengah pertama bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah siswa. Situasi seperti ini mengisyaratkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk merancang program kegiatan yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi guru agar mampu mencapai mutu pengajaran yang optimal.

Selanjutnya, apabila dilihat data per kecamatan yang ada di Kabupaten Badung sesuai dengan Tabel 2.21, dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid pada tahun 2015 pada jenjang sekolah dasar paling tinggi berada pada Kecamatan Petang dan terendah pada Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama, rasio guru terhadap murid tertinggi pada Kecamatan Mengwi dan terendah pada Kecamatan Kuta Selatan. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut :

Tabel 2.21

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan Petang	248	2.643	94	108	1.452	74
2	Kecamatan Abiansemal	767	9.106	84	285	4.786	60
3	Kecamatan Mengwi	791	12.331	64	510	6.787	75
4	Kecamatan Kuta Utara	663	12.874	51	336	5.192	65
5	Kecamatan Kuta	468	9.622	49	263	4.237	62
6	Kecamatan Kuta Selatan	737	14.627	50	405	6.828	59
	Jumlah	3.674	61.203	60	1.907	29.282	65

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.22
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2011	Jumlah Investor	597	92	689
2012	Jumlah Investor	607	170	777
2013	Jumlah Investor	528	257	785
2014	Jumlah Investor	1.264	195	1.459
2015	Jumlah Investor	1701	328	2029

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Badung tercermin dari jumlah izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Dari data Tabel 2.22, terlihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 secara keseluruhan jumlah investor selalu mengalami peningkatan, namun jumlah investor (PMDN) atau investor (PMA) berfluktuasi.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.23
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2011	611	8.536.644.647.061	689	3.173.814.437.239
2012	762	8.808.590.543.488	777	7.180.810.126.088
2013	667	6.297.274.880.989	785	6.147.499.450.989
2014	1.356	3.086.430.085.315	1.459	2.618.136.988.815
2015	1691	32.836.318.317.774	1701	2.967.015.417.734

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Dari data tabel 1.19 di atas terlihat bahwa jumlah nilai investasi dari tahun 2011 sampai 2015 berfluktuasi. Jumlah investasi terbesar terjadi

pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini disebabkan karena adanya perluasan pembangunan bandara Ngurah Rai, pembangunan jalan tol di Nusa Dua dan meningkatnya investasi di bidang akomodasi pariwisata.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	2.985	6.785	17.012	9476	36386
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	689	777	785	1459	5739
3	Rasio daya serap tenaga kerja	4,33	8,73	21,67	6,49	6,34

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga yang bekerja pada perusahaan (PMA/PMDN). Dari data Tabel 20 di atas terlihat ratio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Badung pada tahun 2011 – 2015 berfluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 21,67. Hal ini disebabkan karena adanya perluasan pembangunan bandara Ngurah Rai dan meningkatnya pembangunan akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung, sehingga dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Nilai tukar petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25
 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2015
 Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	99,8	100	110,29	157,53	123,65
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	90,52	100	112,24	124,46	117,86
3.	Rasio	1,103	1	0,98	1,265	1,049

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Dan Dinas Pertanian Kabupaten Badung

Dari tabel 2.25 terlihat bahwa Nilai tukar petani (NTP) setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan indikator Indeks yang diterima petani 99,8 pada tahun 2011 menjadi 157,53. Sedangkan Indeks yang dibayar petani hanya meningkat pada tahun 2013 yang artinya pengeluaran petani lebih tinggi 1,95 point dibandingkan pendapatannya. Pada tahun 2012 Indeks yang diterima dan Indeks yang dibayar sama, sedangkan tahun 2014 dan 2015 Indeks yang diterima petani lebih besar dari Indeks yang dibayar.

- b. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel 2.26
 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
 Tahun 2011 s.d 2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total pengeluaran RT non pangan	617.273	728.813	827.250	849.935	717.712
2.	Total pengeluaran	1.016.725	1.211.685	1.331.826	1.412.756	1.192.583
3.	Rasio	60,71	60,11	62,11	60,16	60,18

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Pada tabel 2.26. Tabel Pengeluaran RT non pangan terus mengalami peningkatan dari Total Pengeluaran, dengan ratio di kisaran 60,11 s/d 62,11, yang artinya pengeluaran RT untuk kebutuhan pangan pengeluarannya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsi non pangan. Indikasi ini mencerminkan tingkat kesejahteraan petani semakin meningkat.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 2.27
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Badung
Tahun 2011 s.d 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Realisasi pemanfaatan ruang (Kawasan Lindung)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	28,98
2.	Realisasi pemanfaatan ruang (Kawasan Budidaya)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	366,63
3.	Rencana Peruntukan RTRW (Kawasan Lindung)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	28,82
4.	Rencana Peruntukan RTRW (Kawasan Budidaya)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	389,69
5.	Rasio kawasan lindung (1./3.)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	100,5
6.	Rasio kawasan budidaya (2./4.)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	94,08

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

Rasio ketaatan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 untuk pola pemanfaatan ruang kawasan lindung eksisting sudah sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Badung. Sedangkan ketaatan pada pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebesar 94,08% terhadap RTRW Kabupaten Badung.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28
Persentase Luas Wilayah Produktif
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas wilayah produktif	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	256,70
2.	Luas Seluruh wilayah budidaya	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	389,69
3.	Rasio (1/2.)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	65,87

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

Untuk luas wilayah produktif di Kabupaten Badung sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 sebagai kawasan budidaya pertanian dalam arti luas dengan rasio sebesar 65,87% dari total luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Tabel 2.29
Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kasus narkoba	15	19	25	17	39
2.	Jumlah kasus pembunuhan	2	2	4	1	2
3.	Jumlah kejahatan seksual	11	8	5	5	0
4.	Jumlah kasus penganiayaan	80	71	116	97	73
5.	Jumlah kasus pencurian	408	310	466	319	107
6.	Jumlah kasus penipuan	58	51	79	21	20
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	1	0	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	574	461	696	460	316
9.	Jumlah penduduk	506.043	524.659	533.203	460.618	589.000
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,11%	0,09%	0,13%	0,10%	0.05%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

Keamanan dan ketertiban merupakan landasan utama menciptakan situasi dan kondisi Kabupaten Badung yang aman dan damai. Rasa aman dan tenteram merupakan prasyarat bagi berputarnya roda pembangunan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meningkatnya jumlah kejahatan merupakan gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Badung menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 terjadi 574 kasus, kemudian menurun menjadi 461 kasus pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 696 kasus pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 316 kasus. Jenis kriminalitas yang mencolok adalah pencurian dan penipuan.

Tindak kejahatan lainnya yang juga cenderung meningkat adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pada tahun 2012 dan tahun 2013, jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba meningkat dibanding tahun 2011. Namun pada tahun 2014 terdapat kasus narkoba sebanyak 17 kasus menurun sebesar 68 % dibanding tahun 2013

sebanyak 25 kasus dan pada tahun 2015 kasus narkoba kembali meningkat dibanding tahun 2014 sebanyak 39 kasus.

b. Jumlah Demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demonstrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30
Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang politik	-	-	-	1	
2	Ekonomi	-	-	1	2	1
3	Kasus pemogokan kerja	-	1	1	2	
4	Jumlah unjuk rasa	-	1	2	5	1

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bersama-sama dengan Kepolisian dan aparat pengamanan lainnya melaksanakan tugas pengamanan demo yang dilakukan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang terjadi di areal Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Adapun demo yang diamankan selama kurun waktu dari Tahun 2011 - 2015 terkait dengan bidang politik, ekonomi dan kasus pemogokan kerja sebagai berikut : Tahun 2011 tidak ada Demo oleh masyarakat, Tahun 2012 ada satu kasus pemogokan kerja yang dilakukan oleh Karyawan Hotel Kartika di Kuta, Tahun 2013 terjadi dua kali demo yang dilakukan oleh pegawai taxi di Jimbaran Kuta Selatan dan Demo pedagang di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kuta. Sedangkan pada Tahun 2014 terjadi demo sebanyak lima kali yang dilakukan oleh penambang galian C, sopir taxi di Jimbaran, Demo oleh mahasiswa Universitas Mahendradata Denpasar, Demo oleh Forum Kaling dan demo oleh masyarakat Desa Adat Cemagi, Kecamatan Mengwi dan Tahun 2015 terjadi demo eksekusi lahan kampus universitas udayana oleh mahasiswa.

2.5. Hasil analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditunjukkan dalam Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31
 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Badung

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	7,07	7,64	6,82	6,97	6,27	-	
1.2.	Laju inflasi provinsi	3,75	4,71	7,35	8,03	2,70	-	
1.3.	PDRB per kapita	39,80	41,79	43,58	45,56	47,34	-	
1.4.	Indeks Gini	0,3385	0,3258	0,3468	0,3404	0,31	-	
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	19,20	19,75	15,12	18,64	20,70	-	
1.6.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	2,62	2,16	2,46	2,54	2,49	2,00 – 3,00	Sesuai
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka partisipasi kasar	115,01	129,23	117,73	120,37	117,22	100	Melampaui
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	99,95	99,96	99,99	100	100	100	Belum Tercapai
1.3.	Angka Partisipasi Murni							
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,87	103,67	98,62	99,12	99,98	90 - 100	Melampaui
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	91,28	101,62	91,59	92,10	109,95	90 - 100	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.3.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/ Paket C	78,04	91,09	83,69	83,72	104,44	90 - 100	Belum Tercapai
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	95,10	99,70	99,74	99,57	99,81	-	
2.2.	Angka usia harapan hidup	73,91	74,05	74,19	74,30	74,61	-	
2.3.	Prevalensi balita gizi buruk	0,21	0,11	0,42	0,25	0,21	3,60	Belum Tercapai
3.	Ketenagakerjaan							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja	54,53	54,49	56,18	53,58	57,11	-	
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	108,07	115,87	111,37	113,13	110,53	100	Melampaui
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	49	52	50	51	42	-	
1.1.3.	Rasio guru/murid	17	17	17	17	62	40	Melampaui
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	29	29	28	28	28	40	Belum Tercapai
1.2.	Pendidikan menengah:							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	117,54	133,5	118,19	123,19	104,44	100	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	23	27	23	23	20	-	
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	15	15	15	15	81	21	Belum Tercapai
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	39	38	37	35	36	21	Melampaui
1.3.	Fasilitas Pendidikan:							
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	269	271	272	274	274	275	Belum tercapai
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85	87	87	91	90	91	Belum Tercapai
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	320	320	320	320	320	-	
1.5.	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	Sesuai
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,00	0,12	0,06	0,01	0,03	0,00	Belum Tercapai
1.6.	Angka Kelulusan:							
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99,99	100	100	100	100	Sesuai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99,97	99,99	99,99	100	100	Sesuai
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	99,98	100	100	100	Sesuai
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	94,60	97,91	96,93	98,24	100	Belum tercapai
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,27	94,89	98,44	100	96,01	100	Belum tercapai
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	61,04	62,56	80,32	81,61	100	100	Sesuai
2.	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	80,8	53,2	59,0	60,0	71,0	1:100	
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	14,7	14,8	14,9	15,9	15,9	-	
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,070	0,069	0,100	0,116	0,116	-	
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	36,5	26,2	55,3	110,0	110,0	1 :40	Sesuai
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	78,2	73,5	73,3	61,72	61,74	1 :100	Sesuai
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60,3	54,9	80,6	72,99	72,99	80	Belum tercapai
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,09	92,0	95,7	99,72	99,73	90	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positive	8,49	43	45,2	51,8	51,8	85	Belum Tercapai
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	105,87	104,3	96,77	93,86	93,86	90	Melampaui
2.14.	Jumlah puskesmas	12	12	13	13	13	-	
2.15.	Jumlah pembantu puskesmas	53	54	54	54	54	-	
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	62,78 5%	84,21 8%	89,06 9%	91,39 2%	91,392 %	-	
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	0,057	0,0571	0,0567	0,0567	0,0567	-	
3.3.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	Belum Tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
3.4.	Panjang jalan dilalui Roda 4	565.981	628.744	628.744	628.744	628.744	-	
3.5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	355.353	529.517	560.018	574.626	574.626	-	
3.6.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	-	569.554	569.554	-	
3.7.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	-	569.554	569.554	-	
3.8.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	10.272,39	10.345,77	10.685,17	10.829,64	10.829,64	-	
4.	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	64.025,50	63.025,50	83.002,67	86.667,00	97.066,83	-	
4.2.	Rumahtangga pengguna listrik	100	100	100	100	100	100,00 %	
4.3.	Rumahtangga ber-Sanitasi	86.519	868,580	89.035	105.154	105.154	-	
4.4.	Rumah layak huni	85.636	85.636	85.636	85.636	85.636	-	
5.	Perencanaan Pembangunan							
5.6.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	sesuai
5.7.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	sesuai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
5.8.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sesuai
5.9.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
6.	Perhubungan							
6.6.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	372.750	1.162.527	1.087.571	1.279.597	1.279.597	1.279.597	Sesuai
6.7.	Rasio ijin trayek	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,0000050	Sesuai
6.8.	Jumlah uji kir angkutan umum	7.138	10.500	12.285	13.689	13.689	13.689	Sesuai
6.9.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3	3	Sesuai
6.10.	Angkutan darat							
6.11.	Kepemilikan KIR angkutan umum	7.150	7.464	8.909	10.316	10.316	10.316	Sesuai
6.12.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	46 menit	46 menit	46 menit	48 menit	48 menit	48 menit	Sesuai
6.13.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	Sesuai
6.14.	Pemasangan Rambu-rambu	4861	4969	5088	5508	5508	7845	Belum Tercapai
7.	Lingkungan Hidup							
7.6.	Persentase penanganan sampah	72,9	89,3	97,3	97,9	97,9	100	Belum Tercapai
7.7.	Pencemaran status mutu air	85%	99%	108%	112%	112%	100%	Melampaui
7.8.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
7.9.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,000 50	0,000 50	0,000 50	0,000 50	0,0005 0	5	Belum Tercapai
7.10.	Penegakan hukum lingkungan	-	-	-	100%	100%	100%	Sesuai
8.	Pertanahan							
8.6.	Persentase luas lahan bersertifikat	-	67,60	73,75	80,16	80,16	100%	Belum Tercapai
8.7.	Penyelesaian kasus tanah Negara	18	22	24	28	28	14	Melampaui
8.8.	Penyelesaian izin lokasi	31,58 %	45,83 %	-	-	-	100%	Belum Tercapai
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
9.6.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	1	Belum Tercapai
9.7.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,70	0,86	0,90	0,92	0,92	1	Belum Tercapai
9.8.	Rasio pasangan berakte nikah	0,74	0,77	0,60	0,104	0,104	1	Belum Tercapai
9.9.	Kepemilikan KTP	99%	99%	0,98	99%	99%	100%	Belum Tercapai
9.10.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	700	800	900	920	920	1.000	Belum Tercapai
9.11.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	100%	Belum Tercapai
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
10.6.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	44,69 %	45,12 %	44,31 %	46,56 %	46,56 %	100%	Belum Tercapai
10.7.	Rasio KDRT	0,50	0,071	0,044	0,048	0,048	0	Belum Tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
10.8.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	6 Kasus	13 Kasus	12 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	0	Belum Tercapai
10.9.	Persentase Penanganan kasus KDRT yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
11.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,14	2,10	2,11	2,12	2,12	2,1	Sesuai
11.2.	Rasio akseptor KB	85,21	85,49	85,46	84,49	84,49	74,00	Melampaui
11.3.	Cakupan peserta KB aktif	82,21 % (65.88 5)	85,46 (%) (67.07 0)	85,57 % (67.1 45)	88,91 % (70.3 48)	88,91 % (70.34 8)	65 %	Melampaui
11.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	3577	3906	3787	2827	2827	-	
12.	Sosial							
12.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	9	9	9	9	9	-	
12.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	2.375	2.773	2.773	2.773	2.773	-	
12.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	297	372	682	782	782	-	
13.	Ketenagakerjaan							
13.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	2,36	1,63	2,20	3,28	3,28	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
13.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	51	54	54	62	62	-	
13.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	77,8	72,92	73,04	73,05	72,92	-	
13.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	1.251	1.396	1.312	1.128	765	-	
13.5.	Tingkat pengangguran terbuka	2,30	1,60	0,77	0,48	0,34	-	
13.6.	Keselamatan dan perlindungan	20	20	20	20	20		
13.7.	Penyelesaian Perselidihan hubungan industrial di Kabupaten Badung	50	54	60	63	77		
14.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
14.1.	Persentase koperasi aktif	88,87 %	90%	78%	78,92 %	78,92 %	75%	Melampaui
14.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	14.754	15.862	17.496	18.700	18.700	-	
14.3.	Jumlah BPR/LKM	607	629	639	663	663	-	
14.4.	Usaha Mikro dan Kecil	839	912	338	786	786	-	
15.	Penanaman Modal							
15.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	689	777	785	1.459	1.459	-	
15.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3.173.814.437.239	7.180.810.126.088	6.147.499.450.989	2.618.136.988.815	2.618.136.988.815	19.032.403.640.000	Melampaui
15.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	4,33	8,73	21,67	6,49	6,49	4,86	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
15.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1,74	1,36	0,03	(1,47)	(1,47)	-	
16.	Kebudayaan							
16.1.	Penyelenggaraa n festival seni dan budaya	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Sesuai
16.2.	Sarana penyelenggaraa n seni dan budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
16.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	23 Situs	-	-	-		
17.	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri							
17.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60	46	40	40	40	-	
17.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	2	3	3		
18.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
18.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,2	5,4	5,2	5,1	5,1	7	Belum Tercapai
18.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	33,01	33,18	33,47	31,71	31,18	1 orang / 1 RT	Sudah tercapai
18.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	378	378	378	378	378	-	
18.4.	Pertumbuhan ekonomi	7,07	7,64	6,82	6,97	6,27	-	
18.5.	Kemiskinan	3.726 RTS- PM	11.54 2RTS- PM	10.87 9 RTS- PM	9.783 RTS- PM	9.783 RTS- PM	0	Belum Tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
18.6.	Penegakan PERDA	105,23	113,43	104,88	106,88	106,88	100	Melampaui
18.7.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali sehari dalam sehari	Sesuai
18.8.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	60%	65%	70%	75%	80%	100%	Belum tercapai
18.9.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1922 orang	1922 orang	1922 orang	1922 orang	1922 orang	-	
18.10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	84.20 %	84.20 %	295.4 %	295.4 %	295.4 %	25%	Melampaui
18.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	84.20 %	84.20 %	295.4 %	295.4 %	295.4 %	25%	Melampaui
18.12	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	80.40 %	88.14 %	88.32 %	96.33 %	96.33 %	75%	Melampaui
18.13	Sistim Informasi Manajemen Pemda	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	Sesuai
18.14	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-	74,90	79,43	(62,51–81,25) untuk interval Baik	Memenuhi nilai interval baik
19.	Ketahanan Pangan							
19.1.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
19.2.	Ketersediaan pangan utama	86,98 %	85,89 %	80,47 %	89,51 %	89,51 %	-	
20.	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
20.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	62 Kelompok	Belum Tercapai
20.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	606 Kelompok	Belum Tercapai
20.3.	Jumlah LSM (yang memiliki SKT)	7	7	7	5	2		
20.4.	LPM Berprestasi	1 kelompok	1 Kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 Kelompok	5 kelompok	Belum Tercapai
20.5.	PKK aktif	606 kelompok	606 kelompok	606 kelompok	606 kelompok	606 kelompok	606 kelompok	Sesuai
20.6.	Posyandu aktif	572 Kelompok	572 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	Sesuai
20.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	93,5%	79,4%	89,3%	93,9%	93,9%	70%	Melampaui
20.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	Sesuai
21.	Statistik							
21.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
21.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
22.	Kearsipan							
22.1.	Pengelolaan arsip secara baku	30 SKPD	30 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	135 SKPD	Belum tercapai
22.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	40 Orang	40 Orang	104 Orang	132 Orang	132 Orang	233 Orang	Terlampau
23.	Komunikasi dan Informatika							
23.1.	Jumlah jaringan komunikasi	6	6	6	6	6	6	Sesuai
23.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	227	227	211	211	211	211	Belum tercapai
23.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	22	22	22	22	22	22	Sesuai
23.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	10	10	10	10	10	10	Sesuai
23.5.	Web site milik pemerintah daerah				62	62	62	Sesuai
23.6.	Pameran/expo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Sesuai
24.	Perpustakaan							
24.1.	Jumlah perpustakaan	336 Perpustakaan	336 Perpustakaan	336 Perpustakaan	440 Perpustakaan	440 Perpustakaan	Setiap sekolah, desa/Kelurahan memiliki perpustakaan yang standar nasional perpustakaan	Sebagian besar belum memenuhi standar perpustakaan
24.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	817 Orang	1.024 Orang	4.621 Orang	3.507 Orang	3.507 Orang	0,55 perjumlah penduduk	Belum tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
24.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.671 Exp	3.461 Exp	9.105 Exp	6.359 Exp	6.359 Exp	10 persen dari jumlah koleksi 5 tahun terakhir	Masih perlu penambahan 10 % pertahun
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62,88	63,20	64,61	62,91	62,91	-	
1.2.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	12,91 M	13,43 M	14,21 M	-	-	-	
1.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	666,32 M	693,76 M	744,55 M	-	-	-	
1.4.	Cakupan bina kelompok petani	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	-	
1.5.	Jumlah Populasi ternak	1.661. 692	1.357. 001	1.366 .005	1.476 .035	1.476. 035	-	
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	137,54 ha	175,68 ha	37,62 ha	82,13 ha	82,13 ha	-	
2.2.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	40 Jt	40 Jt	40 Jt	-	-	-	
3.	Pariwisata							
3.1.	Kunjungan wisata	2.756. 579	2.892. 019	3.148 .443	3.681 .342	3.681. 342	Pada 2011 target 2.700.000 wisman, bertambah 150.000 wisman setiap tahunnya	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
3.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	5.948.208,92	7.186.658,79	8.807.667,89	10.815.279,76	10.815.279,76	-	
4.	Kelautan dan Perikanan							
4.1.	Produksi perikanan	38.386,30	48.563,50	49.099	6.619,60	6.619,60	15 Aspek Daya Saing daerah 94,63	Belum tercapai
4.2.	Konsumsi ikan	30,91	31,10	32,20	32,87	32,87	32,7	Melampaui
4.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	150	169	167	167	167	167	sesuai
4.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	4.467,9	4.570,3	4.748,4	6.094,7	6.094,7	16.523,2	Melampaui
5.	Perdagangan							
5.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,30%	10,30%	9,82%	8,68%	8,68%	-	
5.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	128.296.174,45	64.119.363,27	57.770.469,90	63.675.447,62	63.675.447,62	117.496.806,53	Belum Tercapai
6.	Perindustrian							
6.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,58%	4,36%	4,21%	4,01%	4,01%	-	
6.2.	Pertumbuhan Industri.	54	41	50	22	22	-	
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.	Pertanian							
1.1.	Nilai tukar petani	1,103	1	0,98	1,265	1,265	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1. Perhubungan								
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,77	2,04	2,70	1,36	1,36	1,36	Sesuai
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	372.750	1.162.527	1.087.571	1.279.597	1.279.597	1.279.597	sesuai
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	240.740 Orang	538.011 Orang	702.032 Orang	702.032 Orang	702.032 Orang	sesuai
2. Lingkungan Hidup								
2.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	-	
Fokus Iklim Berinvestasi								
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.	Angka kriminalitas	0,11%	0,09%	0,13%	0,10%	0,10%	-	
1.2.	Jumlah demo	-	1	2	5	1	-	

Sumber Data : PD Terkait

Berdasarkan Tabel 31 tentang hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Badung dapat dijelaskan sebagai berikut :

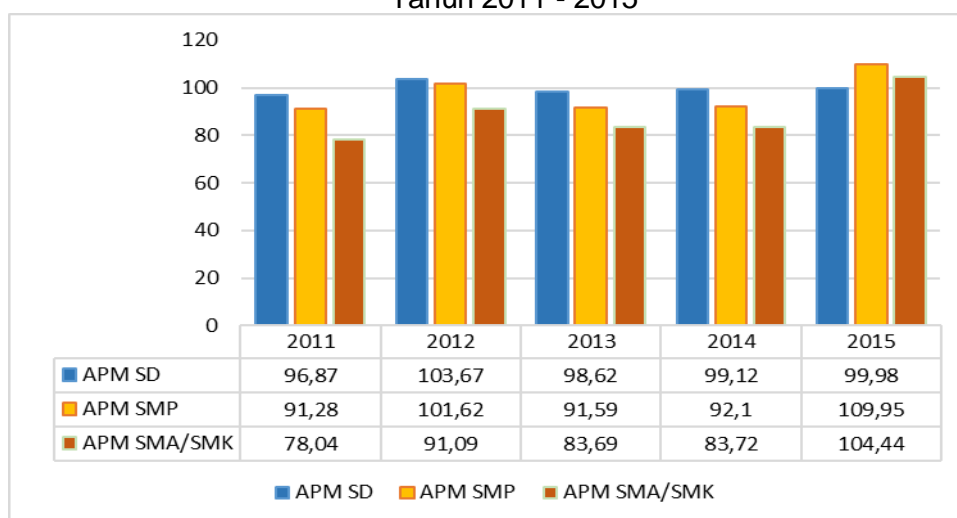
1.5.1 Fokus kesejahteraan rakyat

a) Pendidikan

Dari beberapa indikator pada fokus kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni jenjang SD dan angka partisipasi murni jenjang SMP telah mampu melampaui standar

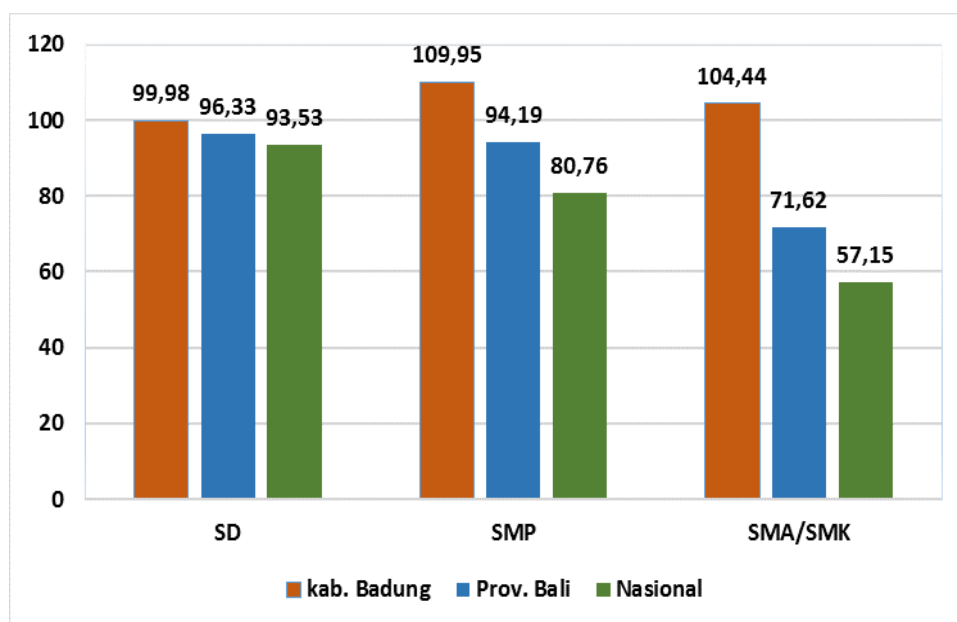
yang ditetapkan. Sedangkan indikator angka partisipasi sekolah dan angka pendidikan yang ditamatkan telah sesuai dengan standar. Namun terdapat pula beberapa indikator yang belum mampu memenuhi standar yaitu : angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK. Kondisi ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang cukup tinggi serta adanya motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah di luar wilayah Kabupaten Badung.

Grafik 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK
Kabupaten Badung
Tahun 2011 - 2015



Sumber Data: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Grafik 2.12
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni
SD, SMP dan SMA/SMK



Sumber Data: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Apabila dilihat dari posisi relatif capaian indikator angka partisipasi murni Kabupaten Badung dengan Propinsi Bali dan

Nasional maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Badung telah berada diatas capaian Propinsi Bali dan Nasional.

1.5.2 Fokus layanan wajib

a) Pendidikan dasar

Ditinjau dari indikator pendidikan dasar maka menunjukkan bahwa terdapat indikator yang telah melampaui standar yaitu angka partisipasi sekolah dan terdapat beberapa indikator yang belum mampu memenuhi standar, antara lain : rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Badung, masih terdapat kekurangan guru sebagai tenaga pendidik.

b) Pendidikan menengah

Dalam penyediaan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Badung dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata telah mampu melampaui standar, namun rasio jumlah guru terhadap murid masih berada dibawah standar yang ditetapkan.

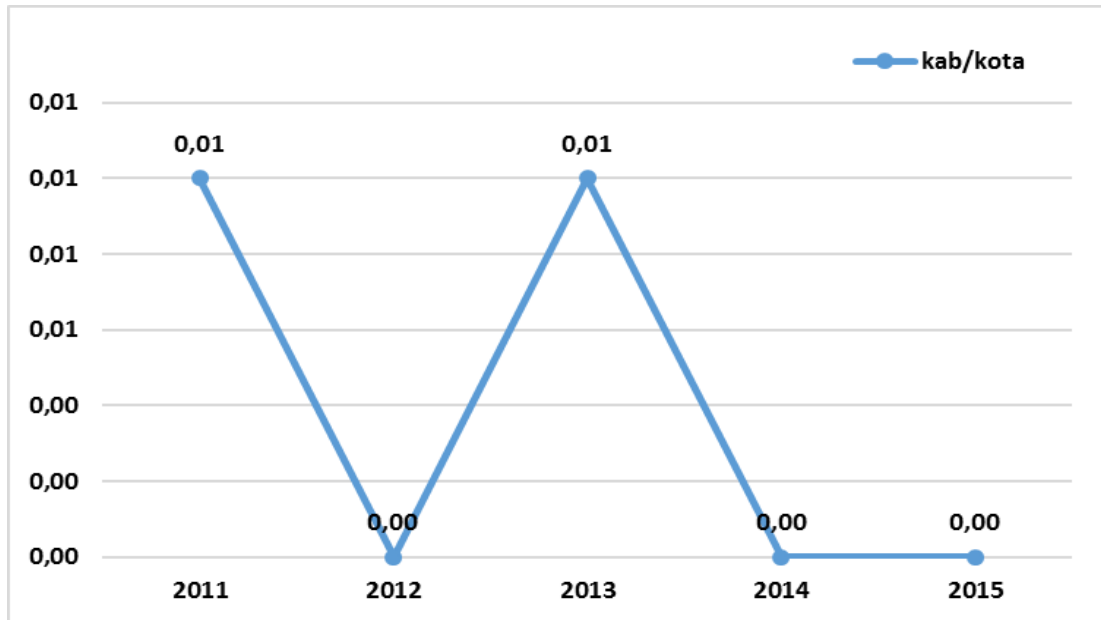
c) Fasilitas pendidikan

Selanjutnya dalam bidang penyediaan fasilitas pendidikan terdapat beberapa indikator yang telah mampu memenuhi standar antara lain : indikator sekolah SMP dengan kondisi bangunan baik, angka putus sekolah jenjang sekolah dasar, angka putus sekolah jenjang sekolah menengah pertama, angka kelulusan jenjang sekolah dasar, serta angka kelulusan jenjang sekolah menengah atas/kejuruan. Sedangkan untuk indikator yang belum memenuhi standar antara lain : angka putus sekolah jenjang SMA/K, angka kelulusan jenjang sekolah menengah pertama, angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama serta dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas/kejuruan, dan capaian jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D IV. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan dalam beberapa indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk/migrasi, serta keterbatasan kemampuan anak didik dalam mengikuti proses pendidikan serta terdapat tenaga pendidik/guru yang pada saat sekarang ini sedang dalam proses menempuh pendidikan untuk memenuhi kualifikasi S1/D IV.

Mengenai perkembangan angka putus sekolah pendidikan dasar jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengalami perkembangan yang cukup signifikan, walaupun untuk

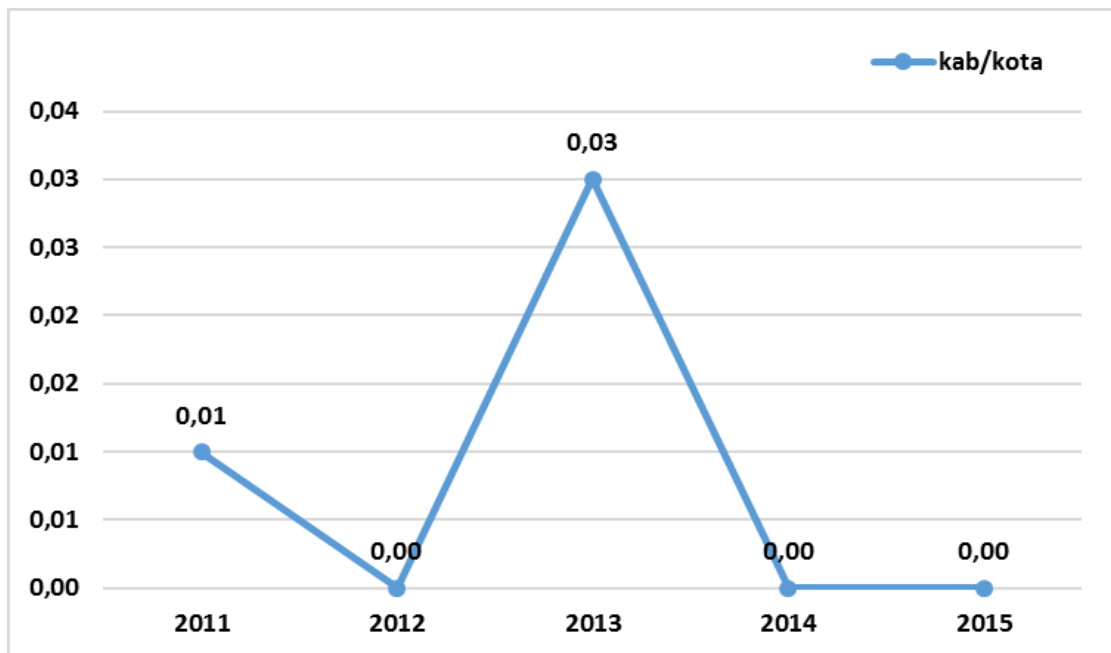
jenjang sekolah menengah pertama sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013, namun kembali mengalami penurunan yang sangat drastic pada tahun 2014 dan tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun perkembangan angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.13
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)
Kabupaten Badung, Tahun 2010 - 2015



Sumber data : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)
Kabupaten Badung, Tahun 2011 - 2015



Sumber data : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, perkembangan indikator pendukung secara umum menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 telah terjadi kemajuan yang berarti. Hal ini antara lain terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di atas 6,5%. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dengan menggunakan tahun dasar

2011 mencapai 7,64% dan mengalami penurunan mencapai 6,82% pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi sedikit penguatan menjadi 6,82% dan pada tahun 2014 kembali menguat mencapai angka 6,98%. Selanjutnya di tahun 2015 kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 6,27%. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya diharapkan dapat menstimulasi pembukaan lapangan pekerjaan baru sehingga berimplikasi pada penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan.

Demikian pula bila dilihat dari indikator pendapatan per kapita, dalam periode yang sama selalu mengalami peningkatan dari rata-rata sebesar Rp 41,91 juta/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi Rp 66,97 juta/kapita/tahun pada tahun 2015. Peningkatan pendapatan per kapita ini, membantu daya beli masyarakat seiring dengan rata-rata laju inflasi di tingkat Provinsi yang cenderung terus bergerak naik dari 3,75% pada tahun 2011 hingga mencapai 8,43% pada tahun 2014. Laju inflasi yang tinggi ini tentunya mempengaruhi tingkat harga komoditi makanan maupun non makanan, yang amat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

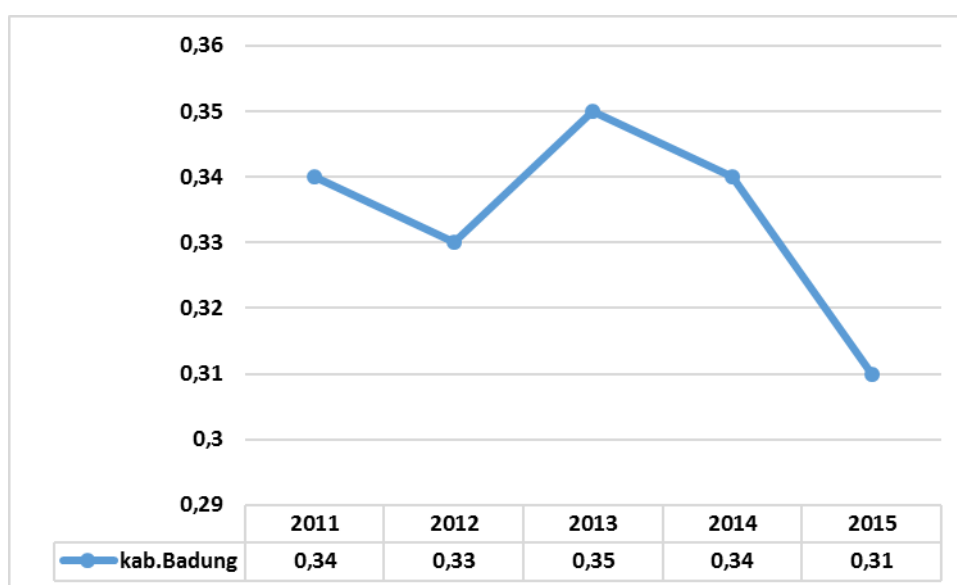
Tentunya menarik pula untuk menyandingkan perkembangan indikator ekonomi tersebut dengan indikator kemiskinan sehingga dapat diperoleh gambaran apakah laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rata-rata pendapatan per kapita dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Bila dilihat dari indikator kesenjangan, data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa gini rasio berkembang secara fluktuatif dari 0,3385 pada tahun 2011 lalu pada tahun 2012 turun menjadi 0,3258. Penurunan indeks gini ini tentunya bermakna positif karena menunjukkan penurunan tingkat kesenjangan. Sekalipun demikian, gini rasio Kabupaten Badung pada tahun 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan menjadi 0,3468 dan selanjutnya pada tahun 2015 turun sedikit menjadi 0,3147.

Kondisi yang diharapkan tentunya indikator gini rasio dapat terus mengecil mendekati angka 0 karena menunjukkan menurunnya kesenjangan antar penduduk/pertumbuhan dinikmati secara merata. Dari perkembangan tersebut, kondisi kesenjangan yang rendah ditunjukkan dengan angka gini rasio yang berada pada kisaran 0 - 0,35 sehingga perkembangan angka gini rasio Kabupaten Badung selama kurun waktu tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan rendah.

Bila dilihat dari kondisi di tingkat Provinsi Bali maupun nasional, perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada tahun

2015 cenderung lebih baik, karena arah perkembangannya menurun. Sama halnya dengan gini rasio Provinsi Bali dan nasional yang pada tahun terakhir bergerak turun, yang selama empat tahun terakhir telah berada dalam tingkat ketimpangan sedang, dengan indeks lebih besar dari 0,35. Peningkatan gini rasio tersebut mengindikasikan masih terjadinya kesenjangan pendapatan masyarakat secara umum di tingkat Provinsi Bali dan nasional.

Grafik 2.15
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2011-2015



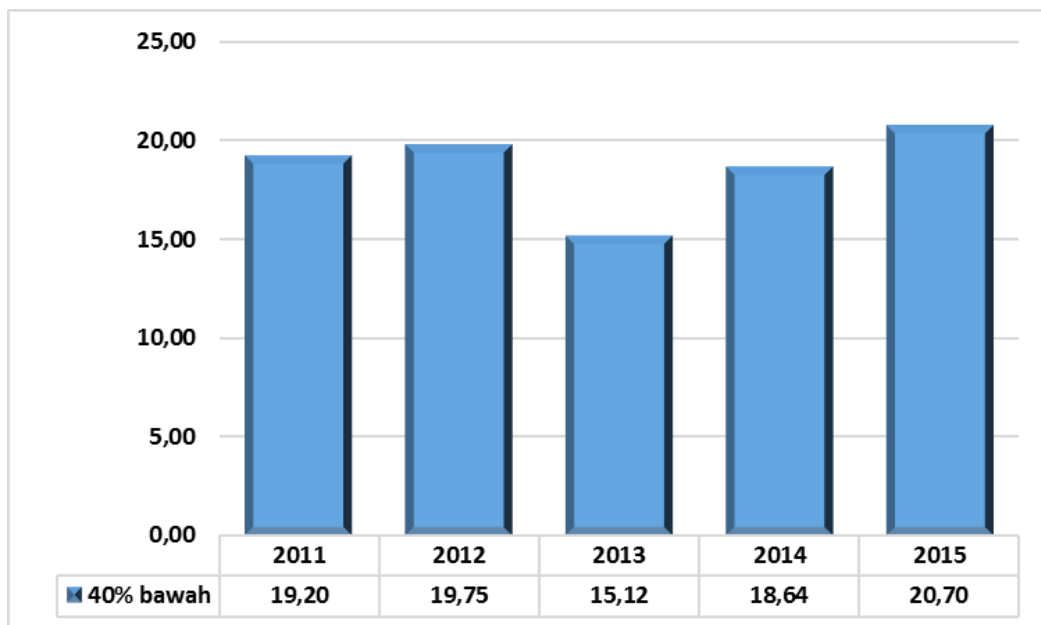
Sumber: BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya bila dilihat dari indikator pemerataan, sepanjang tahun 2011 hingga 2015 distribusi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah berfluktuasi dari kisaran 19% lebih pada tahun 2011 dan tahun 2012, selanjutnya turun menjadi 15,12% pada tahun 2013, meningkat kembali menjadi 18,64% pada tahun 2014 dan 20,70 % tahun 2015. Kondisi peningkatan indikator pemerataan pada tahun 2015 ini menggembirakan karena menunjukkan peningkatan distribusi pendapatan yang dinikmati 40% penduduk berpendapatan terendah. sekaligus menunjukkan berkurangnya tingkat kesenjangan antar lapisan masyarakat.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia bila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati lebih besar dari 17% pendapatan, maka pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah. Kondisi Kabupaten Badung dalam empat tahun terakhir memang berfluktuasi, namun kisarannya masih tetap berada di atas 17%. Oleh sebab itu maka perlu diupayakan agar porsi distribusi pendapatan yang dinikmati oleh

40% terendah ini dapat tetap di atas 17% dan terus meningkat. Grafik distribusi pendapatan pada kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Badung tahun 2011 hingga 2015 adalah sebagai berikut.

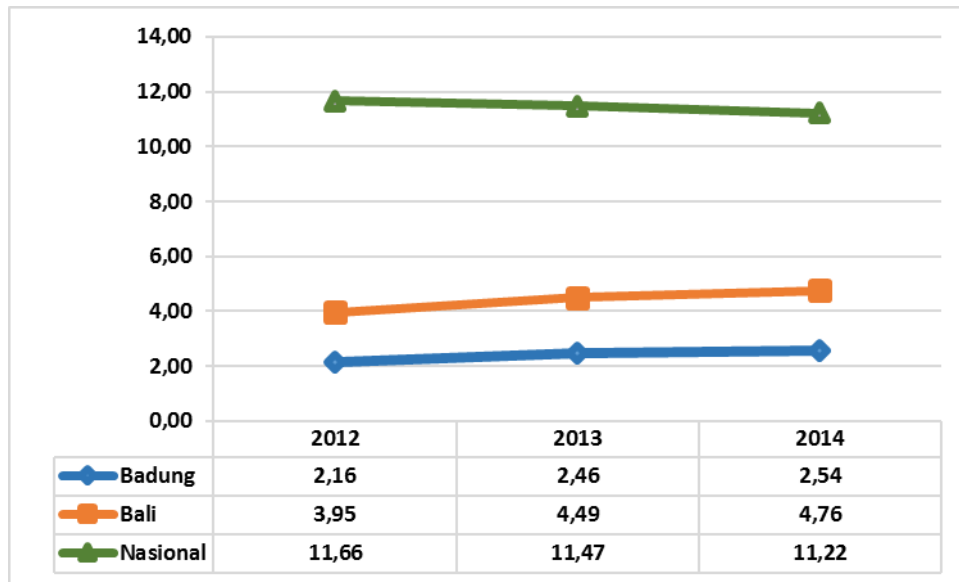
Grafik 2.16
Distribusi Pendapatan Pada Kelompok 40% Penduduk Berpendapatan Rendah di Kabupaten Badung Tahun 2011-2015



Di sisi lain bila dilihat dari proporsi penduduk yang tergolong miskin karena daya belinya berada di bawah garis kemiskinan, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Badung hingga tahun 2014 berada pada tingkat 2,54%. Oleh sebab itu dari sudut pandang persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan pada tahun 2012 mencapai 97,84% (tingkat kemiskinan 2,16%) dan tahun 2013 naik menjadi 97,54% seiring dengan tingkat kemiskinan menjadi 2,46%. Pada tahun 2014 terjadi sedikit peningkatan sehingga tingkat kemiskinan menjadi 2,54% sehingga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan mengalami penurunan menjadi 97,46%.

Bila tingkat kemiskinan Kabupaten Badung ini dibandingkan dengan kondisi di Provinsi Bali dan nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung telah berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Bali dan nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Bali dari tahun 2012 hingga tahun 2014 masih berada pada kisaran 4%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2014 masih sebesar 11,22%. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Badung, Bali dan nasional dari tahun 2012 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.17
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung, Bali dan Nasional
Tahun 2012-2014



Sumber : Dinas Sosial

Sejauh ini tidak terdapat standar persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan yang dapat menjadi acuan. Namun tentunya kondisi yang diupayakan dan diharapkan dapat terwujud adalah semakin kecilnya tingkat kemiskinan sehingga hampir mencapai 100% penduduk berada di atas garis kemiskinan.

Dari berbagai indikator pendukung Aspek Kesejahteraan Masyarakat nampak bahwa secara umum kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2012-2014 mengalami peningkatan, dan untuk memperbaiki capaian aspek kesejahteraan fokus perhatian perlu dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan per kapita agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Oleh sebab itulah indikator gini rasio perlu diarahkan agar terus menurun mendekati nol dan distribusi pendapatan terhadap 40% penduduk berpendapatan terendah perlu terus diarahkan agar menguat, mencapai posisi yang lebih tinggi dari yang pernah dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 19,75% (posisi tertinggi selama kurun waktu 2011-2015).

Dari beberapa indikator pada fokus kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni jenjang SD dan angka partisipasi murni jenjang SMP telah mampu melampaui standar yang ditetapkan. Sedangkan indikator angka partisipasi sekolah dan angka pendidikan yang ditamatkan telah sesuai dengan standar. Namun terdapat pula beberapa indikator yang belum

mampu memenuhi standar yaitu : angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK. Kondisi ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang cukup tinggi serta adanya motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah di luar wilayah Kabupaten Badung.

Untuk indikator pendidikan dasar terdapat indikator yang telah melampaui standar yaitu angka partisipasi sekolah dan ada pula indikator yang belum mampu memenuhi standar, antara lain : rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Badung, masih terdapat kekurangan guru sebagai tenaga pendidik.

Dalam penyediaan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Badung dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata telah mampu melampaui standar, namun rasio jumlah guru terhadap murid masih berada dibawah standar yang ditetapkan.

Selanjutnya dalam bidang penyediaan fasilitas pendidikan terdapat beberapa indikator yang telah mampu memenuhi standar antara lain : indikator sekolah SMP dengan kondisi bangunan baik, angka putus sekolah jenjang sekolah dasar, angka putus sekolah jenjang sekolah menengah pertama, angka kelulusan jenjang sekolah dasar, serta angka kelulusan jenjang sekolah menengah atas/kejuruan. Sedangkan untuk indikator yang belum memenuhi standar antara lain : angka putus sekolah jenjang SMA/K, angka kelulusan sjenjang sekolah menengah pertama, angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama serta dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas/kejuruan, dan capaian jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D IV. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan dalam beberapa indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk/migrasi, serta keterbatasan kemampuan anak didik dalam mengikuti proses pendidikan serta terdapat tenaga pendidik/guru yang pada saat sekarang ini sedang dalam proses menempuh pendidikan untuk memenuhi kualifikasi S1/D IV.

Pada Aspek Pelayanan Umum khususnya Kesehatan dari indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pencapaian kinerja dari tahun 2011 hingga tahun 2015 masih berfluktuasi, dan secara keseluruhan indikator tersebut masih belum mencapai standar yang ditetapkan.

Dari indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaian kinerja

Dinas Kesehatan dari tahun 2011 hingga 2015 secara keseluruhan telah melampaui standar. Sedangkan pada indikator cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin, pencapaian kinerja pada 4 (empat) indikator tersebut dari tahun 2011 hingga tahun 2015 telah sesuai standar (100%).

Dari indikator cakupan kunjungan bayi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari tahun 2011 hingga tahun 2015 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Bila capaian indikator ini dibandingkan dengan standar yang ditetapkan maka pencapaiannya telah melampaui standar.

Pada Aspek Pelayanan Umum khususnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari indikator rata-rata jumlah anak per keluarga penurunan. Bila capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Bali dengan rata-rata jumlah anak sebesar 2,3, maka capaian indikator tersebut di Kabupaten Badung telah jauh lebih kecil yaitu 2,12. Bercermin dari perkembangan selama tahun 2011 hingga 2015 tersebut maka tantangan selanjutnya adalah menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga di tahun 2015 menjadi 2,0 sehingga dapat mendukung visi program KB Nasional untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.

Dari indikator ratio akseptor KB, capaian kinerja BKBKS dari tahun 2011 hingga 2015 secara keseluruhan juga telah menunjukkan terjadinya peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kesadaran pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Badung untuk menggunakan alat kontrasepsi yang meningkat. Sebagai gambaran, dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 72.123, yang telah menggunakan alat kontrasepsi mencapai 60.937 (84,49 %) dari standar yang ditentukan sebesar 74,00 % dari total PUS. Demikian pula dari indikator cakupan Peserta KB Aktif, peserta KB Aktif di Kabupaten Badung dari tahun 2011 hingga 2014 secara konsisten juga terus mengalami peningkatan, antara lain melalui pemakaian kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implant, vasektomi dan tubektomi, sehingga cakupan peserta peserta KB Aktif pada tahun 2014. Namun perlu diakui bahwa dari tingginya cakupan peserta KB Aktif tersebut, nampaknya masih didominasi perempuan, sehingga tantangan ke depan adalah mendorong partisipasi laki-laki dalam program KB. Perhatian ke depan juga

perlu diperkuat untuk mendorong pemakaian kontrasepsi jangka panjang (MKPJ) ini untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Sedangkan bila dilihat dari indikator jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, perkembangan dari tahun 2011 hingga 2014 jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Badung terus mengalami penurunan, dalam artian kualitasnya keluarga yang ada telah mengalami penguatan. Namun mengingat dinamika faktor sosial ekonomi, politik dan lainnya yang amat kompleks dan tidak seluruhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, maka upaya perlindungan sosial kepada Rumah Tangga Sasaran juga perlu dilakukan untuk memastikan mereka tidak jatuh di bawah garis kemiskinan.

Dari dimensi sosial, di Kabupaten Badung terdapat sembilan panti asuhan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama dan juga memperoleh perhatian Pemerintah Kabupaten Badung. Sebagai daerah yang secara sosial ekonomi mengalami perkembangan yang pesat, berbagai masalah terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga dialami oleh Kabupaten Badung, utama keberadaan Pekerja Seks Komersil (PSK) serta gelandangan pengemis. Terhadap keberadaan PMKS yang jumlahnya sulit untuk diketahui secara pasti ini telah terus dilakukan penanganan, baik melalui pembinaan dan pemulangan ke daerah asalnya. Demikian pula terhadap PMKS lainnya terus dilakukan pembinaan dan bantuan sosial yang dapat mendukung peningkatan kualitas kehidupannya.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Badung tentunya berimplikasi terhadap berbagai masalah sosial bahkan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata di atas 6,5% telah mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menekan angka tingkat pengangguran terbuka dari kondisi awal sebesar 2,30% pada tahun 2011 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,34% pada tahun 2015. Fenomena yang menarik dicermati adalah bahwa penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ini juga diikuti dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berturut-turut dari 76,38% pada tahun 2011 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 71,41% pada tahun 2014 dan kembali naik menjadi 72,92% tahun 2015. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara

ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kondisi TPAK Kabupaten Badung yang terus menurun selama kurun waktu 2011-2014 dan selanjutnya kembali naik tahun 2015.

Untuk memperluas peningkatan penempatan para pencari kerja maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung bersinergi dengan perusahaan secara berkelanjutan juga melaksanakan layanan bursa kerja. Dalam pelaksanaannya hingga tahun 2014 sebanyak 5000 lebih pencari kerja telah berhasil ditempatkan sehingga diharapkan dapat terus menekan angka pengangguran. Selanjutnya dari aspek hubungan industrial, berbagai permasalahan menjadi pemicu terjadinya sengketa antara pengusaha-pekerja. Data tahun 2011 hingga 2014 nampaknya menunjukkan gejala peningkatan jumlah sengketa per tahunnya, dari 51 per tahun pada tahun 2011 menjadi 62 per tahun pada tahun 2014. Berbagai perselisihan tersebut terjadinya dengan derajat yang beragam dari ringan. Hal ini perlu menjadi perhatian ke depan agar dapat ditekan dan derajatnya juga tetap berada pada derajat yang ringan dan tidak berimplikasi pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dijelaskan bahwa pada Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah diantaranya Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK seluruhnya belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijelaskan bahwa pada Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah diantaranya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Rasio KDRT belum tercapai sesuai dengan dengan standar yang ditetapkan sedangkan pada aspek Persentase Penanganan Kasus KDRT yang terselesaikan sudah mencapai standar yang telah ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dapat

dijelaskan bahwa pada aspek Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) telah melampaui dari standar yang telah ditetapkan.

Untuk Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD dan PEMDES) dapat dijelaskan bahwa pada cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, PKK aktif, Posyandu aktif, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat telah mencapai standar yang telah ditetapkan dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat telah melampaui standar yang telah ditetapkan sedangkan pada aspek kemiskinan, Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan LPM Berprestasi belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dapat dijelaskan bahwa pada aspek Pengelolaan arsip secara baku belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan sedangkan pada aspek Peningkatan SDM pengelola kearsipan telah melampaui sebanyak 83 orang dari standar yang ditetapkan yaitu sebanyak 233 orang.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dapat dijelaskan bahwa pada aspek jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah seluruhnya belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam menjalankan Bidang Ketahanan Pangan menggunakan satu regulasi ketahanan pangan yang telah diatur berdasarkan permentan No 65 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Ketahanan Pangan berupa ketersediaan bahan pangan utama telah mampu dipenuhi oleh Pemkab Badung dengan rasio kecukupan 80,47% - 89,51%.

Produktivitas padi memiliki tren yang cukup fluktuatif, terutama di tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2014 dari 64,62 Kw/ha menjadi 63,12 kw/ha , hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2014 adanya tunda tanam terkait musim kering yang berkepanjangan dan adanya rehabilitasi jaringan irigasi

usaha tani di beberapa subak abian, di tahun 2015 produktivitas padi sedikit mengalami peningkatan menjadi 63,18 Kw/ha.

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB sebesar 12,913 Milyar tahun 2011 dan tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan tren yang semakin meningkat. Untuk cakupan bina kelompok tani setiap tahunnya telah dilaksanakan pembinaan kelompok tani sebanyak 9 kelompok tani yang di harapkan dapat meningkatkan ketrampilan teknis kelompok tani tersebut.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan luas 137, 545 Ha pada tahun 2011 seluas 175,68 ha tahun 2012 seluas 37,625 ha tahun 2013 dan tahun 2014 seluas 82,13 ha. Tren penanaman sangat fluktuatif hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan permintaan masyarakat pemilik lahan untuk melaksanakan peningkatan kualitas tanam tanaman jenis tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis.

Untuk kerusakan kawasan hutan tidak terjadi kerusakan dalam kawasan hutan. Kondisi Hutan di Kabupaten Badung relatif aman sehingga penebangan liar, perusakan hutan tidak terjadi. Kontribusi sektor kehutanan yang dilaporkan masyarakat secara ekonomi dalam PDRB mencapai rata-rata 40 juta rupiah setiap tahunnya.

Produksi perikanan di Kabupaten Badung berasal dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Secara keseluruhan realisasi produksi perikanan dari tahun 2011 – 2014 sebesar 142.669,3 ton. Jika dibandingkan dengan target produksi perikanan dari tahun 2011-2014 yaitu sebesar 152.494,63 ton maka realisasinya baru mencapai 93,56 %. Belum tercapainya target produksi perikanan disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi budidaya rumput laut yang ada di Kecamatan Kuta Selatan akibat adanya pergeseran peruntukan di Desa Kutuh kecamatan Kuta Selatan yang sebelumnya merupakan sentra pengembangan rumput laut berubah menjadi pengembangan pariwisata. Hal ini menyebabkan banyak pembudidaya yang beralih mata pencaharian dari usaha budidaya rumput laut ke bidang usaha pariwisata sehingga berdampak pada pengurangan jumlah kelompok pembudidaya rumput laut yang semula berjumlah 5 kelompok menjadi 1 kelompok. Ini secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi perikanan karena produksi rumput laut memberikan kontribusi paling besar terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung.

Konsumsi ikan secara keseluruhan dari tahun 2011-2014 setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 dari target tingkat konsumsi ikan sebesar 32,40 kg/kapita/tahun sudah terealisasi sebesar 32,87 kg/kapita/tahun atau sebesar 100,93%. Peningkatan konsumsi ikan ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kandungan gizi dan manfaat dari ikan terhadap kesehatan.

Pada bidang kelautan dan perikanan terdapat beberapa kelompok binaan sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan yaitu kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan rumput laut, kelompok pengolah, kelompok pemasar dan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Pembinaan terhadap kelompok dilakukan secara kontinyu setiap tahun baik itu yang dilakukan oleh bidang teknis di kabupaten maupun oleh petugas penyuluh kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Badung. Dari target jumlah kelompok yang dibina sebanyak 167 kelompok sudah dapat terlaksana 100 %.

Produksi perikanan kelompok nelayan adalah lebih dominan kepada produksi perikanan tangkap di laut yang merupakan hasil produksi tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan yang ada di sepnajang wilayah pesisir kabupaten Badung yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Mengwi. Produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2011 – 2014 setiap tahun mengalami peningkatan. Dari target produksi sebesar 16.523,2 ton sudah mencapai realisasi sebesar 19.881,8 ton atau 120,33 % dari target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari hasil berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan baik dalam bentuk pembinaan, bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Badung.

Urusan pilihan pada bidang pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dimana salah satu indikator keberhasilan kepariwisataan di Kabupaten Badung ditunjukkan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung, dalam hal ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung serta jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 34, berdasarkan tabel tersebut kita melihat bahwa adanya peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata. Tentunya peranan pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai tiga pilar pembangunan , yang mampu memberikan kenyamanan

dan keamanan kepada wisatawan sehingga Kabupaten Badung tetap menjadi primadona destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan Ke Kabupaten Badung tentunya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) , yang dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung, yang mengalami peningkatan secara signifikan pula.

Jumlah arus penumpang angkutan umum adalah jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk / keluar Daerah . Dari data tabel tersebut terlihat jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2011 - sebanyak 372.750 orang, tahun 2012 sebanyak 1.162.527 orang, tahun 2013 sebanyak 1.087.571 orang, tahun 2014 sebanyak 1.279.597 orang, dan jumlah kenaikan yang paling signifikan adalah pada tahun 2012, hal ini disebabkan karena pada bulan juni 2012 terminal Mengwi sudah mulai beroperasi meskipun belum optimal.

Rasio ijin trayek adalah Jumlah ijin Trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk dikali 100 . Sesuai dengan Pasal 2, Ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Badung dalam disebutkan :

1. Trayek Mengwi - Mambal - Jagapati
2. Trayek Mengwi - Darmasabha - Mambal - Penarungan
3. Trayek Mengwi - Puspem - Dalung - Cunggu
4. Trayek Mengwi - Blahkiuh - Sangeh
5. Trayek Munggu - Kerobokan - Sentral Parkir
6. Trayek Sentral Parkir - Pantai Kuta
7. Trayek Jimbaran - GWK - Tanjung Benoa
8. Trayek Tuban - GWK Uluwatu

Dari 8 (delapan) trayek yang ada baru terisi 3 (tiga) trayek, sedangkan lagi 5 (lima) trayek lainnya belum terisi, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya dunia usaha untuk menanam modalnya (investasi) di Kabupaten Badung.

Jumlah wajib uji angkutan umum adalah jumlah kendaraan yang bersifat umum, baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang yang wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga setiap unit kendaraan umum wajib uji melaksanakan pengujian kendaraan dua kali dalam setahun. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2011 s.d 2014 terdapat peningkatan kendaraan

bermotor wajib uji yang bersifat umum, khususnya kendaraan umum jenis angkutan sewa dan pariwisata. Hal ini merupakan suatu peningkatan yang bersifat positif. Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dalam upaya menjamin keselamatan pemakai kendaraan itu sendiri maupun pelaku lalu lintas lainnya, maka dengan demikian merupakan kewajiban bagi pemilik angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Prasarana pendukung sistem transportasi di Kabupaten Badung disamping prasarana jalan juga terdapat beberapa terminal yang digunakan untuk mengatur keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan barang. Terminal yang terdapat di Kabupaten Badung pada tahun 2011 hanya memiliki 2 Terminal tipe C yaitu : terminal Dalung yang berlokasi pada akses masuk Perumahan Dalung Permai dan sentral Parkir yang berlokasi di Kecamatan Kuta . Sedangkan mulai bulan Juni 2012 Kabupaten Badung memiliki 3 terminal yaitu 2 terminal tipe C dan 1 Terminal tipe A. Terminal Tipe A Mengwi yang berlokasi di Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi. Terminal Tipe A Mengwi melayani angkutan penumpang Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan kota, angkutan pedesaan dan angkutan pariwisata.

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada Tahun 2011 s/d 2013 adalah 46 menit. Sedangkan mulai tahun 2014, dilakukan perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor mulai dari awal penerimaan berkas sampai berkas dikembalikan kepada pemilik kendaraan sehingga diperoleh waktu pengujian yang baru yaitu selama 48 menit.

2.5 Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu SPM bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat

dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Adapun jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan :
 - a. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - b. Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Bidang Kesehatan :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - j. Upaya Kesehatan Jiwa pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*).
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah kabupaten/kota.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Bidang Sosial
- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.

Adapun Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan pemerintah kabupaten sesuai tabel berikut :

TABEL 2.32

**Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021**

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Target Capaian Tahunan				
					Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pendidikan								
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	5	100	100	100	100	100
1.2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	5	100	100	100	100	100
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	5	100	100	100	100	100
2	Urusan Kesehatan								
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
2.5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
2.6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
2.7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
2.10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	5	100	100	100	100	100

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Target Capaian Tahunan				
					Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
2.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	5	100	100	100	100	100
3	Urusan Pekerjaan Umum								
3.1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	5	100	100	100	100	100
3.2	Penyediaan Layanan Pengolahan air Limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	5	100	100	100	100	100
4	Urusan Perumahan Rakyat								
4.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	5	100	100	100	100	100
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	5	100	100	100	100	100
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	5	100	100	100	100	100
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	5	100	100	100	100	100
5.4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	5	100	100	100	100	100
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	5	100	100	100	100	100

NO	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	Target Capaian Tahunan				
					Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Urusan Sosial								
6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
6.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar Panti	Jumlah anak telantaryang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut usia terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
6.4	Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	5	100	100	100	100	100
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	5	100	100	100	100	100

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan, maka analisis kinerja keuangan daerah dilakukan terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu penerimaan daerah yang terdiri pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah menggambarkan kapasitas kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah serta pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kapasitas kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat dari posisi keuangan daerah yaitu dari neraca daerah. Neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui cerminan posisi aset daerah, kewajiban daerah sampai dengan ekuitas daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Badung

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD Kabupaten Badung yang terdiri atas: (a). Pendapatan Daerah; (b). Belanja Daerah; (c). Pembiayaan Daerah. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah disajikan secara series untuk menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2011-2015 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan %
1	PENDAPATAN	1.851.283.062.358	2.609.068.617.374	2.954.602.744.485	3.444.267.368.967	3.735.129.565.341	19,8
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.406.835.182.181	1.872.346.181.796	2.279.053.275.955	2.722.625.562.621	3.001.464.263.014	21,1
1.1.1.	Pajak Daerah	1.281.695.594.849	1.685.559.515.318	2.010.554.251.067	2.339.332.864.903	2.598.718.129.654	19,6
1.1.2.	Retribusi Daerah	35.837.593.226	68.946.271.044	90.414.452.112	116.502.660.909	96.040.159.072	33,7
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	36.092.597.140	41.756.733.380	71.350.739.922	125.339.002.878	142.995.660.239	44,1
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	53.209.396.967	76.083.662.054	106.733.832.854	141.451.033.930	163.710.314.049	32,9
1.2.	Dana Perimbangan	280.705.583.161	515.654.159.310	429.797.446.192	381.713.595.700	332.251.562.433	10,7
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	123.435.032.161	160.747.933.310	56.611.263.192	56.346.740.700	44.947.526.433	-13,8
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	157.052.376.000	353.067.906.000	372.625.383.000	324.815.695.000	286.763.106.000	26,5
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	218.175.000	1.838.320.000	560.800.000	551.160.000	540.930.000	6,7
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	163.742.297.016	221.068.276.268	245.752.022.338	339.928.210.646	401.413.739.894	25,6
1.3.1	Hibah	89.625.000	-	-	54.625.825.956	75.091.364.406	9,4
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.903.646.274	122.552.870.720	102.342.371.338	130.253.477.690	162.799.634.488	33,4
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	84.655.996.760	76.432.769.000	113.491.184.000	131.532.528.000	163.317.741.000	19,7
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.015.040.000	10.583.569.648	960.285.000	205.000.000	205.000.000	-17,4
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	7.125.000	-	-	-	-	-25,0
1.3.7	Dana Jamkesmas	69.930.500	-	-	-	-	-25,0
1.3.8	Dana Kompensasi Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) Konsolidasi Tanah (LC)	2.758.963.600	-	-	-	-	-25,0
1.3.9	Dana Kapitasi Askes PNS	681.492.982	-	-	-	-	-25,0
1.3.10	Dana Jampersal	61.410.000	-	-	-	-	-25,0
1.3.11	Dana JKBM	1.606.290.900	-	-	-	-	-25,0

1.3.12	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	9.892.776.000	1.606.290.900	-	-	-	-45,9
1.3.13	Dana Insentif Daerah	-	9.892.776.000	28.958.182.000	23.311.379.000	-	18,3
1.3.14	Pengembalian Kelebihan JKBM	-	-	-	-	-	-

Sumber : 1. Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat yaitu di periode tahun 2011 sebesar Rp.1.851.283.062.358 sampai dengan periode tahun 2015 sebesar Rp.3.735.129.565.341 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 19,8%. Pendapatan Asli Daerah rata-rata pertahun cenderung meningkat dari periode tahun 2011 – 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,1%, Secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar 44,1%, Retribusi Daerah sebesar 33,7%, sedangkan pertumbuhan yang terendah adalah Pajak daerah sebesar 19,6%.

Pendapatan Kabupaten Badung berasal dari dana perimbangan yang didapat dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dana Perimbangan Kabupaten Badung pada periode 2011 – 2015 rata-rata tumbuh sebesar 10,7%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 26,5% serta yang mengalami penurunan adalah Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak dengan penurunan sebesar 13,8%.

Selain dari PAD dan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan Kabupaten Badung berasal dari Lain – Lain Pendapatan yang Sah. Lain – Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Badung pada periode 2011 – 2015 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 25,6%, sumber terbesar diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya sebesar 33,4% dan pertumbuhan terendah Dana Hibah khusus sebesar 9,4%.

B. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar peningkatan belanja. Komponen belanja terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pada tabel berikut disajikan perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015, sebagaimana tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata - rata pertumbuhan (%)
	BELANJA	1.572.210.487.617	2.334.080.297.426	2.755.459.722.078	3.276.164.109.817	3.446.634.314.570	22,7
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.059.192.474.981	1.268.529.842.646	1.488.224.176.921	1.654.384.787.120	1.909.366.328.158	15,9
1	Belanja Pegawai	657.803.294.154	767.437.703.476	881.464.639.348	982.021.268.535	1.035.507.051.033	12,1
3	Belanja Subsidi	540.000.000	910.000.000	2.090.000.000	3.837.400.000	5.393.600.000	80,6
4	Belanja Hibah	43.186.758.790	44.320.460.845	95.313.468.711	93.604.909.624	144.802.581.385	42,6
5	Belanja Bantuan Sosial	32.012.616.500	48.119.962.000	52.141.750.000	33.549.092.500	26.839.800.000	0,8
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	126.170.160.128	191.156.530.025	212.227.730.488	272.387.605.145	332.221.196.731	28,2
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	198.646.101.309	216.289.002.899	234.132.968.576	268.781.366.026	364.602.099.009	16,9
8	Belanja Tidak Terduga	833.544.100	296.183.400	10.853.619.798	203.145.290	-	825,5
II	BELANJA LANGSUNG	513.018.012.636	1.065.550.454.780	1.267.235.545.157	1.621.779.322.697	1.537.267.986.412	37,3
1	Belanja Pegawai	51.806.055.584	63.448.806.722	75.694.057.565	63.427.200.338	59.742.497.212	4,9
2	Belanja Barang dan Jasa	261.507.743.379	374.395.947.727	424.829.297.562	609.282.785.114	554.753.160.856	22,8
3	Belanja Modal	199.704.213.673	627.705.700.331	766.712.190.030	949.069.337.245	922.772.328.344	64,4

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Memperhatikan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode 2011 - 2015 bahwa Belanja daerah Kabupaten Badung memiliki pertumbuhan rata rata sebesar 22,7%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dari Rp.1.059.192.474.981 di tahun 2011 menjadi Rp.1.909.366.328.158 di tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,9%. Sedangkan Belanja Langsung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yakni Rp.513.018.012.636 pada tahun 2011 menjadi Rp.1.537.267.986.412 tahun 2015, dengan rata-rata kenaikan Belanja Langsung sebesar 37,3%.

C. Pembiayaan

Komponen pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

No	URAIAN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	RATA RATA KENAIKAN (%)
	PEMBIAYAAN DAERAH						
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	497.292.438.596	759.887.764.420	902.998.736.991	893.884.086.627	925.326.073.071	18,5
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	97.292.438.596	757.401.951.605	901.461.570.467	888.147.920.029	924.161.610.511	18,5
2	Penarikan kembali pokok dana bergulir	-	2.485.812.815	1.537.166.524	5.736.166.598	1.164.462.560	63,8
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.447.400.000	145.200.000.000	214.000.000.000	154.000.000.000	300.000.000.000	200,3
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.500.000.000	145.200.000.000	214.000.000.000	154.000.000.000	300.000.000.000	223,5
2	Penguatan Modal Dana Bergulir	1.947.400.000	-	-	-	-	-25,0
	PEMBIAYAAN NETTO	478.845.038.596	614.687.764.420	688.998.736.991	739.884.086.627	625.326.073.071	8,1
	SISA LEBH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	757.401.951.605	901.461.570.467	888.201.985.529	923.705.602.144	913.821.323.842	5,1

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Memperhatikan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa realisasi Pembiayaan Netto Kabupaten Badung mengalami kenaikan rata rata sebesar 8,1%, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 18,5%,

sedangkan Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran bahwa realisasi Pengeluaran Pembiayaan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yakni Rp.18.447.400.000 di tahun 2011 menjadi Rp.300.000.000.000 di tahun 2015, dengan rata-rata kenaikan sebesar 200,3%. Pertumbuhan yang signifikan tersebut berasal dari penyertaan modal (Investasi) yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 223,5%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan mengalami kenaikan dari Rp.757.401.951.605 di tahun 2011 menjadi Rp.913.821.323.842 di tahun 2015 dengan rata-rata kenaikan SILPA Tahun berjalan sebesar 5,1%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan kondisi keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah Kabupaten Badung, serta Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Badung dalam kurun waktu tahun 2011-2015 yang disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	2015	%
ASET	4.441.186.555.640	5.427.956.479.093	6.867.820.899.396	8.670.320.796.798	26.143.991.789.511	69,1
ASET LANCAR	952.986.034.533	1.129.953.342.662	1.346.234.012.239	1.539.266.057.557	1.255.354.452.858	8,4
Kas	757.786.742.691	901.573.078.216	888.341.033.175	923.958.007.980	913.821.323.842	5,1
Kas di Kas Daerah	753.880.735.478	894.498.493.069	876.201.606.486	896.870.005.924	877.683.351.481	4,2
Kas di Bendahara Penerimaan	164.947.007	77.127.207	60.207.500	86.960.602	16.471.284	-28,0
Kas di Bendaha Pengeluaran	2.010.728.440	15.434.978	122.995.051	789.825.868	525.727	260,0
Kas di BLUD	1.730.331.766	6.982.022.962	11.956.224.138	21.890.602.445	29.195.242.039	122,8
Kas Lainnya	-	-	-	-	7.108.230.573	25,0
Piutang Pendapatan	-	-	-	-	592.058.661.645	25,0
Piutang Pajak	116.861.878.920	127.497.039.012	350.206.481.355	419.414.081.906	-	50,9
Piutang Retribusi	3.052.957.577	3.826.288.179	9.098.536.545	19.155.272.703	-	68,4
Piutang Bagi Hasil Provinsi	19.831.752.282	89.828.056	19.334.646.192	24.113.133.885	-	5337,3

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	2015	%
Piutang Denda/Bunga Pajak Hotel, Restoran, Hiburan	59.501.443.930	99.770.602.000	86.677.237.969	103.245.269.884	-	-6,6
Piutang Sanksi Administrasi	-	1.606.263.216	2.271.867.668	2.616.424.485	-	-10,8
Biaya dibayar dimuka	1.717.724.513	356.667.034	459.045.522	566.648.403	-	-31,8
Piutang JKBM	45.701.500	4.235.012.058	1.595.107.526	-	-	2251,1
Piutang lain - lain	2.680.000	459.551	4.591.779	-	-	179,1
Penyisihan Piutang	-	-	-	-	(293.668.265.153)	-25,0
Penyisihan Piutang Pajak	(8.996.292.041)	(9.014.889.208)	(20.380.696.520)	(70.814.733.737)	-	68,4
Penyisihan Piutang Bunga Pajak	(3.881.857.337)	(7.437.310.704)	(7.059.545.712)	(37.994.825.278)	-	106,2
Penyisihan Piutang Sanksi Administrasi	-	(80.313.161)	(113.593.383)	(222.918.047)	-	9,4
Piutang Deviden PT BPD Bali	-	-	-	129.756.129.682	-	-
Piutang Deviden Jamkrida Bali Mandfara	-	-	-	5.712.479	-	-
Piutang Sisa Hasil Usaha KPN Bina Sejahtera	-	-	-	68.776.697	-	-
Piutang Lain-lain	-	-	4.591.779	18.283.724	-	49,5
Piutang Sewa atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	121.590.515	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	96.340.384	25,0
Persediaan	7.063.302.498	7.530.618.412	15.799.300.122	25.259.202.275	42.863.894.878	61,5
INVESTASI JANGKA PANJANG	365.614.050.059	527.178.005.241	1.024.284.191.780	1.240.381.224.393	1.614.131.413.890	47,4
Invesatasi Dana Bergulir	33.892.570.000	31.406.757.185	29.869.590.661	24.133.424.063	22.968.961.503	-9,1
Investasi Non Permanen lainnya	9.337.558.220	9.337.558.220	9.337.558.220	9.337.558.220	9.337.558.220	-
Investasi Non Permanen lainnya Diragukan Tertagih	(6.144.222.467)	(6.144.222.467)	(6.144.222.467)	(8.379.222.467)	-8.379.222.467	9,1
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	37.085.905.753	34.600.092.938	33.062.926.414	25.091.759.816	23.927.297.256	-10,0
Invesatasi Jangka Panjang Permanen	328.528.144.306	492.577.912.303	991.221.265.366	1.215.289.464.577	1.590.204.116.634	51,2
Penyertaan Modal Pemerintah daerah	328.528.144.306	492.577.912.303	991.221.265.366	1.215.289.464.577	1.590.204.116.634	51,2
ASET TETAP	3.069.082.012.484	3.685.666.164.923	4.413.348.155.707	5.805.955.412.325	23.159.506.392.408	92,6
Tanah	661.834.567.611	657.679.167.611	654.123.371.611	1.169.896.499.611	19.445.502.558.846	410,0
Peralatan dan Mesin	229.374.702.025	315.155.931.874	409.425.979.659	498.051.787.638	681.149.107.517	31,4
Gedung dan Bangunan	1.245.152.376.036	1.390.782.986.191	1.533.277.353.541	1.798.326.515.796	2.069.137.417.474	13,6

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	2015	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	850.980.004.619	1.281.458.804.888	1.764.723.882.896	2.211.217.421.496	2.749.115.050.667	34,5
Aset Tetap Lainnya	33.306.885.831	36.764.862.393	41.931.876.291	43.543.738.903	50.766.726.436	11,2
Konstruksi dalam Pengerjaan	48.433.476.363	3.824.411.966	9.865.691.708	84.919.448.881	6.132.168.830	183,5
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-1.842.296.637.362	-25,0
ASET LAINNYA	53.504.458.565	85.158.966.268	83.954.539.671	84.718.102.523	114.999.530.355	23,6
Aset Tak Berwujud	1.435.139.625	3.155.343.125	4.339.751.675	6.688.685.475	4.976.042.489	46,5
Aset Lain-lain	52.069.318.940	82.003.623.143	79.614.787.996	78.029.417.048	110.023.487.866	23,4
Jumlah Aset Lainnya	53.504.458.565	85.158.966.268	83.954.539.671	84.718.102.523	114.999.530.355	23,6
JUMLAH AKTIVA	4.441.186.555.640	5.427.956.479.093	6.867.820.899.396	8.670.320.796.798	26.143.991.789.511	69,1
KEWAJIBAN	9.097.551.425	29.799.205.895	17.048.429.700	72.677.898.157	90.917.221.563	134,0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.097.551.425	29.799.205.895	17.048.429.700	72.677.898.157	90.917.221.563	134,0
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	219.844.079	34.380.542	139.050.646	145.008.103	92.963.062	47,1
Pendapatan diterima dimuka	-	1.385.683.308	978.044.588	-	8.082.028.025	258,0
Utang Beban	-	-	-	-	82.742.230.476	25,0
Utang jangka Pendek lainnya	8.877.707.346	28.379.142.045	16.909.379.054	72.532.890.054	-	102,1
EKUITAS DANA	4.432.089.004.216	5.398.157.273.198	6.850.772.469.696	8.597.642.898.641	26.451.770.121.738	70,5
EKUITAS DANA LANCAR	943.888.483.108	1.100.154.136.767	1.329.185.582.539	1.466.588.159.400	1.461.608.017.188	11,8
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	757.401.951.605	901.461.570.467	888.201.982.529	923.705.992.377	913.946.840.743	5,1
Cadangan Piutang	188.135.989.344	220.849.646.034	442.093.678.941	590.048.847.302	590.048.847.302	37,8
Cadangan Persediaan	7.063.302.498	7.530.618.412	15.799.300.122	25.259.202.275	31.512.848.591	50,3
Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(8.877.707.346)	(29.764.825.353)	(16.909.379.054)	(72.532.890.054)	-73.921.909.345	130,7
Pendapatan yang ditangguhkan	164.947.007	77.127.207	-	-	21.389.898	-13,3
EKUITAS DANA INVESTASI	3.488.200.521.108	4.298.003.136.431	5.521.586.887.157	7.131.054.739.241	24.990.162.104.550	82,8
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	365.614.050.059	527.178.005.241	1.024.284.191.780	1.240.381.224.393	1.240.381.224.393	39,9
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.069.082.012.484	3.685.666.164.923	4.413.348.155.707	5.805.955.412.325	23.665.551.156.434	94,7
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	53.504.458.565	85.158.966.268	83.954.539.671	84.718.102.523	84.220.523.723	14,5

URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2011	2012	2013	2014	2015	%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.441.186.555.641	5.427.956.479.093	6.867.820.899.396	8.670.320.796.798	26.542.687.343.302	70,3

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

A. Aset

Secara keseluruhan, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2011-2015 mengalami kenaikan. Aset lancar pemerintah Kabupaten Badung memiliki rata-rata pertumbuhan pada periode 2011 - 2015 sebesar 8,4%. Kas memiliki rata-rata pertumbuhan pada periode 2011 - 2015 sebesar 5,1%. Investasi Jangka Panjang pemerintah memiliki rata-rata pertumbuhan pada periode 2011 - 2015 sebesar 47,4%. Jumlah Aset Tetap Kabupaten Badung selama tahun 2011-2015 memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 92,6%.

B. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2011-2015 memiliki angka rata-rata pertumbuhan positif sebesar 134%, hal tersebut sangatlah wajar mengingat kemampuan keuangan Kabupaten Badung meningkat setiap tahunnya.

C. Ekuitas Dana

Perkembangan Ekuitas Dana Kabupaten Badung selama tahun 2011-2015 rata-rata tumbuh sebesar 70,5%, dimana pada tahun 2011 Ekuitas Dana Kabupaten Badung sebesar Rp.4.432.089.004.216 menjadi Rp.26.451.770.121.738 pada tahun 2015. Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan ekuitas dana investasi yaitu dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 82,8%, dimana bentuk Ekuitas Dana Investasi yang diinvestasikan dalam Aset Tetap memiliki pertumbuhan paling besar yakni pertumbuhan sebesar 94,7%.

3.1.3. Rasio Keuangan Kabupaten Badung

Berdasarkan data neraca Kabupaten Badung periode 2011 - 2015 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan rasio keuangan Kabupaten Badung. Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk Tahun 2011 - 2015 berdasarkan formulasi, yang disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio lancar (current ratio)	104,8	37,9	79,0	21,2	13,8
2.	Rasio Kas (quick ratio)	104,0	37,7	78,0	20,8	13,3
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00205	0,00549	0,00248	0,00838	0,00348
2	Rasio hutang terhadap modal	0,00205	0,00552	0,00249	0,00845	0,00344

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Badung yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, Rasio Lancar pada Tahun 2015 sebesar 13,8, ini berarti pada tahun 2015 kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 13.8 kali lebih besar dibandingkan dengan hutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung pada Tahun 2015.

2. Rasio Kas (*Quick Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah, baik itu jangka

panjang maupun jangka pendek. Penghitungan *quick ratio* dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid untuk menutupi hutang lancar. Berdasarkan tabel diatas, *quick ratio* pada tahun 2015 sebesar 13,3, ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Badung 13,3 kali lebih besar dalam membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya jadi Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada tahun 2015 sebesar 0,00348 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil, atau dengan kata lain Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung lebih banyak diperoleh dari pembelanjaan Pendapatan Kabupaten Badung yang bukan berasal dari hutang.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2015 sebesar 0,00344. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Badung, hal ini berarti Kabupaten Badung merupakan daerah yang mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu

dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah didapat dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan, karena sangat berpengaruh penting terhadap keberhasilan program atau kegiatan yang direncanakan. Sampai saat ini, potensi terbesar Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berasal dari kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Hal ini disebabkan kekhususan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata yang didukung oleh kualitas dan kuantitas akomodasi pariwisata seperti tempat MICE (Meeting, Incentive, Conference and Event) yang memadai, adanya *event* seni budaya, olah raga dan pertemuan/konferensi baik nasional, regional maupun internasional yang diadakan di Kabupaten Badung.

Namun mengingat kepariwisataan bersifat sangat sensitif terhadap berbagai hal seperti isu gangguan keamanan, wabah penyakit dan instabilitas politik, maka hal – hal yang berkaitan dengan itu harus terus diantisipasi dengan cepat dan tepat. Disamping itu, potensi wajib pajak harus terus digali secara maksimal untuk

ditetapkan menjadi wajib pajak daerah sejalan dengan perkembangan kemampuan masyarakat dan pertumbuhan kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Perkembangan indikator-indikator yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa pariwisata di Bali tetap bergairah pada tahun 2014 sehingga menambah optimisme dan menguatkan keyakinan untuk merumuskan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Tahun 2015.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- 1) Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 2) Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- 3) Melakukan Penagihan piutang Pajak Daerah secara aktif dan pasif untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan.
- 4) Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam upaya modernisasi administrasi Pajak Daerah demi terwujudnya e-governance di bidang Pajak Daerah.
- 5) Melakukan kerjasama dengan pihak Perbankan dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang transparan, mudah, dan cepat.
- 6) Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta instansi lainnya dalam meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat.
- 7) Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Dedikasi, Hormat, Akurat, Mudah dan Akuntabel.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru serta melaksanakan pemuktakhiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2) Melakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3) Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 5) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.

- 6) Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang terbaik serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.
- 7) Bekerja sama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.
- 8) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 9) Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain-lain Pendapatan Daerah.

B. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang menggambarkan arah kebijakan Belanja Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan Kabupaten Badung Tahun 2010-2014. Belanja Daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja untuk menyelenggarakan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib
2. Belanja pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran merupakan Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Badung bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang

dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang, Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran dapat di jabarkan sebagai berikut :

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2011 hingga tahun 2015 secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Badung, yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

NO	URAIAN	2011			2012			2013			2014			2015			RATA - RATA (%)
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
2	BELANJA	2.670.890.559.887	2.281.819.828.355	85,4	2.671.642.814.960	2.334.080.297.425	87,4	3.027.775.911.368	2.755.459.722.078	91,0	3.614.006.551.503	3.276.164.109.817	90,7	4.051.571.511.425	3.147.634.314.570	77,7	88,2
02.01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.277.543.517.892	1.110.998.530.565	48,7	1.463.878.021.675	1.268.529.842.645	54,3	1.623.136.935.494	1.488.224.176.921	54,0	1.804.201.412.603	1.654.384.787.120	50,5	2.198.073.625.268	1.610.366.328.158	51,2	88,8
02.01.01	Belanja Pegawai	858.309.551.914	709.609.349.738	31,1	920.296.751.682	767.437.703.476	32,9	977.496.630.367	881.464.639.348	32,0	1.093.374.066.148	982.021.268.535	30,0	1.184.517.208.550	1.035.507.051.033	32,9	86,7
02.01.03	Belanja Subsidi	540.000.000	540.000.000	0,02	910.000.000	910.000.000	0,04	2.090.000.000	2.090.000.000	0,08	3.870.000.000	3.837.400.000	0,1	5.420.000.000	5.393.600.000	0,2	99,7
02.01.04	Belanja Hibah	45.199.676.990	43.186.758.790	1,9	45.454.215.798	44.320.460.845	1,9	96.874.582.650	95.313.468.711	3,5	100.242.049.336	93.604.909.624	2,9	265.477.281.050	144.802.581.385	4,6	87,9
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	36.885.593.800	32.012.616.500	1,4	49.363.658.648	48.119.962.000	2,1	57.501.750.000	52.141.750.000	1,9	35.638.500.000	33.549.092.500	1,0	27.600.000.000	26.839.800.000	0,9	93,3
02.01.06	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	127.357.970.394	126.170.160.128	5,5	212.066.068.817	191.156.530.025	8,2	219.855.161.334	212.227.730.488	7,7	284.286.151.505	272.387.605.145	8,3	341.865.059.659	33.221.196.731	1,1	78,3
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	206.250.724.794	198.646.101.309	8,7	232.787.326.730	216.289.002.899	9,3	255.465.191.345	234.132.968.576	8,5	283.790.645.614	268.781.366.026	8,2	370.194.076.009	364.602.099.009	11,6	94,8
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	833.544.100	0,04	3.000.000.000	296.183.400	0,01	13.853.619.798	10.853.619.798	0,4	3.000.000.000	203.145.290	0,01	3.000.000.000	-	0,0	24,6
02.02	BELANJA LANGSUNG	1.393.347.041.995	1.170.821.297.790	51,3	1.207.764.793.285	1.065.550.454.780	45,7	1.404.638.975.874	1.267.235.545.157	46,0	1.809.805.138.900	1.621.779.322.697	49,5	1.853.497.886.157	1.537.267.986.412	48,8	87
02.02.01	Belanja Pegawai	858.309.551.914	709.609.349.738	31,1	69.182.049.949	63.448.806.722	2,7	79.788.831.923	75.694.057.565	2,7	67.622.576.549	63.427.200.338	1,9	67.205.320.084	59.742.497.212	1,9	90,4
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	292.231.484.331	261.507.734.379	11,5	430.512.061.957	374.395.947.727	16,0	473.202.533.790	424.829.297.562	15,4	650.599.465.027	609.282.785.114	18,6	678.323.213.263	554.753.160.856	17,6	88,3
02.02.03	Belanja Modal	242.806.005.750	199.704.213.673	8,8	708.070.681.379	627.705.700.331	26,9	851.647.610.161	766.712.190.030	27,8	1.091.583.097.324	949.069.337.245	29,0	1.107.969.352.810	922.772.328.344	29,3	86,2

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.6 Dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat, realisasi mengalami kenaikan dari 87,0 pada tahun 2011 menjadi 86,9% pada periode 2015, dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 88,8% pada periode 2011 - 2015. Serta tingkat realisasi Belanja Langsung dari tahun 2011 sebesar 84,0% menjadi 82,9 % pada tahun 2015, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 87,0% pada periode 2011-2015.

B. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Badung tertuang pada tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

KODE	URAIAN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
5.	BELANJA	1.572.210.487.617	1.300.893.221.857	1.162.672.843.062	1.339.140.965.691	3.446.634.314.570
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.059.192.474.981	653.818.498.811	729.463.006.962	796.775.941.269	1.909.366.328.158
5.1.1	Belanja Pegawai	657.803.294.154	653.818.498.811	729.463.006.962	796.775.941.269	1.035.507.051.033
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	417.372.035.899	452.544.105.050	473.780.224.737	509.017.016.921	539.234.123.489
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	166.450.079.049	195.877.913.761	249.656.782.225	281.073.549.348	313.455.742.859
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4.154.980.000	5.396.480.000	6.026.000.000	6.685.375.000	6.468.191.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	513.018.012.636	647.074.723.046	433.209.836.100	542.365.024.422	1.537.267.986.412
5.2.1	Belanja Pegawai	51.806.055.584	58.523.118.468	72.169.967.565	63.427.200.338	59.742.497.212
5.2.1.01	Honorarium PNS	17.152.134.573	22.542.530.120	17.053.300.850	16.365.721.549	15.069.140.762
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.407.602.311	34.562.294.848	53.888.428.215	45.688.120.789	43.235.647.450
5.2.1.03	Uang Lembur	1.075.448.500	1.418.293.500	1.228.238.500	1.373.358.000	1.422.489.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	261.507.743.379	545.780.874.101	295.101.232.228	421.491.287.808	554.753.160.856
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.783.176.535	374.395.947.727	99.933.210.041	165.056.496.349	66.091.846.828
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.869.950.303	75.756.332.643	98.688.016.956	148.534.925.792	144.021.193.347
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.267.653.000	6.256.260.200	10.754.154.679	11.021.659.152	10.742.241.475
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	853.858.000	1.992.821.432	1.393.333.872	1.942.631.702	2.024.952.700
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	462.960.000	4.339.608.000	5.960.926.855	6.107.302.000	6.397.761.000
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	749.637.780	1.491.773.430	2.271.205.952	3.151.887.000	3.248.466.750
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.394.176.520	21.377.173.010	24.362.717.809	21.149.594.577	22.470.466.184
5.2.2.11	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	4.314.807.000	766.915.080	4.818.645.248	7.759.748.800	6.383.331.062
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.117.173.400	2.415.932.050	3.660.344.115	3.898.760.550	882.366.600

KODE	URAIAN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	3.214.353.100	13.441.059.715	5.274.252.232	9.457.629.500	5.014.731.310
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.034.148.195	38.094.466.274	32.175.122.417	34.536.286.671	20.055.428.926
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	164.000.000	1.395.905.200	1.108.500.000	1.043.500.000	1.186.500.000
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.084.580.800	4.056.679.340	4.700.802.052	3.785.401.164	3.195.565.978
5.2.2.38	Honorarium PNS	-	-	-	4.045.464.551	15069140762
5.2.3.	Belanja Modal	199.704.213.673	42.770.730.477	65.938.636.308	57.446.536.276	922.772.328.344
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	15.357.538.900	12.681.226.198	25.274.148.236	20.052.210.016	20.666.250.501
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	640.659.600	2.324.327.200	2.031.717.589	2.478.311.898	-
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.996.112.950	2.891.692.235	5.268.796.725	6.146.427.878	-
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.371.594.262	9.821.153.350	13.901.494.526	12.350.326.682	10.085.022.968
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.884.032.620	10.855.577.040	17.599.549.232	15.206.497.317	636.570.000
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	801.543.500	4.196.754.454	1.862.930.000	1.212.762.485	816.889.800

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2011 – 2013 cenderung mengalami penurunan yang dikarenakan terjadinya penurunan Belanja Langsung. Pada tahun 2013 – 2015 cenderung mengalami peningkatan, Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena peningkatan Belanja barang dan jasa pada Belanja Langsung, juga berkenaan dengan peningkatan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2015

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (Rp.)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (Rp.)	PROSENTASE
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2011	709.609.349.738	1.590.657.887.617	44,6
2	Tahun Anggaran 2012	1.300.893.221.857	2.479.280.297.426	52,5

3	Tahun Anggaran 2013	1.162.672.843.062	2.969.459.722.078	39,2
4	Tahun Anggaran 2014	1.339.140.965.691	3.430.164.109.817	39,0
5	Tahun Anggaran 2015	1.095.249.548.245	3.746.634.314.570	29,2

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.8, diperoleh Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah menunjukkan penurunan pada periode 2011 - 2015, tahun 2011 persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 44,6% dan tahun 2015 turun menjadi 29,2%. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun telah dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD.

C. Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kab.Badung pada 5 (lima) tahun terakhir, tertuang pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Badung

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata Kenai kan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	714.896.750.654	845.693.610.111	942.379.009.790	1.069.877.328.311	1.192.226.986.516	13,7
1	Gaji Dan Tunjangan	417.372.035.899	452.544.105.050	473.780.224.737	509.017.016.921	539.234.123.489	6,6
2	Tambahan Penghasilan PNS	166.450.079.049	195.877.913.761	249.656.782.225	281.073.549.348	313.455.742.859	17,3
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4.154.980.000	5.396.480.000	6.026.000.000	6.685.375.000	6.468.191.000	12,3
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	111.200.377.000	169.531.940.000	192.212.017.000	251.682.036.500	263.716.632.394	25,4
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.782.450.000	9.281.086.750	14.379.279.375	17.589.948.875	40.105.342.151	109,7
6	Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa	12.187.333.128	12.343.503.275	5.636.434.113	3.115.619.770	28.399.222.187	178,4
7	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	749.495.578	718.581.275	688.272.340	713.781.897	847.732.436	3,5

B.	BELANJA LANGSUNG	53.057.845.664	72.581.193.230	87.862.257.440	87.025.752.802	81.904.710.137	12,8
1	Honorarium PNS	17.152.134.573	22.542.530.120	17.053.300.850	16.365.721.549	15.069.140.762	-1,2
2	Honorarium Non PNS	31.407.602.311	34.562.294.848	53.888.428.215	45.688.120.789	43.235.647.450	11,3
3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	853.858.000	1.992.821.432	1.393.333.872	1.942.631.702	2.024.952.700	36,7
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	462.960.000	4.339.608.000	1.393.333.872	6.107.302.000	6.397.761.000	278,1
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	164.000.000	1.395.905.200	1.108.500.000	1.043.500.000	1.186.500.000	184,6
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	749.637.780	1.491.773.430	2.271.205.952	3.151.887.000	3.248.466.750	48,3
7	Belanja Premi Asuransi	2.267.653.000	6.256.260.200	10.754.154.679	12.726.589.762	10.742.241.475	62,6
JUMLAH		767.954.596.318	918.274.803.341	1.030.241.267.230	1.156.903.081.113	1.274.131.696.653	13,5

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada periode 2011-2015 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,5%. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas yang berasal dari Belanja Tidak Langsung pada periode 2011-2015 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,7%, sedangkan yang berasal dari Belanja Langsung sebesar 12,8%.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan. Hasil Analisis pembiayaan tertuang pada Tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Tahun 2011-2015
Kabupaten Badung

NO	Uraian	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Rata-Rata (%)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.850.767.400.625,81	2.620.854.103.474	2.954.662.970.616	3.459.985.625.334	3.735.129.565.341	19,9
	Dikurangi Realisasi :						
2	Belanja Daerah	1.406.298.099.449,01	2.334.080.297.426	2.755.459.722.078	3.276.164.109.817	3.446.634.314.570	27,0
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18.447.400.000	145.200.000.000	214.000.000.000	154.000.000.000	300.000.000.000	200,3
.	Defisit Riil	278.556.913.008,64	141.573.806.048	-14.796.751.462	29.821.515.517	-11.504.749.229	-149,9

Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :							
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	497.292.438.596,16	757.401.951.605	901.461.570.467	888.147.920.029	924.161.610.511	18,5
2	Penarikan Dana Bergulir	-	2.485.812.815	1.537.166.524	5.736.166.598	1.164.462.560	63,8
B.	Total Realisasi Penerimaan	497.292.438.596,16	759.887.764.420	902.998.736.991	893.884.086.627	925.326.073.071	18,5
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		757.401.951.604,80	901.461.570.467	888.201.985.529	923.705.602.144	913.821.323.842	5,1

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)
Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2015

No.	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	757.401.951.605		901.461.570.467		888.201.985.529		923.705.602.144		913.821.323.842	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	42.306.635.508	5,6	250.913.724.425	28,0	141.699.867.776	16,0	249.951.305.853	27,1	246.820.658.601	27,0
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	19.993.208.656	47,3	36.078.991.250	4,0	73.338.487.849	8,0	(5.322.249.175)	-0,6	(3.118.707.275)	-0,3
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(145.812.741)	-0,7	4.398.787.199	0,5	(4.878.217.596)	-1,0	(7.997.461.626)	-0,9	60.546.923.334	6,6
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	251.295.248.250	33,2	240.460.520.356	27,0	328.102.166.857	37,0	272.323.389.289	29,5	337.842.441.686	37,0
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	9.460.350.676	1,1	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan tabel 3.11 diatas selanjutnya dapat disimpulkan analisis kebijakan pembiayaan daerah bahwa dari tahun 2011 – 2015 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan memiliki angka pertumbuhan sebesar 5,1%. Untuk menghindari adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, maka dalam penentuan SiLPA harus cermat dan didasarkan pada penghitungan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.

3.2.3. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2011-2016.

Percepatan penyusunan laporan keuangan daerah belum dapat dilaksanakan karena beberapa hal diantaranya :

- A. Seringnya mutasi bagi petugas keuangan perangkat daerah dan kurang banyaknya personil yang memiliki kompetensi akuntansi. Sebagai solusi untuk permasalahan tersebut dilakukan pelatihan dan bimtek tentang pelaksanaan APBD dan penyusunan pelaporan keuangan, pembinaan kepada bendahara perangkat daerah secara intensif, serta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Penyusunan Laporan Keuangan.
- B. Belum terintegrasinya sistem Simda Barang Milik Daerah (BMD) dengan Simda Keuangan. Sebagai solusi permasalahan ini dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengintegrasikan.
- C. Banyaknya peraturan yang tidak signifikan seperti misalnya antara Peraturan Pengelolaan Keuangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait permasalahan rekening. Solusi untuk permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan mapping ulang.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi yang bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah serta akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2011-2015, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016-2021.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2011-2015, serta memperhatikan perkembangan kondisi daerah dan indikator makro daerah, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Pertumbuhan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	19,80	5.096.064.815.541,24	7.569.868.372.699,63	6.328.881.287.941,05	6.302.353.214.732,10	6.505.662.008.360,87
01.01	Pendapatan Asli Daerah	21,10	4.258.418.287.640,42	6.687.358.950.260,86	5.312.501.110.743,56	5.303.069.994.167,98	5.712.569.994.167,98
01.01.01	Pajak daerah	19,60	3.591.397.745.592,97	5.942.998.856.608,63	4.652.882.190.823,21	4.760.834.664.439,97	5.170.334.664.439,97
01.01.02	Retribusi daerah	33,70	112.229.611.100,00	152.816.261.000,00	186.449.053.042,44	159.253.480.054,00	159.253.480.054,00
01.01.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	44,10	261.914.832.947,45	245.533.821.652,23	237.058.546.477,91	186.841.202.808,01	186.841.202.808,01
01.01.04	Lain-lain PAD yang sah	32,90	292.876.098.000,00	346.010.011.000,00	236.111.320.400,00	196.140.646.866,00	196.140.646.866,00
01.02	Dana Perimbangan	10,70	628.007.028.458,00	572.651.223.000,00	610.070.331.000,00	600.415.190.000,00	486.972.595.600,00
01.02.01	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	-13,80	86.179.375.000,00	88.963.842.000,00	85.374.845.000,00	65.804.133.000,00	59.754.801.700,00
01.02.02	Dana alokasi umum	26,50	366.684.189.458,00	330.336.650.000,00	361.230.411.000,00	365.572.975.000,00	325.107.369.900,00
01.02.03	Dana alokasi khusus	6,70	175.143.464.000,00	153.350.731.000,00	163.465.075.000,00	169.038.082.000,00	102.110.424.000,00
01.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	25,60	209.639.499.442,82	309.858.199.438,77	406.309.846.197,49	398.868.030.564,12	306.119.418.592,89
01.03.01	Hibah	9,40	-	-	73.998.200.000,00	73.998.200.000,00	73.998.200.000,00
01.03.02	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
01.03.03	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	33,40	161.618.880.442,82	179.975.609.438,77	198.488.727.197,49	183.612.836.564,12	172.836.451.592,89
01.03.04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	19,70	47.815.619.000,00	123.552.590.000,00	127.122.919.000,00	137.606.994.000,00	52.584.767.000,00
01.03.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-17,40	205.000.000,00	6.330.000.000,00	6.700.000.000,00	3.650.000.000,00	6.700.000.000,00
2	BELANJA	22,70	6.172.197.577.820,73	8.155.281.067.642,20	6.548.287.598.483,84	6.302.353.214.732,10	6.505.662.008.360,87
02.01	Belanja Tidak Langsung	15,90	2.995.093.814.501,39	4.274.272.528.422,53	3.617.476.167.418,24	2.849.400.656.218,10	3.771.844.810.551,64
02.01.01	Belanja Pegawai	12,10	1.367.853.368.279,71	1.625.853.910.894,64	1.389.333.507.861,00	1.424.518.222.978,71	1.769.563.591.419,34
02.01.02	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
02.01.03	Belanja Subsidi	80,60	9.340.792.000,00	9.527.607.840,00	11.441.487.840,00	11.441.487.840,00	11.441.487.840,00
02.01.04	Belanja Hibah	42,60	525.248.881.222,00	932.588.786.683,00	786.764.589.849,00	103.794.845.350,00	385.583.491.350,00
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	0,80	118.981.940.000,00	267.654.670.250,00	259.990.929.384,00	298.934.000.000,00	336.302.000.000,00
02.01.06	Belanja Bagi Hasil	28,20	498.091.575.700,63	745.539.068.227,51	636.446.802.884,62	632.748.815.049,39	670.815.696.885,47
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan	16,90	459.839.891.599,05	678.108.484.527,38	519.834.775.799,62	362.963.285.000,00	583.138.543.056,83
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	825,50	15.737.365.700,00	15.000.000.000,00	13.664.073.800,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
02.02	Belanja Langsung	37,30	3.177.103.763.319,34	3.881.008.539.219,67	2.930.211.431.065,60	3.452.952.558.514,00	2.733.817.197.809,23
02.02.01	Belanja Pegawai	4,90	89.355.043.637,00	120.232.784.433,00	137.692.342.307,20	164.938.946.923,00	-
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	22,80	1.609.047.947.982,54	2.111.668.858.048,69	1.928.932.090.272,35	2.032.535.180.001,68	-
02.02.03	Belanja Modal	64,40	1.478.700.771.699,80	1.649.106.896.737,98	864.186.998.486,05	1.255.478.431.589,32	-
3	PEMBIAYAAN						
03.01	Penerimaan Pembiayaan	18,50	1.076.132.762.279,49	585.412.694.942,57	221.406.310.542,79	-	-
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	200,30	-	-	2.000.000.000,00	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

A. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas riil keuangan Kabupaten Badung untuk mendanai pembangunan Kabupaten Badung dalam jangka waktu lima tahun 2017-2021, disajikan pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	Pendapatan	5.096.065	7.569.868	6.328.881	6.302.353	6.505.662
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	1.076.133	585.413	221.406	-	-
	Total penerimaan	6.172.198	8.155.281	6.550.288	6.302.353	6.505.662
	dikurangi :					
4	Belanja Tidak Langsung	2.995.094	4.274.273	3.617.476	2.849.401	3.771.845
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	2.000	-	-
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		3.177.104	3.881.009	2.930.811	3.452.953	2.733.817

Sumber : 1. Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

B. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2017-2021. Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14
 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
 Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2021

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	APBD	APBD	APBD	Proyeksi	Proyeksi
		2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Total Penerimaan	6.172.198	8.155.281	6.550.288	6.302.353	6.505.662
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	3.177.104	3.881.009	2.930.811	3.452.953	2.733.817
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	401.585	456.765	450.214	487.662	531.669
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-
II	Total rencana pengeluaran prioritas I ((II.a+II.b)-(II.c-II.d))	2.775.519	3.424.244	2.480.597	2.965.291	2.202.148
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	3.396.679	4.731.038	4.069.690	3.337.063	4.303.514
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	2.995.094	4.274.273	3.617.476	2.849.401	3.771.845
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	2.021.388	2.450.388	2.659.523	2.420.230	3.159.366
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	973.706	1.823.885	957.953	429.170	612.479
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	2.422.973	2.907.153	3.111.737	2.907.892	3.691.035

Sumber : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

C. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka akan ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

a. Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/ misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/ kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

c. Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun, total pada tabel untuk masing-masing kolom persentase harus selalu berjumlah 100 persen. total untuk kolom rupiah dapat menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya.

Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021

(dalam jutaan rupiah)

JENIS DANA	PROYEKSI TA 2017		PROYEKSI TA 2018		PROYEKSI TAHUN 2019		PROYEKSI TAHUN 2020		PROYEKSI TAHUN 2021	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
PRIORITAS I	44,97	2.775.519	41,99	3.424.244	37,87	2.480.597	45,47	2.965.291	33,85	2.202.148
PRIORITAS II	15,78	973.706	22,36	1.823.885	14,62	957.953	0,87	429.170	9,41	612.479
PRIORITAS III	39,26	2.422.973	35,65	2.907.153	47,51	3.111.737	53,66	2.907.892	56,74	3.691.035
JUMLAH	100	6.172.198	100	8.155.281	100	6.550.288	100	6.302.353	100	6.505.662

Sumber : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

4.1.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Pendidikan

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan keluarga.
- 2) Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
- 3) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- 5) Masih kurangnya sekolah jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Abiansemal.

b. Kesehatan

- 1) Belum optimalnya penurunan angka kematian ibu.
- 2) Masih tingginya angka kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.

- 3) Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
- 4) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
- 5) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
- 6) Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- 7) Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
- 8) Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- 9) Terbatasnya sarana pendukung untuk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
- 10) Belum optimalnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir dan menjaga level air agar sungai terlihat lebih bersih saat kemarau.
- 2) Masih adanya pembuangan air limbah secara langsung ke pantai.
- 3) Masih kurangnya instalasi pengolahan air limbah komunal di kawasan perumahan.
- 4) Belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah terpadu di Kabupaten Badung terutama di kawasan Badung Selatan.
- 5) Belum tertanganinya beberapa badan jalan khususnya pada kawasan *Land Consolidation* (LC).
- 6) Belum tuntasnya penanganan terhadap sejumlah infrastuktur yang menghubungkan jalur-jalur pariwisata antara lain : jalan lingkar selatan dan lingkar barat di Kuta Selatan.
- 7) Masih kurangnya infrastruktur penunjang pada jalur-jalur menuju objek wisata, antara lain : Lampu Penerangan Jalan, jaringan telepon, trotoar dan drainase.
- 8) Belum ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyambungkan limbahnya ke sistem jaringan air limbah terpusat DSDP.
- 9) Belum jelasnya referensi pembangunan infrastruktur.
- 10) Belum adanya perangkat hukum tentang bangunan gedung yang mengatur ketentuan tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunan publik.

- d. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 - 2) Masih rendahnya pemahaman pemilih pemula dalam partisipasi politik.
 - 3) Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana masih kurang.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
 - 5) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun perilaku sosial masyarakat.
 - 6) Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
 - 7) Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
 - 8) Belum terbangunnya pos siaga bencana di masing – masing kecamatan.
 - 9) Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.
 - 10) Terbatasnya paket individu masyarakat Kabupaten Badung yang terdampak bencana belum dapat diwujudkan.
 - 11) Payung hukum tentang sumber pendanaan penanganan pasca bencana belum relevan.
- e. Sosial
 - 1) Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - 2) Belum optimalnya sinergi antar *stakeholder* dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan sosial.
 - 3) Belum seluruh masyarakat terlindungi oleh jaminan sosial.

4.1.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

- a. Tenaga Kerja
 - 1) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kerjasama Tripartit dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.
 - 2) Masih terdapat tenaga kerja yang belum mengikuti sertifikasi uji kompetensi .
 - 3) Masih terbatasnya jumlah assessor.
 - 4) Rendahnya jiwa wirausaha.

- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
 - 3) Rendahnya pengetahuan perempuan terhadap penyakit kanker, HIV-AIDS dan penyakit berbahaya lainnya.
- c. Lingkungan Hidup
 - 1) Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air.
 - 2) Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup.
 - 3) Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembuatan taman kota dan hutan kota.
 - 4) Belum adanya masterplan pertamanan.
 - 5) Pencemaran di wilayah Kabupaten Badung 55% berasal dari limbah domestik.
- d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan catatan sipil.
- e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa.
- f. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
 - 1) Tingginya angka pernikahan dini.
 - 2) Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB.
 - 3) Rendahnya pemahaman remaja terhadap program generasi berencana (gen-re).
 - 4) Belum optimalnya peran Tribina KB.
- g. Perhubungan
 - 1) Pertumbuhan jumlah kendaraan yang jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan prasarana jalan.
 - 2) Terkonsentrasinya kegiatan/ aktivitas/ mobilitas di wilayah Badung Selatan menyebabkan beban lalu-lintas dan permasalahan kemacetan lalu-lintas bertumpu di wilayah Badung Selatan.
 - 3) Belum optimalnya pelayanan penggunaan angkutan umum di Kabupaten Badung.
- h. Komunikasi dan Informatika.
 - 1) Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung.

- 2) Kurang tersedianya lahan parkir di luar badan jalan di wilayah padat aktivitas.
- i. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - 1) Kurangnya sinergitas antara UMKM dengan lembaga keuangan dalam hal kemitraan, permodalan dan promosi produk.
 - 2) Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas.
 - 3) Terbatasnya kesempatan UKM dalam mengikuti informasi dan promosi produknya.
 - 4) Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha.
 - 5) Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM.
 - 6) Belum memiliki Unit Pengelola Dana Bergulir.
 - j. Kebudayaan
 - 1) Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
 - 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah.
 - 3) Belum optimalnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual seniman, sastrawan dan budayawan.
 - 4) Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
 - 5) Masih kurangnya tenaga guru Bahasa Bali yang dapat mendukung pengajaran seni, sastra dan budaya Bali.
 - k. Perpustakaan
 - 1) Kondisi perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan yang belum memenuhi standar.
 - 2) Kurangnya minat baca masyarakat.

4.1.3 Urusan Pilihan

- a. Kelautan dan Perikanan
 - 1) Penataan peruntukan sektor perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik.
 - 2) Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan masih rendah.
 - 3) Fluktuasi harga sarana produksi perikanan sangat tinggi yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah.
 - 4) Belum optimalnya fungsi TPI / Dermaga Kedonganan.
 - 5) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

b. Pariwisata

- 1) Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk yang ramah lingkungan.
- 2) Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
- 3) Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
- 4) Perlunya penataan perizinan sarana akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
- 5) Optimalisasi pemasaran dan promosi pariwisata dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 6) Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata perlu ditingkatkan.
- 7) Daya Tarik Wisata (DTW) yang belum tertata secara optimal.
- 8) Belum maksimalnya pengembangan potensi Daya Tarik Wisata baru
- 9) Masih rendahnya kualitas SDM pengelola destinasi
- 10) Terbatasnya jumlah event promosi pariwisata yang diikuti.
- 11) Perlu adanya peningkatan infrastruktur pada Daya Tarik Wisata.
- 12) Terbatasnya ketersediaan sarana parasarana penunjang kepariwisataan.
- 13) Kurangnya ketaatan industri pariwisata melengkapi perijinan.
- 14) Belum adanya data base industri pariwisata.

c. Pertanian

- 1) Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan.
- 2) Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian.
- 3) Pesatnya alih fungsi lahan.
- 4) Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata.
- 5) Kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian.
- 6) Rendahnya adopsi inovasi pertanian.
- 7) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
- 8) Penataan peruntukan sektor peternakan belum terwujud dengan baik.
- 9) Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan masih rendah.
- 10) Fluktuasi harga sarana produksi peternakan sangat tinggi yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah Pemulihan *performance* sapi Bali, serta penurunan jumlah populasi sapi Bali.
- 11) Kurangnya fasilitas baik sarana maupun prasarana RPH Mambal untuk mewujudkan swasembada daging sapi, serta untuk menghasilkan BOB.

d. Perdagangan

- 1) Adanya kecendrungan semakin meningkatnya jumlah *mini market* dan makanan siap saji yang masuk ke kawasan pedesaan.
- 2) Kurangnya daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern.

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Fungsi Lainnya

- 1) Belum optimalnya pelayanan perizinan.
- 2) Belum maksimalnya analisis jabatan dan rasio kebutuhan pegawai.
- 3) Belum optimalnya disiplin aparaturnya pemerintah.
- 4) Belum maksimalnya penegakan Peraturan Daerah.
- 5) Belum ditetapkannya zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis perlu diantisipasi, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis ditunjukkan dari kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis yang berkembang akibat pengaruh kondisi global, regional dan nasional yang perlu mendapat perhatian dan fokus penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam kurun waktu lima tahun kedepan meliputi :

4.2.1 Isu-isu Strategis Global, Regional dan Nasional

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prospek ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global pada periode Tahun 2016-2021. Beberapa isu strategis yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai Tahun 2015, di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian Kabupaten Badung, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi termasuk sumberdaya manusianya.

2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian Kabupaten Badung yang mengandalkan pendapatan daerah dari sektor kepariwisataan antara lain berasal dari : (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor bagi produk-produk UMKM Kabupaten Badung, (b) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya belum sepenuhnya pulih berdampak pada menurunnya ekspor berbagai produk dari Kabupaten Badung; (c) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun flat sehingga mempengaruhi ekspor dan investasi di Kabupaten Badung; (d) proses normalisasi kebijakan moneter AS di Tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya.
3. Stabilitas politik dan keamanan menjadi tantangan utama dalam memelihara keberlanjutan pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karena itu diperlukan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sehingga menjadi kondusif termasuk bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.
4. Perubahan situasi geo-politik global yang ditandai dengan ‘pertarungan’ penguasaan sumber daya alam dalam rangka food and energy security. Krisis energi dunia dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia dan arus ekspor-impor pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam, bahkan persaingan negara besar dan negara industri baru ditandai dengan strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara ekonomi lebih kaya dan kuat.
5. Globalisasi nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan, yang sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang

dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial. Hal ini membawa Indonesia berada pada persilangan antara budaya global dan budaya lokal yang berorientasi pada identitas primordial.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terdapat beberapa tantangan utama yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung diantaranya meliputi :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum dan pemerintah, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun daerah terutama bagi dunia usaha yang akan berinvestasi di daerah.
2. Kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik, sehingga dapat mendukung proses pembangunan kedepan secara efektif dan efisien.
3. Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas.

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan

perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

4. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.
5. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
6. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai kondisi saat ini dan menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju karena saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain perlu direformasi.
7. Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah masih belum optimal. Disamping itu anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif perlu dikurangi, sehingga dapat diarahkan untuk membiaya pembangunan secara optimal.

4.2.2 Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Terdapat beberapa isu strategis dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan daerah meliputi :

a. Pendidikan

- 1) Perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
- 2) Memantapkan program pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 12 tahun
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan peserta didik

- 4) Restrukturisasi satuan pendidikan dasar menuju satuan pendidikan berbasis Hindu
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar
- 6) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
- 7) Pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 12 tahun
- 8) Peningkatan kualitas mutu lulusan yang berintegritas
- 9) Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan
- 10) Peningkatan pendidikan dan pengembangan anak usia dini
- 11) Pembentukan sekolah PAUD/TK berbasis Agama Hindu dan Bahasa Bali
- 12) Peningkatan manajemen guru dan pendidikan kejuruan
- 13) Masih kurangnya sekolah jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Abiansemal

b. Kesehatan

- 1) Perluasan akses dan mutu pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang berkualitas
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan
- 3) Peningkatan kesadaran, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam hidup sehat
- 4) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- 5) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- 6) Peningkatan kesehatan perempuan, ibu hamil, anak, remaja hingga lanjut usia (*continuum of care*)
- 7) Percepatan perbaikan status gizi masyarakat
- 8) Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan
- 9) Pengembangan dan peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan
- 10) Integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam jaminan kesehatan nasional yang berkelanjutan dan menjangkau seluruh masyarakat (*universal coverage*)

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Pengkajian mengenai pemanfaatan muara Tukad Mati sebagai Daerah Tujuan Wisata baru
- 2) Pembangunan utilitas terpadu
- 3) Peningkatan infrastruktur terkait penambahan jumlah penduduk

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Peningkatan intensitas dan kualitas penanggulangan PMKS

- 2) Perluasan akses rumah layak huni bagi masyarakat miskin/rentan
- 3) Optimalisasi jangkauan pelayanan air bersih dan sistem pelayanan air minum
- 4) Pengembangan sistem utilitas terpadu
- 5) Pengembangan sistem pengolahan sampah / limbah terpadu
- 6) Perluasan akses kredit kepemilikan rumah terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- 7) Pengolahan air laut menjadi air minum atau air bersih untuk mengantisipasi kekurangan air baku pada kawasan Badung Selatan
- 8) Pengamanan daerah tangkapan air
- 9) Pengendalian alih fungsi lahan
- 10) Pembangunan IPAL pada kawasan Badung Selatan untuk menanggulangi air limbah

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Peningkatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- 2) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan
- 3) Pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan organisasi kemasyarakatan terutama di lingkungan masyarakat perkotaan
- 4) Pengurangan resiko bencana
- 5) Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif terhadap penanggulangan bencana.
- 6) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
- 7) Peningkatan efektivitas waktu pelayanan dengan merealisasikan pos siaga bencana di masing-masing kecamatan
- 8) Peningkatan cakupan pelayanan tanggap darurat dengan penambahan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
- 9) Peningkatan jaminan kehidupan korban bencana dengan merealisasikan paket bantuan logistik
- 10) Pemberian santunan kepada individu dan kelompok masyarakat terdampak bencana
- 11) Optimalisasi penanganan pasca bencana dengan membuat dan mensinergikan peraturan/payung hukum pada saat pasca bencana.

f. Sosial

- 1) Perluasan jangkauan jaminan sosial terhadap masyarakat rentan
- 2) Peningkatan intensitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- 3) Peningkatan sinergitas antar pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam penanggulangan permasalahan sosial dan kemiskinan.

4.2.3 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Isu strategis dalam pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

a. Tenaga Kerja

- 1) Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui instrumen Upah Minimum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
- 3) Peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja dan pencari kerja dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- 4) Memberi pinjaman lunak kepada pekerja Indonesia (masyarakat Bali) yang ke luar negeri untuk menjadi pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja
- 5) Terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)
- 6) Perluasan penyerapan tenaga kerja berbasis wirausaha mandiri
- 7) Kurang optimalnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mempersiapkan tenaga kerja terlatih

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Peningkatan pengarusutamaan gender
- 2) Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
- 3) Penanggulangan lebih intensif penyakit kanker dan HIV-Aids
- 4) Peningkatan antisipasi terhadap daerah rawan *trafficking*

c. Pangan

- 1) Perubahan iklim (climate change) yang mengganggu suplai air, pola tanam dan produktivitas hasil pertanian
- 2) Terancamnya ketahanan pangan
- 3) Belum tersedianya peta potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Badung
- 4) Terancamnya ketahanan pangan
- 5) Penurunan kualitas sumber daya alam pertanian
- 6) Pesatnya alih fungsi lahan pertanian
- 7) Kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian
- 8) Rendahnya adopsi inovasi pertanian
- 9) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
- 10) Belum optimalnya sinergitas pertanian dengan pariwisata

- 11) Belum optimalnya database potensi sumberdaya pertanian
 - 12) Menurunnya rumah tangga petani dan kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian
 - 13) Pembentukan unit usaha untuk membeli hasil panen petani
- d. Lingkungan Hidup
- 1) Penanganan kawasan resapan air hujan
 - 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3) Mempertahankan ruang Daya terbuka hijau
 - 4) Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati
 - 5) Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) 10 sungai
- e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 1) Belum Sepenuhnya masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil.
- f. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
- 1) Pengendalian angka kelahiran anak untuk menekan tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga (di atas 2 anak)
 - 2) Peningkatan motivasi masyarakat terhadap pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang
 - 3) Peningkatan usia remaja kawin pertama diatas 20 tahun
 - 4) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
 - 5) Penyebarluasan informasi (KIE) tentang program KB
 - 6) Peningkatan peran Tri Bina KB dan UPPKS
 - 7) Perluasan dukungan dari berbagai sektor untuk meraih bonus demografi
- g. Perhubungan
- 1) Isu keamanan Global dan Regional menuntut Kabupaten Badung sebagai destinasi Internasional meningkatkan keamanan wilayahnya
- h. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 1) Peningkatan motivasi dan kapasitas kewirausahaan
 - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri tenun lokal
 - 3) Peningkatan bantuan permodalan kepada UMKM
 - 4) Penyertaan modal pemerintah untuk peningkatan kualitas, kuantitas, sarana dan prasarana pasar tradisional
 - 5) Penguatan promosi potensi industri tenun lokal
 - 6) Penguatan sumber bahan baku dan penggunaan bahan baku tenun lokal

i. Kebudayaan

- 1) Penguatan peran lembaga adat/tradisional sebagai wadah pelestarian adat, seni dan budaya.
- 2) Pelestarian kesenian, budaya serta lembaga adat dan lembaga tradisional lainnya ditengah dinamika kehidupan modern.
- 3) Peningkatan perlindungan asset budaya daerah
- 4) Pemantapan dan peningkatan kualitas kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama
- 5) Mulai memudarnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
- 6) Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
- 7) Lemahnya perlindungan hak cipta dan kurangnya penghargaan (*kerthi budaya*) bagi seniman, sastrawan dan budayawan
- 8) Kekurangan guru agama Hindu.
- 9) Peningkatan srada bhakti bagi generasi muda
- 10) Kurangnya minat generasi muda mendalami tentang Budaya Bali
- 11) Gangguan keamanan terhadap pura dan pratima
- 12) Beralihnya kepemilikan asset pura (pelaba pura)
- 13) Kerancuan penggunaan simbol-simbol keagamaan yang sakral.

j. Perpustakaan

- 1) Peningkatan minat baca masyarakat Kabupaten Badung untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah.
- 2) Kondisi perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan yang belum memenuhi standar

k. Kearsipan

- 1) Peningkatan pengelolaan arsip secara baku pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

4.2.4 Urusan Pilihan

Dalam pelaksanaan urusan pilihan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat penanganan meliputi :

a. Kelautan dan Perikanan

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan serta pengembangan teknologi
- 2) Peningkatan daya saing produk hasil perikanan
- 3) Penataan ruang wilayah yang terpadu bagi peruntukkan sektor perikanan dan kelautan
- 4) Fluktuasi harga sarana produksi perikanan yang sangat tinggi

- 5) Belum optimalnya fungsi TPI / Dermaga Kedonganan
 - 6) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan
- b. Pariwisata
- 1) Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk ramah lingkungan
 - 2) Diversifikasi produk pariwisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata baru
 - 3) Belum tergarapnya secara maksimal potensi kepariwisataan di Kabupaten Badung
 - 4) Kurang optimalnya pengelolaan wisata pedesaan
 - 5) Belum optimalnya sinergi pertanian, perikanan, kelautan, UMKM dan pelaku pariwisata
 - 6) Pesatnya pertumbuhan destinasi/kompetitor baru
 - 7) Lemahnya daya saing SDM kepariwisataan di Kabupaten Badung
 - 8) Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
- c. Penanggulangan Bencana Daerah
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - 2) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kebencanaan
- d. Pertanian
- 1) Pembentukan unit usaha untuk membeli hasil panen petani
 - 2) Pemanfaatan teknologi dalam penghijauan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternakan serta pengembangan teknologi
 - 4) Peningkatan daya saing produk hasil peternakan
 - 5) Penataan ruang wilayah yang terpadu bagi peruntukkan sektor peternakan
 - 6) Fluktuasi harga sarana produksi peternakan yang sangat tinggi
 - 7) Pemulihan *performance* sapi Bali, serta penurunan jumlah populasi sapi Bali
 - 8) Kurangnya sarana maupun prasarana untuk mewujudkan swasembada daging sapi

4.2.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat penanganan meliputi :

a. Fungsi Lainnya

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
- 2) Optimalisasi analisis jabatan dan pengembangan karir PNS
- 3) Optimalisasi pembinaan terhadap kinerja aparatur pemerintah
- 4) Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- 5) Peningkatan penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
- 7) Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara berkelanjutan
- 8) Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
- 9) Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- 10) Optimalisasi pembinaan terhadap disiplin aparatur pemerintah
- 11) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah
- 12) Penetapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;

- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

Tabel 4.1 Identifikasi Program Prioritas

Program Prioritas \ Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1	0	1	0	1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3. Pembangunan drainase 4. Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	1	1	1	0	1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan pusat

					perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Bena, dan Tanjung Bena	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
4.Pengembangan Agropolitan Petang	0	1	1	0	1.Pembangunan terminal 2.Pembangunan Pasar
5.Pembangunan jalan bebas hambatan	0	1	0	0	1.Pengembangan kawasan
6. Pengembangan dan pembangunan terminal	0	1	0	0	1.Pembangunan jalan 2.Pengembangan kawasan
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	1	0	0	1	1.Pengembangan kawasan
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	1	0	0	1	1.Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	1	1	0	1.Perluasan permukiman 2.Pembangunan jalan
10. Pengembangan kawasan pariwisata	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan akomodasi wisata
11.Pengembangan kawasan pertanian modern	1	1	0	0	1.Pembangunan jalan 2.Pengembangan pasar
12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM	1	1	1	0	1.Pengembangan permukiman 2.Pembangunan jalan
13.Pengembangan kawasan perikanan	1	0	1	1	1.Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan	-	Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan	+	Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk	+	Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai
2.Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	-	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	0	Kemungkinan tidak berpengaruh
3.Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
4.Pengembangan Agropolitan Petang	-	Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sarana /prasarana	+	Penataan kawasan	0	Tidak berdampak penting
5.Pembangunan jalan bebas hambatan	0	Tidak berdampak penting	-	Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
6.pengembangan dan pembangunan terminal	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	+	Alih fungsi lahan disekitarnya	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	0	Tidak berdampak penting
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	++	Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	+	Menghindari alih fungsi DAS	+	Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai	+	Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai
8.Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	++	Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	0	Tidak berdampak penting	+	Tidak berdampak penting	++	Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	0	Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	-	Alih fungsi lahan disekitar kawasan	0	Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	0	Tidak berdampak penting
10. Pengembangan kawasan pariwisata	0	Air limbah dari akomodasi wisata	+	Penataan kawasan pariwisata	0	Sampah dari aktivitas pariwisata	0	Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
11.pengembangan kawasan pertanian modern	--	Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sapras yang layak	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
12.pengembangan kawasan industri	--	Air limbah yang dihasilkan	0	Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan	--	Berbagai macam sampah	0	Penurunan kualitas air laut

kerajinan dan UMKM		berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan		kawasan permukiman		yang dihasilkan berbagai aktivitas industri		disekitar-nya
13.Pengembangan kawasan perikanan	--	Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan	0	Tidak berdampak penting	-	Sampah dari aktivitas pasar ikan	--	Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan

Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

Tabel 4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai			
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2. Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu
Pengaruh kumulatif			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut. 2. Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah. 			

Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



Tabel 4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2

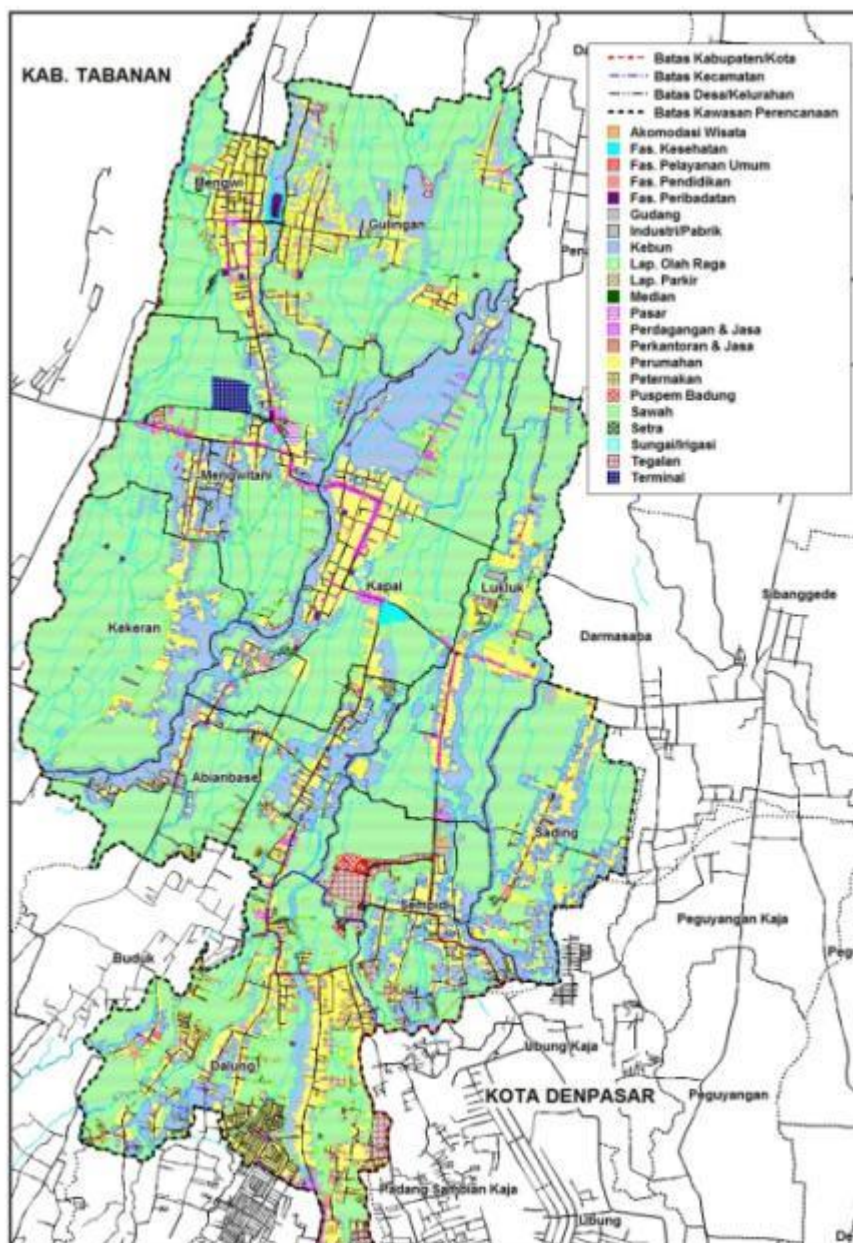
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi	
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan. 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.	
Pengaruh kumulatif			
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta			

banjir.
2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir. sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.

Tabel 4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapandaerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintaahn dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir. 2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk. 			

Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai				
Deskripsi Baseline : Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah				
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan				
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Mitigasi	Adaptasi
Pengembangan Agropolitan Petang		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi	Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan.	

	<p>menimbulkan kepunahan biota dan gangguan kesehatan manusia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas. 3. Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air. Namun kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak. 2. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir. 		

Tabel 4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5

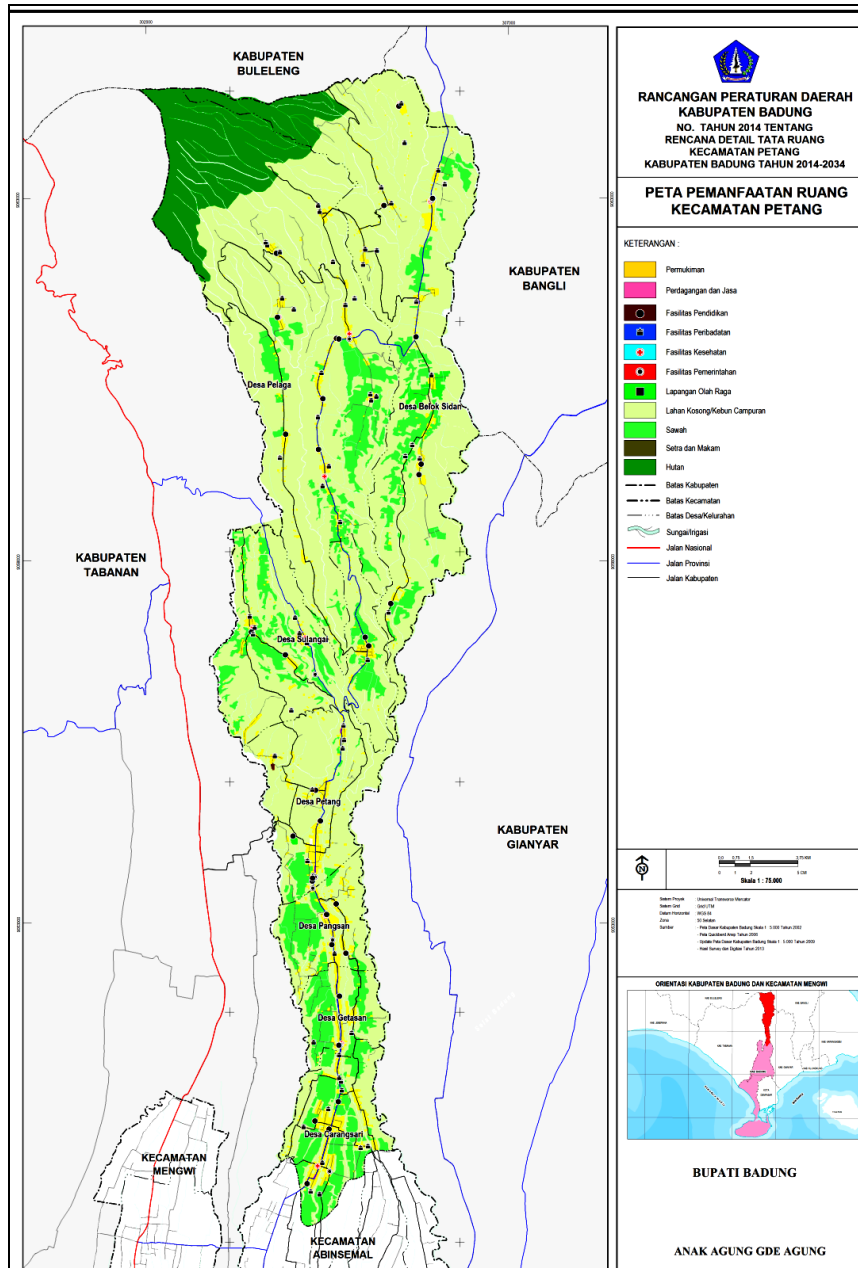
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pembangunan jalan bebas hambatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembanan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta- Tanah Lot- Soka, , Cangu – Mengwi, lingkak Mengwi , Batuan –Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif			
<ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten. Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 			

4. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada social kemasyarakatan.

Tabel 4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Perkembangan pusat perdagangan dan jasa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya. 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan. 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pemerataan perekonomian dengan akses yang cepat dan lengkap di seluruh Kabupaten Badung daerah pertanian dan reapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah munculnya pusat-pusat kepadatan dan kemacetan baru, menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 2. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat pemerataan akan akses perdagangan dan jasa, peningkatan perekonomian dengan dibuka pusat-pusat perdagangan dan jasa baru.Sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. 			

Gambar 4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

Isu Pembangunan Berkelanjutan :		Pencemaran Sungai/Pantai	
Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 	<p>mutu yang ditentukan.</p>
Pengaruh kumulatif		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya. 		

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Masalah Sampah		
Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan 	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif.

	<p>sekitarnya</p> <p>4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</p>	
Pengaruh kumulatif		
<p>1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan.</p> <p>2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.</p>		

Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

Isu Pembangunan Berkelanjutan :		
Pencemaran air dan Masalah Sampah		
Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan Perikanan	<p>1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai</p>	<p>Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan).</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sektamya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 3. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar. 4. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi. 5. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. 6. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sektamya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 7. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar. 	
--	---	--

	<p>8. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sektarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai</p> <p>9. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar.</p> <p>10. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi.</p> <p>11. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</p>	
Pengaruh kumulatif		
<p>3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.</p> <p>4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.</p>		

4.3.2 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi,misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi

sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/dayaampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. Penetapan ruang terbuka hijau

2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/ limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan
3	Pengembangan Agropolitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi. 4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2. Pengembangan pertanian organik
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Pumama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Menutup/ mbatasi akses percabangan jalan TOL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.
5	Pengembangan Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kawasan industri khusus

			4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.	
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.13
Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman	1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ dayaampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/keta	1. Pembatasan/pe- larangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau	Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya

		<p>pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut).</p> <p>4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta</p>	<p>atan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan</p> <p>4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama</p>		
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah.</p> <p>2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.</p> <p>3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan</p> <p>4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah</p>	<p>1. Penetapan sawah abadi.</p> <p>2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas</p> <p>3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha</p> <p>4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah</p>	<p>1. integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan</p>	<p>Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.</p>
3	Pengembangan Agropolitan	<p>1. Dampak terhadap alih fungsi lahan</p> <p>2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air</p> <p>3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi</p>	<p>1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas</p> <p>2. penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan).</p> <p>3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.</p> <p>4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani</p>	<p>1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat</p> <p>2. pengembangan pertanian organik</p>	<p>Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.</p>

		4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif			
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Pumama	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL.	1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Pumama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5	Pengembangan Kawasan Industri	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.	1. penetapan kawasan industri khusus	Penetapan kawasan industry khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus	Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan

		kawasan dan sekitarnya.	parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat		pesisir.
--	--	-------------------------	---	--	----------

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasysarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Pumama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat
6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2010-2015 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

Pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat Badung yang adil dan makmur, lahir dan bathin, *gemah ripah loh jinawi tata tentram kertha raharja*, secara berkelanjutan dan seimbang.

Berangkat dari komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan, maka terdapat 5 (lima) hal mendasar yang menjadi latar belakang perumusan Visi dan Misi Kabupaten Badung yaitu :

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2010-2015;
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (*resources*) pembangunan Kabupaten Badung sesuai ajaran Tri Sakti.
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan.
5. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. **Memantapkan arah pembangunan Badung**, artinya bahwa pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2010-2015 menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Bali dan agenda pembangunan nasional (9 agenda Nawacita).
2. ***Tri Hita Karana***. Secara harfiah *Tri Hita Karana* berasal dari kata (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera, *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.
3. **Maju**, artinya bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi daerah dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sector pembangunan dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkeadilan.
4. **Damai**, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, distriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat.
5. **Sejahtera**, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 dimaksud, juga berpedoman pada :

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

Ideologi sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung 5 (lima) tahun kedepan adalah Pancasila dan ajaran Trisakti. Kedua Ideologi tersebut berfungsi sebagai penuntun, penggerak, pemersatu masyarakat dan pengarah tujuan pembangunan semesta berencana di Kabupaten Badung.

Selanjutnya penjabaran Trisakti dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diwujudkan dalam bentuk :

a) Berdaulat dalam Bidang Politik

Berdaulat dalam Bidang Politik diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan Bali yaitu: *wilayah, sektor, dan sumber daya manusia serta nilai-nilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Bali*; seperti sistem organisasi Desa Adat, Subak; sistem tata ruang dan perumahan tradisional Bali seperti arsitektur tradisional Bali dan *tata palemahan*.

b) Berdikari dalam Bidang Ekonomi

Berdikari dalam Bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Badung yang meliputi : pertanian dalam arti luas, industri kerajinan rakyat, UMKM, dan pariwisata berbasis budaya yang mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat Badung secara mandiri, dengan mengutamakan potensi alam dan sumber daya lokal, sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari pihak luar.

c) Berkepribadian dalam Bidang Budaya

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

- Budaya sebagai landasan membentuk karakter, mental, dan jati diri serta identitas masyarakat Badung;
- Budaya untuk mengembangkan produk seni dan kerajinan;
- Budaya sebagai landasan pembangunan ekonomi kerakyatan;
- Budaya sebagai landasan pelestarian lingkungan.

2) Landasan konstitusional : **Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

3) Landasan filosofis : ***Tri Hita Karana, paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka***, dan kearifan lokal masyarakat lainnya.

a) Pengertian ***Tri Hita Karana*** sebagaimana disebutkan diatas, tercermin dalam tata kehidupan masyarakat Hindu yang meliputi tiga unsur yaitu :

- *Parahyangan*, berasal dari kata *Hyang* yang artinya Tuhan. Jadi *Parahyangan* berarti Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja *Ida Sang Hyang Widhi Waca*/Tuhan Yang Maha Esa.
- *Pawongan*, berupa unsur dalam organisasi masyarakat adat sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia.
- *Palemahan*, yaitu berupa unsur atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan.

b) ***Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*** artinya bersatu-padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Pola itu tertanam awalnya sebagai "*dresta*", yakni tradisi adat yang berlaku sejak dahulu atau disebut *kuna dresta*, yang berlaku bagi

sekelompok orang (*loka dresta*), dan di suatu tempat tertentu (*desa dresta*).

4) Landasan operasional : **9 (Sembilan) agenda Nawacita.**

Nawacita merupakan sembilan (9) agenda perubahan menuju Indonesia Hebat terdiri atas :

- a) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
- b) Membuat Pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
- d) Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
- h) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

5) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan.

Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung yaitu :

- a. Pro-Budaya /*Pro-Culture*
- b. Pro-Pertumbuhan /*Pro-Growth*
- c. Pro-Tenaga Kerja /*Pro-Job*
- d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*
- e. Pro-Lingkungan /*Pro-Environment*
- f. Pro-Penegakan Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan /*Pro Low Enforcement*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera																					
NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Kondisi Awal (Th. 2015)	Target Kinerja Sasaran / Utama					Kondisi Akhir (Th. 2021)	Perangkat Daerah Penanggungjawab					
										Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021							
1	Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Indeks kerukunan umat beragama	Survei kerukunan umat beragama	78,45	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Survei : 1) Hubungan sosial antar kelompok agama, 2) Eksistensi keagamaan, konflik dan resolusi konflik, 3) Kebijakan pemerintah, dan 4) Potensi lokal	81,60	81,60	82,00	78,25	78,35	78,45	78,45	Bakesbangpol Disbud Balitbang					
					90%				2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	(Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang ada dikalikan seratus) + (jumlah organisasi budaya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2	Data Tidak Tersedia	48%	71%	77%		84%	90%	90%	Disbud Bapenda / Pasedaran Agung Seluruh Kecamatan	
2	Misi 2 : Mementapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survei indeks kepuasan masyarakat	82,00	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survei indeks kepuasan masyarakat	76,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00	Setda (Bagian Organisasi) Disdukcapil DPMPTSP Diskerpus DPMD Diskominfo Diskes Balitbang Seluruh Kecamatan					
3	Misi 3 : Mementapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,01 (A)	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75,89 (BB)	76,55 (BB)	76,80 (BB)	78,00 (BB)	78,40 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)	Setda (Bagian Organisasi) Inspektorat Bappeda Perangkat Daerah terkait					
					WTP				5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan.	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD Inspektorat Perangkat Daerah terkait
					75,00 (BB)							6. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Data Tidak Tersedia		B	BB	72,10 (BB)	73,50 (BB)	

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formulasi	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formulasi	Kondisi Awal (Th. 2015)	Target Kinerja Sasaran / Utama					Kondisi Akhir (Th. 2021)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021		
4	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	1. Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	81,57	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	Data Tidak Tersedia	80,30	80,80	81,17	81,37	81,57	81,57	Diskes Disdikpora DP2KBP3A RSUD Diskop UKMP
			2. Indeks kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	75,51	8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	71,50	75,49	75,50	75,51	75,51	Balitbang Perangkat Daerah terkait
			3. Tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin yang berKTP Badung dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Badung kali 100%	0,60-0,40%	9. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin yang berKTP Badung dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Badung kali 100%	2,49%	2,30-2,25%	2,25-2,15%	2,00-1,50%	1,00-0,60%	0,60-0,40%	0,60-0,40%	Dinsos Bappeda Perangkat Daerah terkait
5	Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	1. Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	7,91%	10. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	7,69%	7,73%	7,76%	7,80%	7,85%	7,91%	7,91%	Diskop UKMP Disperinaker Selda (Bag.Perekonomian)
6	Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	95%	11. Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi seluruh indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	70%	80,00%	85,00%	87,00%	90,00%	95,00%	95,00%	Satpol PP Perangkat Daerah terkait
			2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 [(X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis})]$ Dimana : Xede(1) : Xede untuk harapan hidup, Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan, I(Inc-dis) : Indeks distribusi pendapatan	76,13	12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	70%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%
						13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 [(X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis})]$ Dimana : Xede(1) : Xede untuk harapan hidup, Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan, I(Inc-dis) : Indeks distribusi pendapatan	75,48	75,61	75,74	75,87	76,00	76,13	76,13	DP2KBP3A Balitbang Perangkat Daerah terkait

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Kondisi Awal (Th. 2015)	Target Kinerja Sasaran / Utama					Kondisi Akhir (Th. 2021)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
										Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021		
7	Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks pencemaran lingkungan hidup	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan	69,40	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan	60,00	65,90	66,70	69,20	69,30	69,40	69,40	DLHK
		2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Jumlah Pemenuhan Kapasitas dibagi jumlah kebutuhan kapasitas kali 100%	100%	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	2. Indeks Pertanaman (IP)	Luas tanam dibagi luas lahan kali 100 (dalam setahun)	185,00	185,00	195,00	232,00	233,00	235,00	235,00	Disperpa Setda (Bag.SDA)
							Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Survei Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4		
8	Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	1. Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	0,310%	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	0,345%	0,335%	0,330%	0,325%	0,320%	0,310%	0,310%	Disperinaker Diskop UKMP
		2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	90,58%	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	94,50%	97,50%	98,00%	88,21%	89,38%	90,58%	90,58%	DPUPR DPKP Dishub Diskominfo Bappeda Setda (Bag.Pembangunan)
9	Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya	1. Meningkatnya ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	97,00	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	93,38%	93,50	94,00	96,00	96,50	97,00	97,00	Disperpa Diskan Perangkat Daerah terkait
		2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	Indeks daya saing destinasi pariwisata	Survei Indeks daya saing destinasi pariwisata	75%	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100%	61%	64%	66%	69%	72%	75%	75%	Dispar Perangkat Daerah terkait
						20. Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Nilai produk sektor Akomodasi dan Makan Minum dibagi total nilai PDRB kali 100%	28,16%	28,17%	28,36%	28,95%	28,97%	29,00%	29,00%	Dispar Diskominfo

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi pembangunan daerah. Strategi yang dipilih dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1.

Untuk mendukung strategi pembangunan jangka menengah daerah, maka diambil kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan Kabupaten Badung dalam jangka waktu Tahun 2016-2021 tertuang dalam Tabel 6.2.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan dari setiap misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan kiat pemerintah dalam bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum yang berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja dan program pembangunan daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun program pembangunan daerah yang merupakan arahan yang lebih jelas dan nyata dari setiap strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung.

Program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah berdasarkan misi pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Selain itu pula, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Kabupaten Badung, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD kepada Badan dan Lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah, yang dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 7, ayat (1), huruf c, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah Pemberi Hibah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Pasal 7, ayat (1) huruf c, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau untuk Badan dan Lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera		
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan toleransi hidup beragama 2 Meningkatkan pelestarian adat dan budaya 	<p>Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya 2 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2 Interpretasi hasil survei kepuasan masyarakat 3 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi 4 Memberikan kemudahan dalam berinvestasi 5 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 6 Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi Informasi 7 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di pemerintahan daerah 8 Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan 9 Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan Desa berbasis IT 10 Melaksanakan Bimtek dan pembinaan terhadap perangkat desa 11 Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang demokratis 12 Melaksanakan Bimtek PKK, BPD, LPM, Pemerintah Desa, Sistem Informasi Posyandu (SIP) 13 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat 14 Melaksanakan pembinaan dan Bimtek pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan kelompok TTG
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah 3 Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Strategi
		4 Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelitbangan
		5 Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan
		6 Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
		7 Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel
		8 Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan
		9 Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)
		10 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana
		11 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan
		12 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Diklat/Bimtek/workshop teknis fungsional
		13 Peningkatan pelayanan administrasi jabatan fungsional
		14 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi
		15 Meningkatkan Pembinaan dan Penangan Kasus-Kasus
		16 Melaksanakan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur
		17 Peningkatan pelayanan administrasi mutasi Aparatur
		18 Peningkatan pelayanan administrasi pensiun
		19 Meningkatkan pelayanan seleksi administrasi Penyesuaian ijasah
		20 Meningkatkan pelayanan Penghargaan Satya Lencana
		21 Meningkatkan pelayanan administrasi pengukuhan gelar pendidikan
		22 Meningkatkan Sistem manajemen kepegawaian
		23 Penetapan Formasi Kepegawaian
		24 Meningkatkan Pelayanan Rekrutmen CPNSD
		25 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur
		26 Pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kendaraan Dinas dan gedung kantor
		27 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
		28 Nilai Akuntabilitas kinerja yang baik
		29 Dokumen perencanaan dikirim tepat waktu

Tujuan	Sasaran	Strategi
		30 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat 31 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah 32 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah. 33 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik 34 Tersedianya Koran dan Majalah pada sekretariat Daerah 35 Meningkatkan Performance Karyawan Bagian Kehumasan 36 Meningkatkan komunikasi dengan media masa 37 Meningkatkan Kualitas SDM Kehumasan 38 Meningkatkan kualitas informasi 39 Meningkatnya informasi kegiatan yang dipublikasikan 40 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang/Jasa 41 Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sistem Pengadaan Barang / Jasa
	2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	1 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah . 3 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus dan penyimpan Barang di Masing-masing PD 4 Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi 5 Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan 6 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE 7 Peningkatan kualitas SDM dan manajemen
	3 Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	1 Meningkatkan Penerapan Pelaksanaan SPIP di Masing - masing Perangkat Daerah 2 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan 3 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal 2 Memperluas akses pelayanan kualitas layanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia 3 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat 4 Meningkatkan pengendalian penyakit Menular dan penyakit tidak menular

Tujuan	Sasaran	Strategi
	<p>2 Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat</p> <p>3 Menurunnya angka kemiskinan</p>	<p>5 Meningkatkan akses pelayanan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan</p> <p>6 Pemberdayaan masyarakat</p> <p>7 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.</p> <p>8 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.</p> <p>9 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi</p> <p>10 Memberikan beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik</p> <p>1 Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat</p> <p>1 Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia</p> <p>3 Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial</p> <p>4 Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial</p> <p>5 Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</p> <p>6 Peningkatan Kualitas RTLH dengan memfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau Program Bedah Rumah</p>
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	<p>1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing UMKM</p> <p>2 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi</p> <p>3 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri</p>
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<p>1 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada</p> <p>2 Terwujudnya Pengarusutamaan Gender</p>	<p>1 Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada</p> <p>2 Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada</p> <p>3 Meningkatnya pengarusutamaan gender</p>	<p>1 Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada</p> <p>2 Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada</p> <p>1 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>2 Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada</p> <p>1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan</p>
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana		
1 Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<p>1 Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup</p> <p>2 Mengintensifkan pola tanam</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
2 Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	2 Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	1 Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana 2 Pemenuhan SPM bidang Perumahan 3 Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada korban bencana
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	1 Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2 Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor 3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan 4 Mengembangkan potensi kewirausahaan 5 Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri 6 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 7 Meningkatnya kualitas SDM pariwisata 8 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi
2 Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	2 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	1 Membangun, meningkatkan dan mempreservasi jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, Mengembangkan Sumber Daya Air dan sanitasi melalui Peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian 3 Meningkatkan kelancaran ketertiban dan keselamatan lalu lintas 4 Pembangunan sarana Prasarana dasar perumahan dan permukiman 5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan. 6 Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung. 7 Pembangunan yang seimbang antar-wilayah. 8 Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah 9 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1 Meningkatnya ketersediaan pangan	1 Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	1 Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian 2 Memetakan potensi pertanian ,perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung 3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi
<p>2 Meningkatkan daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan</p>	<p>2 Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing</p> <p>3 Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB</p>	<p>4 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian</p> <p>5 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer)</p> <p>6 Mendorong terserapnya produk pertanian kabupaten badung oleh sektor pariwisata.</p> <p>7 Memantapkan ketahanan pangan keluarga</p> <p>8 Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan</p> <p>9 Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik</p> <p>10 Pengembangan teknologi peternakan</p> <p>11 Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah</p> <p>12 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung</p> <p>13 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan</p> <p>1 Melaksanakan penataan kawasan dan DTW</p> <p>2 Menetapkan kelembagaan pengelola DTW</p> <p>1 Meningkatkan kualitas industri pariwisata</p> <p>4 Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi</p>

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera						
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama						
Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1 Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat	Memperkokoh rasa kebangsaan serta adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat.	√	√	√	√	√
2 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya	Merevitalisasi Adat dan Budaya	√	√	√	√	√
3 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya	Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal	√	√	√	√	√
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi						
Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	√	√	√	√	√
	2 Meningkatnya Pelayanan Publik yang mudah, cepat dan aman	√	√	√	√	√
2 Interpretasi hasil survei kepuasan masyarakat	Interpretasi hasil rata-rata nilai SKM perangkat daerah	√	√	√	√	√
3 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi	Mempercepat proses pelayanan kearsipan dan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi	√	√	√	√	√
4 Memberikan kemudahan dalam berinvestasi	1 Meningkatkan akses informasi peluang dan potensi investasi	√	√	√	√	√
	2 Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi	√	√	√	√	√
5 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	1 Menyederhanakan Persyaratan dan mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	√	√	√	√	√
	2 Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dan Non Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	√	√	√	√	√
6 Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi Informasi	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
7 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di pemerintahan daerah	Mengatur tata kelola persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi serta kualifikasi SDM sandi	√	√	√	√	√
8 Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan	Meningkatkan kualitas dokumen statistik kabupaten badung dengan menyajikan data statistik yang akurat dan transparan	√	√	√	√	√
9 Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan Desa berbasis IT	Fasilitasi penggunaan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√
10 Melaksanakan Bimtek dan pembinaan terhadap perangkat desa	Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
11 Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang demokratis	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel	√	√	√	√	√
12 Melaksanakan Bimtek PKK, BPD, LPM, Pemerintah Desa, Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Fasilitasi pembinaan dan pelatihan Lembaga Desa	√	√	√	√	√
13 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat	Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan	√	√	√	√	√
14 Melaksanakan pembinaan dan Bimtek pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan kelompok TTG	Mendayagunakan pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan Kelompok TTG	√	√	√	√	√

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Harmonisasi antar Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	√	√	√	√	√
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	√	√	√	√	√
2 Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah	√	√	√	√	√
3 Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.	√	√	√	√	√
4 Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelitbangan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di bidang kelitbangan	√	√	√	√	√
5 Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
6 Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Fasilitasi penguatan dan pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
7 Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan	√	√	√	√	√
8 Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan	Peningkatan kinerja aparatur di Kecamatan Kuta Selatan	√	√	√	√	√
9 Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)	Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	√	√	√	√	√
10 Meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana	√	√	√	√	√
11 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan	1 Dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNSD	√	√	√	√	√
	2 Dilaksanakan Diklat Kepemimpinan	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
12 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Diklat/Bimtek/workshop teknis fungsional	1 Melaksanakan Bimtek Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	√	√	√	√	√
	2 Melaksanakan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	√	√	√	√	√
	3 Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√
	4 Melaksanakan sosialisasi Penilaian Kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja)	√	√	√	√	√
	5 Melaksanakan Workshop Pengukuran Indek profesional ASN	√	√	√	√	√
	6 Melaksanakan diklat revolusi mental dalam membangun karakter pemimpin yang melayani	√	√	√	√	√
	7 Melaksanakan diklat/bimtek/workshop teknis Fungsional sesuai kebutuhan Perangkat daerah	√	√	√	√	√
	8 Melaksanakan Bimtek tingkat menengah pengadaan barang/jasa pemerintah	√	√	√	√	√
	9 Melaksanakan workshop analisa kebutuhan diklat	√	√	√	√	√
	10 Melaksanakan Bimtek pengelolaan informasi publik	√	√	√	√	√
	11 Melaksanakan Diklat dasar POL-PP	√	√	√	√	√
	12 Melaksanakan penilaian Potensi dan kompotensi ASN	√	√	√	√	√
	13 Pelayanan administrasi ijin belajar dan atau tugas belajar	√	√	√	√	√
13 Peningkatan pelayanan administrasi jabatan fungsional	Usulan kepangkatan jabatan fungsional	√	√	√	√	√
14 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	Pengisian jabatan dengan melakukan seleksi pejabat oleh Tim Pansel dan Bupati	√	√	√	√	√
15 Meningkatkan Pembinaan dan Penangan Kasus-Kasus	Memberikan pembinaan ke OPD dan sekolah untuk mengurangi tindakan melanggar disiplin	√	√	√	√	√
16 Melaksanakan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur	Melakukan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur	√	√	√	√	√
17 Peningkatan pelayanan administrasi mutasi Aparatur	Usulan naik pangkat dengan paper list	√	√	√	√	√
18 Peningkatan pelayanan administrasi pensiun	Usulan administrasi pensiun dengan sistem paper list	√	√	√	√	√
19 Meningkatkan pelayanan seleksi administrasi Penyesuaian ijasah	Melakukan pengembangan karier aparatur	√	√	√	√	√
20 Meningkatkan pelayanan Penghargaan Satya Lencana	Melakukan jemput bola terhadap penghargaan yang di berikan oleh Presiden	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
21 Meningkatkan pelayanan administrasi penguahan gelar pendidikan	Melakukan pengembangan karier aparatur	√	√	√	√	√
	Melakukan jemput bola terhadap penghargaan yang di berikan oleh Presiden	√	√	√	√	√
	Melakukan pengembangan karier aparatur	√	√	√	√	√
22 Meningkatkan Sistem menejemen kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian berbasis web	√	√	√	√	√
23 Penetapan Formasi Kepegawaian	Dokumen penetapan Formasi kepegawain dilaporkan MENPAN RB	√	√	√	√	√
24 Meningkatkan Pelayanan Rekrutmen CPNSD	Rekrutmen CPNSD dengan sistem Computer Assesment Tes (CAT)	√	√	√	√	√
25 Peningkatan pelayanan administasi perkantoran dan kinerja aparatur	Tertib administrasi kepegawaian	√	√	√	√	√
26 Pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kendaraan Dinas dan gedung kantor	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	√	√	√	√	√
27 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Peningkatan kualitas perlengkapan dan peralatan kantor	√	√	√	√	√
28 Nilai Akuntabilitas kinerja yang baik	Penyusunan AKIP	√	√	√	√	√
29 Dokumen perencanaan dikirim tepat waktu	Penyusunan Renstra, Renja, RKA	√	√	√	√	√
30 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat	Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan	√	√	√	√	√
31 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah	Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah	√	√	√	√	√
32 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.	1 Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah	√	√	√	√	√
	2 Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah	√	√	√	√	√
33 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik	1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek	√	√	√	√	√
	2 Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	√
34 Tersedianya Koran dan Majalah pada sekretariat Daerah	Pendistribusian Koran dan Majalah tepat waktu	√	√	√	√	√
35 Meningkatkan Performance Karyawan Bagian Kehumasan	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pelaksanaan Tugas Kehumasan	√	√	√	√	√
36 Meningkatkan komonikasi dengan media masa	Terjalannya komonikasi dan kerajama dengan media masa	√	√	√	√	√
37 Meningkatkan Kualitas SDM Kehumasan	Meningkatnya Kemampuan SDM di Bidang Kehumasan	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
38 Meningkatkan kualitas informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	√	√	√	√	√
39 Meningkatnya informasi kegiatan yang dipublikasikan	Meningkatnya informasi dan kegiatan yang dipublikasikan	√	√	√	√	√
40 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	√	√	√	√	√
41 Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sistem Pengadaan Barang / Jasa	Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa	√	√	√	√	√
42 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).	√	√	√	√	√
	2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola Keuangan dan Aset Daerah	√	√	√	√	√
43 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit kerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku	√	√	√	√	√
44 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus dan penyimpan Barang di Masing-masing PD	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur	√	√	√	√	√
45 Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi	Menfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD	√	√	√	√	√
46 Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	√	√	√	√	√
47 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE	Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan	√	√	√	√	√
48 Peningkatan kualitas SDM dan manajemen	Pembinaan dan pelatihan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik	√	√	√	√	√
49 Meningkatkan Penerapan Pelaksanaan SPIP di Masing - masing Perangkat Daerah	1 Menumbuhkan Pemahaman SPIP pada setiap Aparatur di Masing - masing Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
	2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola dan penerapan sistem pengawasan	√	√	√	√	√
50 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal	√	√	√	√	√

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal	1 Menuntaskan dan memantapkan program wajib belajar 12 tahun	√	√	√	√	√
	2 Memantapkan tata kelola pendidikan	√	√	√	√	√
	3 Memantapkan kemampuan fisik dan mental peserta didik	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
2 Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care). dengan melibatkan peran serta masyarakat	√	√	√	√	√
3 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat	1 Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi	√	√	√	√	√
	2 Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing	√	√	√	√	√
4 Meningkatkan pengendalian penyakit Menular dan penyakit tidak menular	Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular	√	√	√	√	√
6 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan	1 Peningkatan Kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan	√	√	√	√	√
	2 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta	√	√	√	√	√
	3 Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√
	4 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.	√	√	√	√	√
	5 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	√	√	√	√	√
7 Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	√	√	√	√	√
8 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.	Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.	√	√	√	√	√
9 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.	Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).	√	√	√	√	√
10 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi	√	√	√	√	√
	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing	√	√	√	√	√
11 Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebahagiaan hidup dan sarana prasarana pendidikan	√	√	√	√	√
12 Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
13 Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia	Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
14 Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial	Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya	√	√	√	√	√
15 Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
16 Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
17 Peningkatan Kualitas RTLH dengan memfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau Program Bedah Rumah	2 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
	1 Alokasi Anggaran Bedah Rumah dan Peningkatan Kualitas menjadi Rumah Sehat	√	√	√	√	√
	2 Pengendalian titik- titik permukiman kumuh	√	√	√	√	√

Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing UMKM	Peningkatan kualitas UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing	√	√	√	√	√
2 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing	√	√	√	√	√
3 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri	Membuka akses jaringan kerja sama	√	√	√	√	√

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada	Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Perda dan Perkada	√	√	√	√	√
2 Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	1 Mengefektifkan forum-forum masyarakat serta melaksanakan sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	√	√	√	√	√
	2 Penegakan Hukum	√	√	√	√	√
3 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	√	√	√	√	√
4 Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada	1 Mengefektifkan sosialisasi Perda dan Perkada	√	√	√	√	√
	2 Penegakan Hukum	√	√	√	√	√
5 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas hidup perempuan	√	√	√	√	√

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1 Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	1 Meningkatkan Indeks kualitas air, udara, dan Indeks Tutupan hutan/Lahan	√	√	√	√	√
	2 Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak	√	√	√	√	√
2 Mengintensifkan pola tanam	Memantapkan program intensifikasi	√	√	√	√	√
3 Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan	√	√	√	√	√
	2 Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
4 Pemenuhan SPM bidang Perumahan	3 Peningkatan kuantitas dan kualitas TRC yang memadai.	√	√	√	√	√
	4 Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat	√	√	√	√	√
	5 Penanganan pasca bencana yang komprehensif	√	√	√	√	√
	6 Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	√	√	√	√	√
	7 Peningkatan SDM Rumah Sakit	√	√	√	√	√
5 Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada korban bencana	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	√	√	√	√	√
	Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah	√	√	√	√	√

Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	√	√	√	√	√
2 Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor	1 Pelaksanaan Akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan jumlah dan kualitas assesor	√	√	√	√	√
3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	Optimalisasi Pembinaan hubungan industrial berorientasi pada Tripartit	√	√	√	√	√
4 Mengembangkan potensi kewirausahaan	1 Mengintensifkan pelatihan pencari kerja dan tenaga kerja	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing	√	√	√	√	√
	3 Mengintensifkan pelatihan kewirahusahaan	√	√	√	√	√
5 Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	Membuka akses kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	√	√	√	√	√
6 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah	√	√	√	√	√
7 Meningkatnya kualitas SDM pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata	√	√	√	√	√
8 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi	√	√	√	√	√
9 Membangun, meningkatkan dan mempreservasi jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, Mengembangkan Sumber Daya Air dan sanitasi melalui Peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian	1 Pembangunan infrastruktur adalah mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan mutu infrastruktur	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan					
	3 Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan	√	√	√	√	√
	4 Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure).	√	√	√	√	√
10 Meningkatkan kelancaran ketertiban dan keselamatan lalu lintas	Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas	√	√	√	√	√
12 Pembangunan sarana Prasarana dasar perumahan dan permukiman	Mewujudkan Lingkungan Yang sehat dan Nyaman didukung PSU yang memadai	√	√	√	√	√
13 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan.	Mengembangkan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
14 Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung.	Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan	√	√	√	√	√
15 Pembangunan yang seimbang antar-wilayah.	Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan	√	√	√	√	√
16 Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah	Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure)	√	√	√	√	√
17 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE	Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan	√	√	√	√	√

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1 Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian	Mengintensifkan penelitian dan pengembangan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
2 Memetakan potensi pertanian ,perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung	Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	√	√	√	√	√
3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan	Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah	√	√	√	√	√
4 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian	Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	√	√	√	√	√
5 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer)	Memperkuat ekonomi subak sebagai unit produksi, unit agribisnis dan agroindustri	√	√	√	√	√
6 Mendorong terserapnya produk pertanian kabupaten badung oleh sektor pariwisata.	Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor Pariwisata.	√	√	√	√	√
7 Memantapkan ketahanan pangan keluarga	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pekarangan. dan lahan tidak produktif untuk mendukung pangan keluarga	√	√	√	√	√
8 Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu	Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu	√	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
pangan	pangan					
9 Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik	Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming)	√	√	√	√	√
10 Pengembangan teknologi peternakan	Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	√	√	√	√	√
11 Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah	Memetakan potensi peternakan di Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
12 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung	Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah	√	√	√	√	√
13 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan	1 Meningkatkan produksi perikanan	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan	√	√	√	√	√
Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
14 Melaksanakan penataan kawasan dan DTW	1 Penyusunan database DTW	√	√	√	√	√
	2 Pembangunan daya tarik wisata baru	√	√	√	√	√
	3 Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana masing - masing DTW	√	√	√	√	√
15 Menetapkan kelembagaan pengelola DTW	1 Perbaikan manajemen pengelolaan DTW	√	√	√	√	√
	2 Peningkatan SDM pengelola DTW	√	√	√	√	√
16 Meningkatkan kualitas industri pariwisata	1 Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata	√	√	√	√	√
	2 Kajian dan penyusunan database industri pariwisata berbasis IT	√	√	√	√	√
	3 Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan	√	√	√	√	√
	4 Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	√	√	√	√	√
17 Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan tata kelola jaringan pada kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	√	√	√	√	√

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Badung

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	MISI 1 : MEMPERKOKOH KERUKUNAN HIDUP BERMASYARAKAT DALAM JALINAN KERAGAMAN ADAT, BUDAYA DAN AGAMA				204.391,40		269.201,38		231.254,56		306.559,78		295.581,74		1.306.988,86		
	TUJUAN 1 : TERWUJUDNYA KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA SERTA PENGUATAN KEHIDUPAN ADAT DAN BUDAYA				204.391,40		269.201,38		231.254,56		306.559,78		295.581,74		1.306.988,86		
	SASARAN 1 : MENINGKATNYA TOLERANSI HIDUP BERAGAMA				107.795,00		136.122,40		145.211,00		171.704,52		164.764,52		725.597,44		
01	05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.514,13		5.277,20		2.688,17		4.488,82		4.488,82		21.457,15		
	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.514,13		5.277,20		2.688,17		4.488,82		4.488,82		21.457,15		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi umum tepat waktu	15 Kegiatan	100 %	966,04	100 %	804,35	100 %	588,48	100 %	572,87	100 %	572,87	100 %	3.504,62	BAKESBANGPOL
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pengelolaan Barang Milik daerah dengan Baik	8 Kegiatan	100 %	318,80	100 %	418,50	100 %	162,50	100 %	286,56	100 %	286,56	100 %	1.472,93	BAKESBANGPOL
	06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Serapan Anggaran	100 %	100 %	180,55	100 %	199,60	100 %	215,09	100 %	312,84	100 %	312,84	100 %	1.220,91	BAKESBANGPOL
	06	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja Prangkat Daerah dengan renstra	100 %	-	-	-	-	-	100%	8,88	100%	8,88	100 %	17,76	BAKESBANGPOL	
	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	40 %	100 %	1.508,57	100 %	1.875,95	100 %	1.301,11	100 %	1.521,84	100 %	1.521,84	100 %	7.729,32	BAKESBANGPOL
	20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat	40 %	100 %	161,50	100 %	125,79	-	-	100 %	92,87	100 %	92,87	100 %	473,03	BAKESBANGPOL
	21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Persentase konflik politik yang ditangani	1 Kegiatan	100 %	213,82	100 %	546,05	100 %	330,97	100 %	299,44	100 %	299,44	100 %	1.689,72	BAKESBANGPOL
	37	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase Komponen masyarakat memahami ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	7 Kegiatan	100 %	1.164,84	100 %	1.306,95	100 %	90,03	100 %	1.393,52	100 %	1.393,52	100 %	5.348,86	BAKESBANGPOL
02	16	URUSAN KEBUDAYAAN			103.280,87		130.458,11		142.193,14		166.893,48		159.953,48		702.779,07		
	01	DINAS KEBUDAYAAN			103.280,87		130.458,11		142.193,14		166.893,48		159.953,48		702.779,07		
		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	- Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	108 Upacara Keagamaan	114 Upacara Keagamaan	103.280,874	114 Upacara Keagamaan	130.458,107	137 Upacara Keagamaan	142.193,14	122 Upacara Keagamaan	166.893,48	122 Upacara Keagamaan	159.953,48	122 Upacara Keagamaan	702.779,07	DISBUD
			- Desa adat yang dibina	10 Desa Adat	40 Desa Adat		40 Desa Adat	42 Desa Adat									
			- Kehadiran tokoh agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan	100 %	100,000 %		100 %										
			- Karya seni yang direvitalisasi	98 Karya Seni	104 Karya Seni		110 Karya Seni	114 Karya Seni		118 Karya Seni		123 Karya Seni		123 Karya Seni			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
04	06	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			-		387,09		329,69		322,22		322,22		1.361,22		
	01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			-		387,09		329,69		322,22		322,22		1.361,22		
	01	PROGRAM PENINGKATAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Terlaksananya survey kerukunan umat beragama	data tidak tersedia	-	1 dokumen	387,09	1 dokumen	329,69	1 dokumen	322,22	1 dokumen	322,22	1 dokumen	1.361,22	BALITBANG	
		SASARAN 2 : MENINGKATNYA PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA					96.596,40		133.078,98		86.043,56		134.855,26		130.817,22	581.391,42	
02	16	URUSAN KEBUDAYAAN					53.146,28		76.778,13		50.274,94		86.682,25		82.832,98	349.714,58	
	01	DINAS KEBUDAYAAN					53.146,28		76.778,13		50.274,94		86.682,25		82.832,98	349.714,58	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.496,14	100 %	1.955,97	100 %	1.682,33	100 %	1.626,29	100 %	1.647,13	100 %	9.407,86	DISBUD
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	758,32	100 %	1.350,38	100 %	454,38	100 %	452,88	100 %	452,88	100 %	3.468,85	DISBUD
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	375,36	100 %	375,39	100 %	519,63	100 %	663,28	100 %	663,28	100 %	2.596,94	DISBUD
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 %	100 %	10,01	100 %	10,19	100 %	10,09	100 %	11,65	100 %	11,65	100 %	53,59	DISBUD
	05	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	- Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan - Desa adat yang dibina - Kehadiran tokoh agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan - Karya seni yang direvitalisasi	108 upacara keagamaan 10 desa adat 100 % 98 karya seni	114 upacara keagamaan 40 desa adat 100 % 104 sekaa	47.836 40 100 110	114 upacara keagamaan 40 desa adat 100 % 110 sekaa	70.974,61 42 100 114 sekaa	137 upacara keagamaan 42 desa adat 100 % 118 sekaa	45.136,96 42 100 % 118 sekaa	122 upacara keagamaan 40 desa adat 100 % 123 sekaa	80.999,55 40 100 % 123 sekaa	122 upacara keagamaan 40 desa adat 100 % 123 sekaa	77.169,96 40 100 % 123 sekaa	122 upacara keagamaan 40 desa adat 100 % 123 sekaa	322.117,26 40 100 % 123 sekaa	DISBUD
	06	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	- Lontar yang digitalisasi dan direproduksi - Situs cagar budaya yang teridentifikasi	70 cakep 52 situs	90 cakep 0 situs	1.670,27 0	110 cakep 54 situs	2.111,59 54	125 cakep 54 situs	2.471,54 56	140 cakep 56 situs	2.928,60 58 situs	150 cakep 58 situs	2.888,09 58 situs	150 cakep 58 situs	12.070,09 58 situs	DISBUD
01	17	URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			0,00		0,00		3.156,55		3.952,50		3.763,73		10.872,78		
	03	KECAMATAN KUTA			-		-		541,20		660,30		660,30		1.861,80		
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	-	-	-	-	12 jenis	513,18	4 kegiatan	630,12	12 jenis	630,12	12 jenis	1.773,43	KECAMATAN KUTA
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	-	-	-	-	2 jenis	28,02	1 kegiatan	30,18	2 jenis	30,18	2 jenis	88,37	KECAMATAN KUTA
	04	KECAMATAN KUTA UTARA			-		-		499,21		527,64		430,22		1.457,07		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	05	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	4 kegiatan	-	-	-	4 kegiatan	476,21	4 kegiatan	504,52	4 kegiatan	407,10	20 kegiatan	1.387,82	KECAMATAN KUTA UTARA	
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	jenis pengelolaan keragaman budaya	1 jenis	-	-	-	1 jenis	23,00	1 jenis	23,12	1 jenis	23,12	9 jenis	69,25	KECAMATAN KUTA UTARA	
	04	KECAMATAN KUTA SELATAN			-	-	-		571,81		574,23		574,23		1.720,28		
	01	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Kegiatan Pengembangan Budaya	11 jenis	-	-	-	4 jenis	507,86	3 jenis	516,46	3 jenis	516,46	11 jenis	1.540,77	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	02	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	-	-	-	3 jenis	63,95	1 jenis	57,78	1 jenis	57,78	3 jenis	179,51	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	07	KECAMATAN ABIANSEMAL			0,00		0,00		579,66		638,00		546,66		1.764,32		
	08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	2 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	579,66	2 Kegiatan	638,00	2 Kegiatan	546,66	2 Kegiatan	1.764,32	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah Pengelolaan Keraqaman keraqaman budaya	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	0,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	15	KECAMATAN MENGWI			0,00		0,00		517,89		651,16		651,16		1.820,20		
	8	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Jumlah Kegiatan Pengembangan di Kecamatan Mengwi	100 %	-	-	-	100 %	517,89	100 %	651,16	100 %	651,16	100 %	1.820,20	KECAMATAN MENGWI	
	83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah kegiatan Pengelolaan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN MENGWI	
	17	KECAMATAN PETANG			0,00		0,00		446,79		901,17		901,17		2.249,12		
	04	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Terselenggaranya festival budaya pertanian dan pawai pestival budaya	2 kegiatan	-	-	-	2 kegiatan	417,22	5 kegiatan	870,36	2 kegiatan	870,36	5 kegiatan	2.157,94	KECAMATAN PETANG	
	10	PROGRAM PENGELOLAAN KERGAMAN BUDAYA	Jumlah kegiatan dalam HUT kota mangupura	1 kali	-	-	-	1 kali	29,57	1 kali	30,81	1 kali	30,81	1 kali	91,19	KECAMATAN PETANG	
	04	FUNGSI KEUANGAN			43.450,12		56.300,85		32.612,07		44.220,51		44.220,51		220.804,06		
	01	BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG			43.450,12		56.300,85		32.612,07		44.220,51		44.220,51		220.804,06		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	3.848,68	12 bulan	4.887,05	12 bulan	3.657,28	12 bulan	3.875,63	12 bulan	3.875,63	12 bulan	20.144,28	BAPENDA
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	11.974,84	12 bulan	5.089,00	12 bulan	1.963,23	12 bulan	782,93	12 bulan	782,93	12 bulan	20.592,91	BAPENDA
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Waktu pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	12 bulan	308,81	12 bulan	281,25	12 bulan	478,56	12 bulan	677,09	12 bulan	677,09	12 bulan	2.422,80	BAPENDA
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RENJA,RKA)	Persentase kesesuaian antara Renja pada denqan RKPd	12 bulan	12 bulan	10,98	12 bulan	9,00	12 bulan	10,00	12 bulan	8,57	12 bulan	8,57	12 bulan	47,11	BAPENDA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	05	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terlaksananya pelestarian lembaga subak di kabupaten Badung	214 subak	214 subak	13.537,14	214 subak	17.658,63	214 subak	17.551,77	214 subak	28.386,92	214 subak	28.386,92	214 subak	105.521,37	BAPENDA
	06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	13.769,67	10 Jenis Pajak	28.375,93	10 Jenis Pajak	8.951,23	10 Jenis Pajak	10.489,38	10 Jenis Pajak	10.489,38	10 Jenis Pajak	72.075,60	BAPENDA
		MISI 2 : MEMANTAPKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI			116.389,62		203.707,10		139.420,20		77.283,89		69.213,73		606.039,68		
		TUJUAN 2 : TERWUJUDNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK			116.389,62		203.707,10		139.420,20		77.283,89		69.213,73		606.039,68		
		SASARAN 3 : MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK			116.389,62		203.707,10		139.420,20		77.283,89		69.213,73		606.039,68		
01	02	URUSAN KESEHATAN			80.143,04		138.484,86		97.946,09		38.512,92		36.164,64		391.251,56		
		DINAS KESEHATAN			80.143,04		138.484,86		97.946,09		38.512,92		36.164,64		391.251,56		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	10.973,64	12 Bulan	15.296,15	12 Bulan	11.294,46	100 %	12.631,07	100 %	12.631,07	100 %	62.826,38	DISKES
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	18.718,72	100 %	20.606,55	100 %	2.449,54	100 %	2.680,73	100 %	2.680,73	100 %	47.136,28	DISKES
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	614,52	100 %	679,85	100 %	1.035,79	100 %	2.402,58	100 %	1.550,94	100 %	6.283,69	DISKES
	04	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya, utama dan paripurna	92 %	92 %	1.797,85	92 %	57.329,52	92 %	55.450,63	100 %	3.675,55	100 %	3.674,87	100 %	121.928,42	DISKES
	05	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan	data tidak tersedia	8696 Penduduk	37.940,07	8877 Penduduk	23.495,82	8759 Penduduk	4.186,41	8643 Penduduk	8.647,20	8531 Penduduk	7.151,24	8531 Penduduk	81.420,74	DISKES
	06	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Tenaga Kesehatan	3 hari	3 hari	41,90	3 hari	51,56	3 hari	65,51	3 hari	63,95	3 hari	63,95	3 hari	286,88	DISKES
	07	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100 %	100 %	9.806,37	100 %	20.377,12	100 %	23.036,79	100 %	6.902,58	100 %	6.902,58	100 %	67.025,43	DISKES
	08	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100 %	100 %	249,98	100 %	648,29	100 %	426,97	100 %	1.509,25	100 %	1.509,25	100 %	4.343,75	DISKES
02	06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			9.309,06		13.598,12		8.509,18		8.302,04		8.302,04		48.020,44		
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			9.309,06		13.598,12		8.509,18		8.302,04		8.302,04		48.020,44		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.887,09	100 %	2.187,54	100 %	1.816,40	100 %	1.879,79	100 %	1.879,79	100 %	9.650,61	DISDUKCAPIL
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	2.593,43	100 %	4.572,97	100 %	606,47	100 %	969,50	100 %	969,50	100 %	9.711,88	DISDUKCAPIL

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	185.34	100 %	210.66	100 %	239.58	100 %	335.58	100 %	335.58	100 %	1.306.73	DISDUKCAPIL
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	9,75	3 dokumen	9,75	3 dokumen	49,50	DISDUKCAPIL
	05	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase penduduk yang memiliki kelenqkapan	92,02 %	4.633.20	94 %	6.616.94	95 %	5.836.72	97 %	5.107.43	98 %	5.107.43	98 %	27.301.72	DISDUKCAPIL
02	07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.626,73		19.536,23		7.729,24		4.239,09		4.239,09		39.370,36	
	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.626,73		19.536,23		7.729,24		4.239,09		4.239,09		39.370,36	
	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 %	340.73	100 %	1.542.80	100 %	153.64	100 %	157.54	100 %	157.54	100 %	2.352.25	DPMD
	16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	32 pasar desa	469.34	32 pasar desa	9.122.64	32 pasar desa	3.946.48	32 pasar desa	185.26	32 pasar desa	185.26	32 pasar desa	13.908.98	DPMD
				13 Bumdesa		42 Bumdesa		43 Bumdesa		44 Bumdesa		45 Bumdesa		46 Bumdesa		
	17	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	62 Desa/Kel, 6 Kec.	1.000.01	62 Desa/Kel, 6 Kec.	2.281.10	62 Desa/Kel, 6 Kec.	1.168.78	62 Desa/Kel, 6 Kec.	1.378.68	62 Desa/Kel, 6 Kec.	1.378.68	62 Desa/Kel, 6 Kec.	7.207.26	DPMD
	18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	46 desa	1.203,41	46 desa	3.932,58	46 desa	1.842,20	46 desa	1.930,48	46 desa	1.930,48	46 desa	10.839,14	DPMD
	19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 ds/kel.	613,24	62 ds/kel.	2.630,16	62 ds/kel.	618,14	62 ds/kel.	587,13	62 ds/kel.	587,13	62 ds/kel.	5.035,80	DPMD
	20	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan beras	Data tidak tersedia	-	-	8.896 KPM	26,94	-	-	-	-	-	8.896 KPM	26,94	DPMD
02	10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.062,62		7.689,33		4.037,68		3.846,28		3.846,28		27.482,18	
	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.062,62		7.689,33		4.037,68		3.846,28		3.846,28		27.482,18	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	data tidak tersedia	5.891.39	100 %	2.004.69	100 %	2.251.67	100 %	1.801.74	100 %	1.801.74	100 %	13.751.24	DISKOMINFO
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	data tidak tersedia	1.850,29	100 %	5.072,76	100 %	1.302,58	100 %	1.322,47	100 %	1.322,47	100 %	10.870,56	DISKOMINFO
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	data tidak tersedia	310,95	100 %	566,94	100 %	456,23	100 %	611,57	100 %	611,57	100 %	2.557,26	DISKOMINFO
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan	data tidak tersedia	10,00	100 %	10,00	100 %	3,75	100 %	10,11	100 %	10,11	100 %	43,96	DISKOMINFO
	05	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DALAM PENYERAPAN INFORMASI MEDIA	Meningkatnya kualitas pemahaman dalam penyerapan informasi media	data tidak tersedia	-	100 %	34,92	100 %	23,45	100 %	100,39	100 %	100,39	100 %	259,16	DISKOMINFO
02	14	URUSAN PERSANDIAN			0,00		379,86		132,75		353,01		353,01		1.218,62	
	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			0,00		379,86		132,75		353,01		353,01		1.218,62	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH KEGIATAN	Prosentase pelaksanaan tata kelola persandian daerah	data tidak tersedia	-	-	100 %	379,86	100 %	132,75	100 %	353,01	100 %	353,01	100 %	1.218,62	DISKOMINFO
15		URUSAN STATISTIK			0,00		172,47		71,22		120,48		120,48		484,65		
	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			0,00		172,47		71,22		120,48		120,48		484,65		
	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Prosentase Tersedianya Data Informasi/Statistik Daerah	data tidak tersedia	100 %	-	100 %	172,47	100 %	71,22	100 %	120,48	100 %	120,48	100 %	484,65	DISKOMINFO
12		URUSAN PENANAMAN MODAL			5.088,68		13.011,28		5.884,61		8.934,56		8.134,56		41.053,70		
	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			5.088,68		13.011,28		5.884,61		8.934,56		8.134,56		41.053,70		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.551,21	12 bulan	2.502,16	12 bulan	2.200,26	12 bulan	2.537,35	12 bulan	2.537,35	12 bulan	11.328,32	DPMPTSP
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	1.369,62	12 bulan	5.342,18	12 bulan	541,08	12 bulan	1.759,73	12 bulan	959,73	12 bulan	9.972,32	DPMPTSP
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	12 bulan	194,01	12 bulan	400,84	12 bulan	397,86	12 bulan	551,35	12 bulan	551,35	12 bulan	2.095,42	DPMPTSP
	04	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENSTRA, RENJA, RKA)	Cakupan Dokumen Perencanaan	12 bulan	12 bulan	10,99	12 bulan	9,99	12 bulan	9,98	12 bulan	10,01	12 bulan	10,01	12 bulan	50,99	DPMPTSP
	05	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Cakupan Penyebaran Informasi Penanaman Modal	Data tidak tersedia	6 kecamatan	348,99	6 kecamatan	474,94	6 kecamatan	2,84	6 kecamatan	243,08	6 kecamatan	243,08	6 kecamatan	1.312,92	DPMPTSP
	06	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Persentase Realisasi Investasi	Data tidak tersedia	82 %	193,57	6 kecamatan	265,15	6 kecamatan	76,70	90%	205,46	95%	205,46	95%	946,33	DPMPTSP
	07	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Cakupan Kemitraan UMKM	Data tidak tersedia	6 kecamatan	7,69	6 kecamatan	28,30	6 kecamatan	4,81	6 kecamatan	101,57	6 kecamatan	101,57	6 kecamatan	243,95	DPMPTSP
	08	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	Persentase Izin Terbit Tepat Waktu	88%	91 %	1.125,48	6 kecamatan	3.084,99	6 kecamatan	1.928,61	96%	2.745,81	98%	2.745,81	98%	11.630,70	DPMPTSP
	09	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang berbasis teknologi Informasi	Data tidak tersedia	33 %	205,80	12 bulan	518,53	12 bulan	219,92	77 %	493,95	88%	493,95	88%	1.932,15	DPMPTSP
	10	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI	Cakupan data potensi investasi	Data tidak tersedia	6 kecamatan	10,45	6 kecamatan	359,55	6 kecamatan	477,45	6 kecamatan	260,73	6 kecamatan	260,73	6 kecamatan	1.368,90	DPMPTSP
	11	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase Pengaduan yang tertangani	12 bulan	100 %	70,86	6 kecamatan	24,66	6 kecamatan	25,11	100 %	25,53	100%	25,53	100%	171,68	DPMPTSP
02	17	URUSAN PERPUSTAKAAN			865,98		5.936,22		0,00		0,00		0,00		6.802,20		
	01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			865,98		5.936,22		0,00		0,00		0,00		6.802,20		
	01	PROGRAM PELAYANAN	Cakupan layanan	100%	-	-	100	1.209,77	-	-	-	-	-	-	100	1.209,77	DISKERPUS

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	02	ADMINISTRASI PERKANTORAN	administrasi perkantoran			%								%			
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	-	100 %	2.421,47	-	-	-	-	-	-	100 %	2.421,47	DISKERPUS	
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	98 orang	-	122 orang	140,11	-	-	-	-	-	-	122 orang	140,11	DISKERPUS	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Dokumen	-	4 Dokumen	291,54	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	291,54	DISKERPUS	
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan	3 Dokumen	-	3 Dokumen	10,00	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	10,00	DISKERPUS	
	19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 Perpustakaan	0,00	DISKERPUS	
	20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	12305 Orang	5100 Orang	865,98	11000 Orang	1.863,33	-	-	-	-	-	16.100 Orang	2.729,31	DISKERPUS	
	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah pelayanan informasi	5 Materi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKERPUS	
02	18	URUSAN KEARSIPAN			7.834,12		2.569,85		3.763,32		2.494,41		2.494,41		19.181,25		
	01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			7.834,12		2.569,85		3.763,32		2.494,41		2.494,41		19.181,25		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.610,07	-	100 %	792,57	100 %	797,19	100 %	797,19	100 %	3.997,03	DISKERPUS	
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100%	4.328,67	-	100 %	1.604,70	100 %	252,13	100 %	252,13	100 %	6.437,63	DISKERPUS	
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	98 orang	60 orang	204,57	-	-	-	-	-	-	-	60 orang	204,57	DISKERPUS	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	257,10	-	4 Dokumen	345,30	4 Dokumen	420,53	4 Dokumen	420,53	4 Dokumen	1.443,45	DISKERPUS	
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran	3 Dokumen	3,0 Dokumen	10,00	-	3 Dokumen	10,00	3 Dokumen	10,00	3 Dokumen	10,00	3 Dokumen	39,99	DISKERPUS	
	15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	98 PD & Desa	98 PD & Desa	87,71	98 PD & Desa	835,17	98 PD & Desa	288,073	35 PD 62 Desa	261,09	35 PD 62 Desa	261,09	98 PD & Desa	1.733,12	DISKERPUS
	16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	604,26	3 Perangkat Daerah	875,28	1 Perangkat Daerah	695,486	1 Perangkat Daerah	501,86	1 Perangkat Daerah	501,86	9 Perangkat Daerah	3.178,75	DISKERPUS
	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah pelayanan informasi	5 Materi	5 Materi	731,74	5 Materi	859,41	-	-	5 Materi	251,61	5 Materi	251,61	20 Materi	2119,53	DISKERPUS
	19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Data tidak tersedia	-	-	-	-	2 Perpustakaan	27,19	-	-	-	2 Perpustakaan	27,19	DISKERPUS	
02	18	URUSAN PENDIDIKAN			0,00		0,00		8.153,32		6.831,16		1.909,28		16.893,76		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				0,00		0,00		8.153,32		6.831,16		1.909,28		16.893,76		
20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Data tidak tersedia	-	-	-	-	13.750 Orang	8.153,32	13.750 Orang	6.831	13.750 Orang	1.909,28	41.250 Orang	16.893,76	DISKERPUS	
04	06	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			-		429,83		433,30		376,66		376,66		1.616,45		
	01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			-		429,83		433,30		376,66		376,66		1.616,45		
	01	PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Terlaksananya survey kepuasan masrakat dan pengembangan	data tidak tersedia	-	-	1 dokumen	429,83	1 dokumen	433,30	1 dokumen	376,66	1 dokumen	376,66	1 dokumen	1.616,45	BALITBANG
04	01	FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			1.459,39		1.899,05		2.759,50		3.273,29		3.273,29		12.664,51		
		KECAMATAN KUTA			-		-		280,69		313,75		313,75		908,18		
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	-	-	-	7 jenis	280,69	7 jenis	313,75	7 jenis	313,75	7 jenis	908,18	KECAMATAN KUTA	
		KECAMATAN KUTA UTARA			-		-		348,28		319,40		319,40		987,08		
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	-	-	-	7 jenis	348,28	7 jenis	319,40	7 jenis	319,40	7 jenis	987,08	KECAMATAN KUTA UTARA	
		KECAMATAN KUTA SELATAN			-		-		1.068,65		1.235,46		1.235,46		3.539,56		
	12	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	7 jenis	-	-	-	7 jenis	1.068,65	7 jenis	1.235,46	7 jenis	1.235,46	7 jenis	3.539,56	KECAMATAN KUTA SELATAN	
		KECAMATAN ABIANSEMAL			-		-		336,03		347,21		347,21		1.030,45		
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi	8 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	336,03	2 Kegiatan	347,21	2 Kegiatan	347,21	8 Kegiatan	1.030,45	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	15	KECAMATAN MENGWI			-		-		232,64		306,86		306,86		846,37		
	85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pelayanan Administrasi Pelayanan kependudukan di Desa/kel di Kecamatan mengwi	20 desa/kel	-	-	-	100 %	232,64	100 %	306,86	100 %	306,86	100 %	846,37	KECAMATAN MENGWI	
		KECAMATAN PETANG			-		-		387,91		411,55		411,55		1.211,01		
	11	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang di selesaikan	12 bulan	-	-	-	12 bulan	387,91	12 bulan	411,55	12 bulan	411,55	12 bulan	1.211,01	KECAMATAN PETANG	
	01	SEKRETARIAT DAERAH			1.459,39		1.899,05		105,29		339,06		339,06		4.141,85		
	a	BAGIAN ORGANISASI			1.459,39		1.899,05		105,29		339,06		339,06		4.141,85		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	10,00	12 Bulan	13,67	12 Bulan	13,67	12 Bulan	10,00	12 Bulan	10,00	57,33	SETDA.BAGIAN ORGANISASI	
	02	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi tentang Penerapan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1 Dokumen	1 Dokumen	204,79	1 Dokumen	598,76	1 Dokumen	16,34	1 Dokumen	15,80	1 Dokumen	15,80	851,49	SETDA.BAGIAN ORGANISASI	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	03	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	100 %	1.225,86	100 %	1.254,22	100 %	75,28	100 %	313,25	100 %	313,25	100 %	3.181,87	SETDA.BAGIAN ORGANISASI
	04	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Minimal	data tidak tersedia	18,74	100 %	32,41	-	-	-	-	-	-	100 %	51,15	SETDA.BAGIAN ORGANISASI
		MISI 3 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT			330.009,14		578.052,35		342.031,55		422.314,85		422.535,43		2.094.332,21	
		TUJUAN 3 : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			330.009,14		578.052,35		342.031,55		422.314,85		422.535,43		2.094.332,21	
		SASARAN 4 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN			300.237,18		533.176,96		307.440,09		374.166,14		374.179,77		1.888.586,06	
02	04	URUSAN PERTANAHAN			934,33		155.330,70		1.525,89		2.106,54		2.106,54		162.004,00	
	01	BAGIAN PEMERINTAHAN			934,33		155.330,70		1.525,89		2.106,54		2.106,54		162.004,00	
	01	PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Cakupan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Data tidak tersedia	907,36	100%	155.294,96	100%	1.507,03	100%	2.087,22	100%	2.087,22	100%	161.883,778	SETDA.BAGIAN PEMERINTAHAN
	02	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Cakupan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Data tidak tersedia	26,98	4 kasus	35,74	5 kasus	18,86	5 kasus	19,32	5 kasus	19,32	24 kasus	120,220	SETDA.BAGIAN PEMERINTAHAN
02	07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			1.549,47		2.382,68		1.156,46		1.264,54		1.264,54		7.617,69	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			1.549,47		2.382,68		1.156,46		1.264,54		1.264,54		7.617,69	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.114,21	100 %	1.278,64	100 %	721,08	100 %	685,75	100 %	685,75	100 %	4.485,426	DPMD
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	242,26	100 %	856,92	100 %	160,12	100 %	220,43	100 %	220,43	100 %	1.700,160	DPMD
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	183,00	100 %	237,12	100 %	265,26	100 %	348,36	100 %	348,36	100 %	1.382,100	DPMD
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RENJA, RKA)	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	50,000	DPMD
04	01	FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			269.484,98		320.019,95		270.828,41		341.624,68		341.866,85		1.543.824,87	
	01	SEKRETARIAT DPRD			83.377,91		90.767,88		84.869,02		126.734,99		124.714,36		510.464,15	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	5.488,63	100 %	4.770,34	100 %	4.300,88	100 %	4.709,97	100 %	4.721,93	100 %	23.991,761	SET.DPRD
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	4.827,12	100 %	9.896,79	100 %	2.577,52	100 %	4.823,48	100 %	4.376,26	100 %	26.501,171	SET.DPRD
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Tingkat Ketepatan Waktu pelaporan capaian kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja	100%	409,68	100 %	461,54	100 %	553,84	100 %	964,51	100 %	964,51	100 %	3.354,089	SET.DPRD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	15	KEUANGAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	dan Keuangan Meningkarnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	78%	80 %	72.416,94	81 %	75.373,45	82 %	76.793,71	83 %	115.666,27	84 %	114.080,90	84 %	454.331,273	SET.DPRD
	26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	100 %	235.53	100 %	265.74	100 %	643.07	100 %	570.76	100 %	570.76	100 %	2.285.860	SET.DPRD
	02	SEKRETARIAT DAERAH				139.404,51		178.160,13		145.634,03		168.154,29		170.446,45		801.799,41	
	a.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.790,93		3.974,41		2.507,39		1.408,91		1.471,68		14.153,32	
	93	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase administrasi pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Data tidak tersedia	100 %	4.790,93	100 %	3.974,41	100 %	2.507,39	100 %	1.408,91	100 %	1.471,68	100 %	14.153,321	SETDA.BAGIAN KESRA
	b.	BAGIAN PEMERINTAHAN				2.956,22		8.507,68		8.980,64		6.278,73		6.278,73		33.002,01	
	01	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab.Badung	100%	100%	1.108,81	100%	3.105,65	100%	2.276,91	100%	2.249,67	100%	2.249,67	100%	10.990,73	SETDA.BAGIAN PEMERINTAHAN
	02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 kali	1 kali	25,08	1 kali	25,18	1 kali	25,18	1 kali	25,12	1 kali	25,12	1 kali	125,67	SETDA.BAGIAN PEMERINTAHAN
	03	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	3 Hari besar	100%	1.728,20	100%	4.832,05	100%	3.152,37	100%	164,27	100%	164,27	100%	10.041,17	SETDA.BAGIAN PEMERINTAHAN
	04	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Data tidak tersedia	100%	70,90	100%	544,80	100%	2.648,32	100%	3.466,60	100%	3.466,60	100%	10.197,23	SETDA.BAGIAN PEMERINTAHAN
	05	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Cakupan Kualitas Pelayanan Minimal	Data tidak tersedia	-	-	-	1 laporan	18,06	1 laporan	7,29	1 laporan	7,29	1 laporan	32,64	SETDA.BAGIAN PEMERINTAHAN	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Data tidak tersedia	100%	23,23	-	100%	859,80	100%	365,77	100%	365,77	100%	1.614,58	SETDA.BAGIAN PEMERINTAHAN	
	c.	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN				9.926,66		14.483,57		12.762,47		14.111,89		14.111,89		65.396,47	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terealisasinya bahan bacaan berupa koran dan majalah	21 jenis koran dan 4 majalah	20 jenis koran dan majalah	1.017,85	20 jenis koran dan majalah	1.497,23	20 jenis koran dan majalah	1.991,24	20 jenis koran dan majalah	775,94	20 jenis koran dan majalah	775,94	20 jenis koran dan majalah	6.058,196	SETDA. BAGIAN HUMAS
	02	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Data tidak tersedia	-	-	80 setel	160,38	-	-	-	-	-	-	86 setel	160,375	SETDA. BAGIAN HUMAS
	03	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Kehumasan pada Karyawan/Karyawati	28 orang	30 30	-	30 orang	423,70	15 orang	3,45	-	-	-	75 orang	427,145	SETDA. BAGIAN HUMAS	
	04	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASA	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Informasi dengan Media Masa	1 kali	2 Kegiatan	1.189,79	2 Kegiatan	1.724,22	2 Kegiatan	831,89	2 Kegiatan	886,07	2 Kegiatan	886,07	2 Kegiatan	5.518,042	SETDA. BAGIAN HUMAS
	05	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN	Persentase Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	100%	100%	1.649,34	100%	2.696,38	100%	2.320,16	100%	3.361,11	100%	3.361,11	100%	13.388,107	SETDA. BAGIAN HUMAS

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	06	DOKUMENTASI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASA	Terpublikasikannya berbagai kegiatan Pembangunan dan	3036 Adv	3.600 Adv	6.069,68	3.650 Adv	7.981,67	3700 Adv	7.615,74	3750 Adv	9.088,76	3800 Adv	9.088,76	3800 Adv	39.844,604	SETDA. BAGIAN HUMAS
	d	BAGIAN PEREKONOMIAN			3.539,58		2.730,88		2.482,63		3.404,90		3.404,90		15.562,89		
	01	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Memperkuat Kdudukan Lembaga Perkreditan Desa	122 LPD	122 LPD	3.301,61	122 LPD	1.689,11	122 LPD	197,59	122 LPD	265,05	122 LPD	265,05	122 LPD	5.718,423	SETDA.BAGIAN PEREKONOMIAN
	02	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pelaksanaan koordinasi pengendalian inflasi daerah	6 kecamatan	6 kecamatan	65,56	6 kecamatan	812,07	6 kecamatan	2.206,05	6 kecamatan	2.570,57	6 kecamatan	2.570,57	6 kecamatan	8.224,818	SETDA.BAGIAN PEREKONOMIAN
	03	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung	12 bulan	12 bulan	57,13	12 bulan	54,35	2 BUMD	16,78	2 BUMD	531,27	2 BUMD	531,27	2 BUMD	1.190,803	SETDA.BAGIAN PEREKONOMIAN
	04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Mewujudkan tertib usaha di bidang pertambangan	6 kecamatan	6 kecamatan	105,30	6 kecamatan	158,66	6 kecamatan	49,37	6 kecamatan	38,01	6 kecamatan	38,01	6 kecamatan	389,343	SETDA.BAGIAN PEREKONOMIAN
	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Mewujudkan tertib usaha di bidang ketenagalistrikan	6 kecamatan	6 kecamatan	9,98	6 kecamatan	16,69	6 kecamatan	12,84	-	-	-	-	6 kecamatan	39,503	SETDA.BAGIAN PEREKONOMIAN
	j	BAGIAN HUKUM DAN HAM			3.606,90		4.237,49		4.019,57		6.867,35		6.867,35		25.598,68		
	01	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani Persentase Rancangan produk Hukum Daerah yang telah diharmonisasikan sesuai	100 %	100 %	3.606,90	100 %	4.237,49	100 %	4.019,57	100 %	6.867,35	100 %	6.867,35	100 %	25.598,677	SETDA. BAGIAN HUKUM DAN HAM
	h	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA			4.271,15		4.796,39		6.005,06		6.385,78		6.385,78		27.844,14		
	01	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Data tidak tersedia	100%	4.267,13	100%	4.577,80	100%	5.980,98	100%	6.276,32	100%	6.276,32	100%	27.378,55	SETDA.BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase ASN yang bertambah pengetahuannya di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Data tidak tersedia	100%	4,01	100%	218,58	100%	24,08	100%	109,46	100%	109,46	100%	465,59	SETDA.BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	i	BAGIAN ORGANISASI			1.084,75		2.739,40		2.371,07		2.120,18		2.120,18		10.435,57		
	01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	24,71	1 Laporan	100,69	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	125,39	SETDA. BAGIAN ORGANISASI
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah PD yang diasistensi dan pelaporan LKilP tepat waktu	53 SKPD	38 PD	1.060,04	38 PD	2.638,71	38 PD	2.371,07	38 PD	2.120,18	38 PD	2.120,18	38 PD	10.310,178	Setda. Bagian Organisasi
	j	BAGIAN UMUM			47.079,15		58.320,63		51.649,63		53.022,59		56.456,98		266.528,98		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	44.409,59	100 %	54.182	100 %	45.958,05	100 %	45.032,35	100 %	48.466,75	100 %	238.048,29	SETDA. BAGIAN UMUM
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Cakupan Pelayanan Sarana dan	100	100	2.093,73	100	3.806	100	5.481,28	100	7.678,57	100	7.678,57	100	26.738,65	SETDA. BAGIAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	03	DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Prasarana Aparatur Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala	% 36 Kunjungan	% 36 Kunjungan 500,00	% 36 Kunjungan	200	% 36 Kunjungan	100,00	% 36 Kunjungan	200,00	% 36 Kunjungan	200,00	% 36 Kunjungan	1.200,00	UMUM SETDA. BAGIAN UMUM
	04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100 %	100 % 55,52	100 %	110	100 %	103,62	100 %	111,67	100 %	111,67	100 %	492,79	SETDA. BAGIAN UMUM
	05	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	100 %	100 % 20,30	100 %	22	100 %	6,68	-	-	-	-	100 %	49,26	SETDA. BAGIAN UMUM
	k.	BAGIAN KEUANGAN			2.416,85		2.608,16		3.056,42		3.600,10		3.735,75		15.417,29	
	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Data tidak tersedia	12 bulan 995,37	12 bulan	746,74	12 bulan	742,68	12 bulan	745,13	12 bulan	745,13	100%	3.975.050	SETDA.BAGIAN KEUANGAN
	2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel	Data tidak tersedia	100 % 1.209,30	100 %	1.300,69	100 %	1.986,90	100 %	2.309,61	100 %	2.477,75	100%	9.284,258	SETDA.BAGIAN KEUANGAN
	3	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara renja perangkat daerah dengan RKPD	Data tidak tersedia	- 98,67	100 %	495,65	100 %	278,14	100 %	438,71	100 %	399,69	100%	1.710.863	SETDA.BAGIAN KEUANGAN
	4	PROGRAM PEMBINAAN DAN FISILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Data tidak tersedia	100 % 113,51	100 %	65,07	100 %	48,70	100 %	88,07	100 %	94,60	100%	409,947	SETDA.BAGIAN KEUANGAN
	5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung	Data tidak tersedia	- -	- -	- -	- -	- -	100 %	18,58	100 %	18,58	100%	37,168	SETDA.BAGIAN KEUANGAN
	l.	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN			59.732,32		75.761,52		51.799,16		70.953,86		69.613,20		327.860,06	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	25 Paket	8 Paket 3.236,46	8 Paket	22.940,46	3 Paket	21.335,14	3 Paket	24.662,70	3 Paket	24.649,47	25 Paket	96.824,230	SETDA.BAGIAN PERWAT
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	52 Paket	8 Paket 56.472,04	11 Paket	52.792,62	11 Paket	30.436,95	11 Paket	46.265,94	11 Paket	44.938,51	52 Paket	230.906,065	SETDA.BAGIAN PERWAT
	03	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	77 Dokumen	16 Dokumen 23,82	16 Dokumen	28,45	15 Dokumen	27,06	15 Dokumen	25,22	15 Dokumen	25,22	77 Paket	129,769	SETDA.BAGIAN PERWAT
	03	KECAMATAN KUTA			10.911,35		11.661,27		9.108,10		10.418,41		10.418,41		52.517,54	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 kegiatan	17 kegiatan 4.830,19	17 kegiatan	5.095,06	17 kegiatan	4.602,60	17 kegiatan	6.232,53	17 kegiatan	6.232,53	17 kegiatan	26.992,90	KECAMATAN KUTA
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket 1.852,40	2 paket	2.785,09	2 paket	1.850,97	2 paket	1.485,25	2 paket	1.485,25	2 paket	9.458,96	KECAMATAN KUTA
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kepala Lingkungan yang dilantik	9 Orang	9 Orang 7,93	2 Orang	18,23	-	-	3 Orang	5,06	2 Orang	5,06	16 Orang	36,27	KECAMATAN KUTA
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan	2 jenis	2 jenis 163,56	2 jenis	151,44	2 jenis	341,62	2 jenis	460,14	2 jenis	460,14	2 jenis	1.576,90	KECAMATAN KUTA
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	12 jenis 635,68	12 jenis	567,43	-	-	-	-	-	-	12 jenis	1.203,11	KECAMATAN KUTA
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis 9,38	3 jenis	10,00	3 jenis	10,00	3 jenis	10,01	3 jenis	10,01	3 jenis	49,39	KECAMATAN KUTA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	1 dokumen	145,20	1 dokumen	63,09	1 dokumen	89,36	1 dokumen	43,62	1 dokumen	43,62	1 dokumen	384,88	KECAMATAN KUTA
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data dan informasi statistik	2 jenis	2 jenis	136,64	2 jenis	5,54	2 jenis	31,53	-	-	-	-	2 jenis	173,71	KECAMATAN KUTA
78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah kelurahan yang diajaga ketertibannya	5 lokasi	5 lokasi	319,93	5 lokasi	313,04	5 lokasi	73,35	5 lokasi	60,68	5 lokasi	60,68	5 lokasi	827,68	KECAMATAN KUTA
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 kegiatan	3 kegiatan	991,87	3 kegiatan	343,72	3 kegiatan	773,83	3 kegiatan	76,69	3 kegiatan	76,69	3 kegiatan	2.262,81	KECAMATAN KUTA
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	2 jenis	2 jenis	17,88	2 jenis	18,03	2 jenis	17,79	2 jenis	724,22	2 jenis	724,22	2 jenis	1.502,16	KECAMATAN KUTA
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional	7 hari besar	7 hari besar	192,89	7 hari besar	357,21	7 hari besar	377,97	7 hari besar	245,03	7 hari besar	245,03	7 hari besar	1.418,14	KECAMATAN KUTA
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	1 jenis	369,16	2 jenis	577,58	-	-	-	-	-	-	2 jenis	946,73	KECAMATAN KUTA
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	436,04	7 jenis	397,58	-	-	-	-	-	-	7 jenis	833,62	KECAMATAN KUTA
86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Karang Taruna/PSM yang dibina	7 jenis	7 jenis	-	7 jenis	29,41	-	-	-	-	-	-	7 jenis	29,41	KECAMATAN KUTA
87	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jenis kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan	28 lingkungan	28 lingkungan	789,59	28 lingkungan	913,79	28 lingkungan	926,44	28 lingkungan	1.070,87	28 lingkungan	1.070,87	28 lingkungan	4.771,55	KECAMATAN KUTA
90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Pengentasan kemiskinan masyarakat	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	3,82	106 RTM, 101	4,40	106 RTM, 101 RTS	4,35	106 RTM, 101	-	106 RTM, 101	-	106 RTM, 101	12,57	KECAMATAN KUTA
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 lokasi	5 lokasi	9,21	5 lokasi	10,65	5 lokasi	8,31	5 lokasi	4,31	5 lokasi	4,31	5 lokasi	36,78	KECAMATAN KUTA
04	KECAMATAN KUTA UTARA				8.207,66		9.112,60		7.944,57		9.617,41		9.588,06		44.470,30	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	3.858,98	15 kegiatan	4.406,81	14 kegiatan	4.585,85	14 kegiatan	6.507,51	14 kegiatan	6.478,16	15 kegiatan	25.837,32	KECAMATAN KUTA UTARA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 paket	1 paket	1.127,80	1 paket	1.591,76	3 paket	1.528,29	3 paket	1.122,94	4 paket	1.114,43	5 paket	6.485,22	KECAMATAN KUTA UTARA
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	252,42	4 dokumen	160,68	4 dokumen	355,97	4 dokumen	485,20	4 dokumen	485,20	4 dokumen	1.739,48	KECAMATAN KUTA UTARA
04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RENJA, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	11,10	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	9,95	3 dokumen	9,95	3 dokumen	51,01	KECAMATAN KUTA UTARA
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pengangkatan perangkat desa	6 desa/ perbekel	6 desa/ perbekel	3,30	6 desa/ perbekel	22,96	-	-	6 desa/ kelurahan	5,01	6 desa/ kelurahan	5,01	6 desa/ kelurahan	36,27	KECAMATAN KUTA UTARA
05	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai	4 kegiatan	4 kegiatan	518,93	4 kegiatan	632,37	-	-	-	-	-	-	20 kegiatan	1.151,30	KECAMATAN KUTA UTARA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	budaya jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	1 dokumen	102,59	1 dokumen	77,55	1 dokumen	51,46	1 dokumen	66,28	1 dokumen	66,28	4 dokumen	364,17	KECAMATAN KUTA UTARA
07	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	3 jenis	127,21	3 jenis	29,67	3 jenis	3,61	-	-	-	-	12 jenis	160,50	KECAMATAN KUTA UTARA
08	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	jumlah lokasi yang dipantau	6 desa/perbekel	6 desa/perbekel	328,86	6 desa/perbekel	101,00	6 desa/kelurahan	25,09	6 desa/kelurahan	10,00	6 desa/kelurahan	10,00	6 desa/kelurahan	474,94	KECAMATAN KUTA UTARA
09	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/perbekel	6 desa/perbekel	468,41	6 desa/perbekel	362,29	6 desa/kelurahan	572,22	6 desa/kelurahan	498,80	6 desa/kelurahan	507,31	6 desa/kelurahan	2.409,03	KECAMATAN KUTA UTARA
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jumlah kegiatan promosi keehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	3 kegiatan	39,44	1 kegiatan	12,34	1 kegiatan	13,57	1 kegiatan	9,81	1 kegiatan	9,81	4 kegiatan	84,97	KECAMATAN KUTA UTARA
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	143,40	7 hari besar	153,42	7 hari besar	183,50	7 hari besar	196,03	7 hari besar	196,03	7 hari besar	872,38	KECAMATAN KUTA UTARA
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	jenis pengelolaan keragaman budaya	1 jenis	1 jenis	391,15	1 jenis	416,72	-	-	-	-	-	-	9 jenis	807,87	KECAMATAN KUTA UTARA
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	302,56	7 jenis	358,33	-	-	-	-	-	-	7 jenis	660,89	KECAMATAN KUTA UTARA
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	jumlah karang taruna dan PSM yang dibina	1 kegiatan	1 karang taruna 1 PSM	-	1 karang taruna 1 PSM	160,24	1 karang taruna 1 PSM	6,01	1 karang taruna 1 PSM	4,01	1 karang taruna 1 PSM	4,01	1 karang taruna 1 PSM	174,25	KECAMATAN KUTA UTARA
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	3 kelurahan	3 kelurahan	495,56	3 kelurahan	558,41	3 kelurahan	597,39	3 kelurahan	691,80	3 kelurahan	691,80	3 kelurahan	3.034,96	KECAMATAN KUTA UTARA
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	jumlah RTM yang didata kegiatan penanggulangan kemiskinan	462 RTM	298 RTM	4,95	261 RTM	5,46	-	-	-	-	-	-	261 RTM	10,40	KECAMATAN KUTA UTARA
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/perbekel	6 desa/perbekel	4,47	6 desa/perbekel	52,58	6 desa/kelurahan	11,61	6 desa/kelurahan	10,08	6 desa/kelurahan	10,08	6 desa/kelurahan	88,82	KECAMATAN KUTA UTARA
117	PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT	jumlah SIUMK yang diterbitkan	Data tidak tersedia	80 ijin	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	80 ijin	1,37	KECAMATAN KUTA UTARA
118	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KECAMATAN	jumlah lembaga kecamatan yang aktif	1 kegiatan	1 kegiatan	25,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	25,15	KECAMATAN KUTA UTARA
05	KECAMATAN KUTA SELATAN				8.028,40		8.549,70		7.843,18		9.015,56		9.015,56		42.452,40	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 kegiatan	16 kegiatan	3.672,54	15 kegiatan	4.063,73	14 kegiatan	4.600,93	14 kegiatan	5.909,79	14 kegiatan	5.909,79	14 kegiatan	24.156,77	KECAMATAN KUTA SELATAN
01	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Kegiatan Pengembangan Budaya	11 jenis	3 jenis	441,30	3 jenis	639,49	-	-	-	-	-	-	3 jenis	1.080,79	KECAMATAN KUTA SELATAN
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	849,98	100 %	1.045,67	100 %	1.505,20	100 %	1.248,63	100 %	1.248,63	100 %	5.898,10	KECAMATAN KUTA SELATAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	3 jenis	407,27	3 jenis	444,32	-	-	-	-	-	-	3 jenis	851,59	KECAMATAN KUTA SELATAN
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan	2 jenis	2 jenis	254,22	2 jenis	147,58	2 jenis	366,69	2 jenis	476,37	2 jenis	476,37	2 jenis	1.721,23	KECAMATAN KUTA SELATAN
04	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENSTRA,RENJA, RKA)	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	3 jenis	3 jenis	10,00	3 jenis	10,00	3 jenis	15,00	3 jenis	10,00	3 jenis	10,00	3 jenis	55,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
05	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	99,28	1 dokumen	118,11	1 dokumen	85,53	1 dokumen	65,06	1 dokumen	65,06	1 dokumen	433,05	KECAMATAN KUTA SELATAN
06	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK	Jumlah dokumen data	3 jenis	3 jenis	157,91	3 jenis	12,44	3 jenis	12,37	2 jenis	11,14	2 jenis	11,14	3 jenis	205,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
07	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	6 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	231,24	6 desa/ kelurahan	128,15	6 desa/ kelurahan	40,69	6 desa/ kelurahan	36,57	6 desa/ kelurahan	36,57	6 desa/ kelurahan	473,22	KECAMATAN KUTA SELATAN
08	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 kegiatan	11 kegiatan	750,89	5 kegiatan	398,12	5 kegiatan	509,13	9 kegiatan	472,30	9 kegiatan	472,30	4 kegiatan	2.602,75	KECAMATAN KUTA SELATAN
09	PROGRAM HARI BESAR NASIONAL	Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional	7 hari besar	7 hari besar	141,18	7 hari besar	180,27	7 hari besar	127,03	7 hari besar	165,85	7 hari besar	165,85	7 hari besar	780,18	KECAMATAN KUTA SELATAN
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	6 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	6,17	6 desa/ kelurahan	14,03	6 desa/ kelurahan	14,03	6 desa/ kelurahan	8,20	6 desa/ kelurahan	8,20	6 desa/ kelurahan	50,63	KECAMATAN KUTA SELATAN
11	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kepala Lingkungan yang dilantik	5 kaling	4 kaling	5,42	4 kaling	11,15	4 kaling	10,15	4 kaling	5,83	4 kaling	5,83	4 kaling	38,38	KECAMATAN KUTA SELATAN
12	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	data tidak tersedia	4 jenis	87,06	4 jenis	10,69	-	-	-	-	-	-	4 jenis	97,75	KECAMATAN KUTA SELATAN
12	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	7 jenis	7 jenis	448,17	7 jenis	787,41	-	-	-	-	-	-	7 jenis	1.235,58	KECAMATAN KUTA SELATAN
13	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jenis kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan	6 desa/ kelurahan	15 orang	465,77	15 orang	530,85	15 orang	548,35	15 orang	600,20	15 orang	600,20	15 orang	2.745,38	KECAMATAN KUTA SELATAN
14	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Karang Taruna/PSM yang dibina	1 karang taruna/PSM	-	-	1 karang taruna/PSM	7,69	1 karang taruna/PSM	8,09	1 karang taruna/PSM	5,61	1 karang taruna/PSM	5,61	1 karang taruna/PSM	27,01	KECAMATAN KUTA SELATAN
06	KECAMATAN MENGWI				11.779,15		11.477,34		10.196,80		12.057,76		12.057,76		57.568,80	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	100 %	5.224,67	100 %	5.589,83	100 %	5.922,22	100 %	8.222,41	100 %	8.222,41	100 %	33.181,55	KECAMATAN MENGWI
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Jumlah sarana dan prasarana	100	100	2.291,58	100	1.372,91	100	1.934,39	100	1.197,74	100	1.197,74	100	7.994,35	KECAMATAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DAN PRASARANA APARATUR	untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan kantor camat	%	%		%		%		%		%		%		MENGWI
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu	100 %	100 %	308,46	100 %	169,83	100 %	361,96	100 %	532,10	100 kegiatan	532,10	100 %	1.904,45	KECAMATAN MENGWI
8	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Jumlah Kegiatan Pengembangan di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	483,80	100 %	1.090,79	-	-	100 %		100 %		100 %	1.574,59	KECAMATAN MENGWI
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	2,81	3 dokumen	8,16	3 dokumen	8,16	3 dokumen	39,12	KECAMATAN MENGWI
29	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Kegiatan Perencanaan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	161,59	2 Kegiatan	92,62	2 Kegiatan	65,24	2 Kegiatan	37,00	2 Kegiatan	37,00	2 Kegiatan	393,46	KECAMATAN MENGWI
38	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah Dokumen	25 buku	25 buku	135,41	25 buku	5,75	-	-	20 desa/kel	4,10	20 desa/kel	4,10	20 desa/kel	149,37	KECAMATAN MENGWI
78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi Desa/Kelurahan	20 desa/kel	20 desa/kel	296,29	20 desa/kel	108,82	20 desa/kel	40,55	20 desa/kel	100,48	20 desa/kel	100,48	20 desa/kel	646,63	KECAMATAN MENGWI
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah Kegiatan partisipasi	100 %	100 %	812,34	100 %	557,51	100 %	776,74	100 %	794,01	100 %	794,01	100 %	3.734,62	KECAMATAN MENGWI
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah kegiatan Promosi Pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	22,03	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	22,03	KECAMATAN MENGWI
82	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah Hari Besar yang	7 hari besar	7 hari besar	154,17	7 hari besar	173,33	7 hari besar	143,20	7 hari besar	105,43	7 hari besar	105,43	7 hari besar	681,55	KECAMATAN MENGWI
83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah kegiatan Pengelolaan	1 kegiatan	1 kegiatan	393,90	2 kegiatan	422,11	-	-	-	-	-	-	3 kegiatan	816,01	KECAMATAN MENGWI
85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Pelayanan Administrasi kependudukan di Desa/kel di	100 %	100 %	237,85	100 %	296,96	-	-	-	-	-	-	100 %	534,81	KECAMATAN MENGWI
86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka KEPEMUDAAN	100 %	-	-	100 %	86,78	-	-	100 %	1,40	100 %	1,40	100 %	89,58	KECAMATAN MENGWI
87	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	100 %	100 %	804,24	100 %	1.171	100 %	934,47	100 %	1.012,34	100 %	1.012,34	100 %	4.933,94	KECAMATAN MENGWI
90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM yang Menerima	3701 RTM	3701 RTM	11,28	3701 RTM	17,75	-	-	3469 RTM	13,05	3701 RTM	13,05	3701 RTM	55,14	KECAMATAN MENGWI
95	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah Kegiatan Peningkatan	1 kegiatan	1 kegiatan	416,77	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	416,77	KECAMATAN MENGWI
98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Jumlah kegiatan dalam rangka	100 %	-	-	100 %	21,27	-	-	100 %	18,73	100 %	18,73	100 %	58,74	KECAMATAN MENGWI
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Desa kelurahan Yang	100 %	100 %	14,78	100 %	78,95	100 %	15,21	100 %	10,78	100 %	10,78	100 %	130,51	KECAMATAN MENGWI
122	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Kegiatan Bimtek	data tidak tersedia	-	-	3 Kegiatan	211,58	-	-	-	-	-	-	3 Kegiatan	211,58	KECAMATAN MENGWI
07	KECAMATAN ABIANSEMAL				4.069,19		5.030,99		2.440,13		2.451,56		2.451,56		16.443,43	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	15 Kegiatan	15 Kegiatan	1.763,88	15 Kegiatan	1.809,42	15 Kegiatan	1.412,05	15 Kegiatan	1.490,75	15 Kegiatan	1.490,75	15 Kegiatan	7.966,85	KECAMATAN ABIANSEMAL
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	8 Kegiatan	8 Kegiatan	801,88	8 Kegiatan	910,38	8 Kegiatan	188,04	8 Kegiatan	235,54	8 Kegiatan	235,54	8 Kegiatan	2.371,38	KECAMATAN ABIANSEMAL

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	135,24	2 Kegiatan	148,56	2 Kegiatan	235,00	2 Kegiatan	308,87	2 Kegiatan	308,87	2 Kegiatan	1.136,54	KECAMATAN ABIANSEMAL
08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	418,59	2 Kegiatan	650,17	-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	1.068,75	KECAMATAN ABIANSEMAL
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Dokumen perencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	9,84	1 Kegiatan	10,15	1 Kegiatan	10,15	1 Kegiatan	50,15	KECAMATAN ABIANSEMAL
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40,44	2 Kegiatan	52,54	2 Kegiatan	57,55	2 Kegiatan	37,60	2 Kegiatan	37,60	2 Kegiatan	225,73	KECAMATAN ABIANSEMAL
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	23,38	2 Kegiatan	6,43	2 Kegiatan	6,47	2 Kegiatan	5,61	2 Kegiatan	5,61	2 Kegiatan	47,50	KECAMATAN ABIANSEMAL
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	jumlah lokasi yang dipantau	18 Desa	18 Desa	86,61	18 Desa	160,67	18 Desa	96,64	18 Desa	20,19	18 Desa	20,19	18 Desa	384,29	KECAMATAN ABIANSEMAL
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUNAN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 Kegiatan	5 Kegiatan	89,08	5 Kegiatan	349,29	5 Kegiatan	153,72	5 Kegiatan	72,02	5 Kegiatan	72,02	5 Kegiatan	736,13	KECAMATAN ABIANSEMAL
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis kegiatan promosi kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	131,17	1 Kegiatan	171,36	1 Kegiatan	179,88	1 Kegiatan	163,79	1 Kegiatan	163,79	1 Kegiatan	809,98	KECAMATAN ABIANSEMAL
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah Pengelolaan Keragaman Budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	362,13	1 Kegiatan	424,53	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	786,66	KECAMATAN ABIANSEMAL
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	190,47	2 Kegiatan	237,34	-	-	-	-	-	-	8 Kegiatan	427,81	KECAMATAN ABIANSEMAL
86	PROGRAM PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	79,72	1 Kegiatan	79,97	1 Kegiatan	69,80	1 Kegiatan	69,80	1 Kegiatan	299,29	KECAMATAN ABIANSEMAL
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Pengentasan kemiskinan	18 Desa	18 Desa	6,42	18 Desa	7,46	18 Desa	8,42	18 Desa	6,56	18 Desa	6,56	18 Desa	35,42	KECAMATAN ABIANSEMAL
98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Perbekel yang terpilih	3 Desa	3 Desa	5,10	-	-	-	-	15 Desa	22,53	15 Desa	22,53	18 Desa	50,16	KECAMATAN ABIANSEMAL
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Pembinaan penyalenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	18 kali	18 kali	4,82	18 kali	13,12	18 kali	12,55	18 kali	8,15	18 kali	8,15	18 kali	46,78	KECAMATAN ABIANSEMAL
08	KECAMATAN PETANG				3.706,81		5.260,05		2.792,57		3.174,70		3.174,70		18.108,83	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.354,93	12 bulan	1.554	12 bulan	1.258,37	12 bulan	1.760,53	12 bulan	1.760,53	12 bulan	7.688,83	KECAMATAN PETANG
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12 bulan	858,14	12 bulan	1.479	12 bulan	802,47	12 bulan	711,97	12 bulan	711,97	12 bulan	4.563,95	KECAMATAN PETANG
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	12 bulan	133,38	12 bulan	155,91	12 bulan	243,74	12 bulan	278,48	12 bulan	278,48	12 bulan	1.089,99	KECAMATAN PETANG
04	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Terselenggaranya festival budaya pertanian dan pawai festival budaya	2 kegiatan	2 kegiatan	411,40	2 kegiatan	456,77	-	-	-	-	-	-	5 kegiatan	868,17	KECAMATAN PETANG
05	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARA SKPD	Jumlah dokumen Musrenbang SKPD Kecamatan	30 buku	30 buku	10,00	-	-	-	-	-	-	30 buku	-	30 buku	10,00	KECAMATAN PETANG

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen Musrenbang SKPD Kecamatan	12 bulan	12 bulan	43,15	12 bulan	32,38	12 bulan	35,29	12 bulan	30,15	12 bulan	30,15	12 bulan	171,14	KECAMATAN PETANG
06	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	jumlah data monografi dan profil kecamatan	25 buku	25 buku	23,97	25 buku	4,34	25 buku	4,33	25 buku	3,90	25 buku	3,90	25 buku	40,43	KECAMATAN PETANG
07	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	jumlah desa yang dibina	7 desa	7 desa	91,08	7 desa	121,81	7 desa	89,00	7 desa	42,76	7 desa	42,76	7 desa	387,41	KECAMATAN PETANG
08	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jumlah desa yang dibina	7 desa	7 desa	64,44	7 desa	567,63	7 desa	143,71	7 desa	132,71	7 desa	132,71	7 desa	1.041,20	KECAMATAN PETANG
09	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah Upacara peringatan hari hari besar nasional	7 hari besar	7 hari besar	129,17	7 hari besar	150,10	7 hari besar	150,10	7 hari besar	139,00	7 hari besar	139,00	7 hari besar	707,37	KECAMATAN PETANG
10	PROGRAM PENGELOLAAN KERGAMAN BUDAYA	Jumlah kegiatan dalam HUT kota mangupura	1 kali	1 kali	355,35	1 kali	361,31	-	-	-	-	-	-	1 kali	716,66	KECAMATAN PETANG
11	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang di selesaikan	12 bulan	12 bulan	214,89	12 bulan	287,37	-	-	-	-	-	-	12 bulan	502,26	KECAMATAN PETANG
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	jumlah desa yan dibina	7 desa	7 desa	5,72	7 desa	12,59	7 desa	12,45	7 desa	8,72	7 desa	8,72	7 desa	48,20	KECAMATAN PETANG
13	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	jumlah desa yang didata sebagai warga pra KS	7 desa	7 desa	4,48	7 desa	21,69	7 desa	28,23	7 desa	16,68	7 desa	16,68	7 desa	87,77	KECAMATAN PETANG
14	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	jumlah pemuda yang dibina	7 desa	7 desa	6,70	7 desa	54,27	7 desa	24,88	7 desa	13,49	7 desa	13,49	7 desa	112,83	KECAMATAN PETANG
15	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Jumlah perbekel yang terpilih	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	6 desa	4,37	6 desa	4,37	6 desa	8,74	KECAMATAN PETANG
79	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	terwujudnya Kesehatan dan pemerdayaan Masyarakat	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	1 kecamatan	31,94	1 kecamatan	31,94	1 kecamatan	63,88	KECAMATAN PETANG
04	02	FUNGSI PENGAWASAN			659,34		606,22		809,54		1.533,25		1.558,86		5.167,21	
	01	INSPEKTORAT			659,34		606,22		809,54		1.533,25		1.558,86		5.167,21	
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	117,60	100 %	119,27	100 %	184,36	100 %	270,22	100 %	270,22	100 %	961,66	INSPEKTORAT
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dan RKPD	100%	100 %	15,00	100 %	9,58	100 %	9,91	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	54,49	INSPEKTORAT
20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	CC	B	43,87	BB	55,39	BB	60,26	BB	64,88	BB	64,88	BB	289,29	INSPEKTORAT
22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase penetapan sistem dan prosedur pengawasan	100%	100 %	482,86	100 %	421,99	100 %	555,01	100 %	1.188,15	100 %	1.213,76	100 %	3.861,77	INSPEKTORAT
04	03	FUNGSI PERENCANAAN			11.847,21		11.660,86		10.132,57		12.072,82		11.900,40		56.999,77	
	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			11.847,21		11.660,86		10.132,57		12.072,82		11.900,40		56.999,77	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	14 Kegiatan	100%	1.979,16	100%	2.021,07	100%	1.454,78	100%	1.348,79	100%	1.348,79	100%	8.152,60	BAPPEDA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.116,52	100%	1.446,89	100%	303,16	100%	402,21	100%	361,35	100%	3.630,13	BAPPEDA
	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya SDM Perencanaan	Data tidak tersedia	54 orang	595,81	-	-	-	-	-	-	-	-	54 orang	595,81	BAPPEDA
	04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	1 Laporan	485,52	1 Laporan	704,41	1 Laporan	608,60	1 Laporan	823,28	1 Laporan	750,67	1 Laporan	3.372,48	BAPPEDA
	05	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	100%	183,13	100%	9,27	100%	133,20	100%	18,84	100%	18,84	100%	363,28	BAPPEDA
	06	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Cakupan Data dan Informasi Perencanaan Daerah	1 paket	1 paket	418,30	1 paket	125,69	1 paket	88,69	1 paket	68,65	1 paket	68,65	1 paket	769,97	BAPPEDA
	07	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	6.330,31	100%	5.300,56	100%	7.007,86	100%	9.150,86	100%	8.907,17	100%	36.696,77	BAPPEDA
	08	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	6 Kecamatan	247,038	6 Kecamatan	402,140	6 Kecamatan	115,639	6 Kecamatan	218,99	6 Kecamatan	146,400	6 Kecamatan	1.130,21	BAPPEDA
	09	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	-	-	1 Dokumen	597,38	1 Dokumen	16,71	1 Dokumen	28,75	1 Dokumen	286,089	1 Dokumen	314,84	BAPPEDA
	01	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%	16,36%	491,44	20,00%	1.053,44	23,64%	403,916	27,27%	12,44	30,91%	12,439	30,91%	1.973,7	BAPPEDA
04	05	FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				10.052,07		30.924,12		13.335,44		3.084,43		3.084,43		60.480,50	
	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				10.052,07		30.924,12		13.335,44		3.084,43		3.084,43		60.480,50	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 kegiatan	17 kegiatan	1.144,63	17 kegiatan	1.226,38	17 kegiatan	789,33	17 kegiatan	843,18	17 kegiatan	843,18	17 kegiatan	4.846,71	BKPSDM
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah Paket Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1	3 paket	1.437,46	3 paket	659,19	3 paket	208,50	3 paket	399,40	3 paket	399,40	3 paket	3.103,94	BKPSDM
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai akuntabilitas kinerja	73	76,55	205,92	76,80	244,38	78,00	288,17	80,05	417,60	80,10	417,60	80,10	1.573,66	BKPSDM
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RENJA, RKA)	Cakupan Dokumen Perencanaan Yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	15,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	7,30	3 dokumen	8,29	3 dokumen	8,29	3 dokumen	48,88	BKPSDM
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan	12 %	96 %	5.841,86	97 %	12.839,68	98 %	388,76	99 %	972,70	100 %	972,70	100 %	21.015,70	BKPSDM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	06	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah Kabupaten Badung Persentase Kehadiran Pegawai Yang Mentaati Jam Kerja	80 %	36,41	97 %	15.034,58	98 %	11.456,76	99 %	19,05	99 %	19,05	99 %	26.565,85	BKPSDM
	07	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Yang Terisi	100 %	1.186,39	74,00 %	630,87	75,50 %	73,88	76,00 %	87,53	76,50 %	87,53	76,50 %	2.066,20	BKPSDM
	08	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Dapat Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	51,35	100 %	178,99	100 %	45,80	100 %	175,62	100 %	175,62	100 %	627,39	BKPSDM
	09	PROGRAM PENINGKATAN SDM	Prosentase Akurasi Update Data Kepegawaian	data tidak tersedia	133,05	97 %	57,59	98 %	45,59	99 %	133,17	100 %	133,17	100 %	502,57	BKPSDM
	10	PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase Sasaran Kinerja Asn Yang Berkinerja Baik	data tidak tersedia	-	97 %	42,479	98 %	31,349	99 %	27,882	100 %	27,882	100 %	129,59	BKPSDM
04	06	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			5.709,78		12.252,43		9.651,79		12.479,88		12.398,14		52.492,02	
	03	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			5.709,78		12.252,43		9.651,79		12.479,88		12.398,14		52.492,02	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	data tidak tersedia	1.009,323	17 kegiatan	1.053,163	17 kegiatan	893,836	17 kegiatan	791,908	17 kegiatan	791,908	17 kegiatan	4.540,14	BALITBANG
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	data tidak tersedia	1.084,15	7 kegiatan	1.471,66	4 kegiatan	414,20	6 kegiatan	835,59	6 kegiatan	835,59	6 kegiatan	4.641,20	BALITBANG
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	data tidak tersedia	220,840	2 kegiatan	282,244	2 kegiatan	305,171	2 kegiatan	430,556	2 kegiatan	430,556	2 kegiatan	1.669,37	BALITBANG
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RENJA, RKA)	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	data tidak tersedia	13.000	1 kegiatan	21,560	1 kegiatan	19,892	1 kegiatan	9,99	1 kegiatan	9,99	1 kegiatan	74,42	BALITBANG
	05	PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	data tidak tersedia	3.210,853	50 %	6.344,114	60 %	6.105,270	65 %	6.291,886	70 %	6.291,886	70 %	28.244,01	BALITBANG
	06	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Jumlah Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikembangkan	data tidak tersedia	171,620	2 buah	3.079,688	6 buah	1.913,416	8 buah	4.119,955	10 buah	4.038,214	10 buah	13.322,89	BALITBANG
		SASARAN 5 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH			25.959,42		40.752,49		24.891,48		32.283,56		32.430,70		156.317,65	
04	01	FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			3.633,20		14.634,05		2.756,44		5.147,76		4.890,43		31.061,87	
	02	SEKRETARIAT DAERAH														

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	a.	BAGIAN PEMBANGUNAN			3.191,64		13.889,18		2.151,37		3.955,59		3.698,26		26.886,03		
	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah obyek kunjungan kerja Pimpinan Daerah/Pimpinan Perangkat Daerah	40 obyek obyek pemb.	1 paket	59,04	1 paket	93	1 paket	53,30	1 paket	70,59	1 paket	70,59	200 obyek pemb.	346,37	Setda. Bagian Pembangunan
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Data tidak tersedia	100%	249,81	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	249,81	Setda. Bagian Pembangunan
	20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	1 Paket	4 Paket	2.863,28	4 Paket	13.770	4 Paket	2.071,27	4 Paket	3.599,39	4 Paket	3.599,39	20 Paket	25.902,95	Setda. Bagian Pembangunan
	89	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah Kabupaten Badung	1 Paket	1 Paket	19,51	1 Paket	27	1 Paket	26,79	1 Paket	285,61	1 Paket	28,28	1 Paket	386,90	Setda. Bagian Pembangunan
	b.	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			441,56		744,87		605,07		1.192,17		1.192,17		4.175,83		
	75	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Mengoptimalkan Ketahanan pangan di Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	232,74	6 Kecamatan	693,66	6 Kecamatan	339,07	6 Kecamatan	1.173,59	6 Kecamatan	1.173,59	6 Kecamatan	3.612,66	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
	100	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Mengoptimalkan Profesionalisme Organisasi KTNA	Data tidak tersedia	60 Orang	40,51	60 Orang	51,21	60 Orang	266,00	60 Orang	18,58	60 Orang	18,58	60 Orang	394,86	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
	114	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Masyarakat Miskin di Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	9041 RTS-PM	168,31	-	-	-	-	-	-	-	-	9.041 RTS-PM	168,31	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
04	02	FUNGSI PENGAWASAN			195,29		209,36		294,46		320,78		320,78		1.340,67		
	01	INSPEKTORAT			195,29		209,36		294,46		320,78		320,78		1.340,67		
	20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	CC	BB	111,86	BB	166,38	BB	217,72	BB	245,64	BB	245,64	BB	987,24	INSPEKTORAT
	22	PROGRAM PENATAAN DAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR	Persentase penetapan sistem dan prosedur pengawasan	100 %	100 %	83,43	100 %	42,98	100 %	76,74	100 %	75,14	100 %	75,14	100 %	353,43	INSPEKTORAT
04		FUNGSI KEUANGAN			22.130,93		25.909,08		21.840,59		26.815,02		27.219,50		123.915,11		
	01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			22.130,93		25.909,08		21.840,59		26.815,02		27.219,50		123.915,11		
	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Data tidak tersedia	12 bulan	1.518,71	12 bulan	1.577,82	12 bulan	1.370,94	12 bulan	1.553,18	12 bulan	1.553,18	12 bulan	7.573,83	BPKAD
	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparat	Data tidak tersedia	12 bulan	1.127,76	12 bulan	2.903,78	12 bulan	165,09	12 bulan	738,32	12 bulan	738,32	12 bulan	5.673,28	BPKAD
	3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel	Data tidak tersedia	100 %	885,33	100 %	824,46	100 %	964,84	100 %	1.111,62	100 %	1.186,16	100 %	4.972,41	BPKAD
	4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT	Persentase kesesuaian antara renja perangkat	Data tidak tersedia	100 %	10,87	100 %	6,70	100 %	9,00	100 %	5,64	100 %	5,64	100 %	37,86	BPKAD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DAERAH (RENJA,RKA)	daerah dengan RKPD														
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai dimasing-masing PD yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya	Data tidak tersedia	38 Perangkat	58,44	38 Perangkat	50,70	38 Perangkat	37,19	38 Perangkat	28,11	38 Perangkat	28,11	38 Perangkat	202,54	BPKAD
		Jumlah Pegawai di masing-masing PD yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/sejenisnya		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		13 Puskesmas		
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEAH	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Data tidak tersedia	100 %	13.975	100 %	13.452	100 %	12.433	100 %	17.101	100 %	17.379	100 %	74.339,55	BPKAD
7	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Data tidak tersedia	100 %	2.419,68	100 %	4.985,38	100 %	5.070,00	100 %	4.320,82	100 %	4.320,82	100 %	21.116,71	BPKAD
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung	Data tidak tersedia	100 %	133,95	100 %	107,98	100 %	88,85	100 %	55,53	100 %	107,73	100 %	494,04	BPKAD
9	PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover Asuransi	Data tidak tersedia	2 Jenis Asuransi	2.000,68	2 Jenis Asuransi	2.000,58	2 Jenis Asuransi	1.701,60	2 Jenis Asuransi	1.901,01	2 Jenis Asuransi	1.901,01	2 Jenis Asuransi	9.504,89	BPKAD
	SASARAN 6 : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH DAN BEBAS KKN				3.812,539		4.122,900		9.699,971		15.865,144		15.924,957		49.428,505	
	i. BAGIAN ORGANISASI				-		-		137,95		99,79		99,79		340,52	
01	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	100 %	-	-	-	-	100 %	137,95	100 %	99,79	100 %	99,79	100 %	340,52	SETDA.BAGIAN ORGANISASI
04	02	FUNGSI PENGAWASAN			3.812,54		4.122,90		2.315,12		3.926,29		3.986,11		18.162,96	
	01	INSPEKTORAT			3.812,54		4.122,90		2.315,12		3.926,29		3.986,11		18.162,96	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100 %	1.094,85	100 %	1.120,03	100 %	561,48	100 %	749,68	100 %	749,68	100 %	4.275,71	INSPEKTORAT
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan	100	100 %	559,80	100 %	594,93	100 %	309,49	100 %	641,58	100 %	641,58	100 %	2.747,37	INSPEKTORAT
20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	CC	B	1.586,52	BB	2.132,31	BB	1.305,00	BB	2.400,06	BB	2.456,52	BB	9.880,41	INSPEKTORAT
21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	80	100 %	139,44	100 %	223,49	100 %	55,53	100 %	54,59	100 %	54,59	100 %	527,65	INSPEKTORAT
22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase penetapan sistem dan prosedur pengawasan	100	100 %	431,93	100 %	52,13	100 %	83,62	100 %	80,39	100 %	83,74	100 %	731,82	INSPEKTORAT

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
04	05	FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			0,00		0,00		7.246,90		11.839,06		11.839,06		30.925,02		
	01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		-	-	-	-		7.246,899		11.839,061		11.839,061		30.925,021		
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan Bintek/Sejenisnya Di Pemerintah Kabupaten Badung	12 %	-	-	-	98 %	6.833,60	99 %	10.925,73	100 %	10.925,73	100 %	28.685,06	BKPSDM	
	07	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Yang Terisi	100 %	-	-	-	75,50 %	300,92	76,00 %	873,17	76,50 %	873,17	76,50 %	2.047,27	BKPSDM	
	08	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Dapat Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	-	-	-	100 %	72,70	100 %	14,21	100 %	14,21	100 %	101,13	BKPSDM	
	09	PROGRAM PENINGKATAN SDM	Prosentase Akurasi Update Data Kepegawaian	data tidak tersedia	-	-	-	98 %	39,68	99 %	25,95	100 %	25,95	100 %	91,57	BKPSDM	
		MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA DALAM PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN	BERENCANA (KB)		768.431,86		867.766,83		817.186,27		1.211.753,34		1.008.771,50		4.673.909,81		
		TUJUAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT			768.431,86		867.766,83		817.186,27		1.211.753,34		1.008.771,50		4.673.909,81		
		SASARAN 7 : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			760.255,14		855.510,86		806.962,72		1.200.598,94		998.109,54		4.621.437,21		
01	01	URUSAN PENDIDIKAN			365.422,26		402.978,03		378.388,09		566.100,25		461.477,73		2.174.366,36		
	1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			365.422,26		402.978,03		378.388,09		566.100,25		461.477,73		2.174.366,36		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	15.547,56	100 %	15.789,16	100 %	16.554,14	100 %	17.382,30	100 %	17.382,30	100 %	82.655,46	DISDIK
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	1.609,70	100 %	3.859,18	100 %	408,10	100 %	800,60	100 %	800,60	100 %	7.478,19	DISDIK
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	cakupan layanan disiplin aparatur	100 %	100 %	3.072,32	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	3.072,32	DISDIK
	04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	461,19	100 %	670,43	100 %	1.305,99	100 %	1.822,02	100 %	1.822,02	100 %	6.081,66	DISDIK
	05	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Presentase kesesuaian antara Renja PD dengan RKPD	100 %	100 %	14,91	100 %	85,09	100 %	61,37	100 %	120,42	100 %	59,04	100 %	340,83	DISDIK
	06	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun mendapatkan pendidikan anak usia dini	100 %	98,87 %	1.027,31	100 %	15.990,76	100 %	17.102,52	100 %	2.929,27	100 %	2.126,98	100 %	39.176,84	DISDIK

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	07	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Presentase warga Kabupaten Badung usia 7-15 tahun mendapatkan pendidikan dasar	100 %	257.617,05	100 %	181.928,01	100 %	189.174,87	100 %	326.649,42	100 %	222.890,58	100 %	1.178.259,93	DISDIK
	08	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.18 tahun mendapatkan pendidikan	100 %	565,67	100 %	619,53	100 %	92,10	100 %	180,45	100 %	180,45	100 %	1.638,20	DISDIK
	09	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	47 %	4.507,67	60 %	116.707,61	65 %	117.827,53	70 %	137.102,30	75 %	137.102,30	75 %	513.247,41	DISDIK
	10	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	Persentase Satuan Pendidikan berbasis Informasi	data tidak tersedia	80.998,88	100 %	67.328,25	100 %	8.561,30	100 %	69.412,71	100 %	69.412,71	100 %	295.713,84	DISDIK
	11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Persentase prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	100 %	-	-	-	100 %	27.300,18	-	-	100 %	-	100 %	27.300,18	DISDIK
	12	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang berkualitas	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	100 %	9.700,75	100 %	9.700,75	100 %	19.401,50	DISDIK
02	13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			16.647,48		31.528,97		2.476,36		31.556,03		30.985,53		113.194,39	
	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			16.647,48		31.528,97		2.476,36		31.556,03		30.985,53		113.194,39	
	01	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Presentase prestasi bidang kesetaraan kepeloporan pada tingkat provinsi dan atau nasional	20 %	746,21	60 %	2.012,66	80 %	2.476,36	100 %	3.067,11	100 %	3.026,61	100 %	11.328,95	DISDIK
	02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Persentase prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	100 %	15.901,27	100 %	29.516,31	-	-	100 %	28.488,93	100 %	27.958,93	100 %	101.865,43	DISDIK
01	02	URUSAN KESEHATAN			370.576,05		411.338,06		418.830,06		596.722,64		499.457,34		2.296.924,15	
	1	DINAS KESEHATAN			186.883,08		215.004,22		209.823,76		251.143,47		216.873,26		1.079.727,79	
	01	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Presentase kesesuaian antara Renja PD dengan RKPD	100 %	-	100 %	61,51	100 %	92,93	100 %	92,62	100 %	92,62	100 %	339,69	DISKES
	02	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas	78,70 %	3.810,50	100 %	3.976,79	100 %	4.383,32	100 %	7.185,94	100 %	7.185,94	100 %	26.542,51	DISKES
	03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	70,97 %	145.952,53	90 %	157.475,31	90 %	157.460,76	90 %	192.491,19	90 %	158.220,62	90 %	811.600,41	DISKES
	04	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase sarana kesehatan dan toko obat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan obat	100 %	88,95	100 %	94,83	100 %	233,30	100 %	245,86	100 %	245,86	100 %	908,81	DISKES
	05	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan dan penanggulangan stunting	data tidak tersedia	1.295,02	100 %	514,07	100 %	1.219,11	100 %	1.192,76	100 %	1.192,76	100 %	5.413,72	DISKES
	06	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase desa yang	21	546,29	62	757,13	62	576,88	68	777,31	68	777,31	68	3.434,93	DISKES

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	07	LINGKUNGAN SEHAT PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	melaksanakan STBM Cakupan penanganan penakit menular	% data tidak tersedia	% 100	% 32.338,41	% 100	% 48.481,98	% 100	% 41.610,22	% 100	% 47.591,54	% 100	% 47.591,90	% 100	% 217.614,05	DISKES
	08	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Cakupan pelayanan kesehatan balita	data tidak tersedia	100	54,40	100	60,11	100	199,16	84	199,38	84	199,38	84	712,43	DISKES
	09	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	50 %	54 %	277,36	56 %	252,11	56 %	104,95	60 %	103,22	60 %	103,22	60 %	840,85	DISKES
	10	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	93 %	100 %	2.519,62	100 %	3.330,38	100 %	3.943,12	100 %	1.263,64	100 %	1.263,64	100 %	12.320,40	DISKES
	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANGUSADA				183.692,97		196.333,84		209.006,30		343.868,38		280.873,30		1.213.774,79	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	18.291,87	100 %	18.757,52	100 %	20.007,94	100 %	22.307,10	100 %	22.307,10	100 %	101.671,54	RSUD
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	70 %	80 %	852,20	85 %	2.329,82	90 %	1.622,61	95 %	15.100,28	100 %	15.000,28	100 %	34.905,20	RSUD
	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mendapat Diklat/Bimtek sejenisnya di RSUD Kab. Badung	45 %	-	-	55 %	810,24	60 %	351,65	65 %	425,09	70 %	430,01	70 %	2.017,00	RSUD
	04	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	100 %	100 %	43.712,09	100 %	34.436,26	100 %	21.803,06	100 %	155.272,82	100 %	92.372,82	100 %	347.597,05	RSUD
	05	PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	100 %	100 %	120.836,81	100 %	140.000,00	100 %	165.000,00	100 %	150.000,00	100 %	150.000,00	100 %	725.836,81	RSUD
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan	100 %	-	-	-	-	100 %	221,04	100 %	763,08	100 %	763,08	100 %	1.747,20	RSUD
	3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				0,00		0,00		0,00		1.710,79		1.710,79		3.421,57	
	05	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan	75 %	-	-	-	-	-	-	76,40	1.710,79	76,40	1.710,79	77,24	3.421,57	DP2KBP3A
02	08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.365,58		8.321,72		6.687,82		5.424,50		5.393,40		32.193,01	
	01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.365,58		8.321,72		6.687,82		5.424,50		5.393,40		32.193,01	
	01	PROGRAM PELAYANAN	Cakupan layanan administrasi	100	100	1.409,70	100	1.264,66	100	629,22	100	1.017,01	100	1.017,01	100	5.337,60	DP2KBP3A

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta			
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	02	ADMINISTRASI PERKANTORAN	perkantoran	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	505,49	100 %	1.412,30	100 %	1.372,79	100 %	490,37	100 %	490,37	100 %	4.271,32	DP2KBP3A	
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	251,84	100 %	250,69	100 %	349,06	100 %	430,19	100 %	430,19	100 %	1.711,97	DP2KBP3A	
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Presentase kesesuaian antara Renja PD dengan RKPD	100 %	100 %	15,00	100 %	24,67	100 %	45,30	100 %	19,88	100 %	19,88	100 %	124,73	DP2KBP3A	
	05	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan	75 %	75 %	2.821,04	76 %	4.424,58	76,03	3.872,73	76,40	2.765,94	77,24	2.765,94	77,24	16.650,24	DP2KBP3A	
	06	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Persentase Perkawinan Remaja kurang dari 20 tahun	data tidak tersedia	0 %	690,97	0 %	422,04	0,17 %	178,97	0,16 %	52,28	0,15 %	52,28	0,15 %	1.396,55	DP2KBP3A	
	07	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran / Total Fertility Rate (TFR)	data tidak tersedia	-	-	-	-	2,2	2,25	2,2	12	2,1	93,50	2,1	107,83	DP2KBP3A	
	08	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	51 %	54 %	189,78	55 %	113,87	56,56 %	1,07	-	-	-	-	59,12 %	304,72	DP2KBP3A	
	09	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Persentase kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	data tidak tersedia	92 %	461,66	94 %	353,76	96	86,97	98	359,94	100	328,84	100	1.591,16	DP2KBP3A	
	10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang	100 %	100 %	20,11	100 %	55,14	100 %	149,46	100 %	276,80	100 %	195,39	100 %	696,90	DP2KBP3A	
02	11	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.243,77		1.344,08		580,39		795,53		795,53		4.759,31		
		01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			1.243,77		1.344,08		580,39		795,53		795,53		4.759,31		
		01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	100 %	100 %	1.243,77	100 %	1.344,08	100 %	580,39	100 %	795,53	100 %	795,53	100 %	4.759,31	DISKOP UKMP
			SASARAN 8 : MENINGKATNYA TINGKAT KEBAHAGIAAN MASYARAKAT			-		610,36		666,68		587,85		587,85		2.452,74		
04	04	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-		610,36		666,68		587,85		587,85		2.452,74		
		01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					610,36		666,68		587,85		587,85		2.452,74		
		01	PROGRAM PENINGKATAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	Terlaksananya survey pengukuran tingkat kebahagiaan	data tidak tersedia	-	-	1 dokumen	535,01	1 dokumen	559,09	1 dokumen	524,09	1 dokumen	524,09	1 dokumen	2.142,27	BALITBANG
		02	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Jumlah data dan Informasi yang dikembangkan	data tidak tersedia	-	-	3 kegiatan	75,35	3 kegiatan	107,60	3 kegiatan	63,76	2 kegiatan	63,76	2 kegiatan	310,47	BALITBANG
			SASARAN 9 : MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN			8.176,71		11.645,61		9.556,87		10.566,55		10.074,11		50.019,86		
01	06	URUSAN SOSIAL				7.498,05		9.883,31		7.630,47		8.308,94		7.863,10		41.183,87		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	01	DINAS SOSIAL			7.498,05		9.883,31		7.630,47		8.308,94		7.863,10		41.183,87		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administarsi Perkantoran	12 bln	100 %	1.128,64	100 %	997,56	100 %	776,28	100 %	825,19	100 %	825,19	12 bln	4.552,85	DINSOS
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	617,36	100 %	1.661,62	100 %	233,75	100 %	218,78	100 %	218,78	100 %	2.950,28	DINSOS
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	207,20	100 %	218,22	100 %	275,09	100 %	349,87	100 %	349,87	100 %	1.400,26	DINSOS
	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat Ketepatan Kualitas dan kuantitas penyebaran Informasi	80 buku	100 %	56,88	100 %	59,92	100 %	136,25	100 %	54,16	100 %	59,56	80 buku	366,76	DINSOS
	05	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Kesesuaian Renja PD dengan RKPD	3 dokumen	100 %	10,00	100 %	10,38	100 %	11,69	100 %	11,09	100 %	11,09	3 dokumen	54,24	DINSOS
	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	100 %	68,81 %	747,97	100 %	942,36	84,41 %	184,54	92,2 %	149,89	100 %	149,89	100 %	2.174,66	DINSOS
	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	2.897,95	100 %	4.156,75	100 %	3.525,62	100 %	4.455,79	100 %	4.004,54	100 %	19.040,65	DINSOS
	08	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	1.832,05	100 %	1.836,49	100 %	2.487,26	100 %	2.244,18	100 %	2.244,18	100 %	10.644,16	DINSOS
04	03	FUNGSI PERENCANAAN			678,66		1.762,30		1.926,41		2.257,61		2.211,01		8.835,99		
	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			678,66		1.762,30		1.926,41		2.257,61		2.211,01		8.835,99		
	01	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	678,66	100%	1.762,30	100%	1.926,41	100%	2.257,61	100%	2.211,01	100%	8.835,99	BAPPEDA
		MISI 5 : MEMPERKUAT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN				13.713,56		17.729,85		8.375,60		7.929,06		7.815,18		55.563,25	
		TUJUAN 5 : MENGUATNYA UMKM DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN KERAKYATAN				13.713,56		17.729,85		8.375,60		7.929,06		7.815,18		55.563,25	
		SASARAN 10 : MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR UMKM TERHADAP PDRB				13.713,56		17.729,85		8.375,60		7.929,06		7.815,18		55.563,25	
	11	URUSAN KOPERASI DAN USAHA				3.349,83		5.450,08		1.989,92		1.983,59		1.983,59		14.757,01	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KECIL DAN MENENGAH															
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				3.349,83		5.450,08		1.989,92		1.983,59		1.983,59		14.757,01	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	100 %	100 %	539,90	100 %	1.069,37	100 %	8,07	-	-	-	-	100 %	1.617,35	DISKOP UKMP
2	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM UKM YANG KONDUSIF	Persentase Usaha Kecil yang melakukan kemitraan	100 %	100 %	647,16	100 %	1.467,86	100 %	699,86	100 %	251,60	100 %	251,60	100 %	3.318,08	DISKOP UKMP
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI	Jumlah data/informasi UMKM-UMKM	100 %	62 buku	25,17	112 buku	29,92	112 buku	5,86	100 buku	20,48	100 buku	20,48	100 %	101,91	DISKOP UKMP
4	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100 %	100 %	1.188,01	100 %	1.272,01	100 %	900,92	100 %	952,67	100 %	952,67	100 %	5.266,27	DISKOP UKMP
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	100 %	100 %	696,14	100 %	1.244,76	100 %	175,05	100 %	366,00	100 %	366,00	100 %	2.847,95	DISKOP UKMP
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Laporan capaian kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	242,44	100 %	360,16	100 %	191,84	100 %	387,18	100 %	387,18	100 %	1.568,79	DISKOP UKMP
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 %	110 Dokumen	11,00	30 Dokumen	6,00	50 Dokumen	8,33	25 Dokumen	5,67	35 Dokumen	5,67	250 Dokumen	36,66	DISKOP UKMP
03	06	URUSAN PERDAGANGAN			6.510,47		3.219,41		3.139,72		1.749,96		1.636,08		16.255,64	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				6.510,47		3.219,41		3.139,72		1.749,96		1.636,08		16.255,64	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase perlindungan terhadap konsumen	100 %	100 %	1.751,76	100 %	286,81	100 %	114,66	100 %	194,23	100 %	80,35	100 %	2.427,80	DISKOP UKMP
2	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NAWA	Persentase Efisiensi Perdagangan dalam negeri	100 %	100 %	4.758,71	100 %	1.608,13	100 %	2.699,65	100 %	909,85	100 %	587,38	100 %	10.563,71	DISKOP UKMP
3	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase realisasi eksor Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	-	-	100 %	160,36	100 %	4,27	100 %	58,50	100 %	909,85	100 %	1.132,97	DISKOP UKMP
4	PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR	Persentase Pelaksanaan Tertib Ukur	Data tidak tersedia	-	-	100 %	1.164,13	100 %	321,15	100 %	587,38	100 %	58,50	100 %	2.131,16	DISKOP UKMP
07	URUSAN PERINDUSTRIAN				3.783,54		8.920,50		3.102,70		4.047,38		4.047,38		23.901,50	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				3.783,54		8.920,50		3.102,70		4.047,38		4.047,38		23.901,50	
01	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Jumlah IKM yang meningkat produktivitas usahanya	1000 orang 1500 IKM 90 IKM	300 IKM	1.318,56	300 IKM	4.467,30	300 IKM	1.291,06	300 IKM	1.787,68	300 IKM	1.787,68	1.500 IKM	10.652,27	DISPERINAKEK
02	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah kelompok IKM yang mampu menerapkan teknologi industri	17 Gugus	1 Gugus	25,52	1 Gugus	419,31	1 auqus	64,93	1 auqus	234,08	1 auqus	234,08	5 auqus	977,92	DISPERINAKEK
03	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	Data tidak tersedia	100 %	160,12	100 %	871,62	100 %	353,23	100 %	382,99	100 %	382,99	100 %	2.150,95	DISPERINAKEK
04	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administarsi perkantoran	Data tidak tersedia	100 %	1.200,94	100 %	1.262,84	100 %	846,56	100 %	906,36	100 %	906,36	100 %	5.123,06	DISPERINAKEK
		Persentase Pelayanan administrasi perkantoran		100 %		100 %										

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	05	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelavanan sarana dan prasarana aparatur	Data tidak tersedia	100 %	785.41	100 %	1.598.32	100 %	153.75	100 %	266.93	100 %	266.93	100 %	3.071.33	DISPERINAKEK
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	Data tidak tersedia	100 %		100 %										
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan Keuangan	Data tidak tersedia	10 dokumen	278.00	10 dokumen	291.66	100 %	383.25	100 %	459.01	100 %	459.01	100 %	1.870.93	DISPERINAKEK
			Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Data tidak tersedia	100 %		100 %										
	07	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Data tidak tersedia	30 dokumen	15.00	30 dokumen	9.45	50 dokumen	9.92	3 dokumen	10.33	3 dokumen	10.33	3.000 dokumen	55.04	DISPERINAKEK
			Kesesuaian Renja PD dengan RKPD	Data tidak tersedia	100 %		100 %										
01		FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				69.72		139.86		143.25		148.13		148.13		649.10	
		SEKRETARIAT DAERAH															
	a.	BAGIAN PEREKONOMIAN				69.72		139.86		143.25		148.13		148.13		649.10	
	01	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Peningkatan Kualitas Produk UMKM	6 kecamatan	6 Kecamatan	69.72	6 Kecamatan	139.86	6 kecamatan	143.25	6 kecamatan	148.13	6 kecamatan	148.13	6 kecamatan	649.10	SETDA.BAGIAN PEREKONOMIAN
		MISI 6 : MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG MENJUNJUNG TINGGI PENEKAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)				8.197,55		12.852,49		8.369,59		9.942,33		9.958,31		49.320,27	
		TUJUAN 6 : TERWUJUDNYA KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PERDA DAN PERKADA				5.604,39		10.084,11		6.596,88		8.284,97		8.269,85		38.840,20	
		SASARAN 11 : MENINGKATNYA PENCEGAHAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA				960,12		2.756,70		2.313,05		3.158,78		3.158,78		12.347,44	
01	05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				960,12		2.756,70		2.313,05		3.158,78		3.158,78		12.347,44	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				960,12		2.756,70		2.313,05		3.158,78		3.158,78		12.347,44	
	16	PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Cakupan warga negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	75 %	75 %	479,01	80 %	1.957,69	85 %	2.078,82	90 %	2.945,39	95 %	2.945,39	95 %	10.406,30	SATPOL PP
	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	100 %	481,11	100 %	799,01	100 %	234,23	100 %	213,39	100 %	213,39	100 %	1.941,13	SATPOL PP
		SASARAN 12 : MENINGKATNYA PENEKAKAN PERDA DAN PERKADA				4.644,28		7.327,40		4.283,84		5.126,19		5.111,07		26.492,77	
01	05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.644,28		7.327,40		4.283,84		5.126,19		5.111,07		26.492,77	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				4.644,28		7.327,40		4.283,84		5.126,19		5.111,07		26.492,77	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	16	PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Menurunnya pelanqqaran Perda dan Perkada	70 %	75 %	1.656,17	80 %	3.143,41	85 %	2.270,05	90 %	2.608,75	95 %	2.608,75	95 %	12.287,13	SATPOL PP
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.464,20	100 %	1.647,82	100 %	973,25	100 %	1.297,99	100 %	1.282,87	100 %	6.666,12	SATPOL PP
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	443,65	100 %	798,03	100 %	286,61	100 %	391,80	100 %	391,80	100 %	2.311,89	SATPOL PP
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan Disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas	100 %	100 %	306,00	100 %	504,00	100 %	36,00	100 %	30,00	100 %	30,00	100 %	906,00	SATPOL PP
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya	100 %	100 %	77,14	100 %	84,90	100 %	154,63	100 %	74,77	100 %	74,77	100 %	466,21	SATPOL PP
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan	100 %	100 %	223,64	100 %	240,34	100 %	383,89	100 %	496,28	100 %	496,28	100 %	1.840,44	SATPOL PP
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RENJA,RKA)	Terlaksananya perencanaan dan penanqqaran perangkat daerah	100 %	100 %	9,88	100 %	9,03	100 %	9,05	100 %	9,98	100 %	9,98	100 %	47,93	SATPOL PP
	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	100 %	32,25	100 %	33,97	-	-	-	-	-	-	100 %	66,22	SATPOL PP
	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	100 %	431,34	100 %	865,90	100 %	170,35	100 %	216,61	100 %	216,61	100 %	1.900,83	SATPOL PP
		TUJUAN 7 : TERWUJUDNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER				2.593,15		2.768,38		1.772,70		1.657,36		1.688,46		10.480,06	
		SASARAN 13 : MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER				2.593,15		2.768,38		1.772,70		1.657,36		1.688,46		10.480,06	
02	02	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.593,15		2.652,55		1.672,68		1.561,30		1.592,40		10.072,08	
	01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.593,15		2.652,55		1.672,68		1.561,30		1.592,40		10.072,08	
	01	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	presentase Perempuan di lembaga pemerintahan	11 %	30 %	259,96	30 %	620,48	30 %	840,54	30 %	223,85	30 %	223,85	30 %	2.168,68	DP2KBP3A
	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100 %	100 %	249,11	100 %	72,18	100 %	0,00	100 %	77,11	100 %	77,11	100 %	475,51	DP2KBP3A
	03	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari tindakan kekerasan	85 %	100 %	1.150,36	100 %	1.388,06	100 %	569,81	100 %	798,77	100 %	829,87	100 %	4.736,88	DP2KBP3A
	04	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif	100 %	100 %	933,72	100 %	571,83	100 %	262,33	100 %	461,57	100 %	461,57	100 %	2.691,02	DP2KBP3A
04		FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-		115,83		100,03		96,06		96,06		407,98	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-		115.83		100.03		96.06		96.06		407.98		
01	PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	Tersusunnya indeks pembangunan gender	data tidak tersedia	-	-	1 dokumen	115.83	1 dokumen	100.03	1 dokumen	96.06	1 dokumen	96.06	1 dokumen	407.98	BALITBANG	
	MISI 7 : MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA				86.611.17		145.429.63		91.611.17		187.534.35		126.847.53		638.033.84		
	TUJUAN 8 : TERWUJUDNYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN				64.187.17		97.000.72		66.842.86		158.780.58		98.093.76		484.905.10		
	SASARAN 14 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				64.187.17		97.000.72		66.842.86		158.780.58		98.093.76		484.905.10		
02	05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			62.002.64		91.542.60		61.565.27		157.310.30		96.280.64		468.701.45		
	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			62.002.64		91.542.60		61.565.27		157.310.30		96.280.64		468.701.45		
	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	100 %	4.566,90	100 %	5.572,10	100 %	4.113,09	100 %	5.441,96	100 %	4.276,08	100 %	23.970,13	DLHK
	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai Penunjang Kegiatan	100 %	100 %	2.463,48	100 %	3.656,09	100 %	379,43	100 %	1.036,91	100 %	511,00	100 %	8.046,92	DLHK
	3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	351,46	100 %	372,32	100 %	889,40	100 %	1.000,28	100 %	999,14	100 %	3.612,59	DLHK
	4	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Persentase Terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %	100 %	11,00	100 %	10,04	100 %	9,93	100 %	12,36	100 %	12,36	100 %	55,69	DLHK
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	100 %	100 %	41.626,89	100 %	56.926,10	100 %	43.628,77	100 %	133.405,52	100 %	74.858,03	100 %	350.445,31	DLHK
	6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100 %	100 %	2.168,74	100 %	2.759,38	100 %	1.279,28	100 %	1.684,05	100 %	1.799,98	100 %	9.691,43	DLHK
	7	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100 %	100 %	1.267,14	100 %	102,30	100 %	91,47	100 %	82,08	100 %	82,08	100 %	1.625,08	DLHK
	8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	100 %	586,04	100 %	967,65	100 %	165,05	U %	824,77	100 %	824,77	100 %	3.368,29	DLHK
	9	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase keindahan dan keasrian taman di kabupaten badung	100 %	100 %	8.765,48	100 %	20.957,02	100 %	10.908,00	100 %	13.709,62	100 %	12.806,25	100 %	67.146,37	DLHK
	10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	100 %	195,50	100 %	219,60	100 %	100,85	100 %	112,74	100 %	110,94	100 %	739,64	DLHK

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	URUSAN PANGAN				1.681,38		4.489,55		4.872,10		627,61		970,46		12.641,10	
01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				1.681,38		4.489,55		4.872,10		627,61		970,46		12.641,10	
16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	data tidak tersedia	84,50	1.681,38	85,00	4.489,55	96,00	4.872,10	96,50	627,61	97,00	970,46	97,00	12.641,10	DISPERPA
03	URUSAN PERTANIAN				210,74		756,79		366,21		749,01		749,01		2.831,76	
01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				210,74		756,79		366,21		749,01		749,01		2.831,76	
09	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN	Jumlah data yang informatif yang tersedia	3,000 Jenis Data	3,00 Jenis Data	78,50	3,00 Jenis Data	481,83	3,00 Jenis Data	75,96	3,00 Jenis Data	229,21	3,00 Jenis Data	229,21	3,00 Jenis Data	1.094,71	DISPERPA
11	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah Produksi pertanian pertahun	122500 ton	125.000,00 ton	132,25	127.500,00 ton	274,96	127.500,00 ton	290,26	130.000,00 ton	519,79	130.000,00 ton	519,79	132.500,00 ton	1.737,05	DISPERPA
01	FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				292,41		211,78		39,27		93,66		93,66		730,79	
02	SEKRETARIAT DAERAH															
a	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM				292,41		211,78		39,27		93,66		93,66		730,79	
1	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100 %	100 %	41,38	100 %	166,30	100 %	37,45	100 %	65,22	100 %	65,22	100 %	375,58	SETDA. BAGIAN SDA
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok tani/masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hutan lestari	100 %	9,00 Kelompok	11,62	9,00 Kelompok	45,48	9,00 Kelompok	1,82	9,00 Kelompok	28,44	9,00 Kelompok	28,44	9,00 Kelompok	115,80	SETDA. BAGIAN SDA
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI KEHUTANAN	Jumlah data base dan peta potensi wilayah kehutanan	100 %	1 Paket	239,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	239,41	SETDA. BAGIAN SDA
	TUJUAN 9 : TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA SECARA TERPADU				22.424,00		48.428,90		24.768,31		28.753,77		28.753,77		153.128,75	
	SASARAN 15 : MENINGKATNYA KAPASITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA				22.424,00		48.428,90		24.768,31		28.753,77		28.753,77		153.128,75	
01	05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			22.424,00		48.428,90		24.768,31		28.753,77		28.753,77		153.128,75	
01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				11.924,44		23.966,15		8.288,64		10.070,59		10.070,59		64.320,41	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.529,72	100 %	1.812,15	100 %	1.545,99	100 %	1.778,46	100 %	1.778,46	100 %	8.444,78	BPBD
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	1.743,25	100 %	1.254,00	100 %	461,98	100 %	457,01	100 %	457,01	100 %	4.373,26	BPBD
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	268,72	100 %	274,46	100 %	281,86	100 %	323,61	100 %	323,61	100 %	1.472,27	BPBD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %	-	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	8,95	100 %	8,95	100 %	37,90	BPBD	
	05	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Persentase desa/kelurahan menda fasilitasi pengurangan resiko bencana	55 %	60 %	714,63	70 %	1.408,03	80 %	616,83	-	-	-	100 %	2.739,49	BPBD	
			Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	76,8 %	654,48	100 %	654,48	100 %	1.308,97	BPBD	
	06	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	100 %	3.557,45	100 %	4.246,85	100 %	3.274,40	-	-	-	100 %	11.078,70	BPBD	
			Response time mencapai lokasi kejadian	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	18 Menit	3.671,92	15 Menit	3.671,92	15 Menit	7.343,84	BPBD	
	07	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Persentase kerusakan/kerugian sarpras, ekonomi dan psikologi yang terpulihkan	100 %	100 %	4.110,66	100 %	14.960,67	100 %	2.097,59	90 %	3.176,14	-	90 %	24.345,06	BPBD	
			Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	-	90 %	3.176,140	90 %	3.176,14	BPBD	
	02	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			10.499,56		24.462,75		16.479,67		18.683,18		18.683,18		88.808,34		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.510,94	100 %	3.406,49	100 %	2.839,71	100 %	3.498,01	100 %	3.498,01	100 %	15.753,14	DISKARMAT
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	1.599,22	100 %	3.756,56	100 %	2.058,00	100 %	381,10	100 %	381,10	100 %	8.175,98	DISKARMAT
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	216,00	100 %	245,64	100 %	458,22	100 %	751,00	100 %	751,00	100 %	2.421,86	DISKARMAT
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling terhubung	100 %	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	50,00	DISKARMAT	
	05	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100 %	100 %	6.163,40	100 %	17.044,06	100 %	11.113,75	100 %	14.043,07	100 %	14.043,07	100 %	62.407,35	DISKARMAT
			MISI 8 : MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			1.590.168,41		1.669.422,08		1.211.479,02		1.063.244,28		646.845,93		6.726.715,39	
			TUJUAN 10 : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING			7.182,60		10.179,38		7.573,27		7.188,67		7.126,17		39.250,08	
			SASARAN 16 : MENINGKATNYA DAYA SAING TENAGA KERJA			7.182,60		10.179,38		7.573,27		7.188,67		7.126,17		39.250,08	
02	01		URUSAN TENAGA KERJA			7.171,07		9.715,18		7.274,11		6.717,42		6.654,92		37.532,70	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			7.171,07		9.715,18		7.274,11		6.717,42		6.654,92		37.532,70		
	01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	35 %	35,74 %	4.437,918	41,39 %	4.562,368	47,48 %	4.146,246	54 %	2.759,954	60,96 %	2.759,954	60,96 %	18.666,44	DISPRINNAKER
	02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Persentase penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama	52 %	52 %	864.196	54 %	1.512.219	56 %	585.740	58 %	909.941	60 %	909.941	60 %	4.782.04	DISPRINNAKER
	03	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	50 %	50 %	1.868.952	50 %	3.640.591	50%	2.542.12	50 %	3.047.529	50 %	2.985.029	50 %	14.084.23	DISPRINNAKER
02	11	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			11,53		464,20		299,16		471,24		471,24		1.717,38		
	01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			11,53		464,20		299,16		471,24		471,24		1.717,38		
	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIP UMKM	Persentase Kewirausaha yang mempunyai jiwa interpreneur	100 %	100 %	11,53	100 %	464,20	100	299,16	100 %	471,24	100 %	471,24	100 %	1.717,38	DISKOP UKMP
		TUJUAN 11 : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERKUALITAS			1.582.985,81		1.659.242,70		1.203.905,74		1.056.055,61		639.719,77		6.687.465,31		
		SASARAN 17 : MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG			1.582.985,81		1.659.242,70		1.203.905,74		1.056.055,61		639.719,77		6.687.465,31		
01	01	URUSAN PENDIDIKAN			0,00		0,00		489.136,73		82.579,51		0,00		831.609,70		
	02	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-		-		489.136,73		82.579,51		0,00		831.609,70		
	37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	48 %	-	-	-	85 %	489.136,73	92 %	79.713,41	-	-	100 %	775.852,05	DPUPR	
	46	PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	100 %	2.866,10	-	-	100 %	55.757,65	DPUPR	
01	02	URUSAN KESEHATAN			-		-		110.532		232.346		-		628.540		
	03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			-		-		110.531,83		232.346,44		0,00		628.540,48		
	10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	data tidak tersedia	-	-	-	85 %	110.531,83	92 %	232.346,44	-	-	100 %	628.540,48	DPUPR	
01	03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN			1.302.713,57		1.370.123,94		400.511,86		562.717,47		463.336,90		4.099.403,73		
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.302.713,57		1.370.123,94		400.511,86		562.717,47		463.336,90		4.099.403,73		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %	24.589,95	100 %	28.030,35	100 %	24.148,16	100 %	2.598,22	100 %	2.858,04	100 %	82.224,71	DPUPR
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan	100 %	100 %	2.033,14	100 %	10.280,90	100 %	2.879,79	100 %	5.485,52	100 %	6.034,07	100 %	26.713,42	DPUPR

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		lancar														
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100 %	100 %	2.742,26	100 %	3.193,26	100 %	1.850,55	100 %	3.295,60	100 %	3.486,56	100 %	14.568,23	DPUPR
07	PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi Mantap	94,50 %	97,50 %	397.163,23	-	-	-	-	-	-	-	-	97,50 %	397.163,23	DPUPR
07	PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase infrastruktur jalan kabupaten berkondisi baik	97,5 %	-	-	98 %	406.413,35	98,80 %	91.247,45	92,20 %	181.090,39	99,60 %	125.000,00	99,60 %	803.751,19	DPUPR
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100 %	100 %	12,74	100 %	261,52	100 %	379,25	100 %	466,60	100 %	513,26	100 %	1.633,37	DPUPR
15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	100 %	100 %	2.021,56	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	2.021,56	DPUPR
23	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI	Tersedianya jasa konstruksi yang memadai	data tidak tersedia	-	-	30 %	592,68	60 %	179,38	80 %	317,94	100 %	349,73	100 %	1.439,72	DPUPR
18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi Mantap	94,50 %	95,78 %	13.714,86	-	-	-	-	-	-	-	-	95,78 %	13.714,86	DPUPR
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai	100 %	100 %	1.282,73	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	1.282,73	DPUPR
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	95,72 %	95,78 %	127.383,36	-	-	-	-	-	-	-	-	95,78 %	127.383,36	DPUPR
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	persentase infrastruktur jaringan irigasi berkondisi baik	94,72 %	-	-	98,36 %	160.863,75	97,20 %	78.212,07	98,20 %	75.681,50	99,20 %	81.960,18	99,20 %	396.717,50	DPUPR
35	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Penyehatan Lingkungan	58,78 %	62 %	103.872,07	-	-	-	-	-	-	-	-	62 %	103.872,07	DPUPR
35	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak	58,78 %	-	-	88,71 %	18.073,53	89,50 %	8.404,46	92 %	47.773,84	95 %	12.277,54	95 %	86.529,37	DPUPR
37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/ GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	48 %	65 %	587.605,20	76 %	673.529,48	85 %	151.975,71	92 %	237.867,39	100 %	218.750,28	100 %	1.869.728,06	DPUPR
42	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78 %	60,85 %	38.484,59	-	-	-	-	-	-	-	-	60,85 %	38.484,59	DPUPR
43	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78 %	60,85 %	526,46	-	-	-	-	-	-	-	-	60,85 %	526,46	DPUPR
44	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78 %	66,67 %	1.281,43	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67 %	1.281,43	DPUPR
42	PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	60 %	-	-	100 %	68.885,11	100 %	41.235,04	100 %	8.140,49	100 %	12.107,25	100 %	130.367,88	DPUPR
01	04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN			244.635,15		141.978,91		45.499,95		57.565,07		56.214,22		545.893,30	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KAWASAN PERMUKIMAN														
01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				244.635,15		141.978,91		45.499,95		57.565,07		56.214,22		545.893,30	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Data tidak tersedia	100 %	1.530,49	100 %	1.543,55	100 %	1.754,78	100 %	1.298,25	100 %	1.298,25	100 %	7.425,33	DPKP
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	Data tidak tersedia	100 %	1.036,22	100 %	1.109,28	100 %	708,00	100 %	1.114,48	100 %	1.114,48	100 %	5.082,46	DPKP
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	Data tidak tersedia	100 %	549,44	100 %	771,56	100 %	1.156,53	100 %	1.281,77	100 %	1.281,77	100 %	5.041,07	DPKP
04	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	64,67 %	77 %	239.941,27	81 %	121.870,99	85 %	33.951,68	87 %	33.488,09	90 %	32.218,54	90 %	461.470,56	DPKP
05	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Data tidak tersedia	100 %	10,00	100 %	9,56	100 %	10,13	100 %	10,51	100 %	10,51	100 %	50,71	DPKP
06	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Persentase Monitoring	100 %	100 %	11,94	100 %	7,99	100 %	12,90	100 %	20,98	100 %	20,98	100 %	74,80	DPKP
07	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Data tidak tersedia	100 %	1.088,80	100 %	1.659,07	100 %	2.294,70	100 %	6.500,59	100 %	6.419,30	100 %	17.962,45	DPKP
08	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	Data tidak tersedia	20 %	467,00	25 %	15.001,22	30 %	5.600,53	35 %	13.840,87	40 %	13.840,87	40 %	48.750,48	DPKP
18	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni akibat Bencana	Data tidak tersedia	100 %	0,00	100 %	5,68	100 %	10,70	100 %	9,52	100 %	9,52	100 %	35,43	DPKP
01	09	URUSAN PERHUBUNGAN			24.674,34		35.537,17		36.261,60		59.883,03		59.231,77		215.587,90	
	01	DINAS PERHUBUNGAN			24.674,34		35.537,17		36.261,60		59.883,03		59.231,77		215.587,90	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMININISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tuqas	100 %	1.702,10	100 %	2.052,00	100 %	22.570,87	100 %	23.419,39	100 %	23.419,39	100 %	73.163,77	DISHUB
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	2.537,53	100 %	4.229,73	100 %	3.217,52	100 %	7.719,69	100 %	7.719,68	100 %	25.424,15	DISHUB
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100 %	378,39	100 %	366,20	100 %	409,92	100 %	609,36	100 %	668,30	100 %	2.432,17	DISHUB
	04	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	89,39 %	13.634,85	100 %	24.414,27	100 %	9.387,74	100 %	27.750,75	100 %	27.040,65	100 %	102.228,27	DISHUB
	05	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	99,34 %	6.367,02	100 %	4.465,04	100 %	665,61	100 %	326,53	100 %	326,53	100 %	12.150,73	DISHUB
	06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA	Capaian meningkatnya kualitas sumber daya manusia	100 %	44,45	-	-	-	-	100 %	48,95	100 %	48,95	100 %	142,36	DISHUB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	07	MANUSIA PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	10,00	100 %	9,92	100 %	9,93	100 %	8,35	100 %	8,27	100 %	46,46	DISHUB	
02	10	URUSAN PENDIDIKAN			0,00		0,00		0,00		41.636,38		41.636,38		83.272,76		
	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-		-		-		41.636,38		41.636,38		83.272,76		
	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	persentase infrastruktur jaringan internet/intranet yang dibangun di Kabupaten Badung	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	100 %	41.636,38	100 %	41.636,38	100 %	83.272,76	DISKOMINFO	
02	10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.566,47		111.069,69		121.649,30		18.916,28		18.935,66		281.137,41		
	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			10.566,47		111.069,69		121.649,30		18.916,28		18.935,66		281.137,41		
	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	persentase infrastruktur jaringan internet/intranet yang dibangun di Kabupaten Badung	data tidak tersedia	100 %	10.566,47	100 %	111.069,69	100 %	121.649,30	100 %	18.916,28	100 %	18.935,66	100 %	281.137,41	DISKOMINFO
04	01	FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			92,65		60,08		54,60		55,84		55,84		319,01		
	01	SEKRETARIAT DAERAH															
	a	BAGIAN PEMBANGUNAN			92,65		60,08		54,60		55,84		55,84		319,01		
	03	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	data tidak tersedia	1 Dokumen	92,65	1 Dokumen	60,08	1 Dokumen	54,60	1 Dokumen	55,84	1 Dokumen	55,84	1 Dokumen	319,01	BAGIAN PEMBANGUNAN
04	03	FUNGSI PERENCANAAN			303,64		472,91		259,87		355,59		309,00		1.701,02		
	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			303,64		472,91		259,87		355,59		309,00		1.701,02		
	01	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	3 paket	303,64	3 paket	301,42	3 paket	68,67	3 paket	134,77	3 paket	134,77	15 paket	943,3	BAPPEDA
	01	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%	-	-	20,00%	171,492	23,64%	191,20	27,27%	220,826	30,91%	174,235	30,91%	757,8	BAPPEDA
		MISI 9 : MEMPERKUAT PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN YANG BERSINERGI DENGAN KEPARIWISATAAN BERBASIS BUDAYA			59.191,07		116.846,84		81.083,48		166.390,69		146.247,84		569.759,92		
		TUJUAN 12 : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN			35.431,80		39.135,46		42.019,32		54.948,32		44.805,46		216.340,36		
		SASARAN 18 : MENINGKATNYA PRODUKSI PANGAN NABATI DAN HEWANI			35.431,80		39.135,46		42.019,32		54.948,32		44.805,46		216.340,36		
03	03	URUSAN PERTANIAN			23.028,58		32.173,47		32.881,77		43.475,60		38.332,74		169.892,17		
	01	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			23.028,58		32.173,47		32.881,77		43.475,60		38.332,74		169.892,17		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	60 bulan	12 bulan	3.929,52	12 bulan	4.727,23	12 bulan	3.992,47	12 bulan	3.818,73	12 bulan	3.818,73	60 bulan	20.286,68	DIPERPA	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	60 bulan	1 Paket	1.826,91	1 paket	1.796,03	1 paket	1.050,84	1 paket	783,59	1 paket	783,59	5 paket	6.240,96	DIPERPA	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	60 bulan	12 Bulan	368,48	12 bulan	463,72	12 Bulan	532,55	12 Bulan	706,75	12 Bulan	706,75	60 bulan	2.778,24	DIPERPA	
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	3 jenis	3 Jenis	10,99	2 jenis	8,16	2 jenis	8,31	2 jenis	6,75	2 jenis	6,75	3 jenis	40,97	DIPERPA	
8	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	280 orang	345 orang	482,40	345 orang	368,79	110 orang	8.738,72	110 orang	18.492,28	110 orang	18.492,28	1020 orang	46.574,47	DIPERPA	
09	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN	Jumlah data yang informatif yang tersedia	3 jenis data	3 jenis data	528,46	3 jenis data	202,51	3 jenis data	279,14	3 jenis data	457,19	3 jenis data	457,19	3 jenis data	1.924,49	DIPERPA	
10	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	15 kali	4 Kali	1.925,09	5 kali	2.083,24	5 kali	1.342,20	5 kali	1.492,94	5 kali	1.492,94	24 Kali	8.336,41	DIPERPA	
11	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah Produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	9.422,07	125.000 ton	10.198,95	127.500 ton	6.085,04	130 ton	6.468,69	130.000 ton	6.468,69	132.500 ton	38.643,44	DIPERPA	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	55 orang	45 Orang	1.312,38	45,00 orang	2.059,21	45 orang	793,20	45 orang	2.683,86	45 orang	2.683,86	45 Orana	9.532,51	DIPERPA	
13	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	65.427 ekor	30068 Ekor	3.076,30	29521 Ekor	3.188,69	28975 ekor	2.553,60	28428 Ekor	2.969,02	28428 Ekor	2.969,02	27335 Ekor	14.756,63	DIPERPA	
14	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan ternak ruminansia	Data tidak tersedia	5 Kelompok	24,40	5 kelompok	59,53	5 Kelompok	66,86	5 Kelompok	27,22	5 Kelompok	27,22	25 Kelompok	205,22	DIPERPA	
15	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berorientasi pasar	Data tidak tersedia	-	-	17 Kelompok	6.838,49	21 Kelompok	7.228,62	24 Kelompok	118,41	24 Kelompok	118,41	27 Kelompok	14.303,92	DIPERPA	
16	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	96,5	5.142,85	-	-	96,5	5.142,85	DIPERPA	
17	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Tersedianya daging ASUH (Aman. Sehat. Utuh dan Halal)	Data tidak tersedia	714 Sampel	121,59	714 Sampel	178,92	714 sampel	210,23	714 sampel	307,32	714 sampel	307,32	714 Sampel	1.125,38	DIPERPA	
03	01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			12.403,22		6.961,99		9.137,54		11.472,72		6.472,72		46.448,19		
		DINAS PERIKANAN			12.403,22		6.961,99		9.137,54		11.472,72		6.472,72		46.448,19		
	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran	60 Bulan	12 bulan	1.550,721	12 bulan	1.542,873	12 bulan	1.135,971	12 bulan	1.193,88	12 bulan	1.193,88	60 bulan	6.617,33	DISKAN
			Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan												

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100	665,529	100%	641,840	1 PD	6.486,052	100%	7.747,02	100%	2.747,02	100%	18.287,46	DISKAN
		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur		100 %		100 %										
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah capaian kinerja dan keuangan PD	6 Jenis Dokumen	6 jenis dokumen	260,084	6 jenis dokumen	234,882	6 jenis dokumen	321,864	6 jenis dokumen	346,64	6 jenis dokumen	346,64	6 jenis dokumen	1.510,12	DISKAN
		Jumlah Dokumen AKIP yang disusun		6 jenis dokumen		6 jenis dokumen										
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 Jenis	3 jenis	10,746	3 jenis	11,245	3 jenis	12,734	3 jenis	14,74	3 jenis	14,74	3 jenis	64,21	DISKAN
		Jumlah jenis dokumen yang tersusun		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Jumlah produksi perikanan	155.646,48 Ton	7.021 ton	36,891	-	-	-	-	-	-	-	-	7.021 ton	36,89	DISKAN
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN	Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan	5 Kelompok	3 kelompok	82,258	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kelompok	82,26	DISKAN
7	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	2 Kawasan	1 kawasan	1.689,853	2 kawasan	485,647	-	-	-	-	-	-	3 kawasan	2.175,50	DISKAN
8	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah Produksi perikanan budidaya	586.80 ton	598 ton	1.219,495	603,00 ton	1.974,224	611,00 ton	130,145	617,00 ton	1.296,457	623,00 ton	1.296,457	3.052 ton	5.916,78	DISKAN
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6890,7 ton	6.423 ton	645,866	6.551 ton	1.712,145	6.682 ton	545,591	6.816 ton	227,38	6.952 ton	227,38	33.424 ton	3.358,36	DISKAN
10	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	6.083 ton	8,249	6.205 ton	6,187	-	-	-	-	-	-	12.288 ton	14,44	DISKAN
11	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	8,931	9.325	50,998	9.371	42,298	9417 ton	22,108	9464 ton	118,767	9.511	118,767	47.088	352,94	DISKAN
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN	Jumlah dokumen data/informasi perikanan	data tidak tersedia	3 jenis dokumen	308,023	3 jenis dokumen	195,950	4 jenis dokumen	241,483	3 jenis dokumen	375,37	4 jenis dokumen	375,37	4 jenis dokumen	1.496,19	DISKAN
13	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	6083 ton	5,458	6.205 ton	52,223	6329 ton	34,540	6456 ton	81,16	6585 ton	81,16	31658 ton	254,54	DISKAN
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL yang diberdayakan	Jumlah kelompok nelayan dan Pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	data tidak tersedia	-	-	50 kelompok	49,676	-	-	20 kelompok	12,56	50 kelompok	12,56	150 kelompok	74,80	DISKAN
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA	Jumlah kawasan pesisir yang tertata untuk mendukung pariwisata tertata untuk mendukung pariwisata	data tidak tersedia	1 kawasan	5.869,051	1 kawasan	12,80	1 kawasan	207,055	1 kawasan	58,74	1 kawasan	58,74	4 kawasan	6.206,39	DISKAN
	TUJUAN 13 : MENINGKATNYA DAYA SAING KEPARIWISATAAN BERSINERGI				23.759,26		77.711,38		39.064,17		111.442,37		101.442,37		353.419,55	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	DENGAN SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN																
	SASARAN 19 : MENINGKATNYA DAYA TARIK WISATA YANG BERDAYA SAING				15.154,90		24.416,35		23.003,27		82.882,27		72.882,27		218.339,06		
03	02	URUSAN PARIWISATA			15.154,90		24.416,35		23.003,27		82.882,27		72.882,27		218.339,06		
	01	DINAS PARIWISATA			15.154,90		24.416,35		23.003,27		82.882,27		72.882,27		218.339,06		
	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Daya Tarik Wisata yang berdaya saing	12 Bulan	64 %	2.328,15	44 %	2.750,42	12 bulan	2.405,12	12 bulan	2.288,33	12 bulan	2.288,33	12 bulan	12.060,34	DISPAR
	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	1 Tahun	290 Orang	1.637,52	447 Orang	3.450,58	bulan	1.567,20	12 bulan	1.984,67	12 bulan	1.984,67	12 bulan	10.624,65	DISPAR
	3	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat penyelesaian administrasi keuangan dan pelaporan	5 Paket	100 %	304,72	100 %	369,22	1 paket	443,43	1 paket	701,96	1 paket	701,96	1 paket	2.521,29	DISPAR
	4	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PD (RENJA, RKA, RENSTRA)	Tingkat Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	25 Buku	100 %	11,00	100 %	10,00	25 buku	10,00	25 buku	10,00	25 buku	10,00	25 buku	51,00	DISPAR
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	4.000.000 orang wisatawan mancanegara	5.080.000 orang wisatawan mancanegara	5.511,36	6.502.400 orang wisatawan mancanegara	6.596,94	6.000.000 orang wisatawan mancanegara	5.698,93	6.150.000 orang wisatawan mancanegara	6.602,39	6.300.000 orang wisatawan mancanegara	6.602,39	30.032.400 wisatawan mancanegara	31.012,02	DISPAR
	6	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	180 usaha + 4 Daya tarik wisata	64 %	4.828,36	66 %	10.383,01	69 %	12.292,01	72 %	69.408,48	75 %	59.408,48	75 %	156.320,33	DISPAR
	7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Cakupan pengembangan kemitraan	200 orang	100 %	502,00	100 %	738,77	100 %	563,17	100 %	1.554,25	100 %	1.554,25	100 %	4.912,43	DISPAR
	8	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	Jumlah sasaran kelompok binaan pengembangan dan pengelolaan produk wisata	180 usaha + 4 Daya tarik wisata	100 %	31,79	100 %	117,41	100 %	23,40	100 %	332,20	100 %	332,20	100 %	837,00	DISPAR
	SASARAN 20 : MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB				8.604,36		53.295,03		16.060,90		28.560,10		28.560,10		135.080,49		
02	10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1.898,89		17.118,38		4.432,79		10.681,07		10.681,07		44.812,20		
	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1.898,89		17.118,38		4.432,79		10.681,07		10.681,07		44.812,20		
	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA	Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang	data tidak tersedia	100 %	1.898,89	100 %	17.118,38	100 %	4.432,79	100 %	10.681,07	100 %	10.681,07	100 %	44.812,196	DISKOMINFO
03	02	URUSAN PARIWISATA			6.705,48		36.176,65		11.628,11		17.879,03		17.879,03		90.268,30		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	01	DINAS PARIWISATA			6.705,48		36.176,65		11.628,11		17.879,03		17.879,03		90.268,30		
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	4.000.000 orang wisatawan mancanegara	28 %	6.520,94	28 %	34.484,26	28,58 %	10.888,94	28,77 %	16.880,48	28,96 %	16.880,48	28,96 %	85.655,11	DISPAR
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Cakupan pengembangan kemitraan	200 orang	100 %	0,00	100 %	452,77	100 %	137,34	100 %	209,96	100 %	209,96	100 %	1.010,02	DISPAR
	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	Jumlah sasaran kelompok binaan pengembangan dan pengelolaan produk wisata	180 usaha + 4 Daya tarik wisata	100 %	184,53	100 %	1.239,62	100 %	601,83	100 %	788,59	100 %	788,59	100 %	3.603,16	DISPAR

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Tahun 2017-2021 yang dijabarkan kedalam indikasi rencana program prioritas Kabupaten Badung, dibutuhkan dana pembangunan yang memadai sesuai kapasitas keuangan daerah. Berikut ini disajikan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten badung Tahun 2017-2021 pada Tabel 7.1.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Badung memuat program-program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta program-program strategis yang berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang disertai dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap program tersebut. Program-program prioritas dan strategis yang telah disertai kebutuhan pendanaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada Tabel 7.2 dibawah ini akan disajikan indikasi rencana program prioritas seluruh Perangkat Daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam jangka waktu lima tahun (Tahun 2017-2021) yang dikelompokkan atas : (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (2) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Urusan Pilihan, serta (4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disamping Tabel 7.2, pada RPJMD Kabupaten Badung ini ditambahkan pula Program-Program Prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah khusus Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.3 berikut ini. Penyajian Program-Program Prioritas Tahun 2016 tersebut merupakan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2021
Kabupaten Badung

No.	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	3.177.103.763.319,34	3.881.008.539.219,67	2.930.811.431.065,60	3.452.952.558.514,00	2.733.817.197.809,23
2	BELANJA	6.172.197.577.820,73	8.155.281.067.642,20	6.548.287.598.483,84	6.302.353.214.732,10	6.505.662.008.360,87
02.01	Belanja Tidak Langsung	2.995.093.814.501,39	4.274.272.528.422,53	3.617.476.167.418,24	2.849.400.656.218,10	3.771.844.810.551,64
02.01.01	Belanja Pegawai	1.367.853.368.279,71	1.625.853.910.894,64	1.389.333.507.861,00	1.424.518.222.978,71	1.769.563.591.419,34
02.01.02	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
02.01.03	Belanja Subsidi	9.340.792.000,00	9.527.607.840,00	11.441.487.840,00	11.441.487.840,00	11.441.487.840,00
02.01.04	Belanja Hibah	525.248.881.222,00	932.588.786.683,00	786.764.589.849,00	103.794.845.350,00	385.583.491.350,00
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	118.981.940.000,00	267.654.670.250,00	259.990.929.384,00	298.934.000.000,00	336.302.000.000,00
02.01.06	Belanja Bagi Hasil	498.091.575.700,63	745.539.068.227,51	636.446.802.884,62	632.748.815.049,39	670.815.696.885,47
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan	459.839.891.599,05	678.108.484.527,38	519.834.775.799,62	362.963.285.000,00	583.138.543.056,83
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	15.737.365.700,00	15.000.000.000,00	13.664.073.800,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
02.02	Belanja Langsung	3.177.103.763.319,34	3.881.008.539.219,67	2.930.811.431.065,60	3.452.952.558.514,00	2.733.817.197.809,23
02.02.01	Belanja Pegawai	89.355.043.637,00	120.232.784.433,00	137.692.342.307,20	164.938.946.923,00	-
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	1.609.047.947.982,54	2.111.668.858.048,69	1.928.932.090.272,35	2.032.535.180.001,68	-
02.02.03	Belanja Modal	1.478.700.771.699,80	1.649.106.896.737,98	864.186.998.486,05	1.255.478.431.589,32	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.403.530,64		2.538.577,32		1.990.750,56		2.234.848,34		1.609.572,04		10.777.278,89	
01	URUSAN PENDIDIKAN				365.422,26		402.978,03		875.746,94		697.147,30		505.023,39		2.846.317,92	
01	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				365.422,26		402.978,03		378.388,09		566.100,25		461.477,73		2.174.366,36	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	15.547,56	100 %	15.789,16	100 %	16.554,14	100 %	17.382,30	100 %	17.382,30	100 %	82.655,46	DISDIKPORA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	1.609,70	100 %	3.859,18	100 %	408,10	100 %	800,60	100 %	800,60	100 %	7.478,19	DISDIKPORA
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	cakupan layanan disiplin aparatur	100 %	100 %	3.072,32	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	3.072,32	DISDIKPORA
04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	461,19	100 %	670,43	100 %	1.305,99	100 %	1.822,02	100 %	1.822,02	100 %	6.081,66	DISDIKPORA
05	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Presentase kesesuaian antara Renja PD dengan RKPd	100 %	100 %	14,91	100 %	85,09	100 %	61,37	100 %	120,42	100 %	59,04	100 %	340,83	DISDIKPORA
06	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun mendapatkan pendidikan anak usia dini	100 %	98,87 %	1.027,31	100 %	15.990,76	100 %	17.102,52	100 %	2.929,27	100 %	2.126,98	100 %	39.176,84	DISDIKPORA
07	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Presentase warga Kabupaten Badung usia 7-15 tahun mendapatkan pendidikan dasar	100 %	100 %	257.617,05	100 %	181.928,01	100 %	189.174,87	100 %	326.649,42	100 %	222.890,58	100 %	1.178.259,93	DISDIKPORA
08	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.18 tahun mendapatkan pendidikan kesetaraan	100 %	100 %	565,67	100 %	619,53	100 %	92,10	100 %	180,45	100 %	180,45	100 %	1.638,20	DISDIKPORA
09	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	47 %	55 %	4.507,67	60 %	116.707,61	65 %	117.827,53	70 Orang	137.102,30	75 %	137.102,30	100 %	513.247,41	DISDIKPORA
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	Persentase Satuan Pendidikan berbasis Informasi	data tidak tersedia	100 %	80.999	100 %	67.328	100 %	8.561,30	100 %	69.413	100 %	69.413	100 %	295.713,84	DISDIKPORA
11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Persentase prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	100 %	-	-	-	-	100 %	27.300,18	-	-	100 %	-	100 %	27.300,18	DISDIKPORA
12	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Terwujudnya manajemen pelayanan pendidikan yang berkualitas	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	20 Orang	9.700,75	20 Orang	9.700,75	40 Orang	19.401,50	DISDIKPORA
02	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				-		-		489.136,73		82.579,51		0,00		571.716,24	
37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	48 %	-	-	-	-	85 %	489.136,73	92 %	79.713,41	-	-	100 %	568.850,14	DPUPR
46	PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	100 %	2.866,10	-	-	100 %	2.866,10	DPUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	03	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			-		-		8.153,32		6.831,2		1.909,3		16.893,76		
	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	12305 Orang	-	-	-	-	13750 Orang	8.153,32	13750 Orang	6.831,16	13.750 Orang	1.909,3	41250 Orang	16.893,76	DISKERPUS
	04	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-		-		-		41.636,38		41.636,38		83.272,76		
	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	0 %	0 %	-	0 %	-	0 %	0,00	100 %	41.636,38	100 %	41.636,38	100 %	83.272,76	Diskominfo
	05	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			-		-		68,81		-		-		68,81		
	93	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase administrasi pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Data tidak tersedia	-	-	-	-	100 %	68,81	-	-	-	-	100 %	68,81	SETDA. BAGIAN KESRA
	02	URUSAN KESEHATAN				450.719,09		549.822,92		627.307,98		867.582,00		535.621,98		3.031.053,97	
	01	DINAS KESEHATAN				267.026,12		353.489,08		307.769,85		289.656,39		253.037,90		1.470.979,34	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	10.973,64	12 Bulan	15.296,15	12 Bulan	11.294,46	100 %	12.631,07	100 %	12.631,07	100 %	62.826,38	DISKES
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	18.718,72	100 %	20.606,55	100 %	2.449,54	100 %	2.680,73	100 %	2.680,73	100 %	47.136,28	DISKES
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	614,52	100 %	679,85	100 %	1.035,79	100 %	2.402,58	100 %	1.550,94	100 %	6.283,69	DISKES
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renia PD dengan RKPD	100 %	-	-	100 %	61,51	100 %	92,93	100 %	92,62	100 %	92,62	100 %	339,68	DISKES
	05	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas	78,7 %	100 %	3.810,50	100 %	3.976,79	100 %	4.383,32	100 %	7.185,94	100 %	7.185,94	100 %	26.542,50	DISKES
	06	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	70,97 %	80 %	145.952,53	90 %	157.475,31	90 %	157.460,76	90 %	192.491,19	90 %	158.220,63	90 %	811.600,42	DISKES
	07	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase sarana kesehatan dan toko obat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan obat	100 %	100 %	88,95	100 %	94,83	100 %	233,30	100 %	245,86	100 %	245,86	100 %	908,80	DISKES
	10	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan dan penanggulangan stunting	data tidak tersedia	100 %	1.295,02	100 %	514,07	100 %	1.219,11	100 %	1.192,76	100 %	1.192,76	100 %	5.413,72	DISKES
	11	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase desa yang melaksanakan STBM	21 %	58 %	546,29	62 %	757,13	62 %	576,88	68 %	777,31	68 %	777,31	68 %	3.434,93	DISKES
	12	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan penanganan penyakit menular	data tidak tersedia	100 %	32.338,41	100 %	48.481,98	100 %	41.610,22	100 %	47.591,54	100 %	47.591,90	100 %	217.614,05	DISKES
	13	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya, utama dan paripurna	data tidak tersedia	92 %	1.797,85	92 %	57.329,52	92 %	55.450,63	100 %	3.675,55	100 %	3.674,87	100 %	121.928,42	DISKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan	data tidak tersedia	8696 Penduduk	37.940,07	8877 Penduduk	23.495,82	8759 Penduduk	4.186,41	8643 Penduduk	8.647,20	8531 Penduduk	7.151,24	8531 Penduduk	81.420,74	DISKES
15	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perilinan Tenaga Kesehatan	data tidak tersedia	3 hari	41,90	3 hari	51,56	3 hari	65,51	3 hari	63,95	3 hari	63,95	3 hari	286,88	DISKES
16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Cakupan pelayanan kesehatan balita	data tidak tersedia	100 %	54,40	100 %	60,11	100 %	199,16	84 %	199,38	84 %	199,38	84 %	712,43	DISKES
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	50 %	54 %	277,36	56 %	252,11	56 %	104,95	60 %	103,22	60 %	103,22	60 %	840,86	DISKES
18	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	93 %	100 %	2.519,62	100 %	3.330,38	100 %	3.943,12	100 %	1.263,64	100 %	1.263,64	100 %	12.320,40	DISKES
19	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100 %	100 %	9.806,37	100 %	20.377,12	100 %	23.036,79	100 %	6.902,58	100 %	6.902,58	100 %	67.025,43	DISKES
20	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100 %	100 %	249,98	100 %	648,29	100 %	426,97	100 %	1.509,25	100 %	1.509,25	100 %	4.343,75	DISKES
02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANGUSADA				183.692,97		196.333,84		209.006,30		343.868,38		280.873,30		1.213.774,79	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	18.291,87	100 %	18.757,52	100 %	20.007,94	100 %	22.307,10	100 %	22.307,10	100 %	101.671,54	RSUD MANGUSADA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	70 %	80 %	852,20	85 %	2.329,82	90 %	1.622,61	95 %	15.100,28	100 %	15.000,28	100 %	34.905,20	RSUD MANGUSADA
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mendapat Diklat/Bimtek sejenisnya di RSUD Kab. Badung	45 %	0 %	0,00	55 %	810,24	60 %	351,65	65 %	425,09	70 %	430,01	70 %	2.017,00	RSUD MANGUSADA
04	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	100 %	100 %	43.712,09	100 %	34.436,26	100 %	21.803,06	100 %	155.272,82	100 %	92.372,82	100 %	347.597,05	RSUD MANGUSADA
05	PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	100 %	100 %	120.836,81	100 %	140.000,00	100 %	165.000,00	100 %	150.000,00	100 %	150.000,00	100 %	725.836,81	RSUD MANGUSADA
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya honorarium pengelola kegiatan	100%	-	-	-	-	100 %	221,04	100 %	763,08	100 %	763,08	100%	1.747,20	RSUD MANGUSADA
03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				0,00		0,00		110.531,83		232.346,44		0,00		342.878,27	
10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	data tidak tersedia	-	-	-	-	85 %	110.531,83	92 %	232.346,44	-	-	100 %	342.878,27	DPUPR
04	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				-		-		-		1.710,79		1.710,79		3.421,57	
05	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan	75 %	-	-	-	-		0,00	76,40	1.710,79	77,24	1.710,79	77,24	3.421,57	DP2KBP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.302.713,57		1.370.123,94		400.511,86		562.717,47		463.336,90		4.099.403,73	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.302.713,57		1.370.123,94		400.511,86		562.717,47		463.336,90		4.099.403,73	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	100 %	24.589,95	100 %	28.030,35	100 %	24.148,16	100 %	2.598,22	100 %	2.858,04	100 %	82.224,71	DPUPR
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100 %	100 %	2.033,14	100 %	10.280,90	100 %	2.879,79	100 %	5.485,52	100 %	6.034,07	100 %	26.713,42	DPUPR
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100 %	100 %	2.742,26	100 %	3.193,26	100 %	1.850,55	100 %	3.295,60	100 %	3.486,56	100 %	14.568,23	DPUPR
07	PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi Mantap	94,50 %	97,50 %	397.163,23	-	-	-	-	-	-	-	-	97,50 %	397.163,23	DPUPR
07	PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase infrastruktur jalan kabupaten berkondisi baik	97,5 %	-	-	98 %	406.413,35	98,80 %	91.247,45	92,20 %	181.090,39	99,60 %	125.000,00	99,60 %	803.751,19	DPUPR
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100 %	100 %	12,74	100 %	261,52	100 %	379,25	100 %	466,60	100 %	513,26	100 %	1.633,37	DPUPR
15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	100 %	100 %	2.021,56	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	2.021,56	DPUPR
23	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI	Tersedianya jasa konstruksi yang memadai	data tidak tersedia	-	-	30 %	592,68	60 %	179,38	80 %	317,94	100 %	349,73	100 %	1.439,72	DPUPR
18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi Mantap	94,50 %	95,78 %	13.714,86	-	-	-	-	-	-	-	-	95,78 %	13.714,86	DPUPR
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai	100 %	100 %	1.282,73	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	1.282,73	DPUPR
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	95,72 %	95,78 %	127.383,36	-	-	-	-	-	-	-	-	95,78 %	127.383,36	DPUPR
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	persentase infrastruktur jaringan irigasi berkondisi baik	94,72 %	-	-	98,36 %	160.863,75	97,20 %	78.212,07	98,20 %	75.681,50	99,20 %	81.960,18	99,20 %	396.717,50	DPUPR
35	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Penyehatan Lingkungan	58,78 %	62 %	103.872,07	-	-	-	-	-	-	-	-	62 %	103.872,07	DPUPR
35	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak	58,78 %	-	-	88,71 %	18.073,53	89,50 %	8.404,46	92 %	47.773,84	95 %	12.277,54	95 %	86.529,37	DPUPR
37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/ GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	48 %	65 %	587.605,20	76 %	673.529,48	85 %	151.975,71	92 %	237.867,39	100 %	218.750,28	100 %	1.869.728,06	DPUPR
42	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78 %	60,85 %	38.484,59	-	-	-	-	-	-	-	-	60,85 %	38.484,59	DPUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	43	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78 %	60,85 %	526,46	-	-	-	-	-	-	-	60,85 %	526,46	DPUPR	
	44	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78 %	66,67 %	1.281,43	-	-	-	-	-	-	-	66,67 %	1.281,43	DPUPR	
	42	PROGRAM PERENCANAAN,PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	60 %	-	-	100 %	68.885,11	100 %	41.235,04	100 %	8.140,49	100 %	12.107,25	100 %	130.367,88	DPUPR
04		URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				244.635,15		141.978,91		45.499,95		57.565,07		56.214,22		545.893,30	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				244.635,15		141.978,91		45.499,95		57.565,07		56.214,22		545.893,30	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Data tidak tersedia	100 %	1.530,49	100 %	1.543,55	100 %	1.754,78	100 %	1.298,25	100 %	1.298,25	100 %	7.425,33	DPKP
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	Data tidak tersedia	100 %	1.036,22	100 %	1.109,28	100 %	708,00	100 %	1.114,48	100 %	1.114,48	100 %	5.082,46	DPKP
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	Data tidak tersedia	100 %	549,44	100 %	771,56	100 %	1.156,53	100 %	1.281,77	100 %	1.281,77	100 %	5.041,07	DPKP
	04	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	64,67 %	77 %	239.941,27	81 %	121.870,99	84,80 %	33.951,68	87,34 %	33.488,09	89,96 %	32.218,54	92 %	461.470,56	DPKP
	05	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Data tidak tersedia	100 %	10,00	100 %	9,56	100 %	10,13	100 %	10,51	100 %	10,51	100 %	50,71	DPKP
	06	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Persentase Monitoring	100 %	100 %	11,94	100 %	7,99	100 %	12,90	100 %	20,98	100 %	20,98	100 %	74,80	DPKP
	07	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Data tidak tersedia	100 %	1.088,80	100 %	1.659,07	100 %	2.294,70	100 %	6.500,59	100 %	6.419,30	47 %	17.962,45	DPKP
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	Data tidak tersedia	20 %	467,00	25 %	15.001,22	30 %	5.600,53	35 %	13.840,87	40 %	13.840,87	47 %	48.750,48	DPKP
	18	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni akibat Bencana	Data tidak tersedia	-	-	100 %	5,68	100 %	10,70	100 %	9,52	100 %	9,52	100 %	35,43	DPKP
05		URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				32.542,52		63.790,21		34.053,36		41.527,57		41.512,44		213.426,10	
	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5.604,39		10.084,11		6.596,88		8.284,97		8.269,85		38.840,21	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.464,20	100 %	1.647,82	100 %	973,25	100 %	1.297,99	100 %	1.282,87	100 %	6.666,12	SATPOL PP
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	443,65	100 %	798,03	100 %	286,61	100 %	391,80	100 %	391,80	100 %	2.311,89	SATPOL PP
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatkan Disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas	100 %	100 %	306,00	100 %	504,00	100 %	36,00	100 %	30,00	100 %	30,00	100 %	906,00	SATPOL PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya	100 %	100 %	77,14	100 %	84,90	100 %	154,63	100 %	74,77	100 %	74,77	100 %	466,21	SATPOL PP
05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan	100 %	100 %	223,64	100 %	240,34	100 %	383,89	100 %	496,28	100 %	496,28	100 %	1.840,44	SATPOL PP
06	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RENJA,RKA)	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	100 %	100 %	9,88	100 %	9,03	100 %	9,05	100 %	9,98	100 %	9,98	100 %	47,93	SATPOL PP
07	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (Keterlibatan, Ketentraman, Keindahan)	100 %	100 %	513,36	100 %	832,98	100 %	234,23	100 %	213,39	100 %	213,39	100 %	2.007,36	SATPOL PP
08	PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	70 %	75 %	2.135,18	80 %	5.052,50	85 %	4.348,87	90 %	5.554,14	95 %	5.554,14	95 %	22.644,83	SATPOL PP
09	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100 %	100 %	431,34	100 %	914,50	100 %	170,35	100 %	216,61	100 %	216,61	100 %	1.949,42	SATPOL PP
02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.514,13		5.277,20		2.688,17		4.488,82		4.488,82		21.457,15	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi umum tepat waktu	15 Kegiatan	100 %	966,04	100 %	804,35	100 %	588,48	100 %	572,87	100 %	572,87	100 %	3.504,62	BAKESBANGPOL
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pengelolaan Barang Milik daerah dengan Baik	8 Kegiatan	100 %	318,80	100 %	418,50	100 %	162,50	100 %	286,56	100 %	286,56	100 %	1.472,93	BAKESBANGPOL
06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Serapan Anggaran	100 %	100 %	180,55	100 %	199,60	100 %	215,09	100 %	312,84	100 %	312,84	100 %	1.220,91	BAKESBANGPOL
06	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja Prangkat Daerah dengan renstra	100 %	-	-	-	-	-	-	100%	8,88	100%	8,88	100 %	17,76	BAKESBANGPOL
15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	40 %	100 %	1.508,57	100 %	1.875,95	100 %	1.301,11	100 %	1.521,84	100 %	1.521,84	100 %	7.729,32	BAKESBANGPOL
20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat	40 %	100 %	161,50	100 %	125,79	-	-	100 %	92,87	100 %	92,87	100 %	473,03	BAKESBANGPOL
21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Persentase konflik politik yang ditangani	1 Kegiatan	100 %	213,82	100 %	546,05	100 %	330,97	100 %	299,44	100 %	299,44	100 %	1.689,72	BAKESBANGPOL
37	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase Komponen masyarakat memahami ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	7 Kegiatan	100 %	1.164,84	100 %	1.306,95	100 %	90,03	100 %	1.393,52	100 %	1.393,52	100 %	5.348,86	BAKESBANGPOL
03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				11.924,44		23.966,15		8.288,64		10.070,59		10.070,59		64.320,41	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.529,72	100 %	1.812,15	100 %	1.545,99	100 %	1.778,46	100 %	1.778,46	100 %	8.444,78	BPBD
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Cakupan pelayanan sarana dan	100 %	100 %	1.743,25	100 %	1.254,00	100 %	461,98	100 %	457,01	100 %	457,01	100 %	4.373,26	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DAN PRASARANA APARATUR	prasarana aparatur	%	%		%		%		%		%		%		
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	268,72	100 %	274,46	100 %	281,86	100 %	323,61	100 %	323,61	100 %	1.472,27	BPBD
04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %	-	-	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	8,95	100 %	8,95	100 %	37,90	BPBD
05	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Persentase desa/kelurahan mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	55 %	60 %	714,63	70 %	1.408,03	80 %	616,83	-	-	-	-	100 %	2.739,49	BPBD
		Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	76,8 %	654,48	100 %	654,48	100 %	1.308,97	BPBD
06	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	100 %	3.557,45	100 %	4.246,85	100 %	3.274,40	-	-	-	-	100 %	11.078,70	BPBD
		Response time mencapai lokasi kejadian	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	18 Menit	3.671,92	15 Menit	3.671,92	15 Menit	7.343,84	BPBD
07	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Persentase kerusakan/kerugian sarpras, ekonomi dan psikologi yang terpulihkan	100 %	100 %	4.110,66	100 %	14.960,67	100 %	2.097,59	90 %	3.176,14	-	-	90 %	24.345,06	BPBD
		Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	90 %	3.176,140	90 %	3.176,14	BPBD
04	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				10.499,56		24.462,75		16.479,67		18.683,18		18.683,18		88.808,34	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.510,94	100 %	3.406,49	100 %	2.839,71	100 %	3.498,01	100 %	3.475,81	100 %	15.730,94	Diskarmat
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	1.599,22	100 %	3.756,56	100 %	2.058,00	100 %	381,10	100 %	381,10	100 %	8.175,98	Diskarmat
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	216,00	100 %	245,64	100 %	458,22	100 %	751,00	100 %	773,20	100 %	2.444,06	Diskarmat
04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling terhubung	100 %	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	50,00	Diskarmat
05	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100 %	100 %	6.163,40	100 %	17.044,06	100 %	11.113,75	100 %	14.043,07	100 %	14.043,07	100 %	62.407,35	Diskarmat
06	URUSAN SOSIAL				7.498,05		9.883,31		7.630,47		8.308,94		7.863,10		41.183,87	
	DINAS SOSIAL				7.498,05		9.883,31		7.630,47		8.308,94		7.863,10		41.183,87	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administarsi Perkantoran	12 bln	100 %	1.128,64	100 %	997,56	100 %	776,28	100 %	825,19	100 %	825,19	12 bln	4.552,85	Dinsos
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	617,36	100 %	1.661,62	100 %	233,75	100 %	218,78	100 %	218,78	100 %	2.950,28	Dinsos
03	PROGRAM PENINGKATAN	Tingkat ketepatan waktu	100	100	207,20	100	218,22	100	275,09	100	349,87	100	349,87	100	1.400,26	Dinsos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	%		%		%		%		%		%		
04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat Ketepatan Kualitas dan kuantitas penyebaran Informasi	80 buku	100 %	56,88	100 %	59,92	100 %	136,25	100 %	54,16	100 %	59,56	80 buku	366,76	Dinsos
05	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Kesesuaian Renja PD dengan RKPD	3 dokumen	100 %	10,00	100 %	10,38	100 %	11,69	100 %	11,09	100 %	11,09	3 dokumen	54,24	Dinsos
06	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	100 %	68,81 %	747,97	100 %	942,36	84,41 %	184,54	92,2 %	149,89	100 %	149,89	100 %	2.174,66	Dinsos
16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksannya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	100 %	1.832,05	100 %	1.836,49	100 %	2.487,26	100 %	2.244,18	100 %	2.244,18	100 %	10.644,16	Dinsos
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	% Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	2.897,95	100 %	4.156,75	100 %	3.525,62	100 %	4.455,79	100 %	4.004,54	100 %	19.040,65	Dinsos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			331.904,28		747.077,15		475.039,92		581.164,57		507.623,60		2.642.834,68		
01		URUSAN TENAGA KERJA			7.171,07		9.715,18		7.274,11		6.717,42		6.654,92		37.532,70		
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			7.171,07		9.715,18		7.274,11		6.717,42		6.654,92		37.532,70		
	01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	35 %	35,74 %	4.437,92	41,39 %	4.562,37	47,48 %	4.146,246	54 %	2.759,95	60,96 %	2.759,95	60,96 %	18.666,44	Disperinaker
	02	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Persentase penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama	52 %	52 %	864,20	54 %	1.512,22	56 %	585,740	58 %	909,94	60 %	909,94	60 %	4.782,04	Disperinaker
	03	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	50 %	50 %	1.868,95	50 %	3.640,59	50%	2.542,12	50 %	3.047,53	50 %	2.985,03	50 %	14.084,23	Disperinaker
02		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.593,15		2.652,55		1.672,68		1.561,30		1.592,40		10.072,08		
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.593,15		2.652,55		1.672,68		1.561,30		1.592,40		10.072,08		
	01	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	presentase Perempuan di lembaga pemerintahan	11 %	30 %	259,96	30 %	620,48	30 %	840,54	30 %	223,85	30 %	223,85	14 %	2.168,68	DP2KBP3A
	02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100 %	100 %	249,11	100 %	72,18	100 %	0,00	100 %	77,11	100 %	77,11	100 %	475,51	DP2KBP3A
	03	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Anak dari tindakan kekerasan	85 %	100 %	1.150,36	100 %	1.388,06	100 %	569,81	100 %	798,77	100 %	829,87	100 %	4.736,88	DP2KBP3A
	04	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang aktif	100 %	100 %	933,72	100 %	571,83	100 %	262,33	100 %	461,57	100 %	461,57	100 %	2.691,02	DP2KBP3A
03		URUSAN PANGAN			1.681,38		4.489,55		4.872,10		627,61		970,46		12.641,10		
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			1.681,38		4.489,55		4.872,10		627,61		970,46		12.641,10		
	16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)	Data tidak tersedia	84,50	1.681,38	85,00	4.489,55	96,00	4.872,10	96,50	627,61	97,00	970,46	97,00	12.641,10	Diperpa
04		URUSAN PERTANAHAN			934,33		155.330,70		1.525,89		2.106,54		2.106,54		162.004,00		
		BAGIAN PEMERINTAHAN			934,33		155.330,70		1.525,89		2.106,54		2.106,54		162.004,00		
	01	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan,	Data tidak tersedia	100%	907,36	100%	155.294,96	100%	1.507,03	100%	2.087,22	100%	2.087,22	100%	161.883,78	Setda. Bagian Pemerintahan
	02	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Data tidak tersedia	4 kasus	26,98	5 kasus	35,74	5 kasus	18,86	5 kasus	19,32	5 kasus	19,32	9 kasus	120,22	Setda. Bagian Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				62.002,64		91.542,60		61.565,27		157.310,30		96.280,64		468.701,45	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				62.002,64		91.542,60		61.565,27		157.310,30		96.280,64		468.701,45	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100 %	100 %	4.566,90	100 %	5.572,10	100 %	4.113,09	100 %	5.441,96	100 %	4.276,08	100 %	23.970,13	DLHK
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai Penunjang Kegiatan	100 %	100 %	2.463,48	100 %	3.656,09	100 %	379,43	100 %	1.036,91	100 %	511,00	100 %	8.046,92	DLHK
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	351,46	100 %	372,32	100 %	889,40	100 %	1.000,28	100 %	999,14	100 %	3.612,59	DLHK
28	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Persentase Terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100 %	100 %	11,00	100 %	10,04	100 %	9,93	100 %	12,36	100 %	12,36	100 %	55,69	DLHK
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	100 %	100 %	41.626,89	100 %	56.926,10	100 %	43.628,77	100 %	133.405,52	100 %	74.858,03	100 %	350.445,31	DLHK
16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100 %	100 %	2.168,74	100 %	2.759,38	100 %	1.279,28	100 %	1.684,05	100 %	1.799,98	100 %	9.691,43	DLHK
18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100 %	100 %	1.267,14	100 %	102,30	100 %	91,47	100 %	82,08	100 %	82,08	100 %	1.625,08	DLHK
19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100 %	100 %	586,04	100 %	967,65	100 %	165,05	100 %	824,77	100 %	824,77	100 %	3.368,29	DLHK
24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase keindahan dan keasrian taman di kabupaten badung	100 %	100 %	8.765,48	100 %	20.957,02	100 %	10.908,00	100 %	13.709,62	100 %	12.806,25	100 %	67.146,37	DLHK
27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	100 %	195,50	100 %	219,60	100 %	100,85	100 %	112,74	100 %	110,94	100 %	739,64	DLHK
06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.309,06		13.598,12		8.509,18		8.302,04		8.302,04		48.020,44	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.309,06		13.598,12		8.509,18		8.302,04		8.302,04		48.020,44	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.887,09	100 %	2.187,54	100 %	1.816,40	100 %	1.879,79	100 %	1.879,79	100 %	9.650,61	Disdukcapil
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	2.593,43	100 %	4.572,97	100 %	606,47	100 %	969,50	100 %	969,50	100 %	9.711,88	Disdukcapil
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	185,34	100 %	210,66	100 %	239,58	100 %	335,58	100 %	335,58	100 %	1.306,73	Disdukcapil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	9,75	3 dokumen	9,75	3 dokumen	49,50	Disudicapil
	05	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase penduduk yang memiliki kelengkapan	92,02 %	4.633,20	92 %	6.616,94	95 %	5.836,72	97 %	5.107,43	98 %	5.107,43	98 %	27.301,72	Disudicapil
	07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.176,20		21.918,91		8.885,70		5.503,62		5.503,62		46.988,05	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.176,20		21.918,91		8.885,70		5.503,62		5.503,62		46.988,05	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.114,21	100 %	1.278,64	100 %	721,08	100 %	685,75	100 %	685,75	100 %	4.485,43	DPMD
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	242,26	100 %	856,92	100 %	160,12	100 %	220,43	100 %	220,43	100 %	1.700,16	DPMD
	03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	183,00	100 %	237,12	100 %	265,26	100 %	348,36	100 %	348,36	100 %	1.382,10	DPMD
	04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RENJA, RKA)	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	50,00	DPMD
	15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 %	340,73	100 %	1.542,80	100 %	153,64	100 %	157,54	100 %	157,54	100 %	2.352,25	DPMD
	16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	32 pasar desa 13 Bumdesa	469,34	32 pasar desa 42 Bumdesa	9.122,64	32 pasar desa 43 Bumdesa	3.946,48	32 pasar desa 44 Bumdesa	185,26	32 pasar desa 45 Bumdesa	185,26	32 pasar desa 46 Bumdesa	13.908,98	DPMD
	17	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	Peningkatan wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	62 ds/ke., Kec.	1.000,01	62 ds/ke., Kec.	2.281,10	62 ds/ke., Kec.	1.168,78	62 ds/ke., Kec.	1.378,68	62 ds/ke., Kec.	1.378,68	62 ds/ke., Kec.	7.207,26	DPMD
	18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	46 desa	1.203,41	46 desa	3.932,58	46 desa	1.842,20	46 desa	1.930,48	46 desa	1.930,48	46 desa	10.839,14	DPMD
	19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 ds/ke.	613,24	62 ds/ke.	2.630,16	62 ds/ke.	618,14	62 ds/ke.	587,13	62 ds/ke.	587,13	62 ds/ke.	5.035,80	DPMD
	20	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menda-	Data tidak tersedia	-	-	8896 KPM	26,94	-	-	-	-	-	8896 KPM	26,94	DPMD
	08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6.365,58		8.321,72		6.687,82		5.424,50		5.393,40		32.193,02	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.365,58		8.321,72		6.687,82		5.424,50		5.393,40		32.193,02	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	1.409,70	100 %	1.264,66	100 %	629,22	100 %	1.017,01	100 %	1.017,01	100 %	5.337,60	DP2KBP3A
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	505,49	100 %	1.412,30	100 %	1.372,79	100 %	490,37	100 %	490,37	100 %	4.271,32	DP2KBP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	251,84	100 %	250,69	100 %	349,06	100 %	430,19	100 %	430,19	100 %	1.711,97	DP2KBP3A
04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Presentase kesesuaian antara Renja PD dengan RKPD	100 %	100 %	15,00	100 %	24,67	100 %	45,30	100 %	19,88	100 %	19,88	100 %	124,73	DP2KBP3A
05	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan	75 %	75 %	2.821,04	76 %	4.424,58	76,03	3.872,73	76,40	2.765,94	77,24	2.765,94	77,24	16.650,24	DP2KBP3A
06	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Persentase Perkawinan Remaja kurang dari 20 tahun	Data tidak tersedia	0 %	690,97	0 %	422,04	0,17 %	178,97	0,16 %	52,28	0,15 %	52,28	0,15 %	1.396,55	DP2KBP3A
07	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Anaka Kelahiran / Total Fertility Rate (TFR)	Data tidak tersedia	-	-	-	-	2,2	2,25	2,2	12,08	2,1	93,50	2,1	107,83	DP2KBP3A
08	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	51 %	54 %	189,78	55 %	113,87	56,56 %	1,07	57,88 %	-	59,12 %	-	59,12 %	304,72	DP2KBP3A
09	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Persentase kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	Data tidak tersedia	92 %	461,66	94 %	353,76	96 %	86,97	98 %	359,94	100 %	328,84	100 %	1.591,16	DP2KBP3A
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang	100 %	100 %	20,10	100 %	55,14	100 %	149,46	100 %	276,80	100 %	195,39	100 %	696,90	DP2KBP3A
09	URUSAN PERHUBUNGAN				24.674,34		35.537,17		36.261,60		59.883,03		59.231,77		215.587,91	
	DINAS PERHUBUNGAN				24.674,34		35.537,17		36.261,60		59.883,03		59.231,77		215.587,91	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100 %	100 %	1.702,10	100 %	2.052,00	100 %	22.570,87	100 %	23.419,39	100 %	23.419,39	100 %	73.163,77	Dishub
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100 %	100 %	2.537,53	100 %	4.229,73	100 %	3.217,52	100 %	7.719,69	100 %	7.719,68	100 %	25.424,15	Dishub
22	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Capaian meningkatnya kualitas sumber daya manusia	100 %	100 %	44,45	-	-	-	-	100 %	48,95	100 %	48,95	100 %	142,36	Dishub
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100 %	100 %	378,39	100 %	366,20	100 %	409,92	100 %	609,36	100 %	668,30	100 %	2.432,17	Dishub
15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	89,39 %	100 %	13.634,86	100 %	24.414,27	100 %	9.387,74	100 %	27.750,75	100 %	27.040,65	100 %	102.228,27	Dishub
17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	99,34 %	100 %	6.367,02	100 %	4.465,05	100 %	665,61	100 %	326,53	100 %	326,53	100 %	12.150,73	Dishub
23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tingkat Penyelarsan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	10,00	100 %	9,92	100 %	9,93	100 %	8,35	100 %	8,27	100 %	46,46	Dishub

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				20.527,98		135.877,40		130.119,77		33.443,63		33.463,01		353.431,78	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				20.527,98		135.877,40		130.119,77		33.443,63		33.463,01		353.431,78	
	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Data tidak tersedia	100 %	5.891,39	100 %	2.004,69	100 %	2.251,67	100 %	1.801,74	100 %	1.801,74	100 %	13.751,24	Diskominfo
	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	Data tidak tersedia	100 %	1.850,29	100 %	5.072,76	100 %	1.302,58	100 %	1.322,47	100 %	1.322,47	100 %	10.870,56	Diskominfo
	3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Data tidak tersedia	100 %	310,95	100 %	566,94	100 %	456,23	100 %	611,57	100 %	611,57	100 %	2.557,26	Diskominfo
	1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (RENJA , RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	Data tidak tersedia	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	3,75	100 %	10,11	100 %	10,11	100 %	43,96	Diskominfo
	4 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	Data tidak tersedia	100 %	12.465,36	100 %	128.188,07	100 %	126.082,09	100 %	29.597,35	100 %	29.616,73	100 %	325.949,61	Diskominfo
	5 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DALAM PENYERAPAN LITERASI MEDIA	Meningkatnya Pemahaman Dalam Penyerapan Informasi Media	Data tidak tersedia	-	-	100 %	34,92	100 %	23,45	100 %	100,39	100 %	100,39	100 %	259,16	Diskominfo
11	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				4.605,13		7.258,36		2.869,48		3.250,36		3.250,36		21.233,69	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				4.605,13		7.258,36		2.869,48		3.250,36		3.250,36		21.233,69	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.188,01	100 %	1.272,01	100 %	900,92	100 %	952,67	100 %	952,67	100 %	5.266,27	Diskop.UKMP
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur kantor	100 %	100 %	696,14	100 %	1.244,76	100 %	175,05	100 %	366,00	100 %	366,00	100 %	2.847,95	Diskop.UKMP
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Laporan capaian kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	242,44	100 %	360,16	100 %	191,84	100 %	387,18	100 %	387,18	100 %	1.568,79	Diskop.UKMP
	07 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 %	110 Dokumen	11,00	30 Dokumen	6,00	50 Dokumen	8,33	25 Dokumen	5,67	35 Dokumen	5,67	250 Dokumen	36,66	Diskop.UKMP
	08 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Persentase Kewirausaha yang mempunyai jiwa interpreneur	100 %	100 %	11,53	100 %	464,20	100 %	299,16	100 %	471,24	100 %	471,24	100 %	1.717,38	Diskop.UKMP
	09 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Persentase Usaha Kecil yang melakukan kemitraan	100 %	100 %	647,16	100 %	1.467,86	100 %	699,86	100 %	251,60	100 %	251,60	100 %	3.318,08	Diskop.UKMP
	10 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Persentase pertumbuhan UMKM	100 %	100 %	539,90	100 %	1.069,37	100 %	8,07	0 %	-	100 %	-	100 %	1.617,35	Diskop.UKMP
	11 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	100 %	100 %	1.243,77	100 %	1.344,08	100 %	580,39	100 %	795,53	100 %	795,53	100 %	4.759,31	Diskop.UKMP
	12 PROGRAM PENGEMBANGAN SITEM DATA DAN INFORMASI	Jumlah data/informasi UMKM	100 %	62 buku	25,17	112 buku	29,92	112 buku	5,86	100 buku	20,48	100 buku	20,48	100 %	101,91	Diskop.UKMP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	URUSAN PENANAMAN MODAL				5.088,68		13.011,28		5.884,61		8.934,56		8.134,56		41.053,70	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.088,68		13.011,28		5.884,61		8.934,56		8.134,56		41.053,70	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Data tidak tersedia	12 bulan	1.551,21	12 bulan	2.502,16	12 bulan	2.200,26	12 bulan	2.537,346	12 bulan	2.537,346	12 bulan	11.328,32	DPMPTSP
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Data tidak tersedia	12 bulan	1.369,62	12 bulan	5.342,18	12 bulan	541,08	12 bulan	1.759,73	12 bulan	959,73	12 bulan	9.972,32	DPMPTSP
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Data tidak tersedia	12 bulan	194,01	12 bulan	400,84	12 bulan	397,86	12 bulan	551,35	12 bulan	551,35	12 bulan	2.095,42	DPMPTSP
05	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Cakupan Dokumen Perencanaan	Data tidak tersedia	12 bulan	10,99	12 bulan	9,99	12 bulan	9,98	12 bulan	10,01	12 bulan	10,01	12 bulan	50,99	DPMPTSP
08	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI	Cakupan Penyebaran Informasi Penanaman Modal	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	348,99	6 Kecamatan	474,94	6 Kecamatan	2,84	6 Kecamatan	243,08	6 Kecamatan	243,08	6 Kecamatan	1.312,92	DPMPTSP
09	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Persentase Realisasi Investasi	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	193,57	6 Kecamatan	265,15	6 Kecamatan	76,70	6 kecamatan	205,46	6 kecamatan	205,46	95%	946,33	DPMPTSP
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Cakupan data potensi investasi	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	10,45	6 Kecamatan	359,55	6 Kecamatan	477,45	6 Kecamatan	260,73	6 Kecamatan	260,73	100%	1.368,90	DPMPTSP
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAHUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Cakupan Kemitraan UMKM	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	7,69	6 Kecamatan	28,30	6 Kecamatan	4,81	6 Kecamatan	101,57	6 Kecamatan	101,57	6 kecamatan	243,95	DPMPTSP
12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	Persentase Izin Terbit Tepat Waktu	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	1.125,48	6 Kecamatan	3.084,99	6 Kecamatan	1.928,61	6 Kecamatan	2.745,81	6 Kecamatan	2.745,81	6 Kecamatan	11.630,70	DPMPTSP
13	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase Pengaduan yang tertangani	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	70,86	6 Kecamatan	24,66	6 Kecamatan	25,11	6 Kecamatan	25,53	6 Kecamatan	25,53	6 Kecamatan	171,68	DPMPTSP
14	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang berbasis	Data tidak tersedia	12 bulan	205,80	12 bulan	518,53	12 bulan	219,92	12 bulan	493,95	12 bulan	493,95	12 bulan	1.932,15	DPMPTSP
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				16.647,48		31.528,97		2.476,36		31.556,03		30.985,53		113.194,39	
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				16.647,48		31.528,97		2.476,36		31.556,03		30.985,53		113.194,39	
01	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase prestasi bidang kepeloporan pada tingkat provinsi dan atau nasional	20 %	40 %	746,21	60 %	2.012,66	80 %	2.476,36	100 %	3.067,11	100 %	3.026,61	100 %	11.328,95	Disdikpora
02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Persentase prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi	100 %	100 %	15.901,27	100 %	29.516,31	-	-	100 %	28.488,93	100 %	27.958,93	100 %	101.865,43	Disdikpora
14	URUSAN STATISTIK				-		172,47		71,22		120,48		120,48		484,65	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-		172,47		71,22		120,48		120,48		484,65	
01	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK	Prosentase Tersediannya Data Informasi/Statistik	Data Tidak Tersedia	-	-	100 %	172,47	100 %	71,22	100 %	120,48	100 %	120,48	100 %	484,65	Diskominfo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15	URUSAN PERSANDIAN				-		379,86		132,75		353,01		353,01		1.218,62		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-		379,86		132,75		353,01		353,01		1.218,62		
01	PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH	Prosentase Terlaksananya Tata Kelola Persandian Daerah	Data Tidak Tersedia	-	-	100 %	379,86	100 %	132,75	100 %	353,01	100 %	353,01	100 %	1.218,62	Diskominfo	
16	URUSAN KEBUDAYAAN				156.427,16		207.236,24		192.468,08		253.575,72		242.786,46		1.052.493,65		
	DINAS KEBUDAYAAN				156.427,16		207.236,24		192.468,08		253.575,72		242.786,46		1.052.493,65	Disbud	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.496,14	100 %	1.955,97	100 %	1.682,33	100 %	1.626,29	100 %	1.647,13	100 %	9.407,86	Disbud	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	758,32	100 %	1.350,38	100 %	454,38	100 %	452,88	100 %	452,88	100 %	3.468,85	Disbud	
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	375,36	100 %	375,39	100 %	519,63	100 %	663,28	100 %	663,28	100 %	2.596,94	Disbud	
04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 %	100 %	10,01	100 %	10,19	100 %	10,09	100 %	11,65	100 %	11,65	100 %	53,59	Disbud	
05	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	- Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan - Desa adat yang dibina - Kehadiran tokoh agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan - Karva seni yang direvitalisasi	108 upacara keagamaan 10 desa adat 100 % 98 karya seni	114 upacara keagamaan 40 desa adat 100 % 104 sekaa	151.117,05 10 100 % 104 sekaa	114 upacara keagamaan 40 desa adat 100 % 110 sekaa	201.432,72 42 desa adat 100 % 114 sekaa	114 upacara keagamaan 42 desa adat 100 % 114 sekaa	187.330,10 122 upacara keagamaan 118 sekaa	122 upacara keagamaan 40 desa adat 100 % 118 sekaa	247.893,03 122 upacara keagamaan 123 sekaa	122 upacara keagamaan 40 desa adat 100 % 123 sekaa	237.123,44 122 upacara keagamaan 150 cakep 58 situs	122 upacara keagamaan 40 desa adat 100 % 569 sekaa	1.024.896,33 122 upacara keagamaan 150 cakep 58 situs	1.024.896,33 122 upacara keagamaan 150 cakep 58 situs	Disbud
06	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	- Lontar yang digitalisasi dan direproduksi - Situs cagar budaya yang teridentifikasi	70 cakep 52 situs	90 cakep 0 situs	1.670,27 0 situs	110 cakep 54 situs	2.111,59 54 situs	125,00 cakep 54 situs	2.471,54 56 situs	140 cakep 56 situs	2.928,60 58 situs	150 cakep 58 situs	2.888,09 58 situs	150 cakep 58 situs	12.070,09 58 situs	Disbud	
17	URUSAN PERPUSTAKAAN				865,98		5.936,22		0,00		-		-		6.802,20		
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				865,98		5.936,22		-		-		-		6.802,20		
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	-	-	100 %	1.209,77	-	-	-	-	-	-	100 %	1.209,77	Diskerpus	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	-	-	100 %	2.421,47	-	-	-	-	-	-	100 %	2.421,47	Diskerpus	
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	98 orang	-	-	122 orang	140,11	-	-	-	-	-	-	122 orang	140,11	Diskerpus	
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	291,54	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	291,54	Diskerpus	
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3 Dokumen	-	-	3 Dokumen	10,00	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	10,00	Diskerpus	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	12305 Orang	5100 Orang	865,98	11000 Orang	1.863,33	-	-	-	-	-	-	16.100 Orang	2.729,31	Diskerpus
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah pelayanan informasi	5 Materi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskerpus
18	URUSAN KEARSIPAN				7.834,12		2.569,85		3.763,32		2.494,41		2.494,41		19.181,25	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				7.834,12		2.569,85		3.763,32		2.494,41		2.494,41		19.181,25	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.610,07	-	-	100 %	792,57	100 %	797,19	100 %	797,19	100 %	3.997,03	Diskerpus
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	4.328,67	-	-	100 %	1.604,70	100 %	252,13	100 %	252,13	100 %	6.437,63	Diskerpus
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	98 orang	60 orang	204,57	-	-	-	-	-	-	-	-	60 orang	204,57	Diskerpus
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	257,10	-	-	4 Dokumen	345,30	4 Dokumen	420,53	4 Dokumen	420,53	4 Dokumen	1.443,45	Diskerpus
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	10,00	-	-	3 Dokumen	10,00	3 Dokumen	10,00	3 Dokumen	10,00	3 Dokumen	39,99	Diskerpus
15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	98 PD & Desa	98 PD & Desa	87,71	98 PD & Desa	835,17	98 PD & Desa	288,073	35 PD 62 Desa	261,09	35 PD 62 Desa	261,09	98 PD & Desa	1.733,12	Diskerpus
16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	604,26	3 Perangkat Daerah	875,28	1 Perangkat Daerah	695,486	1 Perangkat Daerah	501,86	1 Perangkat Daerah	501,86	9 Perangkat Daerah	3.178,75	Diskerpus
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah pelayanan informasi	5 Materi	5 Materi	731,74	5 Materi	859,41	-	-	5 Materi	251,61	5 Materi	251,61	20 Materi	2119,53	Diskerpus
19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Data tidak tersedia	-	-	-	-	2 Perpustakaan	27,19	-	-	-	-	2 Perpustakaan	27,19	Diskerpus

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	URUSAN PILIHAN				68.204,62		112.800,50		83.259,34		162.255,96		141.999,23		568.519,66	
01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				12.403,22		6.961,99		9.137,54		11.472,72		6.472,72		46.448,19	
	DINAS PERIKANAN				12.403,22		6.961,99		9.137,54		11.472,72		6.472,72		46.448,19	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	12 bulan	1.550,721	12 bulan	1.542,873	12 bulan	1.135,97	12 bulan	1.193,88	12 bulan	1.193,88	12 bulan	6.617,33	Dinas Perikanan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %	100%	665,529	100%	641,840	100%	6.486,05	100%	7.747,02	100%	2.747,018	100 %	18.287,46	Dinas Perikanan
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah Dokumen AKIP yang disusun	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	260,084	6 jenis dokumen	234,882	6 jenis dokumen	321,86	6 jenis dokumen	346,64	6 jenis dokumen	346,644	6 jenis dokumen	1.510,12	Dinas Perikanan
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 jenis	3 jenis	10,746	3 jenis	11,245	3 Jenis	12,73	3 jenis	14,74	3 jenis	14,743	3 jenis	64,21	Dinas Perikanan
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Jumlah produksi perikanan	155.646 ton	7.021,00 ton	36,891	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.021,00 ton	36,89	Dinas Perikanan
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER	Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan	kelompok	3 kelompok	82,258	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3 kelompok	82,26	Dinas Perikanan
19	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	2 kawasan	1 kawasan	1.689,853	2 kawasan	485,647	-	-	-	0,00	-	-	3 kawasan	2.175,50	Dinas Perikanan
20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah Produksi perikanan budidaya	586,80 ton	598	1.219,495	603,00	1.974,224	611 ton	130,14	617,00 ton	1.296,46	623 ton	1.296,457	3.052 ton	5.916,78	Dinas Perikanan
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.890,70 ton	6.423 ton	645,866	6.551 ton	1.712,145	6.682 ton	545,59	6.816,00 ton	227,38	6.952 ton	227,380	33.424 ton	3.358,36	Dinas Perikanan
23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	6.083 ton	8,249	6.205 ton	6,187	-	-	-	0,00	-	-	12.288 ton	14,44	Dinas Perikanan
26	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah pemasaran produksi hasil perikanan	8,931 ton	9.325	50,998	9.371	42,298	9.417	22,11	9.464 ton	118,77	9.511	118,767	47.088 ton	352,94	Dinas Perikanan
30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah dokumen data/informasi perikanan	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	308,023	3 jenis dokumen	195,950	4 jenis dokumen	241,48	3 jenis dokumen	375,37	4 jenis dokumen	375,367	4 jenis dokumen	1.496,19	Dinas Perikanan
34	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	6083 ton	5,458	6.205 ton	52,223	6.329 ton	34,54	6.456 ton	81,16	6.585 ton	81,160	31.658 ton	254,54	Dinas Perikanan
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL yang diberdayakan	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	Data tidak tersedia	-	-	50 kelompok	49,676	-	-	20 kelompok	12,56	50 kelompok	12,563	150 kelompok	74,80	Dinas Perikanan
36	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA	Jumlah kawasan pesisir yang tertata untuk mendukung	Data tidak tersedia	1 kawasan	5.869,051	1 kawasan	12,798	1 kawasan	207,06	1 kawasan	58,74	1 kawasan	58,741	4 kawasan	6.206,39	Dinas Perikanan
02	URUSAN PARIWISATA				21.860,37		60.593,00		34.631,38		100.761,30		90.761,30		308.607,36	
	DINAS PARIWISATA				21.860,37		60.593,00		34.631,38		100.761,30		90.761,30		308.607,36	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.328,15	12 bulan	2.750,42	12 bulan	2.405,12	12 bulan	2.288,33	12 bulan	2.288,33	60 bulan	12.060,34	Dispar
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang Tersedia	1 tahun	12 bulan	1.637,52	12 bulan	3.450,58	12 bulan	1.567,20	12 bulan	1.984,67	12 bulan	1.984,67	60 bulan	10.624,65	Dispar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	5 paket	1 paket	304,72	1 paket	369,22	1 paket	443,43	1 paket	701,96	1 paket	701,96	5 tahun	2.521,29	Dispar
	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	25 buku	25 buku	11,00	25 buku	10,00	25 buku	10,00	25 buku	10,00	25 buku	10,00	125 buku	51,00	Dispar
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	4.000.000 orang wisatawan mancanegara	5.080.000 orang wisatawan mancanegara	12.032,31	6.502.400 orang wisatawan mancanegara	41.081,21	6.000.000 orang wisatawan mancanegara	16.587,87	6.150.000 orang wisatawan mancanegara	23.481,41	6.300.000 orang wisatawan mancanegara	23.482,88	30.032.400 orang wisatawan mancanegara	116.665,68	Dispar
16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI	Prosentase DTW yang ditata	61 %	64 %	4.828,36	66 %	10.383,01	69 %	12.292,01	72 %	69.408,48	75 %	59.408,48	75 %	156.320,33	Dispar
17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	200 orang	334 orang	502,00	1020 orang	1.191,54	750 orang	700,51	1325 orang	1.765,66	1325 orang	1.764,20	4754 orang	5.923,92	Dispar
18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	jumlah produk wisata yang dibina	180 usaha + 4 daya tarik wisata	615 usaha+23 daya tarik wisata	216,33	925 usaha+24 daya tarik wisata	1.357,03	925 usaha+25 daya tarik wisata	625,22	925 usaha+26 daya tarik wisata	1.120,79	925 usaha+27 daya tarik wisata	1.120,79	4315 usaha + 27 daya tarik wisata	4.440,17	Dispar
03	URUSAN PERTANIAN				23.239,33		32.930,26		33.247,99		44.224,60		39.081,75		172.723,93	
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				23.239,33		32.930,26		33.247,99		44.224,60		39.081,75		172.723,93	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	60 bulan	12 bulan	3.929,52	12 bulan	4.727,23	12 bulan	3.977,47	12 bulan	3.818,73	12 bulan	3.818,73	60 bulan	20.271,68	Diperpa
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	60 bulan	1 Paket	1.826,91	1 paket	1.796,03	1 paket	1.065,84	1 Paket	783,59	1 Paket	783,59	5 paket	6.255,96	Diperpa
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pengeolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	60 bulan	12 Bulan	368,48	12 bulan	463,72	12 Bulan	532,55	12 Bulan	706,75	12 Bulan	706,75	60 bulan	2.778,24	Diperpa
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Perenc	3 jenis	3 Jenis	10,99	2 jenis	8,16	2 jenis	8,31	2 Jenis	6,75	3 Jenis	6,75	3 jenis	40,97	Diperpa
8	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya	280 orang	345 orang	482,40	345 orang	368,79	110 orang	8.746,96	110 orang	18.492,28	110 orang	18.492,28	1289.612773	46.582,71	Diperpa
16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola	Data tidak tersedia	84,50		85,00		96,00		96,5	5.142,85	97,00	-	97,00	5.142,85	Diperpa
09	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN	Jumlah data yang informatif yang tersedia	3 jenis data	3 jenis data	606,96	3 jenis data	684,34	3 jenis data	355,09	3 Jenis Data	686,40	3 jenis data	686,40	3 jenis data	3.019,20	Diperpa
10	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian	15 kali	4 Kali	1.925,09	5 kali	2.083,24	5 kali	1.342,20	5 kali	1.492,94	5 kali	1.492,94	24 Kali	8.336,41	Diperpa
11	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah Produksi pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	9.473,20	125.000 ton	10.452,27	127.500 ton	6.367,06	130.000 ton	6.988,48	132.500 ton	6.988,48	132.500 ton	40.269,50	Diperpa
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	55 orang	45 Orang	1.312,38	45,00 orang	2.059,21	45 orang	793,20	45 Orang	2.683,86	45 Orana	2.683,86	45 Orana	9.532,51	Diperpa
13	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	65.427	30068 Ekor	3.076,30	29521	3.188,69	28975	2.553,60	28428 Ekor	2.969,02	27335	2.969,02	27335	14.756,63	Diperpa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	14 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	Data tidak tersedia	5 Kelompok	24,399	5 kelompok	59,52961	5 Kelompok	66,859	5 Kelompok	27,22	5 Kelompok	27,22	25 Kelompok	205,22	Diperpa
	15 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berorientasi pasar	Data tidak tersedia	13 Kelompok	-	17 Kelompok	6,838,49	21 Kelompok	7,228,62	24 Kelompok	118,41	27 Kelompok	118,41	27 Kelompok	14,303,92	Diperpa
	17 PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Data tidak tersedia	714 Sampel	202,71	714	200,56	714	210,23	714	307,32	714	307,32	714 Sampel	1,228,12	Diperpa
04	URUSAN KEHUTANAN				292,41		0,00		0,00		0,00		0,00		292,41	
	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM				292,41		0,00		0,00		0,00		0,00		292,41	
	16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Jumlah kelompok tani yang memiliki pemahaman tentang rehabilitasi	Data tidak tersedia	15 Kelompok	41,38	-	-	-	-	-	-	-	-	15 kelompok	41,380	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
	23 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Jumlah kelompok tani/masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hutan lestari	Data tidak tersedia	9 kelompok	11,62	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kelompok	11,621	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
	22 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI KEHUTANAN	Jumlah data base dan peta potensi kehutanan	Data tidak tersedia	1 paket	239,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	239,41	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
05	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				115,28		175,35		0,00		0,00		0,00		290,62	
	BAGIAN PEREKONOMIAN				115,28		175,35		0,00		0,00		0,00		290,62	
	15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Mewujudkan Tertib Usaha Di Bidang ESDM	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	105,30	6 Kecamatan	158,66	-	-	-	-	-	-	6 Kecamatan	263,96	Setda. Bagian Perekonomian
	17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Mewujudkan tertib Usaha di Bidang ketenagalistrikan	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	9,98	6 Kecamatan	16,69	-	-	-	-	-	-	6 Kecamatan	26,66	Setda. Bagian Perekonomian
06	URUSAN PERDAGANGAN				6.510,47		3.219,41		3.139,72		1.749,96		1.636,08		16.255,64	
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN				6.510,47		3.219,41		3.139,72		1.749,96		1.636,08		16.255,64	
	15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase perlindungan terhadap Konsumen	100 %	100 %	1.751,76	100 %	286,81	100 %	114,66	100 %	194,23	100 %	80,35	100 %	2.427,80	Diskop.UKMP
	16 PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR	Persentase Pelaksanaan Tertib Ukur	Data tidak tersedia	0	-	100 %	1.164,13	100 %	321,15	100 %	587,38	100 %	587,38	100 %	2.660,03	Diskop.UKMP
	17 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase Efisiensi Perdagangan dalam negeri	100 %	100 %	4.758,71	100 %	1.608,13	100 %	2.699,65	100 %	909,85	100 %	909,85	100 %	10.886,18	Diskop.UKMP
	18 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase realisasi ekspor Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	0	-	100 %	160,36	100 %	4,27	100 %	58,50	100 %	58,50	100 %	281,63	Diskop.UKMP
07	URUSAN PERINDUSTRIAN				3.783,54		8.920,50		3.102,70		4.047,38		4.047,38		23.901,50	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				3.783,54		8.920,50		3.102,70		4.047,38		4.047,38		23.901,50	
	1 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Jumlah IKM yang meningkat produktivitas usahanya	1000 orang 1500 IKM 90 IKM	300 IKM	1.318,56	300 IKM	4.467,30	300 IKM	1.291,06	300 IKM	1.787,68	300 IKM	1.787,68	1.500 IKM	10.652,27	Disperinaker
	2 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah kelompok IKM yang mampu menerapkan teknologi industri	17 Gugus	1 Gugus	25,52	1 Gugus	419,31	1 gugus	64,93	1 gugus	234,08	1 gugus	234,08	5 gugus	977,92	Disperinaker

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	Data tidak tersedia	100 %	160.12	100 %	871.62	100 %	353.23	100 %	382.99	100 %	382.99	100 %	2.150.95	Disperinaker
4	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administarsi perkantoran	Data tidak tersedia	100 %	1.200.94	100 %	1.262.84	100 %	846.56	100 %	906.36	100 %	906.36	100 %	5.123.06	Disperinaker
		Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Data tidak tersedia	100 %		100 %										
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Data tidak tersedia	100 %	785.41	100 %	1.598.32	100 %	153.75	100 %	266.93	100 %	266.93	100 %	3.071.33	Disperinaker
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	Data tidak tersedia	100 %		100 %										
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja dan Keuangan	Data tidak tersedia	10 dokumen	278.00	10 dokumen	291.66	100 %	383.25	100 %	459.01	100 %	459.01	100 %	1.870.93	Disperinaker
		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Data tidak tersedia	100 %		100 %										
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Data tidak tersedia	30 dokumen	15.00	30 dokumen	9.45	50 dokumen	9.92	3 dokumen	10.33	3 dokumen	10.33	3 dokumen	55.04	Disperinaker
		Kesesuaian Renja PD dengan RKPD	Data tidak tersedia	100 %		100 %										

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				373.464,22		482.553,57		381.761,61		474.683,69		474.622,32		2.186.311,69	
01	FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				274.624,65		336.789,43		279.807,17		354.395,65		354.191,72		1.599.034,89	
3	SEKRETARIAT DAERAH				144.544,18		194.929,61		148.802,04		174.038,53		176.073,35		838.387,71	
a.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.790,93		3.974,41		2.438,58		1.408,91		1.471,68		14.084,51	
01	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Proposal yang diverifikasi administratif sesuai	100 %	100 %	4.790,93	100 %	3.974,41	100 %	2.438,58	100 %	1.408,91	100 %	1.471,68	100 %	14.084,51	Setda. Bagian Kesra
b.	BAGIAN PEMERINTAHAN				2.956,22		8.507,68		8.980,64		6.278,73		6.278,73		33.002,01	
01	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase pelaksanaan administrasi	100%	100%	1.108,81	100%	3.106	100%	2.276,91	100%	2.249,67	100%	2.249,67	100%	10.990,73	Setda. Bagian Pemerintahan
02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 kali	1 kali	25,08	1 kali	25	1 kali	25,18	1 kali	25,12	1 kali	25,12	5 kali	125,67	Setda. Bagian Pemerintahan
03	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	3 Hari besar	100%	1.728,20	100%	4.832	100%	3.152,37	100%	164,27	100%	164,27	3 Hari besar	10.041,17	Setda. Bagian Pemerintahan
04	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Data tidak tersedia	100%	70,90	100%	545	100%	2.648,32	100%	3.466,60	100%	3.466,60	-	10.197,23	Setda. Bagian Pemerintahan
05	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Cakupan Kualitas Pelayanan Minimal	Data tidak tersedia	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	18,06	1 laporan	7,29	1 laporan	7,29	-	32,64	Setda. Bagian Pemerintahan
06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	CAKUPAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Data tidak tersedia	100%	23,23	100%	-	100%	859,80	100%	365,77	100%	365,77	-	1.614,58	Setda. Bagian Pemerintahan
c.	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN				9.926,66		14.483,57		12.762,47		14.111,89		14.111,89		65.396,47	Bagian Humas
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terealisasinya bahan bacaan berupa koran dan majalah	21 jenis koran dan 4 majalah	20 jenis koran dan majalah	1.017,85	20 jenis koran dan majalah	1.497,23	20 jenis koran dan majalah	1.991,24	20 jenis koran dan majalah	775,94	20 jenis koran dan majalah	775,94	20 jenis koran dan majalah	6.058,197	Setda. Bagian Humas
02	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Data tidak tersedia	-	-	80 setel	160,38	-	-	-	0,00	-	0,00	80 setel	160,375	Setda. Bagian Humas
03	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Kehumasan Karyawan/Karyawati	28 orang	30 orang	30	30 orang	423,70	15 orang	3,45	-	0,00	-	0,00	75 orang	427,145	Setda. Bagian Humas
04	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASA	Jumlah Kegiatan Kerjasama Informasi dengan Media Masa	1 kali	2 Kegiatan	1.189,79	2 Kegiatan	1.724,22	2 Kegiatan	831,89	2 Kegiatan	886,07	2 Kegiatan	886,07	10 Kegiatan	5.518,042	Setda. Bagian Humas
05	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Persentase Pelayanan dan Dokumentasi	100%	100%	1.649,34	100%	2.696,38	100%	2.320,16	100%	3.361,11	100%	3.361,11	100%	13.388,107	Setda. Bagian Humas
06	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASA	Terpublikasikannya berbagai kegiatan Pembangunan dan	3036 Adv	3.600 Adv	6.069,68	3.650 Adv	7.981,67	3700 Adv	7.615,74	3750 Adv	9.088,76	3800 Adv	9.088,76	18500 Adv	39.844,604	Setda. Bagian Humas
d.	BAGIAN HUKUM DAN HAM				3.606,90		4.237,49		4.019,57		6.867,35		6.867,35		25.598,68	
01	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100 %	100 %	3.606,90	100 %	4.237,49	100 %	4.019,57	100 %	6.867,35	100 %	6.867,35	100 %	25.598,677	Setda. Bagian Hukum dan HAM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	e.	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Rancangan Hukum Daerah yang telah diharmonisasikan sesuai		441,56		956,65		644,34		1.285,83		1.285,83		4.614,21		
	75	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Mengoptimalkan Ketahanan pangan di Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	232,74	6 Kecamatan	693,66	6 Kecamatan	339,07	6 Kecamatan	1.173,59	6 Kecamatan	1.173,59	6 Kecamatan	3.612,659	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
	100	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Mengoptimalkan Profesionalisme Organisasi KTNA	Data tidak tersedia	60 Orang	40,51	60 Orang	51,21	60 Orang	266,00	60 Orang	18,58	60 Orang	18,58	60 Orang	394,864	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
	114	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Masyarakat Miskin di Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	9041 RTS-PM	168,31	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	9.041 RTS-PM	168,310	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
	102	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok tani/masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hutan lestari	Data tidak tersedia	9 Kelompok	-	9 Kelompok	45,48	9 Kelompok	1,82	9 Kelompok	28,44	9 Kelompok	28,44	9 Kelompok	104,183	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
	101	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Data tidak tersedia			100 %	166,30	100 %	37,45	100 %	65,22	100 %	65,22	100 %	334,195	Setda. Bagian Sumber Daya Alam
	f.	BAGIAN PEREKONOMIAN			3.494,02		2.695,39		2.625,88		3.553,03		3.553,03		15.921,36		
	56	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Memperkuat Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa Desa	Data tidak tersedia	122 LPD	3.301,61	122 LPD	1.689,11	122 LPD	197,59	122 LPD	265,05	122 LPD	265,05	122 LPD	5.718,423	Setda. Bagian Perekonomian
	111	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pelaksanaan koordinasi pengendalian inflasi daerah	Data tidak tersedia	6 kecamatan	65,56	6 kecamatan	812	6 kec.	2.206,05	6 kec.	2.570,57	6 kec.	2.570,57	6 kec.	8.224,818	Setda. Bagian Perekonomian
	112	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Mengoptimalkan Kinerja BUMD di Kabupaten Badung Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	12 bulan	57,13	12 bulan	54	2 BUMD	16,78	2 BUMD	531,27	2 BUMD	531,27	2 BUMD	1.190,803	Setda. Bagian Perekonomian
	113	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Peningkatan Kualitas Produk UMKM	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	69,72	6 Kecamatan	140	6 kecamatan	143,25	6 kecamatan	148,13	6 kecamatan	148,13	6 kecamatan	649,095	Setda. Bagian Perekonomian
	115	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Mewujudkan tertib usaha di bidang pertambangan	Data tidak tersedia	6 kecamatan				6 kecamatan	49,37	6 kecamatan	38,01	6 kecamatan	38,01	6 kecamatan	125,381	Setda. Bagian Perekonomian
	116	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Mewujudkan tertib usaha di bidang ketenagalistrikan	Data tidak tersedia	6 kecamatan				6 kecamatan	12,84	-	0,00	-	0,00	6 kecamatan	12,840	Setda. Bagian Perekonomian
	g.	BAGIAN PEMBANGUNAN			3.284,29		13.949,26		2.205,97		4.011,43		3.754,09		27.205,04		
	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah obyek kunjungan kerja Pimpinan Daerah/Pimpinan Perangkat Daerah	40 obyek obyek pemb.	1 paket	59,04	1 paket	93	1 paket	53,30	1 paket	70,59	1 paket	70,59	200 obyek pemb.	346,37	Setda. Bagian Pembangunan
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Data tidak tersedia	100 %	249,81									100 %	249,81	
	20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	1 Paket	4 Paket	2.863,28	4 Paket	13.770	4 Paket	2.071,27	4 Paket	3.599,39	4 Paket	3.599,39	20 Paket	25.902,95	Setda. Bagian Pembangunan
	89	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Kabupaten Badung	1 Paket	1 Paket	19,51	1 Paket	27	1 Paket	26,79	1 Paket	285,611	1 Paket	28,276	1 Paket	386,90	Setda. Bagian Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	Data tidak tersedia	1 Dokumen	92,65	1 Dokumen	60	1 Dokumen	54,60	1 Dokumen	55,836	1 Dokumen	55,836	4 Dokumen	319,01	Setda. Bagian Pembangunan
h.	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				4.271,15		4.796,39		6.005,06		6.385,78		6.385,78		27.844,14	
20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	100 %	4.267,13	100 %	4.577,80	100 %	5.980,98	100 %	6.276,32	100 %	6.276,32	100 %	27.378,55	Setda. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	100 %	4,01	100 %	218,58	100 %	24,08	100 %	109,46	100 %	109,46	100 %	465,59	Setda. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
i.	BAGIAN ORGANISASI				2.544,14		4.638,45		2.614,32		2.559,02		2.559,02		14.914,95	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pembayaran iuran FORSESDASI	1 Orang	1 Orang	10,00	1 Orang	13,67	1 Orang	13,67	1 Orang	10,00	1 Orang	10,00	5 Orang	57,33	Setda. Bagian Organisasi
02	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi tentang Penerapan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten	100 %	100 %	204,79	100 %	598,76	-	-	100 %	15,80	100 %	15,80	100 %	835,15	Setda. Bagian Organisasi
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah ASN yang memahami Budaya Kerja	248 Orang	125 Orang	24,71	125 Orang	100,69	125 Orang	16,34	-	-	-	-	620 Orang	141,74	Setda. Bagian Organisasi
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah PD yang diasistensi dan pelaporan LKjIP tepat waktu	53 SKPD	38 PD	1.060,04	38 PD	2.638,71	38 PD	2.371,07	38 PD	2.120,18	38 PD	2.120,18	38 PD	10.310,18	Setda. Bagian Organisasi
28	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	38 PD	1.225,86	38 PD	1.254,22	38 PD	213,24	38 PD	413,04	38 PD	413,04	38 PD	3.519,40	Setda. Bagian Organisasi
39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	Data tidak tersedia	100%	18,74	100%	32,41	-	-	-	-	-	-	100%	51,15	Setda. Bagian Organisasi
j.	BAGIAN UMUM				47.079,15		58.320,63		51.649,63		53.022,59		56.456,98		266.528,98	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	44.409,59	100 %	54.182	100 %	45.958,05	100 %	45.032,35	100 %	48.466,75	100 %	238.048,29	Setda. Bagian Umum
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	100 %	2.093,73	100 %	3.806	100 %	5.481,28	100 %	7.678,57	100 %	7.678,57	100 %	26.738,65	Setda. Bagian Umum
03	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala	36 Kunjungan	36 Kunjungan	500,00	36 Kunjungan	200	36 Kunjungan	100,00	36 Kunjungan	200,00	36 Kunjungan	200,00	36 Kunjungan	1.200,00	Setda. Bagian Umum
04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100 %	100 %	55,52	100 %	110	100 %	103,62	100 %	111,67	100 %	111,67	100 %	492,79	Setda. Bagian Umum
05	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	100 %	100 %	20,30	100 %	22	100 %	6,68	100 %	0,00	0 %	0,00	100 %	49,26	Setda. Bagian Umum
k.	BAGIAN KEUANGAN				2.416,85		2.608,16		3.056,42		3.600,10		3.735,75		15.417,29	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Data tidak tersedia	12 bulan	995,37	12 bulan	746,74	12 bulan	742,68	12 bulan	745,13	12 bulan	745,13	100%	3.975,05	Setda. Bagian Keuangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel	Data tidak tersedia	100 %	1.209,30	100 %	1.300,69	100 %	1.986,90	100 %	2.309,61	100 %	2.477,75	100%	9.284,26	Setda. Bagian Keuangan
07	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara renia perangkat daerah dengan RKPD	Data tidak tersedia	100 %	98,67	100 %	495,65	100 %	278,14	100 %	438,71	100 %	399,69	100%	1.710,86	Setda. Bagian Keuangan
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan Kab. Badung	Data tidak tersedia	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 %	18,58	100 %	18,58	100%	37,17	Setda. Bagian Keuangan
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FISILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Terciptanya SPJ dimasing-masing Bagian yang akuntabel	Data tidak tersedia	100 %	113,51	100 %	65,07	100 %	48,70	100 %	88,07	100 %	94,60	100 %	409,95	Setda. Bagian Keuangan
I.	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN				59.732,32		75.761,52		51.799,16		70.953,86		69.613,20		327.860,06	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	25 Paket	8 Paket	3.236,46	8 Paket	22.940	3 Paket	21.335,14	3 Paket	24.662,70	3 Paket	24.649,47	25 Paket	96.824,23	Setda. Bagian Perengkapan dan Perawatan
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dipelihara	52 Paket	8 Paket	56.472,04	11 Paket	52.793	11 Paket	30.436,95	11 Paket	46.265,94	11 Paket	44.938,51	52 Paket	230.906,06	Setda. Bagian Perengkapan dan Perawatan
33	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Aset	77 Dokumen	16 Dokumen	23,82	16 Dokumen	28	15 Dokumen	27,06	15 Dokumen	25,22	15 Dokumen	25,22	77 Dokumen	129,77	Setda. Bagian Perengkapan
4	SEKRETARIAT DPRD				83.377,91		90.767,88		84.869,02		126.734,99		124.714,36		510.464,15	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	5.488,63	100 %	4.770,34	100 %	4.300,88	100 %	4.709,97	100 %	4.721,93	100 %	23.991,76	Setwan
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	4.827,12	100 %	9.896,79	100 %	2.577,52	100 %	4.823,48	100 %	4.376,26	100 %	26.501,17	Setwan
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	409,68	100 %	461,54	100 %	553,84	100 %	964,51	100 %	964,51	100 %	3.354,09	Setwan
15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Meningkarnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	78 %	80 %	72.416,94	81 %	75.373,45	82 %	76.793,71	83 %	115.666,27	84 %	114.080,90	84 %	454.331,27	Setwan
26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	100 %	100 %	235,53	100 %	265,74	100 %	643,07	100 %	570,76	100 %	570,76	100 %	2.285,86	Setwan
12	KANTOR CAMAT KUTA				10.911,35		11.661,27		9.929,99		11.392,45		11.392,45		55.277,41	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	Cakupan Pelayanan Administ Perkantoran	17 kegiatan	17 kegiatan	4.830,19	17 kegiatan	5.095,06	17 kegiatan	4.602,60	17 kegiatan	6.232,53	17 kegiatan	6.232,53	17 kegiatan	26.992,90	Kecamatan Kuta
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan sarar prasarana aparatur	2 paket	2 paket	1.852,40	2 paket	2.785,09	2 paket	1.850,97	2 paket	1.485,25	2 paket	1.485,25	2 paket	9.458,96	Kecamatan Kuta
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kepala Lingkungan yang dilantik	9 Orang	9 Orang	7,93	2 Orang	18,23	-	-	3 Orang	5,06	2 Orang	5,06	16 Orang	26,16	Kecamatan Kuta
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan	2 jenis	2 jenis	163,56	2 jenis	151,44	2 jenis	341,62	2 jenis	460,14	2 jenis	460,14	2 jenis	1.576,90	Kecamatan Kuta

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	12 jenis	635,68	12 jenis	567,43	12 jenis	513,18	4 kegiatan	630,12	12 jenis	630,12	12 jenis	2.976,53	Kecamatan Kuta
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	9,38	3 jenis	10,00	3 jenis	10,00	3 jenis	10,01	3 jenis	10,01	3 jenis	49,39	Kecamatan Kuta
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	1 dokumen	145,20	1 dokumen	63,09	1 dokumen	89,36	1 dokumen	43,62	1 dokumen	43,62	1 dokumen	384,88	Kecamatan Kuta
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data dan informasi statistik	2 jenis	2 jenis	136,64	2 jenis	5,54	2 jenis	31,53	-	-	-	-	2 jenis	173,71	Kecamatan Kuta
78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah kelurahan yang diajaga ketertibannya	5 Lokasi	5 lokasi	319,93	5 lokasi	313,04	5 lokasi	73,35	5 lokasi	60,68	5 lokasi	60,68	5 lokasi	827,68	Kecamatan Kuta
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	2 kegiatan	3 kegiatan	991,87	3 kegiatan	343,72	3 kegiatan	773,83	3 kegiatan	76,69	3 kegiatan	76,69	3 kegiatan	2.262,81	Kecamatan Kuta
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	2 jenis	2 jenis	17,88	2 jenis	18,03	2 jenis	17,79	2 jenis	724,22	2 jenis	724,22	2 jenis	1.502,16	Kecamatan Kuta
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional	7 hari besar	7 hari besar	192,89	7 hari besar	357,21	7 hari besar	377,97	7 hari besar	245,03	7 hari besar	245,03	7 hari besar	1.418,14	Kecamatan Kuta
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	1 jenis	369,16	2 jenis	577,58	2 jenis	28,02	1 kegiatan	30,18	2 jenis	30,18	2 jenis	1.035,11	Kecamatan Kuta
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	436,04	7 jenis	397,58	7 jenis	280,69	7 jenis	313,75	7 jenis	313,75	7 jenis	1.741,80	Kecamatan Kuta
86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Karang Taruna/PSM yang dibina	7 jenis	-	-	7 jenis	29,41	-	-	-	-	-	-	7 jenis	29,41	Kecamatan Kuta
87	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jenis kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan	28 lingkungan	28 lingkungan	789,59	28 lingkungan	913,79	28 lingkungan	926,44	28 lingkungan	1.070,87	28 lingkungan	1.070,87	28 lingkungan	4.771,55	Kecamatan Kuta
90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Pengentasan kemiskinan masyarakat	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101	3,82	106 RTM, 101	4,40	106 RTM, 101	4,35	-	-	-	-	106 RTM, 101	12,57	Kecamatan Kuta
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan	5 lokasi	5 lokasi	9,21	5 lokasi	10,65	5 lokasi	8,31	5 lokasi	4,31	5 lokasi	4,31	5 lokasi	36,78	Kecamatan Kuta
13	KANTOR CAMAT KUTA UTARA				8.207,66		9.112,60		8.792,06		10.464,45		10.337,68		46.914,45	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	3.858,98	15 kegiatan	4.406,81	14 kegiatan	4.585,85	14 kegiatan	6.507,51	14 kegiatan	6.478,16	15 kegiatan	25.837,32	Kecamatan Kuta Utara
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 paket	1 paket	1.127,80	1 paket	1.591,76	3 paket	1.528,29	3 paket	1.122,94	4 paket	1.122,94	5 paket	6.493,72	Kecamatan Kuta Utara
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	252,42	4 dokumen	160,68	4 dokumen	355,97	4 dokumen	485,20	4 dokumen	485,20	4 dokumen	1.739,48	Kecamatan Kuta Utara
04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RENJA, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	11,10	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	9,95	3 dokumen	9,95	3 dokumen	51,01	Kecamatan Kuta Utara
05	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	4 kegiatan	4 kegiatan	518,93	4 kegiatan	632,37	4 kegiatan	476,21	2 kegiatan	504,52	4 kegiatan	407,10	18 kegiatan	2.539,12	Kecamatan Kuta Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	jumlah desa yang dibangun dan dimonitoring dalam pengangkatan perangkat desa	6 desa/Perbekel	6 desa/Perbekel	3,30	6 desa/Perbekel	22,96	-	-	6 desa/Perbekel	5,01	6 desa/Perbekel	5,01	6 desa/Perbekel	36,27	Kecamatan Kuta Utara
06	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	jumlah dokumen pembangunan daerah	1 dokumen	1 dokumen	102,59	1 dokumen	77,55	1 dokumen	51,46	1 dokumen	66,28	1 dokumen	66,28	4 dokumen	364,17	Kecamatan Kuta Utara
07	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 jenis	3 jenis	127,21	3 jenis	29,67	3 jenis	3,61	-	-	-	-	12 jenis	160,50	Kecamatan Kuta Utara
08	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	jumlah lokasi yang dipantau	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	328,86	6 desa/kelurahan	101,00	6 desa/kelurahan	25,09	6 desa/kelurahan	10,00	6 desa/kelurahan	10,00	6 desa/kelurahan	474,94	Kecamatan Kuta Utara
09	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	468,41	6 desa/kelurahan	362,29	6 desa/kelurahan	572,22	6 desa/kelurahan	498,80	6 desa/kelurahan	498,80	6 desa/kelurahan	2.400,52	Kecamatan Kuta Utara
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	143,40	7 hari besar	153,42	7 hari besar	183,50	7 hari besar	196,03	7 hari besar	196,03	7 hari besar	872,38	Kecamatan Kuta Utara
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	3 kegiatan	39,44	1 kegiatan	12,34	1 kegiatan	13,57	1 kegiatan	9,81	1 kegiatan	9,81	4 kegiatan	84,97	Kecamatan Kuta Utara
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	jenis pengelolaan keragaman budaya	1 jenis	1 jenis	391,15	1 jenis	416,72	1 jenis	23,00	1 jenis	23,12	1 jenis	23,12	9 jenis	877,11	Kecamatan Kuta Utara
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	302,56	7 jenis	358,33	7 jenis	348,28	7 jenis	319,40	7 jenis	319,40	7 jenis	1.647,97	Kecamatan Kuta Utara
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	jumlah karang taruna dan PSM yang dibangun	1 kegiatan	1 karang taruna dan 1 PSM	-	160,24	1 karang taruna dan 1 PSM	6,01	1 karang taruna dan 1 PSM	4,01	1 karang taruna dan 1 PSM	4,01	1 karang taruna dan 1 PSM	1 karang taruna dan 1 PSM	174,25	Kecamatan Kuta Utara
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	3 kelurahan	3 kelurahan	495,56	3 kelurahan	558,41	3 kelurahan	597,39	3 kelurahan	691,80	3 kelurahan	691,80	3 kelurahan	3.034,96	Kecamatan Kuta Utara
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan	462 RTM	298 RTM	4,95	261 RTM	5,46	-	-	-	-	-	-	261 RTM	10,40	Kecamatan Kuta Utara
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/Perbekel	6 desa/Perbekel	4,47	6 desa/Perbekel	52,58	6 desa/Perbekel	11,61	6 desa/Perbekel	10,08	6 desa/Perbekel	10,08	6 desa/Perbekel	88,82	Kecamatan Kuta Utara
117	PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT	jumlah SIUMK yang diterbitkan	Data tidak tersedia	80 ijin	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	80 ijin	1,37	Kecamatan Kuta Utara
118	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KECAMATAN	jumlah lembaga kecamatan yang aktif	1 kegiatan	1 kegiatan	25,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	25,15	Kecamatan Kuta Utara
14	KANTOR CAMAT KUTA SELATAN				8.028,40		8.549,70		9.483,64		10.825,25		10.825,25		47.712,24	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administ Perkantoran	15 kegiatan	16 kegiatan	3.672,54	15 kegiatan	4.063,73	14 kegiatan	4.600,93	14 kegiatan	5.909,79	14 kegiatan	5.909,79	14 kegiatan	24.156,77	Kecamatan Kuta Selatan
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase peningkatan prasarana aparatur	100 %	100 %	849,98	100 %	1.045,67	100 %	1.505,20	100 %	1.248,63	100 %	1.248,63	100 %	5.898,10	Kecamatan Kuta Selatan
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan	2 jenis	2 jenis	254,22	2 jenis	147,58	2 jenis	366,69	2 jenis	476,37	2 jenis	476,37	2 jenis	1.721,23	Kecamatan Kuta Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENSTRA.RENJA, RKA)	Jumlah dokumen Perangkat D	3 jenis	3 jenis	10,00	3 jenis	10,00	3 jenis	15,00	3 jenis	10,00	3 jenis	10,00	3 jenis	55,00	Kecamatan Kuta Selatan
05	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Kegiatan Pengembangan Budaya	11 jenis	11 jenis	441,30	11 jenis	639,49	4 jenis	507,86	3 jenis	516,46	3 jenis	516,46	3 jenis	2.621,56	Kecamatan Kuta Selatan
06	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	99,28	1 dokumen	118,11	1 dokumen	85,53	1 dokumen	65,06	1 dokumen	65,06	1 dokumen	433,05	Kecamatan Kuta Selatan
07	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK	Jumlah dokumen data	3 jenis	3 jenis	157,91	3 jenis	12,44	3 jenis	12,37	2 jenis	11,14	2 jenis	11,14	2 jenis	205,00	Kecamatan Kuta Selatan
08	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	6 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	231,24	6 desa/ kelurahan	128,15	6 desa/ kelurahan	40,69	6 desa/ kelurahan	36,57	6 desa/ kelurahan	36,57	6 desa/ kelurahan	473,22	Kecamatan Kuta Selatan
09	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 kegiatan	3 kegiatan	750,89	3 kegiatan	398,12	3 kegiatan	509,13	9 kegiatan	472,30	9 kegiatan	472,30	9 kegiatan	2.602,75	Kecamatan Kuta Selatan
10	PROGRAM HARI BESAR NASIONAL	Jumlah pelaksanaan hari-hari besar nasional	7 hari besar	7 hari besar	141,18	7 hari besar	180,27	7 hari besar	127,03	7 hari besar	165,85	7 hari besar	165,85	7 hari besar	780,18	Kecamatan Kuta Selatan
11	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan budaya	3 jenis	3 jenis	407,27	3 jenis	444,32	3 jenis	63,95	1 jenis	57,78	1 jenis	57,78	1 jenis	1.031,10	Kecamatan Kuta Selatan
12	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	7 jenis	7 jenis	448,17	7 jenis	787,41	7 jenis	1.068,65	7 jenis	1.235,46	7 jenis	1.235,46	7 jenis	4.775,14	Kecamatan Kuta Selatan
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan	6 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	6,17	6 desa/ kelurahan	14,03	6 desa/ kelurahan	14,03	6 desa/ kelurahan	8,20	6 desa/ kelurahan	8,20	6 desa/ kelurahan	50,63	Kecamatan Kuta Selatan
14	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kepala Lingkungan yang dilantik	5 kalinq	4 kalinq	5,42	4 kalinq	11,15	4 kalinq	10,15	4 kalinq	5,83	4 kalinq	5,83	4 kalinq	38,38	Kecamatan Kuta Selatan
15	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jenis kegiatan promosi kesehatan dan masyarakat	data tidak tersedia	4 jenis	87,06	4 jenis	10,69	-	-	-	-	-	-	4 jenis	97,75	Kecamatan Kuta Selatan
16	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jenis kegiatan pengelolaan kebersihan lingkungan	6 desa/ kelurahan	15 orang	465,77	15 orang	530,85	15 orang	548,35	15 orang	600,20	15 orang	600,20	15 orang	2.745,38	Kecamatan Kuta Selatan
17	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Karang Taruna/PSM yang dibina	1 karang taruna/PSM	-	-	1 karang taruna/PSM	7,69	1 karang taruna/PSM	8,09	1 karang taruna/PSM	5,61	1 karang taruna/PSM	5,61	1 karang taruna/PSM	27,01	Kecamatan Kuta Selatan
15	KANTOR CAMAT MENGWI				11.779,15		11.477,34		10.947,33		13.015,78		13.015,78		60.235,37	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase layanan perkantoran untuk mendukung pelaksanaan	100 %	100 %	5.224,67	100 %	5.589,83	100 %	5.922,22	100 %	8.222,41	100 %	8.222,41	100 %	33.181,55	Kecamatan Mengwi
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan untuk menunjang program/kegiatan kantor	100 %	100 %	2.291,58	100 %	1.372,91	100 %	1.934,39	100 %	1.197,74	100 %	1.197,74	100 %	7.994,35	Kecamatan Mengwi
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	100 %	100 %	308,46	100 %	169,83	100 %	361,96	100 %	532,10	100 %	532,10	100 %	1.904,45	Kecamatan Mengwi
8	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Persentase Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	100 %	100 %	483,80	100 %	1.090,79	100 %	517,89	100 %	651,16	100 %	651,16	100 %	3.394,79	Kecamatan Mengwi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	2,81	3 dokumen	8,16	3 dokumen	8,16	3 dokumen	39,12	Kecamatan Mengwi
29	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	161,59	2 Kegiatan	92,62	2 Kegiatan	65,24	2 Kegiatan	37,00	2 Kegiatan	37,00	2 Kegiatan	393,46	Kecamatan Mengwi
38	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah Dokumen	25 buku	25 buku	135,41	25 buku	5,75	-	-	20 desa/kel	4,10	20 desa/kel	4,10	20 desa/kel	149,37	Kecamatan Mengwi
78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi	20 desa/kel	20 desa/kel	296,29	20 desa/kel	108,82	20 desa/kel	40,55	20 desa/kel	100,48	20 desa/kel	100,48	20 desa/kel	646,63	Kecamatan Mengwi
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Persentase Peningkatan Masyarakat dalam	100 %	100 %	812,34	100 %	557,51	100 %	776,74	100 %	794,01	100 %	794,01	100 %	3.734,62	Kecamatan Mengwi
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah kegiatan Promosi Pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	22,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,03	Kecamatan Mengwi
82	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah Hari Besar yang	7 hari besar	7 hari besar	154,17	7 hari besar	173,33	7 hari besar	143,20	7 hari besar	105,43	7 hari besar	105,43	7 hari besar	681,55	Kecamatan Mengwi
83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah kegiatan Pengelolaan	1 kegiatan	1 kegiatan	393,90	2 kegiatan	422,11	-	-	-	-	-	-	3 kegiatan	816,01	Kecamatan Mengwi
85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi kependudukan di Desa/kel di Kecamatan mengwi	100 %	100 %	237,85	100 %	296,96	100 %	232,64	100 %	306,86	100 %	306,86	100 %	1.381,18	Kecamatan Mengwi
86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan PSM dalam membangun desa	100 %	-	-	100 %	86,78	-	-	100 %	1,40	100 %	1,40	100 %	89,58	Kecamatan Mengwi
87	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Persentase lingkungan yang kecamatan mengwi	100 %	100 %	804,24	100 %	1.171	100 %	934,47	100 %	1.012,34	100 %	1.012,34	100 %	4.933,94	Kecamatan Mengwi
90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM yang Menerima	3701 RTM	3701 RTM	11,28	3701 RTM	17,75	-	-	3469 RTM	13,05	3701 RTM	13,05	3701 RTM	55,14	Kecamatan Mengwi
95	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	416,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,77	Kecamatan Mengwi
98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Persentase Peningkatan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %	-	-	100 %	21,27	-	-	100 %	18,73	100 %	18,73	100 %	58,74	Kecamatan Mengwi
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Persentase Pemberdayaan Pemerintah di Kecamatan	100 %	100 %	14,78	100 %	78,95	100 %	15,21	100 %	10,78	100 %	10,78	100 %	130,51	Kecamatan Mengwi
122	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Kegiatan Bimtek lembaga Desa di Kecamatan	Data tidak tersedia	-	-	3 Kegiatan	211,58	-	-	-	-	-	-	3 Kegiatan	211,58	Kecamatan Mengwi
16	KANTOR CAMAT ABIANSEMAL				4.069,19		5.030,99		3.355,82		3.436,77		3.345,43		18.474,59	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	15 Kegiatan	15 Kegiatan	1.763,88	15 Kegiatan	1.809,42	15 Kegiatan	1.412,05	15 Kegiatan	1.490,75	15 Kegiatan	1.490,75	15 Kegiatan	7.966,85	Kecamatan Abiansemal
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	8 Kegiatan	8 Kegiatan	801,88	8 Kegiatan	910,38	8 Kegiatan	188,04	8 Kegiatan	235,54	8 Kegiatan	235,54	8 Kegiatan	2.371,38	Kecamatan Abiansemal
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	135,24	2 Kegiatan	148,56	2 Kegiatan	235,00	2 Kegiatan	308,87	2 Kegiatan	308,87	2 Kegiatan	1.136,54	Kecamatan Abiansemal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	418,59	2 Kegiatan	650,17	2 Kegiatan	579,66	2 Kegiatan	638,00	2 Kegiatan	546,66	2 Kegiatan	2.833,08	Kecamatan Abiansemal
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Dokumen perencanaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	9,84	1 Kegiatan	10,15	1 Kegiatan	10,15	1 Kegiatan	40,00	Kecamatan Abiansemal
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	jumlah dokumen pembangunan daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40,44	2 Kegiatan	52,54	2 Kegiatan	57,55	2 Kegiatan	37,60	2 Kegiatan	37,60	2 Kegiatan	188,13	Kecamatan Abiansemal
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	jumlah dokumen data/informasi statistik daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	23,38	2 Kegiatan	6,43	2 Kegiatan	6,47	2 Kegiatan	5,61	2 Kegiatan	5,61	2 Kegiatan	41,89	Kecamatan Abiansemal
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	jumlah lokasi yang dipantau	18 Desa	18 Desa	86,61	18 Desa	160,67	18 Desa	96,64	18 Desa	20,19	18 Desa	20,19	18 Desa	364,11	Kecamatan Abiansemal
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUNAN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 Kegiatan	5 Kegiatan	89,08	5 Kegiatan	349,29	5 Kegiatan	153,72	5 Kegiatan	72,02	5 Kegiatan	72,02	5 Kegiatan	664,11	Kecamatan Abiansemal
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis kegiatan promosi kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	131,17	1 Kegiatan	171,36	1 Kegiatan	179,88	1 Kegiatan	163,79	1 Kegiatan	163,79	1 Kegiatan	646,19	Kecamatan Abiansemal
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah Pengelolaan keragaman budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	362,13	1 Kegiatan	424,53	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	786,66	Kecamatan Abiansemal
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	190,47	2 Kegiatan	237,34	2 Kegiatan	336,03	2 Kegiatan	347,21	2 Kegiatan	347,21	8 Kegiatan	1.111,05	Kecamatan Abiansemal
86	PROGRAM PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	79,72	1 Kegiatan	79,97	1 Kegiatan	69,80	1 Kegiatan	69,80	1 Kegiatan	229,49	Kecamatan Abiansemal
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Pengentasan kemiskinan	18 Desa	18 Desa	6,42	18 Desa	7,46	18 Desa	8,42	18 Desa	6,56	18 Desa	6,56	18 Desa	28,86	Kecamatan Abiansemal
98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Perbeker yang terpilih	3 Desa	3 Desa	5,10	-	-	-	-	15 Desa	22,53	15 Desa	22,53	18 Desa	27,63	Kecamatan Abiansemal
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Pembinaan penvelenqaraan pemerintahan desa/kelurahan	18 kali	18 Kali	4,82	18 Kali	13,12	18 Kali	12,55	18 Kali	8,15	18 Kali	8,15	18 kali	38,63	Kecamatan Abiansemal
17	KECAMATAN PETANG				3.706,81		5.260,05		3.627,27		4.487,42		4.487,42		21.568,96	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.354,93	12 bulan	1.554	12 bulan	1.258,37	12 bulan	1.760,53	12 bulan	1.760,53	12 bulan	7.688,83	Kecamatan Petang
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	12 bulan	12 bulan	858,14	12 bulan	1.479	12 bulan	802,47	12 bulan	711,97	12 bulan	711,97	12 bulan	4.563,95	Kecamatan Petang
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	12 bulan	133,38	12 bulan	155,91	12 bulan	243,74	12 bulan	278,48	12 bulan	278,48	12 bulan	1.089,99	Kecamatan Petang
04	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	terselenggaranya festival budaya pertanian dan pawai festival budaya	2 kegiatan	2 kegiatan	411,40	2 kegiatan	456,77	2 kegiatan	417,22	5 kegiatan	870,36	5 kegiatan	870,36	5 kegiatan	3.026,11	Kecamatan Petang
05	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARA SKPD	Jumlah dokumen SKPD Kecamatan	30 BUKU	30 buku	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30 BUKU	10,00	Kecamatan Petang
05	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen Musrenbang SKPD Kecamatan	12 bulan	12 bulan	43,15	12 bulan	32,38	12 bulan	35,29	12 bulan	30,15	12 bulan	30,15	12 bulan	171,14	Kecamatan Petang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah data monografi dan profil kecamatan	25 buku	25 buku	23,97	25 buku	4,34	25 buku	4,33	25 buku	3,90	25 buku	3,90	25 buku	40,43	Kecamatan Petang
07	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah desa yang dibina	7 desa	7 desa	91,08	7 desa	121,81	7 desa	89,00	7 desa	42,76	7 desa	42,76	7 desa	387,41	Kecamatan Petang
08	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah desa yang dibina	7 desa	7 desa	64,44	7 desa	567,63	7 desa	143,71	7 desa	132,71	7 desa	132,71	7 desa	1.041,20	Kecamatan Petang
09	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah Upacara peringatan hari hari besar nasional	7 hari besar	7 hari besar	129,17	7 hari besar	150,10	7 hari besar	150,10	7 hari besar	139,00	7 hari besar	139,00	7 hari besar	707,37	Kecamatan Petang
10	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah kegiatan dalam HUT kota Mangupura dengan meriah	1 kali	1 kali	355,35	1 kali	361,31	1 kali	29,57	1 kali	30,81	1 kali	30,81	1 kali	807,85	Kecamatan Petang
11	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang diselesaikan	12 bulan	12 bulan	214,89	12 bulan	287,37	12 bulan	387,91	12 bulan	411,55	12 bulan	411,55	12 bulan	1.713,27	Kecamatan Petang
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah desa yang dibina	7 desa	7 desa	5,72	7 desa	12,59	7 desa	12,45	7 desa	8,72	7 desa	8,72	7 desa	48,20	Kecamatan Petang
13	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah desa yang didata sebagai warga pra KS	7 desa	7 desa	4,48	7 desa	21,69	7 desa	28,23	7 desa	16,68	7 desa	16,68	7 desa	87,77	Kecamatan Petang
14	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang dibina	7 desa	7 desa	6,70	7 desa	54,27	7 desa	24,88	7 desa	13,49	7 desa	13,49	7 desa	112,83	Kecamatan Petang
15	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Jumlah perbekel yang terpilih	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	6 desa	4,37	6 desa	4,37	12 desa	8,74	Kecamatan Petang
79	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	data tidak tersedia	-	-	-	-	-	-	1 kecamatan	31,94	1 kecamatan	31,94	1 kecamatan	63,88	Kecamatan Petang
02	FUNGSI PENGAWASAN				4.667,17		4.938,48		3.419,12		5.780,33		5.865,75		24.670,85	
	INSPEKTORAT				4.667,17		4.938,48		3.419,12		5.780,33		5.865,75		24.670,85	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100 %	1.094,85	100 %	1.119,98	100 %	561,48	100 %	749,68	100 %	749,68	100 %	4.275,66	Inspektorat
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan	100 %	100 %	559,80	100 %	594,93	100 %	309,49	100 %	641,58	100 %	641,58	100 %	2.747,37	Inspektorat
21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	80 %	100 %	139,44	100 %	223,49	100 %	55,53	100 %	54,59	100 %	54,59	100 %	527,65	Inspektorat
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	117,60	100 %	119,27	100 %	184,36	100 %	270,22	100 %	270,22	100 %	961,66	Inspektorat
09	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dan RKPD	100%	100 %	15,00	100 %	9,58	100 %	9,91	100 %	10,00	100 %	10,00	100 %	54,49	Inspektorat
20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	CC	B	1.742,25	BB	2.354,1	BB	1.583,0	BB	2.710,58	BB	2.767,05	BB	11.156,94	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase penetapan sistem dan prosedur pengawasan	100%	100 %	998.22	100 %	517.15	100 %	715.37	100 %	1.343.69	100 %	1.372.64	100 %	4.947.07	Inspektorat
03	FUNGSI PERENCANAAN				12.829,51		13.896,07		12.318,85		14.686,02		14.420,42		68.150,87	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				12.829,51		13.896,07		12.318,85		14.686,02		14.420,42		68.150,87	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	14 Kegiatan	100%	1.979,16	100%	2.021,07	100%	1.454,78	100%	1.348,79	100%	1.348,79	100%	8.152,60	Bappeda
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.116,52	100%	1.446,89	100%	303,16	100%	402,21	100%	361,35	100%	3.630,13	Bappeda
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana Pembangunan Daerah	Data tidak tersedia	54 orang	595,81	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	54 orang	595,81	Bappeda
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	1 Laporan	485,52	1 Laporan	704,41	1 Laporan	608,60	1 Laporan	823,28	1 Laporan	750,67	1 Laporan	3.372,48	Bappeda
07	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	100%	183,13	100%	9,27	100%	133,20	100%	18,84	100%	18,84	100%	363,28	Bappeda
15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya Data dan Informasi yang Memadai	1 paket	1 paket	418,30	1 paket	125,69	1 paket	88,69	1 paket	68,65	1 paket	68,65	1 paket	769,97	Bappeda
21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	7.008,97	100%	7.062,87	100%	8.934,27	100%	11.408,47	100%	11.118,19	100%	45.532,76	Bappeda
22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	6 Kecamatan	247,04	6 Kecamatan	402,14	6 Kecamatan	115,64	6 Kecamatan	218,99	6 Kecamatan	146,40	6 Kecamatan	1.130,21	Bappeda
24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 Dokumen	303,64	1 Dokumen	898,80	1 Dokumen	85,38	1 Dokumen	163,52	1 Dokumen	420,86	1 Dokumen	1.872,20	Bappeda
27	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%	16,36%	491,44	20,00%	1.224,93	23,64%	595,12	27,27%	233,27	30,91%	186,67	30,91%	2.731,43	Bappeda
04	FUNGSI KEUANGAN				65.581,05		82.209,92		54.452,65		71.035,53		71.440,01		344.719,16	
01	BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG				43.450,12		56.300,84		32.612,07		44.220,51		44.220,51		220.804,05	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	3.848,68	12 bulan	4.887,05	12 bulan	3.657,28	12 bulan	3.875,63	12 bulan	3.875,63	12 bulan	20.144,28	Bapenda/ Pasedahan Agung
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	11.974,84	12 Bulan	5.089,00	12 Bulan	1.963,23	12 Bulan	782,93	12 Bulan	782,93	12 bulan	20.592,91	Bapenda/ Pasedahan Agung
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	waktu pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem	12 Bulan	12 Bulan	308,81	12 Bulan	281,25	12 Bulan	478,56	12 Bulan	677,09	12 Bulan	677,09	12 bulan	2.422,80	Bapenda/ Pasedahan Agung
08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Jumlah Lembaga Subak yang dilestarikan	214 Subak	214 Subak	13.537,14	214 Subak	17.658,62	214 Subak	17.551,77	214 Subak	28.386,918	214 Subak	28.386,918	214 Subak	105.521,36	Bapenda/ Pasedahan Agung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	07 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja pada denqan RKPD	12 Bulan	12 Bulan	10,98	12 Bulan	9,00	12 Bulan	10,00	12 Bulan	8,57	12 Bulan	8,57	12 Bulan	47,11	Bapenda/ Pasedaran Aqunc
	09 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	13.769,67	10 Jenis Pajak	28.375,93	10 Jenis Pajak	8.951,23	10 Jenis Pajak	10.489,38	10 Jenis Pajak	10.489,38	10 Jenis Pajak	72.075,60	Bapenda/ Pasedaran Aqunc
	02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				22.130,93		25.909,08		21.840,59		26.815,02		27.219,50		123.915,11	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	1.518,71	12 bulan	1.577,82	12 bulan	1.370,94	12 bulan	1.553,18	12 bulan	1.553,18	12 bulan	7.573,83	BPKAD
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		12 bulan	1.127,76	12 bulan	2.903,78	12 bulan	165,09	12 bulan	738,32	12 bulan	738,32	12 bulan	5.673,28	BPKAD
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai di Masing-Masing PD yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / sejenisnya	Data tidak tersedia	53 PD dan 12 puskesmas	58,44	53 PD dan 12 puskesmas	50,70	53 PD dan 12 puskesmas	37,19	53 PD dan 12 puskesmas	28,11	53 PD dan 12 puskesmas	28,11	53 PD dan 12 puskesmas	202,54	BPKAD
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel	Data tidak tersedia	100 %	885,33	100 %	824,46	100 %	964,84	100 %	1.111,62	100 %	1.186,16	100 %	4.972,41	BPKAD
	07 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Data tidak tersedia	100 %	10,87	100 %	6,70	100 %	9,00	100 %	5,64	100 %	5,64	100 %	37,86	BPKAD
	09 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan	Data tidak tersedia	100 %	13.975,50	100 %	13.451,68	100 %	12.433,08	100 %	17.101	100 %	17.379	100 %	74.339,55	BPKAD
	10 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung	Data tidak tersedia	100 %	133,95	100 %	107,98	100 %	88,85	100 %	55,53	100 %	107,73	100 %	494,04	BPKAD
	11 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Data tidak tersedia	100 %	2.419,68	100 %	4.985,38	100 %	5.070,00	100 %	4.320,82	100 %	4.320,82	100 %	21.116,71	BPKAD
	12 PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover Asuransi	Data tidak tersedia	2 Jenis Asuransi	2.000,68	2 Jenis Asuransi	2.000,58	2 Jenis Asuransi	1.701,60	2 Jenis Asuransi	1.901,01	2 Jenis Asuransi	1.901,01	2 Jenis Asuransi	9.504,89	BPKAD
05	FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN				10.052,07		30.924,12		20.582,34		14.923,49		14.923,49		91.405,52	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				10.052,07		30.924,12		20.582,34		14.923,49		14.923,49		91.405,52	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 kegiatan	17 kegiatan	1.144,63	17 kegiatan	1.226,38	17 kegiatan	789,33	17 kegiatan	843,18	17 kegiatan	843,18	17 kegiatan	4.846,71	BKPSDM
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah Paket Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1	3 paket	1.437,46	3 paket	659,19	3 paket	208,50	3 paket	399,40	3 paket	399,40	15 paket	3.103,94	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai akuntabilitas kinerja	73	76,55	205,92	76,80	244,38	78,00	288,17	80,05	417,60	80,10	417,60	80,10	1.573,66	BKPSDM
04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH (RENJA, RKA)	Cakupan Dokumen Perencanaan Yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	15,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	7,30	3 dokumen	8,29	3 dokumen	8,29	3 dokumen	48,88	BKPSDM
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan BinteK/Sejenisnya Di	12 %	96 %	5.841,86	97 %	12.839,68	98 %	7.222,37	99 %	11.898,43	100 %	11.898,43	100 %	49.700,76	BKPSDM
06	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kehadiran Pegawai Yang Mentaati Jam Kerja	80 %	96 %	36,41	97 %	15.034,58	98 %	11.456,76	99 %	19,05	99 %	19,05	99 %	26.565,85	BKPSDM
07	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Yang Terisi	100 %	72,50 %	1.186,39	74,00 %	630,87	75,50 %	374,80	76,00 %	960,70	76,50 %	960,70	76,50 %	4.113,46	BKPSDM
08	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Dapat Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	51,35	100 %	178,99	100 %	118,50	100 %	189,84	100 %	189,84	100 %	728,52	BKPSDM
09	PROGRAM PENINGKATAN SDM	Prosentase Akurasi Update Data Kepegawaian	data tidak tersedia	96 %	133,05	97 %	57,59	98 %	85,26	99 %	159,12	100 %	159,12	100 %	594,14	BKPSDM
10	PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase Sasaran Kinerja ASN Yang Berkinerja Baik	data tidak tersedia	-	-	97 %	42,479	98 %	31,35	99 %	27,882	100 %	27,882	100 %	129,59	BKPSDM
06	FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.709,78		13.795,53		11.181,49		13.862,68		13.780,93		58.330,41	
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.709,78		13.795,53		11.181,49		13.862,68		13.780,93		58.330,41	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	Data tidak tersedia	17 kegiatan	1.009,32	17 kegiatan	1.053,16	17 kegiatan	893,84	17 kegiatan	791,92	17 kegiatan	791,92	17 kegiatan	4.540,16	Balitbang
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	Data tidak tersedia	7 kegiatan	1.084,15	8 kegiatan	1.471,66	4 kegiatan	414,20	6 kegiatan	835,59	6 kegiatan	835,59	6 kegiatan	4.641,20	Balitbang
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	Data tidak tersedia	2 kegiatan	220,84	2 kegiatan	282,24	2 kegiatan	305,17	2 kegiatan	430,56	2 kegiatan	430,56	2 kegiatan	1.669,37	Balitbang
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Data tidak tersedia	1 kegiatan	13,00	1 kegiatan	21,56	1 kegiatan	19,89	1 kegiatan	9,99	1 kegiatan	9,99	1 kegiatan	74,42	Balitbang
15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data dan Informasi yang memadai	Data tidak tersedia	-	-	3 kegiatan	75,35	3 kegiatan	107,60	3 kegiatan	63,76	3 kegiatan	63,76	3 kegiatan	310,47	Balitbang
26	PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	Data tidak tersedia	1 dokumen	3.210,85	1 dokumen	7.811,87	1 dokumen	7.527,38	1 dokumen	7.610,91	1 dokumen	7.610,91	1 dokumen	33.771,92	Balitbang
28	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	data tidak tersedia	2 buah	171,62	4 buah	3.079,69	6 buah	1.913,42	8 buah	4.119,94	10 buah	4.038,20	10 buah	13.322,87	Balitbang

Tabel 7.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
1	URUSAN WAJIB			2.319.465,57	
01	URUSAN PENDIDIKAN			421.446,07	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH			421.446,07	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 Paket	20.602,84	DISDIKPORA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	2.414,18	DISDIKPORA
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Paket	3.825,60	DISDIKPORA
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	370,27	DISDIKPORA
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	1 Paket	9,76	DISDIKPORA
15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK TK	1 Paket	536,80	DISDIKPORA
16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	APK SD	1 Paket	377.649,93	DISDIKPORA
17	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	APK SM	1 Paket	10.070,49	DISDIKPORA
18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Peningkatan profesionalisme dan keterampilan lembaga pendidikan non formal	1 Paket	4.834,91	DISDIKPORA
20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peningkatan Kualifikasi Guru S.1	1 Paket	1.131,28	DISDIKPORA
02	URUSAN KESEHATAN			353.265,39	
	DINAS KESEHATAN			160.416,98	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung Tupoksi SKPD	1 Paket	9.354,90	DISKES
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	8.847,79	DISKES
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	338,68	DISKES
15	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	100%	3.774,12	DISKES
16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penjarangan kesehatan anak SD dan setingkat	100%	48.009,23	DISKES
17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	100%	85,23	DISKES
20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan anak balita gizi buruk	100%	526,54	DISKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
1	2	3	5	6	7	
	21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Cakupan Rumah Sehat	100%	375,02	DISKES
			Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) Sehat	100%		DISKES
	22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA+	100%	17.124,60	DISKES
	23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kualifikasi pelayanan	100%	5.374,31	DISKES
	25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKEMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang pelayanan pada puskesmas/BKIA	100%	52.910,42	DISKES
	28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase perijinan praktek tenaga kesehatan	100%	37,68	DISKES
	29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Angka kematian balita per 1.000 Balita	100%	165,88	DISKES
	30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Cakupan lansia mendapat pelayanan kesehatan	100%	1.225,20	DISKES
	32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	100.000 kelahiran hidup	4.049,49	DISKES
	36	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Jumlah puskesmas mendapat bahan penunjang medis	6 Kecamatan	7.968,50	DISKES
	37	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Jumlah alkes puskesmas yang	13 Puskesmas, 54 Pustu	249,38	DISKES
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)			192.848,41	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	16.740,14	RSUD
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	100%	47.035,16	RSUD
	26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	100%	1.873,51	RSUD
	40	PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Meningkatnya kemampuan BLUD untuk membiaya operasionalnya secara mandiri	6 Paket	127.199,60	RSUD
	03	URUSAN PEKERJAAN UMUM			697.782,97	
		DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN			617.845,17	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	4.090,86	DINAS BMP
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang	1 Paket	2.293,57	DINAS BMP
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	807,39	DINAS BMP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	07 PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	1 paket	448.921,04	DINAS BMP
	09 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Paket	10,00	DINAS BMP
	15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah ruas jalan dan jembatan yang terbangun	1 Paket	373,25	DINAS BMP
	18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Terpeliharanya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap di Kabupaten Badung	1 Paket	38.774,81	DINAS BMP
	23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Tersedianya prasarana dan sarana kebinamargaan yang memadai	1 Paket	1.127,31	DINAS BMP
	24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	1 Paket	121.446,95	DINAS BMP
	DINAS CIPTA KARYA			79.937,80	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	1.296,59	DCK
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan	1 paket	983,44	DCK
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	1 Paket	805,23	DCK
	09 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 laporan	9,98	DCK
	17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 buku	3,09	DCK
	35 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Tercapainya sarana prasarana air bersih dengan spam untuk perluasan cakupan layanan 80% (30 paket pekerjaan) th 2014	1 Paket	34.635,99	DCK
	37 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Jumlah fasilitas umum yang tertata	1 paket	42.191,88	DCK
	38 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Meningkatnya sistem pengawasan insternal keciptakaryaan	1 Paket	11,60	DCK
04	URUSAN PERUMAHAN			232.139,70	
	DINAS CIPTA KARYA			223.390,42	
	16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	1 Paket	223.390,42	DCK
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN			8.749,28	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya pelayanan Administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 Bulan.	1.901,52	DISDAMKAR
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran	12 Bulan	653,86	DISDAMKAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan	98,60	DISDAMKAR
19	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Terlaksananya program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kab.Badung	12 Bulan.	6.085,30	DISDAMKAR
23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terlaksananya program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kab.Badung	12 Bulan	10,00	DISDAMKAR
05	URUSAN PENATAAN RUANG			14.736,67	
	DINAS CIPTA KARYA			13.422,32	
16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Tertatanya ruang di wilayah Kabupaten Badung	1 paket	13.314,72	DCK
17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Terwujudnya pengendalian ruang di Kab. Badung	1 paket	107,60	DCK
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.314,35	
18	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan	1 Paket	1.314,35	BAPPEDA LITBANG
06	URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN			9.634,83	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			9.634,83	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD	1 Paket	1.037,17	BAPPEDA LITBANG
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	2.550,12	BAPPEDA LITBANG
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	362,23	BAPPEDA LITBANG
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	95%	31,32	BAPPEDA LITBANG
15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data	1 Paket	963,98	BAPPEDA LITBANG
21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	95%	3.982,49	BAPPEDA LITBANG
22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	394,47	BAPPEDA LITBANG
24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	145,24	BAPPEDA LITBANG
26	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	12 Bulan.	83,09	BAPPEDA LITBANG
28	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Terbinanya ilmu pengetahuan dan teknologi	12 Bulan.	84,71	BAPPEDA LITBANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
07	URUSAN PERHUBUNGAN			59.250,73	
	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			59.250,73	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 paket	22.025,82	DISHUBKOMINFO
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	1.304,98	DISHUBKOMINFO
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	384,29	DISHUBKOMINFO
15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	1 paket	29.198,25	DISHUBKOMINFO
17	POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan	1 paket	6.327,40	DISHUBKOMINFO
23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan penganggaran SKPD sesuai dengan Rencana	1 paket	9,99	DISHUBKOMINFO
08	URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP			52.994,60	
	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN			49.916,80	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	3.481,00	DKP
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	930,57	DKP
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	195,40	DKP
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase penanganan sampah	100%	36.614,94	DKP
24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	terpeliharanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Badung	100%	8.684,88	DKP
28	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, Renja, Renstra)	100%	10,00	DKP
	BADAN LINGKUNGAN HIDUP			3.077,81	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	meningkatnya kinerja pelayanan	100%	791,38	BLH
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	247,29	BLH
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	106,18	BLH
16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	nilai baku mutu kualitas air, udara, dan air laut	20 lokasi	835,61	BLH
18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	terlaksananya pelestarian sumber daya alam	100%	398,70	BLH
19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersedian database lingkungan hidup di Kabupaten Badung	1 paket	538,95	BLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	27 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah kelompok masyarakat yang terbina dibidang lingkungan hidup	1 paket	149,69	BLH
	28 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA,RKA)	tersusunnya laporan hasil kinerja SKPD	1 dokumen	10,00	BLH
09	URUSAN PERTANAHAN			910,36	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM			910,36	
	16 PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Tertanganinya permasalahan tanah	100%	892,66	BAG ADM PEM UMUM
	17 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Terselesainya konflik-konflik pertanahan	4 kasus	17,70	BAG ADM PEM UMUM
10	URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			6.074,99	
	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL			6.074,99	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	12 bulan	1.385,72	DISDUKCAPIL
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	3.236,80	DISDUKCAPIL
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	97,06	DISDUKCAPIL
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Paket	10,00	DISDUKCAPIL
	15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pelayanan kependudukan	12 bulan	1.345,41	DISDUKCAPIL
11	URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.097,46	
	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2.097,46	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya pelayanan Administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 bulan	403,58	KPP
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan Prasarana aparatur yang memadai	1 paket	79,15	KPP
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	68,49	KPP
	09 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 paket	9,99	KPP
	15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Terwujudnya kualitas keluarga dan institusi masyarakat	1 paket	548,98	KPP
	16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	Terlaksananya pemberdayaan perempuan < PUG dan perlindungan anak	1 paket	703,69	KPP
	17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terbangunnya kesepahaman perlindungan perempuan dan anak	1 paket	154,31	KPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETERAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender	1 paket	129,28	KPP
12	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			4.237,39	
	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			4.237,39	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung Tupoksi SKPD	1 Paket	931,07	BKBKS
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	454,50	BKBKS
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya kegiatan yang berorientasi peningkatan wawasan bidang keluarga berencana	1 kali	17,60	BKBKS
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	101,56	BKBKS
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Program SKPD	3 jenis dokumen	9,45	BKBKS
15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya cakupan jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	100%	1.322,32	BKBKS
16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Meningkatnya cakupan orientasi kesehatan reproduksi bagi remaja	100%	448,66	BKBKS
23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Terwujudnya tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	1 Paket	210,79	BKBKS
26	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT	Terpenuhinya jumlah kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan /mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat desa/ kelurahan.	1 Paket	132,42	BKBKS
31	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Cakupan wilayah yang mendapatkan pembinaan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS secara berkelanjutan	1 Paket	609,01	BKBKS
13	URUSAN WAJIB SOSIAL			5.310,50	
	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA			5.310,50	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	1.001,67	DISOSNAKER
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	790,34	DISOSNAKER
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dengan kualitas yang baik	4 Hari besar nasional	2.017,67	DISOSNAKER
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	153,50	DISOSNAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	08 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Peningkatan Kualitas Bursa Kerja	1 Paket	42,20	DISOSNAKER
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD	1 Paket	9,80	DISOSNAKER
	15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Peningkatan kemandirian Fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya	1 Paket	257,32	DISOSNAKER
	16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAN SOSIAL	Peningkatan UEP dan RTM	1 Paket	774,07	DISOSNAKER
	21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 Paket	263,93	DISOSNAKER
14	URUSAN KETENAGAKERJAAN			4.347,88	
	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA			4.347,88	
	15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Anakatan Kerja	100%	3.136,38	DISOSNAKER
	16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Terkendalnya angka pengangguran	1 Paket	494,80	DISOSNAKER
	17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1 Paket	716,69	DISOSNAKER
15	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			4.643,03	
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN			4.643,03	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 bulan	929,00	DISKOPERINDAG
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 bulan	1.016,79	DISKOPERINDAG
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	12 bulan	147,17	DISKOPERINDAG
	15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF	Meningkatnya produktifitas, kualitas, kuantitas, pemasaran, pendapatan dan daya saing bagi UMKM	3 koperasi	122,06	DISKOPERINDAG
	17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap hasil produk jiwa kewirausahaan serta pemahaman terhadap peraturan yang berlaku bagi UKM	12 bulan	1.153,92	DISKOPERINDAG
	18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Terwujudnya koperasi yang sehat dan berkualitas	12 bulan	971,38	DISKOPERINDAG
	19 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen yang disusun perencanaan	12 bulan	9,99	DISKOPERINDAG
	21 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/ INFORMASI	Tersedianya buku profil dan buku laporan kegiatan SKPD	62 buku	292,72	DISKOPERINDAG
16	URUSAN PENANAMAN MODAL			52,57	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			52,57	
	17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH	Tersusunnya buku informasi produk unggulan daerah	6 Kecamatan	32,44	BAG. PEREKONOMIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	6 Kecamatan	20,13	BAG. PEREKONOMIAN
17	URUSAN KEBUDAYAAN			52.845,49	
	DINAS KEBUDAYAAN			52.845,49	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupuksi SKPD	1 Paket	1.951,66	KEBUDAYAAN
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	570,42	KEBUDAYAAN
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	1 paket	14,95	KEBUDAYAAN
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	138,57	KEBUDAYAAN
09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	9,29	KEBUDAYAAN
15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan adat dan budaya Bali	1 paket	49.253,54	KEBUDAYAAN
16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Terinventarisasinya produk budaya masyarakat melalui Museum Yadnya	1 paket	907,07	KEBUDAYAAN
18	URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			9.194,54	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			9.194,54	
16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Meningkatnya peran serta pemuda dalam penyebaran nilai-nilai kebangsaan dan kepeloporan	1 Paket	829,86	DISDIKPORA
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam olah raga	1 Paket	8.364,68	DISDIKPORA
19	URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			12.424,98	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			3.607,90	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12 bln	971,33	SATPOLPP
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	307,64	SATPOLPP
03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkat disiplin aparatur dalam menjalankan tugas dan mengenakan kelengkapan pakaian serta atribut	100%	307,67	SATPOLPP
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Keterampilan dan wawasan serta taktis dan teknis anggota satpol. PP	100%	79,14	SATPOLPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	102,82	SATPOLPP
	08 PROGRAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	Tersedianya informasi dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di	1 paket	6,95	SATPOLPP
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan perencanaan dan penganggaran	1 paket	9,88	SATPOLPP
	15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya situasi, kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di kabupaten Badung	100%	321,58	SATPOLPP
	16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANKAMTRIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak kriminal melalui penegakan Perda dan Perbup	100%	1.500,89	SATPOLPP
	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS			1.603,05	KESBANG LINMAS
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 paket	616,70	KESBANG LINMAS
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	1 paket	133,32	KESBANG LINMAS
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia	1 paket	37,99	KESBANG LINMAS
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	81,35	KESBANG LINMAS
	15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten	1 paket	337,33	KESBANG LINMAS
	19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	1 paket	170,79	KESBANG LINMAS
	21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam berpolitik	1 paket	75,65	KESBANG LINMAS
	37 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Terlaksananya Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 paket	149,93	KESBANG LINMAS
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			7.214,03	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	1.234,51	BPBD
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	100 %	482,45	BPBD
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	135,39	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
1	2	3	5	6	7	
	34	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PERINGATAN DINI	jumlah desa/kelurahan tangguh bencana, sekolah aman bencana dan pusat pemerintahan siaga bencana yang terbentuk	100 %	10,66	BPBD
	35	PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Meningkatnya penanganan terhadap korban bencana	100 %	135,82	BPBD
	39	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA	Meningkatnya Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana	1 paket	89,76	BPBD
	40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menghadapi bencana	1 paket	206,54	BPBD
	41	PROGRAM KESIAPSIAGAAN	Terwujudnya TRC yang siap dalam menghadapi bencana	1 paket	28,38	BPBD
	42	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Meningkatnya Penanganan Darurat Kebencanaan	1 paket	1.862,92	BPBD
	43	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Terlaksananya pemulihan pasca bencana	100 %	3.027,60	BPBD
20		URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PRANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN			308.402,82	
		SEKERTARIAT DAERAH			157.624,09	
		BAGIAN UMUM			65.963,42	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket	51.058,14	BAG. UMUM
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket	3.849,20	BAG. UMUM
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkat disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	1 paket	9.867,52	BAG. UMUM
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	688,56	BAG. UMUM
	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terwujudnya pelayanan kedinasan bagi kepala	1 Paket	500,00	BAG. UMUM
		BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL			8.579,15	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	4 Paket	919,46	HUMAS DAN PROTOKOL
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	606,32	HUMAS DAN PROTOKOL
	35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Meningkatnya Responsibilitas Pemerintah terhadap berbagai informasi di media massa	12 bulan	950,15	HUMAS DAN PROTOKOL
	36	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa	12 Bulan	1.010,99	HUMAS DAN PROTOKOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	37 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Meningkatnya komunikasi Informasi Dengan Media Massa	12 bulan	5.092,23	HUMAS DAN PROTOKOL
	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET DAERAH			64.676,29	
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	59.497,87	BAG. ASSET DAERAH
	20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Paket	1.628,46	BAG. ASSET DAERAH
	33 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan asset daerah	12 Bulan	1.349,29	BAG. ASSET DAERAH
	34 PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	Terasuransinya gedung - gedung yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kab Badung	1 Paket	2.200,67	BAG. ASSET DAERAH
	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA			2.526,08	
	91 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya jumlah Proposal yang diproses tepat waktu	100%	2.526,08	BAG KESRA
	BAGIAN KEUANGAN			6.601,49	
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pembinaan untuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	53 SKPD	57,44	BAG.KEUANGAN
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan pelaporan keuangan yang akuntabel	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	235,54	BAG.KEUANGAN
	17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/akuntansi pemerintah daerah	12 bulan	6.191,26	BAG.KEUANGAN
	18 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada	1572 SPMUP/GU/TU	117,25	BAG.KEUANGAN
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			752,98	
	56 PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Meningkatnya sistem administrasi pengelolaan LPD	122 LPD	406,10	BAG. PEREKONOMIAN
	75 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Tercapainya produktivitas pertanian yang memadai	6 Kecamatan	138,18	BAG. PEREKONOMIAN
	92 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan	6 Kecamatan	104,64	BAG. PEREKONOMIAN
	00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya Profesionalisme Organisasi KTNA	60 Orang	27,41	BAG. PEREKONOMIAN
	11 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	6 kecamatan	19,38	BAG. PEREKONOMIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	12 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi	12 bulan	57,27	BAG. PEREKONOMIAN
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM			1.017,06	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	25,08	BAG ADM PEM UMUM
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	925,68	BAG ADM PEM UMUM
	16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	24 kunjungan	19,60	BAG ADM PEM UMUM
	27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Tertatanya Daerah Otonomi Baru	6 Lokasi	46,71	BAG ADM PEM UMUM
	BAGIAN HUKUM DAN HAM			1.907,48	
	26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	1.900,38	BAG. HUKUM DAN HAM
	03 PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Hukum	1 Paket	7,11	BAG. HUKUM DAN HAM
	BAGIAN ORGANISASI TATALAKSANA			832,00	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	4 Paket	10,00	BAG.ORTAL
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah SKPD yang ditingkatkan sumber daya aparaturnya	53 SKPD	28,74	BAG.ORTAL
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	403,16	BAG.ORTAL
	28 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah SKPD yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	6 SKPD	359,18	BAG.ORTAL
	39 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Jumlah SKPD yang ditingkatkan kualitas pelayanan minimal	16 SKPD/Unit Kerja	30,92	BAG.ORTAL
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			4.768,14	
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	53 SKPD	214,98	BAG. ADM PEMBANGUNAN
	16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	6 Kecamatan	98,82	BAG. ADM PEMBANGUNAN
	20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	53 SKPD	4.442,77	BAG. ADM PEMBANGUNAN
	89 PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelaksanaan operasional administrasi pembangunan	100 %	11,57	BAG. ADM PEMBANGUNAN
	SEKRETARIAT DPRD			67.473,06	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	3.805,08	SEKWAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	17.328,40	SEKWAN
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya dokumen pelaporan dan capaian kinerja	1 paket	163,18	SEKWAN
	15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	45.937,49	SEKWAN
	26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	Tertatanya Peraturan Perundang - Undangan	100%	238,92	SEKWAN
	INSPEKTORAT			3.974,40	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	771,33	INSPEKTORAT
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	295,46	INSPEKTORAT
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Training Of Trainer (TOT) Tunas Integritas	1 Paket	27,43	INSPEKTORAT
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya honor pelaksana kegiatan	1 Paket	202,80	INSPEKTORAT
	09 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	3 Dokumen	8,38	INSPEKTORAT
	20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terlaksananya pemeriksaan yang komprehensif terhadap 5 aspek pemeriksaan	12 Obrik	1.955,09	INSPEKTORAT
	21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Terlaksananya pelatihan tenaga tenaga pemeriksa dan pengawas	1 Paket	37,88	INSPEKTORAT
	22 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Terlaksananya Reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, sehingga terjamin adanya pelaksanaan tertib administrasi keuangan	100%	676,02	INSPEKTORAT
	DINAS PENDAPATAN / PASEDAHAN AGUNG			16.328,61	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 Bulan	2.212,23	DISPENDA
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 Bulan	816,64	DISPENDA
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	12 Bulan	187,96	DISPENDA
	08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Meningkatnya Subak Abian/yeh di Kab. Badung yang memiliki Awig-Awig	12 Bulan	4.184,42	DISPENDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12 Bulan	10,00	DISPENDA
	17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	12 Bulan	8.917,35	DISPENDA
	KECAMATAN KUTA			5.101,68	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1.436,88	KEC KUTA
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	1.074,85	KEC KUTA
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	87,25	KEC KUTA
	08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1.530,83	KEC KUTA
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9,45	KEC KUTA
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	1 paket	35,49	KEC KUTA
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,10	KEC KUTA
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 kelurahan	25,71	KEC KUTA
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	66,77	KEC KUTA
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	44,40	KEC KUTA
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	8 hari besar	109,18	KEC KUTA
	83 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	410,55	KEC KUTA
	85 PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1867 KK, 4284 KTP	56,30	KEC KUTA
	86 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 kegiatan	4,57	KEC KUTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
1	2	3	5	6	7	
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	7,54	KEC KUTA
	90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	5 kelurahan	3,34	KEC KUTA
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	5 kelurahan	4,71	KEC KUTA
	06	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Terlaksananya penataan bangunan / gedung kantor	2 unit	190,78	KEC KUTA
	KECAMATAN KUTA UTARA				4.153,59	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	12 Bulan	1.225,44	KEC KUTA UTARA
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	402,77	KEC KUTA UTARA
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	84,98	KEC KUTA UTARA
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1.544,62	KEC KUTA UTARA
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra	1 paket	9,54	KEC KUTA UTARA
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	6 kali	28,64	KEC KUTA UTARA
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,27	KEC KUTA UTARA
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	22,10	KEC KUTA UTARA
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	120,61	KEC KUTA UTARA
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan promosi kesehatan dari pemberdayaan masyarakat	1 paket	72,87	KEC KUTA UTARA
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terperingatinya hari besar nasional	8 peringatan	109,31	KEC KUTA UTARA
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	390,06	KEC KUTA UTARA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
1	2	3	5	6	7	
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	85,14	KEC KUTA UTARA
	86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	5,01	KEC KUTA UTARA
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	8,76	KEC KUTA UTARA
	90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	4,42	KEC KUTA UTARA
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Terlaksananya penataan bangunan / gedung kantor	1 paket	36,04	KEC KUTA UTARA
	KECAMATAN KUTA SELATAN				4.181,40	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	100 %	936,89	KEC KUTA SELATAN
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	697,51	KEC KUTA SELATAN
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	87,21	KEC KUTA SELATAN
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	8 Kegiatan	1.559,24	KEC KUTA SELATAN
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9,99	KEC KUTA SELATAN
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	1 paket	31,65	KEC KUTA SELATAN
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,37	KEC KUTA SELATAN
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	6 desa /kelurahan	27,28	KEC KUTA SELATAN
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	105,11	KEC KUTA SELATAN
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	67,27	KEC KUTA SELATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
1	2	3	5	6	7	
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	7 hari besar	108,37	KEC KUTA SELATAN
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	363,62	KEC KUTA SELATAN
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	133,07	KEC KUTA SELATAN
	86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	4,34	KEC KUTA SELATAN
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	7,76	KEC KUTA SELATAN
	90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	4,50	KEC KUTA SELATAN
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	6 desa /kelurahan	34,22	KEC KUTA SELATAN
	KECAMATAN MENGWI				5.199,34	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1.309,41	KEC MENGWI
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	1.253,86	KEC MENGWI
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	84,59	KEC MENGWI
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1.557,03	KEC MENGWI
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	10,00	KEC MENGWI
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	1 paket	46,50	KEC MENGWI
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,17	KEC MENGWI
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	25,90	KEC MENGWI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
1	2	3	5	6	7	
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	171,81	KEC MENGWI
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	81,35	KEC MENGWI
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	1 paket	114,53	KEC MENGWI
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	419,80	KEC MENGWI
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	51,52	KEC MENGWI
	86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	36,59	KEC MENGWI
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	11,32	KEC MENGWI
	90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	6,48	KEC MENGWI
	98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	1 paket	6,65	KEC MENGWI
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 paket	8,82	KEC MENGWI
		KECAMATAN ABIANSEMAL			4.760,91	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1.189,84	KEC ABIANSEMAL
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	992,79	KEC ABIANSEMAL
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	92,39	KEC ABIANSEMAL
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1.556,42	KEC ABIANSEMAL
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9,99	KEC ABIANSEMAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	1 paket	28,73	KEC ABIANSEMAL
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,08	KEC ABIANSEMAL
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	32,00	KEC ABIANSEMAL
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	144,07	KEC ABIANSEMAL
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	69,63	KEC ABIANSEMAL
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	1 paket	103,33	KEC ABIANSEMAL
	83 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	446,13	KEC ABIANSEMAL
	85 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	62,92	KEC ABIANSEMAL
	86 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	4,31	KEC ABIANSEMAL
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	10,63	KEC ABIANSEMAL
	90 PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	5,06	KEC ABIANSEMAL
	98 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	1 paket	4,65	KEC ABIANSEMAL
	99 PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 paket	4,96	KEC ABIANSEMAL
	KECAMATAN PETANG			4.527,54	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1.505,95	KEC PETANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	525,21	KEC PETANG
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	73,92	KEC PETANG
08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1.547,67	KEC PETANG
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9,87	KEC PETANG
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	1 paket	36,78	KEC PETANG
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,97	KEC PETANG
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	36,20	KEC PETANG
79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	124,17	KEC PETANG
81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	65,99	KEC PETANG
82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	1 paket	103,77	KEC PETANG
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	408,64	KEC PETANG
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	54,20	KEC PETANG
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	9,94	KEC PETANG
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	11,04	KEC PETANG
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	2,78	KEC PETANG
98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	1 paket	4,58	KEC PETANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	99 PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 paket	2,86	KEC PETANG
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT			7.844,34	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	908,18	BKD DIKLAT
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Server, 3 Printer, 1 laptop, 9 UPS	1.113,07	BKD DIKLAT
	03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	500 orang	82,05	BKD DIKLAT
	05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di Pemkab. Badung	10 orang	4.357,11	BKD DIKLAT
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai akuntabilitas kinerja	1 LS	122,89	BKD DIKLAT
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	9,99	BKD DIKLAT
	69 PROGRAM PENINGKATAN SDM	Persentase urusan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	12 bulan	1.208,73	BKD DIKLAT
	96 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase update database kepegawaian	1 LS	42,31	BKD DIKLAT
	KELURAHAN KUTA			1.766,46	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	931,49	KEL KUTA
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	7 kegiatan	327,39	KEL KUTA
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	65	63,74	KEL KUTA
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10,00	KEL KUTA
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 Usulan	19,32	KEL KUTA
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data /informasi statistik daerah	2 Dokumen	43,23	KEL KUTA
	73 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Jumlah lokasi fogging masal	2 kegiatan	42,36	KEL KUTA
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	8 kali	73,86	KEL KUTA
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	13 Lingkungan, 4 Duta	91,20	KEL KUTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
1	2	3	5	6	7	
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1Kali	3,45	KEL KUTA
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL KUTA
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	13 Lingkungan	148,09	KEL KUTA
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	13 Lingkungan	7,34	KEL KUTA
		KELURAHAN LEGIAN			1.197,78	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	425,32	KEL LEGIAN
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	215,87	KEL LEGIAN
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	62,85	KEL LEGIAN
	08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Jenis pengembangan Nilai Budaya	2 Jenis	162,89	KEL LEGIAN
	09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10,00	KEL LEGIAN
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pemangunan daerah	1 dokumen	15,33	KEL LEGIAN
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi Statistik Daerah	2 Jenis	15,63	KEL LEGIAN
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	3 Lingkungan	33,64	KEL LEGIAN
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	91,86	KEL LEGIAN
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	2 Jenis	2,42	KEL LEGIAN
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 Hari Besar	5,00	KEL LEGIAN
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	3 Klingkungan	150,34	KEL LEGIAN
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	7 Jenis	6,63	KEL LEGIAN
		KELURAHAN SEMINYAK			1.131,21	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	436,91	KEL SEMINYAK
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	270,68	KEL SEMINYAK
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	66,90	KEL SEMINYAK
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terlaksannya perencanaan dan penganggaran SKPD yang baik	3 dokumen	10,00	KEL SEMINYAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah yang baik	1 paket	17,23	KEL SEMINYAK
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 dokumen	13,36	KEL SEMINYAK
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	6 lingkungan	59,66	KEL SEMINYAK
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 paket	86,99	KEL SEMINYAK
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 Jenis	3,33	KEL SEMINYAK
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5,00	KEL SEMINYAK
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	2 lingkungan	146,23	KEL SEMINYAK
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	2 Lingkungan	14,93	KEL SEMINYAK
	KELURAHAN TUBAN			1.352,69	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	546,43	KEL TUBAN
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	300,76	KEL TUBAN
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	62,10	KEL TUBAN
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10,00	KEL TUBAN
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Jenis	16,90	KEL TUBAN
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	1 dokumen	21,91	KEL TUBAN
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	4 Lingkungan	35,18	KEL TUBAN
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	169,78	KEL TUBAN
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL TUBAN
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	4 Lingkungan	154,29	KEL TUBAN
	94 PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	30,34	KEL TUBAN
	KELURAHAN KEDONGANAN			1.177,46	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	684,56	KEL KEDONGANAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	86,65	KEL KEDONGANAN
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	62,85	KEL KEDONGANAN
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9,96	KEL KEDONGANAN
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Jenis	16,55	KEL KEDONGANAN
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	18,73	KEL KEDONGANAN
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	6 Lingkungan	33,61	KEL KEDONGANAN
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	95,79	KEL KEDONGANAN
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	6,06	KEL KEDONGANAN
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL KEDONGANAN
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	6 Lingkungan	144,47	KEL KEDONGANAN
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	13,24	KEL KEDONGANAN
	KELURAHAN KEROBOKAN			1.301,25	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	597,81	KEL KEROBOKAN
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	209,67	KEL KEROBOKAN
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	69,10	KEL KEROBOKAN
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10,00	KEL KEROBOKAN
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	19,61	KEL KEROBOKAN
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	25,32	KEL KEROBOKAN
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	10 lingkungan	33,76	KEL KEROBOKAN
	79 PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	96,23	KEL KEROBOKAN
	81 PROGRAM PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	10 Lingkungan	44,65	KEL KEROBOKAN
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL KEROBOKAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	158,32	KEL KEROBOKAN
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	31,77	KEL KEROBOKAN
	KELURAHAN KEROBOKAN KAJA			1.624,06	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	1.078,43	KEL KEROBOKAN KAJA
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	73,22	KEL KEROBOKAN KAJA
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	64,70	KEL KEROBOKAN KAJA
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10,00	KEL KEROBOKAN KAJA
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	19,26	KEL KEROBOKAN KAJA
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	44,18	KEL KEROBOKAN KAJA
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	23 lingkungan	34,84	KEL KEROBOKAN KAJA
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	116,73	KEL KEROBOKAN KAJA
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL KEROBOKAN KAJA
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	154,46	KEL KEROBOKAN KAJA
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	23,25	KEL KEROBOKAN KAJA
	KELURAHAN KEROBOKAN KELOD			1.322,64	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	729,00	KEL KEROBOKAN KELOD
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	158,17	KEL KEROBOKAN KELOD
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	50,35	KEL KEROBOKAN KELOD
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10,00	KEL KEROBOKAN KELOD
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	16,97	KEL KEROBOKAN KELOD
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	32,89	KEL KEROBOKAN KELOD
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	13 lingkungan	33,62	KEL KEROBOKAN KELOD
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	105,27	KEL KEROBOKAN KELOD
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	13 lingkungan	3,75	KEL KEROBOKAN KELOD
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 Paket	5,00	KEL KEROBOKAN KELOD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	154,85	KEL KEROBOKAN KELOD
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	22,76	KEL KEROBOKAN KELOD
	KELURAHAN BENOA			1.625,95	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	1.020,63	KEL BENOA
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	126,41	KEL BENOA
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	65,83	KEL BENOA
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9,94	KEL BENOA
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	18,07	KEL BENOA
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	81,32	KEL BENOA
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33,68	KEL BENOA
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	101,08	KEL BENOA
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar nasional	5,00	KEL BENOA
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 Lingkungan	145,98	KEL BENOA
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	18,00	KEL BENOA
	KELURAHAN TANJUNG BENOA			1.779,48	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	699,00	KEL TANJUNG BENOA
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	436,55	KEL TANJUNG BENOA
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	75,23	KEL TANJUNG BENOA
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9,00	KEL TANJUNG BENOA
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	17,42	KEL TANJUNG BENOA
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	18,46	KEL TANJUNG BENOA
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33,61	KEL TANJUNG BENOA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	99,42	KEL TANJUNG BENOA
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5,00	KEL TANJUNG BENOA
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	6 Lingkungan	151,94	KEL TANJUNG BENOA
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	6 Lingkungan	36,87	KEL TANJUNG BENOA
	06 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	jumlah bangunan/gedung yang ditata	1 paket	196,99	KEL TANJUNG BENOA
	KELURAHAN JIMBARAN			1.476,36	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	899,09	KEL JIMBARAN
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	121,96	KEL JIMBARAN
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	61,63	KEL JIMBARAN
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9,53	KEL JIMBARAN
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	16,53	KEL JIMBARAN
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	34,15	KEL JIMBARAN
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33,63	KEL JIMBARAN
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	126,38	KEL JIMBARAN
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL JIMBARAN
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	142,92	KEL JIMBARAN
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	25,54	KEL JIMBARAN
	KELURAHAN SEMPIDI			1.321,21	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	645,89	KEL SEMPIDI
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	215,61	KEL SEMPIDI
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	66,91	KEL SEMPIDI
	08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 kegiatan	27,48	KEL SEMPIDI
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10,00	KEL SEMPIDI
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	32,24	KEL SEMPIDI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
1	2	3	5	6	7	
	38	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	16,09	KEL SEMPIDI
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	34,36	KEL SEMPIDI
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	114,82	KEL SEMPIDI
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL SEMPIDI
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	10 lingkungan	146,72	KEL SEMPIDI
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	6,08	KEL SEMPIDI
	KELURAHAN LUKLUK				1.324,57	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	671,53	KEL LUKLUK
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	206,20	KEL LUKLUK
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	65,52	KEL LUKLUK
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10,00	KEL LUKLUK
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	18,14	KEL LUKLUK
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	25,51	KEL LUKLUK
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33,73	KEL LUKLUK
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	121,79	KEL LUKLUK
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5,00	KEL LUKLUK
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	9 lingkungan	160,57	KEL LUKLUK
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	6,58	KEL LUKLUK
	KELURAHAN KAPAL				1.904,56	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	965,01	KEL KAPAL
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	221,66	KEL KAPAL
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	77,05	KEL KAPAL
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10,00	KEL KAPAL
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	16,52	KEL KAPAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	31,36	KEL KAPAL
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	16 Lingkungan	33,86	KEL KAPAL
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	175,96	KEL KAPAL
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	16 lingkungan	11,94	KEL KAPAL
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5,00	KEL KAPAL
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 lingkungan	144,91	KEL KAPAL
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	7,00	KEL KAPAL
	05 PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	1 paket	204,30	KEL KAPAL
	KELURAHAN ABIANBASE			1.376,97	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	803,07	KEL ABIANBASE
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	133,56	KEL ABIANBASE
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	67,68	KEL ABIANBASE
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	9,97	KEL ABIANBASE
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	18,41	KEL ABIANBASE
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	18,35	KEL ABIANBASE
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	13 lingkungan	33,91	KEL ABIANBASE
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	124,68	KEL ABIANBASE
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	16 lingkungan	7,40	KEL ABIANBASE
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5,00	KEL ABIANBASE
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 lingkungan	150,78	KEL ABIANBASE
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	4,16	KEL ABIANBASE
	KELURAHAN SADING			1.263,55	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	580,25	KEL SADING

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	211,48	KEL SADING
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	61,92	KEL SADING
	08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 Paket	43,46	KEL SADING
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	9,95	KEL SADING
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	12,62	KEL SADING
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	20,30	KEL SADING
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	34,06	KEL SADING
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	123,65	KEL SADING
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5,00	KEL SADING
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 lingkungan	155,58	KEL SADING
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan	1 Paket	5,26	KEL SADING
	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU			4.287,67	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah izin yang diterbitkan	100%	1.560,54	BPPT
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	2.494,60	BPPT
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	93,34	BPPT
	24 PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Jumlah pengaduan yang tertangani	100%	47,32	BPPT
	37 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Tersedianya informasi perizinan dan non perizinan	1 paket	81,94	BPPT
	09 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	tersusunnya laporan hasil kinerja SKPD	1 paket	9,93	BPPT
21	URUSAN KETAHANAN PANGAN			26.982,17	
	01 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN			26.982,17	
	16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Produktivitas bahan pangan Utama (padi)	6 Kecamatan	26.982,17	DISTANBUNHUT
22	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.272,38	
	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMDES			5.272,38	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	12 bulan	785,42	BPMD DAN PEMDES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
1	2	3	5	6	7	
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	444,27	BPMD DAN PEMDES
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	116,30	BPMD DAN PEMDES
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 bulan	10,00	BPMD DAN PEMDES
	10	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	150,74	BPMD DAN PEMDES
	16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Terwujudnya sistem pengelolaan Pasar Desa/Adat dan BUMDA sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 bulan	143,65	BPMD DAN PEMDES
	18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 bulan	1.268,70	BPMD DAN PEMDES
	19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat di bidang IPTEK	12 bulan	1.983,26	BPMD DAN PEMDES
	23	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Tersalurnya beras untuk RTS-PM Raskin di Desa/Kelurahan	9043 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin	171,11	BPMD DAN PEMDES
	24	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	12 bulan	198,92	BPMD DAN PEMDES
	24	URUSAN KEARSIPAN			4.808,32	
		KANTOR ARSIP DAERAH			4.808,32	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	12 bulan	660,53	K. ARSIP DAERAH
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	3.289,77	K. ARSIP DAERAH
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya tatakelola kearsipan di kab. Badung	129 orang	68,30	K. ARSIP DAERAH
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	68,30	K. ARSIP DAERAH
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 BULAN	10,00	K. ARSIP DAERAH
	15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Terwujudnya penataan arsip unit kerja peserta lomba	12 bulan	158,14	K. ARSIP DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
			Target	Rp. Juta		
1	2	3	5	6	7	
	16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Terselamatnya arsip yang mempunyai nilai guna dan arsip statis	12 bulan	447,47	K. ARSIP DAERAH
	17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Tertata dan terpeliharanya arsip SKPD pada KAD Badung	12 bulan	67,28	K. ARSIP DAERAH
	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Terwujudnya penataan arsip di lingkungan Pemkab Badung	12 bulan	38,54	K. ARSIP DAERAH
	25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			28.660,62	
		DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			28.660,62	
	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan pelayanan komunikasi, informasi media komunikasi, informasi media massa	31 %	28.660,62	
	26	URUSAN PERPUSTAKAAN			1.949,10	
		KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH			1.949,10	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 bulan	568,76	K. PERPUSTAKAAN D.
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 bulan	339,83	K. PERPUSTAKAAN D.
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya pengetahuan petugas perpustakaan Sekolah di bidang layanan pustaka	12 bulan	43,22	K. PERPUSTAKAAN D.
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	69,20	K. PERPUSTAKAAN D.
	19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya jumlah kunjungan ke Perpustakaan	12 bulan	918,09	K. PERPUSTAKAAN D.
	20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 bulan	10,00	K. PERPUSTAKAAN D.
	2	URUSAN PILIHAN			50.688,93	
	01	URUSAN PERTANIAN			26.219,25	
	01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN			14.758,70	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terealisasinya Pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien	12 Bulan	2.701,97	DISTANBUNHUT
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terealisasinya sarana/prasarana pendukung kinerja aparatur	12 bulan	1.186,29	DISTANBUNHUT
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya dukungan kegiatan SKPD	12 bulan	216,83	DISTANBUNHUT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Terwujudnya Pembinaan dan pelatihan keterampilan petani	12 Bulan	190,09	DISTANBUNHUT
	17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Terselenggaranya promosi pemasaran hasil pertanian/perkebunan	6 Kecamatan	1.267,94	DISTANBUNHUT
	19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Terwujudnya peningkatan luas tanam padi	100000 Ha	2.381,79	DISTANBUNHUT
	20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh	63 Penyuluh	6.611,31	DISTANBUNHUT
	26 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tersedianya pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatan	3 Jenis	7,69	DISTANBUNHUT
	27 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Terwujudnya Pengembangan agribisnis	4 Kecamatan	18,21	DISTANBUNHUT
	28 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	Tersedianya data pola harapan ketersediaan pangan di kabupaten badung	3 Jenis	176,59	DISTANBUNHUT
	02 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN			11.460,55	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun anggaran	2.122,21	DISNAKANLUT
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang operasional kantor	1 SKPD	2.035,52	DISNAKANLUT
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 tahun anggaran	188,00	DISNAKANLUT
	21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah populasi ternak yang tertangani dari serangan penyakit	1 tahun anggaran	2.564,24	DISNAKANLUT
	22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Jumlah populasi dan produksi hasil peternakan	6 kecamatan	4.047,07	DISNAKANLUT
	23 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Peningkatan jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan	1 paket	259,33	DISNAKANLUT
	26 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Tahun anggaran	10,00	DISNAKANLUT
	30 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PETERNAKAN	Tersedianya data/informasi peternakan	1 paket	137,57	DISNAKANLUT
	31 PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Tersedianya bahan pangan ternak yang bermutu	1 Tahun Anggaran	96,62	DISNAKANLUT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
02	URUSAN KEHUTANAN			118,77	
01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN			118,77	
16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	6 Kecamatan	109,58	DISTANBUNHUT
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Terciptanya Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	1767.87 Ha	5,11	DISTANBUNHUT
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	Jumlah Desa yang dibina, dimonitor dan diawasi peredaran hasil	10 Desa	4,09	DISTANBUNHUT
03	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			661,59	
	DINAS CIPTA KARYA			661,59	
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Tercapainya Upaya Pembinaan bidang SDA	1 paket	146,13	DCK
16	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN	Tertibnya Kegiatan Pertambangan rakyat yang diusahakan oleh masyarakat	1 Paket	505,84	DCK
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Tercapainya Upaya Pembinaan bidang energi	1 Paket	9,62	DCK
04	URUSAN PARIWISATA			16.174,86	
	DINAS PARIWISATA			16.174,86	
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	1.774,85	DIPARDA
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	1.456,35	DIPARDA
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	153,25	DIPARDA
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya promosi	100%	10.277,54	DIPARDA
16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Berkembangnya Destinasi Pariwisata	1 paket	2.025,41	DIPARDA
17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Berkembangnya Kemitraan dalam bidang kepariwisataan	1 paket	427,35	DIPARDA
18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	Meningkatnya kualitas Produk wisata	1 paket	50,13	DIPARDA
19	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, Renja, Renstra)	100%	10,00	DIPARDA
05	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.572,27	
02	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN			5.572,27	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Peningkatan produksi hasil perikanan laut	2 Kelompok	69,02	DISNAKANLUT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
	16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	Peningkatan kelompok masyarakat pengawas pemanfaatan sumberdaya kelautan	1 tahun anggaran	46,43	DISNAKANLUT
	19 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Terlaksananya Peringatan Hari Nusantara	4 kecamatan	3,44	DISNAKANLUT
	20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	peningkatan produksi budidaya perikanan	1 Paket	443,10	DISNAKANLUT
	21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap	1 Paket	4.805,99	DISNAKANLUT
	23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Peningkatan produksi hasil pengolahan komoditi perikanan	1 Paket	4,15	DISNAKANLUT
	29 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah tenaga penyuluh dan petugas peternakan, perikanan dan kelautan yang meningkat Pengetahuan dan ketrampilan teknis di bidang peternakan dan perikanan	1 tahun anggaran	26,79	DISNAKANLUT
	30 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Tersedianya data/informasi perikanan dan kelautan	1 Paket	168,25	DISNAKANLUT
	34 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Hasil Olahan Perikanan	1 Paket	5,08	DISNAKANLUT
06	URUSAN PERDAGANGAN			1.457,17	
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			1.457,17	
	15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Terwujudnya perdagangan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen	12 bulan	438,23	DISKOPERINDAG
	18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan proses perijinan dan Peningkatan Promosi	12 bulan	1.018,94	DISKOPERINDAG
07	URUSAN PERINDUSTRIAN			485,01	
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			485,01	
	16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Untuk menumbuh kembangkan produktifitas dan kualitas kerajinan serta meningkatkan perekonomian kerakyatan melalui industri kecil kerajinan rumah tangga dan tersedianya data yang muktahir dan akurat	12 bulan	329,16	DISKOPERINDAG
	17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Terbangunnya gerakan nasional penerapan GKM melalui percepatan peningkatan mutu dan produktifitas	12 bulan	155,85	DISKOPERINDAG
JUMLAH				2.370.154,50	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja pemerintah daerah berkenaan.

Pada Tabel 8.1 berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Tabel 8.2 menggambarkan target Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Badung

No.	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama				
		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
1	Indeks kerukunan umat beragama	81,60	82,00	78,25	78,35	78,45
2	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	48%	71%	77%	84%	90%
3	Indeks kepuasan masyarakat	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	76,55 (BB)	76,80 (BB)	78,00 (BB)	78,40 (BB)	80,01 (A)
5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B	BB	72,10 (BB)	73,50 (BB)	75,00 (BB)
7	Indeks Pembangunan Manusia	80,30	80,80	81,17	81,37	81,57
8	Indeks Kebahagiaan	Data Tidak Tersedia	71,50	75,49	75,50	75,51
9	Persentase penduduk miskin	2,30-2,25%	2,25-2,15%	2,00-1,50%	1,00-0,60%	0,60-0,40%
10	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	7,73%	7,76%	7,80%	7,85%	7,91%
11	Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	80,00%	85,00%	87,00%	90,00%	95,00%
12	Persentase penegakan Perda dan Perkada	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	75,61	75,74	75,87	76,00	76,13

No.	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Target Kinerja Sasaran / Utama				
		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,90	66,70	69,20	69,30	69,40
15	Indeks Pertanaman (IP)	185,00	195,00	232,00	233,00	235,00
16	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,335%	0,330%	0,325%	0,320%	0,310%
18	Persentase Infrastruktur dalam kondisi mantap	97,50%	98,00%	88,21%	89,38%	90,58%
19	Skor Pola Pangan Harapan	93,50	94,00	96,00	96,50	97,00
20	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	64%	66%	69%	72%	75%
21	Persentase kontribusi sektor Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	28,17%	28,36%	28,95%	28,97%	29,00%

Tabel 8.2
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1.	Pertumbuhan PDRB	7,07	7,64	6,82	6,97	6,24 - 6,58	7,2 - 7,6	7,75 - 8,18	7,91 - 8,35	8,2 - 8,65	8,5 - 8,97	8,5 - 8,97
1.2.	Laju inflasi provinsi	3,75	4,71	7,35	8,03	2,70	4,38 - 4,85	4,3 - 4,75	4,21 - 4,65	4,12 - 4,55	4,03 - 4,45	4,03 - 4,45
1.3.	PDRB per kapita	39,80	41,79	43,58	45,56	44,97 - 49,7	49,3 - 54,49	52,05 - 57,53	55,07 - 60,87	58,48 - 64,63	62,3 - 68,86	62,3 - 68,86
1.4.	Indeks Gini	0,3385	0,3258	0,3468	0,3404	0,31	0,31-0,33	0,33-0,35	0,33-0,36	0,33-0,37	0,33-0,37	0,33-0,37
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	19,20	19,75	15,12	18,64	18,8 - 20,78	19,46 - 21,51	20,04 - 22,15	20,43 - 22,58	20,9 - 23,09	21,35 - 23,6	21,35 - 23,6
1.6.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	2,62	2,16	2,46	2,54	2,49%	2,30-2,25%	2,25-2,15%	2,00-1,50%	1,00-0,60%	0,60-0,40%	0,60-0,40%
1.7.	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,07	7,64	6,82	6,97	6,24 - 6,58	5,98-6,15	6,10-6,90	6,15-7,10	6,15-7,15	6,15-7,20	6,15-7,20
1.8.	Laju inflasi (%)	2,33	3,59	7,67	7,31	2,70	3,50-1	3,00-1	3,00-1	3,00-1	3,00-1	3,00-1
1.9.	PDRB Konstan Th. 2010 (Triliyun)	22,32	24,03	25,67	27,46	27,72 - 30,64	31,72 - 35,06	34,19 - 37,79	36,29-40,47	38,51-43,37	40,84-46,48	40,84-46,48
1.10.	PDRB berlaku (Triliyun)	23,51	27,20	31,79	37,06	39,22 - 43,35	50,99-56,35	55,44-60,59	61,64-67,37	68,13-74,46	73,95-80,82	73,95-80,82
1.11.	PDRB per kapita (ADHB)	41,91	47,31	53,97	61,49	68,83	74,49-82,72	80,99-88,32	85,22-89,67	87,30-92,45	90,32-92,76	90,32-92,76
	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1.	IPM	76,66	77,26	77,63	77,98	78,86	80,30	80,80	81,17	81,37	81,57	81,57
2.	Angka usia harapan hidup	73,91	74,05	74,19	74,30	74,31 - 78,03	74,5 - 78,23	74,58 - 78,31	74,65 - 78,38	74,73 - 78,47	74,81 - 78,56	74,81 - 78,56
3.	Pengeluaran per Kapita (Rp. 000)	15.507,72	15.794,76	16.024,52	16.080,47	16326,87 - 17229,36	17024,24 - 17965,28	17612,16 - 18585,7	8007,89 - 19003,31	18512,87 - 19536,19	18935,29 - 19981,96	18935,29 - 19981,96
4.	IPG	93,25	93,89	94,68	94,88	95,09 - 95,61	75,61	75,74	75,87	76,00	76,13	76,13
5.	IDG				55,24	55,37 - 58,16	55,84 - 58,66	56,03 - 58,86	56,26 - 59,1	56,49 - 59,35	56,74 - 59,61	56,74 - 59,61
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat											
1.	Pendidikan											
1.1.	Angka melek huruf (BPS)	92,96	93,01	93,93	95,71							
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	8,96	9,07	9,18	9,29	9,87	9,89	9,90	9,92	9,94	9,96	9,96
1.3.	Angka partisipasi kasar	115,01	129,23	117,73	120,37	118,89	100	100	100	100	100	100
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	99,95	99,96	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.	Angka Partisipasi Murni											
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,87	103,67	98,62	99,12	99,98	100	100	100	100	100	100
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	91,28	101,62	91,59	92,1	109,95	100	100	100	100	100	100
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	78,04	91,09	83,69	83,72	104,44	100	100	100	100	100	100
1.6.	PAUD :											
1.6.1.	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	96,02	96,46	100,45	102,93	103,06	100	100	100	100	100	100
1.7.	Pendidikan Dasar 9 Tahun :											
1.7.1.	APK SD/MI (%)	110,04	117,84	112,31	113,16	113,57	100	100	100	100	100	100
1.7.2.	APM SD/MI (%)	96,87	103,67	98,62	99,12	99,98	100	100	100	100	100	100
1.7.3.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%)	100	94,6	97,91	96,99	99,37	100	100	100	100	100	100
1.7.5.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.7.6.	Setiap sekolah memiliki minimal 6 ruang kelas (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.7.	Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.8.	Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%)	55,72	60,15	64,57	69,00	73,43	82,43	86,86	91,28	95,71	100	100
1.7.9.	Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%)	70	72	74	77	80	86	88	92	96	99	100
1.7.10.	Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7.11.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	36	37	38	39	80	85	87	90	95	100	100
1.7.12.	Setiap Sekolah memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi (%)	42	43	44	45	46	70	80	90	95	100	100
1.7.13.	APK SMP/MTs (%)	122,57	137,63	125,12	128,14	123,16	100	100	100	100	100	100
1.7.14.	APM SMP/MTs (%)	91,28	101,62	91,59	92,19	109,95	100	100	100	100	100	100
1.7.15.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,01	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.16.	Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA (%)	89,27	94,89	98,44	100	95,93	100	100	100	100	100	100
1.7.17.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	99,97	99,99	99,99	100	100	100	100	100	100	100
1.7.18.	Rasio Rombel / Kelas 1:1 (%)	1,4	1,38	1,36	1,33	1,3	1,15	1,1	1,05	1,05	1	1
1.7.19.	Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.20.	Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%)	99,89	99,97	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.21.	Setiap sekolah memiliki Lab ipa lengkap dengan prabotnya (%)	99,98	99,99	99,76	98,97	98,08	100	100	100	100	100	100
1.7.22.	Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit)	99,79	99,88	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.23.	Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%)	84	86	90	95	97	98	98,5	99	99,5	100	100
1.7.24.	Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7.25.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	48	49	50	55	80	85	87	90	95	100	100
1.7.26.	Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%)	23	24	25	26	27	70	80	90	95	100	100
1.8.	Pendidikan Menengah :											
1.8.1.	APK SMA/MA/SMK (%)	112,42	132,21	115,75	119,81	119,95	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	APM SMA/MA/SMK (%)	78,04	91,09	83,69	83,72	104,44	0	0	0	0	0	0
1.8.3.	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%)	0	0,12	0,06	0,01	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	100	100	99,98	100	100	0	0	0	0	0	0
1.8.5.	Rasio Rombel / Kelas 1 : 1 (%)	1,35	1,29	1,28	1,26	1,3	0	0	0	0	0	0
1.8.6.	Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%)	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
1.8.7.	Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%)	81	81,85	81,95	81,99	82,93	0	0	0	0	0	0
1.8.8.	Setiap sekolah memiliki Lab IPA lengkap dengan prabotnya (%)	80,97	80,49	81,75	81,99	82,11	0	0	0	0	0	0
1.8.9.	Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit)	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
1.8.10.	Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%)	99,06	99,99	99,99	99,87	99,88	0	0	0	0	0	0
1.8.11.	Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1.8.12.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	45	46	47	48	49	0	0	0	0	0	0
1.8.13.	Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%)	45	46	47	48	49	0	0	0	0	0	0
1.9.	Pendidikan Non Formal :											
1.9.1.	Angka Kelulusan Paket A (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.9.2.	Angka Kelulusan Paket B (%)	100	100	98	100	99	100	100	100	100	100	100
1.9.3.	Angka Kelulusan Paket C (%)	100	100	93	100	100	100	100	100	100	100	100
1.10.	Manajemen Pelayanan Pendidikan :											
1.10.1.	Persentase Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.10.2.	Persentase SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.10.3.	Persentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.10.4.	Persentase SMA/SMK/MA Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
1.11.	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan :											

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.11.1.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	82,50	89,19	92,50	94,40	91,22	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
1.11.2.	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	85,90	88,00	90,00	93,30	91,81	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00
1.11.3.	Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	88,00	89,50	90,00	90,90	92,63	-	-	-	-	-	-
2.	Kesehatan :											
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	0,951/1000	0,997/ 1000	0,997/ 1000	0,995/ 1000							
2.2.	Angka usia harapan hidup	71,85	71,9	71,91	74,3	74,3	74,6	74,7	74,8	74,9	75	75
2.3.	Prevalensi balita gizi buruk	0,21	0,11	0,42	0,25	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
2.4.	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya :											
2.4.1	Persentase Puskesmas kondisi baik (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.2	Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk)	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
2.5.	Pengelolaan BLUD RSUD :											
2.5.1.	Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat	-	85%	87,50%	90%	90%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
2.5.2.	Kinerja Pelayanan	-	61,75%	66,13%	61,63%	65%	76%	77%	78%	79%	80%	80%
2.5.3.	Kinerja Keuangan	-	83%	74,50%	79%	76,50%	80%	81%	82%	83%	85%	85%
2.6.	Pengawasan Obat dan Makanan :											
2.6.1.	Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%)	90,50	91,75	92,15	92,50	93,75	94,75	95,20	96	96,50	96,75	96,75
2.7.	Pengembangan Tenaga Kesehatan :											
2.7.1.	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	36,5	26,2	55,3	110	110	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.7.2.	Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk)	78,2	73,5	73,3	61,72	61,72	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.9.	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan											
2.9.1.	Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.2.	Persentase Faskes swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS	0	0	0	40%	45%	50%	55%	80%	90%	100%	100%
2.10.	Upaya Kesehatan Masyarakat :											
2.10.1.	Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
2.11.	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	74,5	77,39	78	79	80,16	80,25	80,5	80,75	81	81	81
2.11.1.	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	0	0	0	2%	3%	20%	30%	40%	50%	53%	53%
2.11.2.	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	0	0	0	2%	3%	20%	30%	40%	50%	53%	53%
2.12.	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.1.	Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) (%)	3	3	4	7	3	3	3	3	3	3	3
2.12.2.	AFP rate per 10.000 penduduk < 15 tahun	2,13	1,46	6,8	1,5	2,5						
2.12.3.	Penemuan penderita Pneumonia balita (%)	48,9	40,2	45,2	53,8	45,6	100	100	100	100	100	100
2.12.4.	Penemuan pasien baru TB BTA positif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.5.	Penderita DBD yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.6.	Penemuan penderita Diare (%)	<0.5	<0.5	<0.5	0,43	0,43	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
2.12.7.	Penemuan dan penanganan HIV AIDs (%)	<0.5	<0.5	<0.5	0,43	0,43	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.6
2.13.	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak											
2.13.1.	Angka usia harapan hidup (tahun)	106,7	132	98,91	43,7	99,89	93,83	90,83	87,83	85		
2.13.2.	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH	4,27	2,83	2,54	4,09	2,99	3,74	3,37	2,99	2,99	2,99	2,99
2.13.3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH	5,1	5,2	3,1	2,8	4,7	3,62					
2.13.4.	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)	96,14	90,34	93,28	95,3	90,36	92	93	94	95	95	95
2.13.5.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	60,34	54,93	80,62	73,23	74,21	77	78	80	80	80	80
2.13.6.	Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani (%)	99,09	92,03	95,7	99,72	94,24	92	93	94	95	97	97
2.13.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang	97,77	90,44	99,97	95,66	93,76	98,3	98,4	98,5	98,6	98,6	98,6
2.13.8.	Cakupan pelayanan ibu nifas (%)	65,43	50,73	80,76	87,77	71,98	72,5	73	75	80	80	80
2.13.9.	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	105,87	96,42	96,77	97,88	96,57	96,62	96,64	96,65	96,67	96,97	96,97
2.13.10.	Cakupan kunjungan bayi (%)	105,87	96,42	96,77	97,88	96,57	96,62	96,64	96,65	96,67	96,97	96,97
2.14.	Perbaikan Gizi Masyarakat	3,79	3,27	3,85	3,01	2,97	12,3	12,1	11	10	10	10
2.14.1.	Persentase Balita gizi kurang (%)	13,1	9,96	8,69	8,39	10,53	20	20	20	20	20	20
2.14.2.	Prevalensi Balita Stunting (%)	76,29	78,06	80,77	84,44	86,02	84	85	85	85	85	85
2.14.3.	Cakupan Pelayanan Anak Balita (D/S) (%)	0,21	0,11	0,42	0,16	0,21	12,3	12,1	11	10	10	10
2.14.4.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.14.5.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	61,34	64,54	66,69	68,2	70,29	44	47	50	50	50	50
2.14.6.	Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
2.14.7.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anakusia 6-24 bulan	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.8.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan sederajat (%)	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.9.	Rasio Posyandu per 1.000 balita	90,91	92,92	93,29	94,35	95,91	95,92	99,29	99,35	99,45	100	100
2.15.	Pengembangan Lingkungan Sehat	99,88	99,88	99,89	99,92	99,95	100	100	100	100	100	100
2.15.1.	Persentase Keluarga memiliki Jamban (%)	90,91	92,92	93,29	94,35	95,91	95,92	99,29	99,35	99,45	100	100
2.15.2.	Persentase Keluarga memiliki Sarana Air Bersih (%)	99,88	99,88	99,89	99,92	99,95	100	100	100	100	100	100
2.16	Persentase Sarana dan Prasarana sesuai standar kelas rumah sakit	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Ketenagakerjaan											
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja	54,53	54,49	56,18	53,58	0	0	0	0	0	0	0
4.	Perumahan (Bidang Praswil)											
4.1.	pengembangan perumahan :											
4.1.1.	Rumah layak huni (%)	74,67%	75,36%	76,05%	76,74%	77,43%	79,50%	80,19%	80,88%	81,57%	82,26%	82,26%
4.3.	Lingkungan sehat perumahan						91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
4.3.1.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%)	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
4.3.2.	Persentase Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	88,00%	86,00%	86,96%	82,77%	75,62%	87,43%	90,43%	93,43%	96,43%	100%	100%
5.	Penataan Ruang (Bidang Praswil) :											
5.1.	Perencanaan Tata Ruang :											
5.1.1.	Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah)	-	-	-	-	6	1	2	2	2	2	2
5.1.2.	Terlaksananya perijinan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang.	-	-	-	-	-	2	4	4	4	4	4
5.2.	Pemanfaatan Ruang:											
5.2.2.	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinciannya	-	-	3000	5000	4000	4000	3000	2000	2000	1500	1500
6.	Perencanaan :											
6.1.	Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan :											
6.1.1.	Hasil Evaluasi RKPD (dokumen)	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.1.2.	Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen)	-	-	Ada	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Perencanaan Pembangunan Daerah :											
6.2.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Perhubungan :											
7.1.	Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan :											
7.1.1.	Jumlah Terminal Bis	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
7.2.	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ :											
7.2.1.	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ berfungsi dengan baik (%)	87,0%	87,2%	87,4%	88,6%	89,9%	92,0%	93,8%	95,2%	96,8%	98,4%	98,4%
7.3.	Peningkatan Pelayanan Angkutan :											
7.3.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	372750	1552142	1307679	1279597	695433	920000	966000	1014300	1065015	1118265,75	1118265,75
7.3.2.	Rasio ijin trayek per jumlah penduduk	0,0000075	0,0000071	0,0000051	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050
7.3.3.	Persentase Angkutan darat terhadap penumpang (%)	44,5%	37,0%	59,0%	64,0%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%
7.4.	Peningkatan Kelaihan Pengoperasian Kendaraan Bermotor :											
7.4.1.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	46 menit	46 menit	46 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit
7.4.2.	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	7138	10500	12285	13689	13655	15055	15808	16598	17428	18300	18300
8.	Lingkungan Hidup (Bidang Praswil) :											

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
8.1.	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup :											
8.1.1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.1.2.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.1.3.	Pencemaran status mutu air (%)	73,33	92,86	79,22	76,25	75,00	77,00	78,00	79,00	79,00	79,00	79,00
8.1.4.	Penegakan hukum lingkungan (%)	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
8.2.	Peningkatan Pengendalian Polusi :											
8.2.1.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	-	-	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100
8.3.	Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam :											
8.3.2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.3.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.4.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) :											
8.4.1.	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)	8,47 Ha	8,54 Ha	10,58 Ha	12,20 Ha	12,30 Ha	12,65 Ha	12,72 Ha	13,08 Ha	14,03Ha	14,50 Ha	14,50 Ha
8.5.	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup :											
8.5.1.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	-	-	-	42,56%	100	100	100	100	100	100	100
8.6.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan :											
8.6.1.	Prosentase Cakupan pelayanan sampah	25,00%	25,00%	27,00%	26,00%	30,00%	37,00%	42,00%	47,00%	52,00%	57,00%	57,00%
8.6.2.	Prosentase Sampah yang Tertangani	72,9	89,3	97,3	97,9	78,5	89,8	91,1	92,1	93,3	94,4	94,4
9.	Pertanahan :											
9.1.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah :											
9.1.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	422 bidang	474 bidang	839 bidang	888 bidang	1007 bidang	1156 bidang	0	0	0	0	1156 bidang
9.2.	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan :	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	100,00%
9.2.1.	Penyelesaian kasus tanah Negara	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	100,00%
10.	Kependudukan Dan Catatan Sipil											
10.1.	Penataan administrasi kependudukan :											
10.1.1.	Kepemilikan KTP (%)	99%	99%	98%	99%	90,02%	92%	94%	95%	97%	100%	100%
10.1.2.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) (%)	-	97%	98%	99%	100%						
10.1.3.	Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	99,43%		98%	99%	100%						
10.1.4.	Rasio bayi berakte kelahiran	70%	86%	90%	92%	84,33%	85%	87%	89%	90%	92%	92%
10.1.5.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	74%	77%	60%	10%	80%	85%	90%	93%	89%	95%	95%
10.1.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	99%	99%	98%	99%	90%	94%	95%	98%	99%	100%	100%
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang Litbang)											
11.1.	Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan :											
11.1.1.	Jumlah organisasi perempuan aktif (%)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
11.2.	penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak :											
11.2.1.	Jumlah Focal Point SKPD yang aktif (unit)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
11.2.2.	Keterampilan perencana SKPD mengenai cara penyusunan PPRG (SKPD)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
11.2.3.	Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok)	-	-	1	1	1	7	7	7	7	7	7
11.2.4.	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif (%)	-	1	1	1	63	63	63	63	63	63	63
11.3.	keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak :											
11.3.1.	Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk perda dan Perbup (buah)	3	2	1	1	7	7	1	1	1	1	12
11.3.2.	Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dalam bentuk perda dan Perbup (buah)	6	57	67	-	75	-	-	-	-	-	-
11.4.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak :											
11.4.1.	Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan (unit)	1	1	1	1	13	35	40	50	55	63	63

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
11.4.2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	0,45%	0,48%	0,50%								
11.4.3.	Rasio KDRT	0,011%	0,023%	0,012%	0,015%	0,012%						
11.4.4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	0,44%	0,42%	0,43%	0,31%							
11.4.5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	0,60%	100%	100%	100%	100%	100%
11.4.6	IPG	74,31	75,27	-	75,30	75,47	75,48	75,49	75,50	75,51	75,52	75,52
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
12.1.	Keluarga Berencana :											
12.1.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,14	2,10	2,11	2,12	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	2,00	2,00
12.1.2.	Rasio akseptor KB (%)	85,26	85,31	85,32	84,31	78,64	78,76	78,82	78,86	78,90	78,94	78,94
12.1.3.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%)	0,20	0,16	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
12.1.4.	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%)	82,21	85,49	85,57	88,91	75,05	75,26	75,52	76,03	76,40	77,24	77,24
12.1.5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	1,75	1,79	1,67	1,86	1,52	2,39	2,35	2,3	2,25	2,15	2,15
12.1.6.	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan	2,00	1,09	1,07	1,11	1	1	1	1	1	1	1
12.1.7.	Ratio PembantuPembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.1.8.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.1.9.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12.2.	Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU :											
12.2.1.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	92,56	90,89	88,28	88,55	91,31	89,16	89,23	89,30	89,36	89,43	89,43
12.2.2.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	79,63	85,46	87,55	84,28	94,83	75,73	75,77	75,81	75,84	75,87	75,87
12.3.	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR :											
12.3.1.	Jumlah kelompok PIK KRR aktif (unit)	2	2	3	3	6	8	14	17	19	21	87
12.3.2.	Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya)	10	28	15	18	78	24	56	68	76	80	320
13.	Sosial (Bidang Kersos) :											
13.1.	pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya :											
13.1.1.	Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala kabupaten/kota	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	100%	75%	81,25%	81,25%	87,5%	100%	100%
13.1.2.	Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	100%	75%	81,25%	81,25%	87,5%	100%	100%
13.2.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial :											
13.2.1.	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2.2.	Cakupan anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2.3.	Cakupan lanjut usia terlanjar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2.4.	Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2.5.	Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.3.	Pembinaan anak terlanjar :											
13.4.	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma.											

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
13.4.1.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	75%	87,5%	87,5%	100%	100%	100%
13.5.	Pembinaan panti asuhan/ panti jompo :											
13.5.1.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
13.6.	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) :	758	2082	1585	1899	2004	450	450	450	450	450	100%
13.6.1.	Jumlah Pengemis yang terbina (jiwa)	556	410	430	346	239	400	400	400	400	400	400
13.7.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial :											
14.	Ketenagakerjaan (Bidang Kersos)											
14.1.	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja :											
14.1.1.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.1.2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.1.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.2.	Peningkatan Kesempatan Kerja :											
14.2.3.	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (orang)	1583	1223	451	653	401	600	650	675	700	725	#REF!
14.3.	Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan :											
14.3.1.	Jumlah tenaga kerja kepesertaan Jamsostek (orang)	-	-	-	19100	13102						
14.3.4.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	17	13	17	15	19	16	18	18	19	19	19
14.3.5.	Persentase perusahaan menerapkan Keselamatan dan perlindungan (%)	100	100	92,57	89,22	65,45	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.3.6.	Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	86,11	76,47	83,24	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Koperasi Dan Usaha Kecil menengah :											
15.1.	Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah :											
15.1.1.	Jumlah orang yang dilatih pelatihan kewirausahaan	40 UKM	40 UKM	40 UKM	80 Orang	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	120 orang
15.1.2.	Jumlah koperasi dan UMKM bermitra (unit)	14	19	19	19	19	20	20	20	20	20	100
15.2.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah :											
15.2.1.	Jumlah UMKM yang telah memiliki ijin usaha (unit)	980	1.053	377	1.163	1.108	1.218	1.273	1.328	1.383	1.438	6.640
15.2.2.	Jumlah UMKM yang mampu mengakses permodalan usaha (unit)	61	92	236	225	230	240	242	246	248	250	1.226
15.3.	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif :											
15.3.1.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	14.754	15.862	17.162	18.366	19.173	21,327	22,404	23,481	24,558	25,635	25,635
15.3.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UMKM (%)	84,74	85,95	89,18	66,83	81,99	83,05	83,65	83,90	84,35	85,10	85,10
15.4.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi :											
15.4.1.	Persentase koperasi aktif (%)	88,87	90,00	78,00	78,92	81,51	47,56%	56,01%	65,51%	75,72%	86,99%	100%
15.4.2.	Persentase koperasi sehat (%)	14,81 (40)	14,81 (40)	18,51 (50)	14,81 (40)	67,73 (466)	32,85%	45,98%	59,12%	72,26%	85,39%	100%
15.4.3.	Jumlah koperasi yang telah dilatih prinsip-prinsip koperasi (koperasi)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
16.	Penanaman Modal (Bidang Ekonomi) :											
16.1.	Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi :											
16.1.1.	Jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali
16.1.2.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	25 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	75 bidang usaha
16.2.	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi :											
16.2.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (investor)	689	777	785	1.459	5.739	2.231	2.357	2.496	2.649	2.817	12.550
16.2.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah)	3.173.814.437.239,00	7.180.810.126.088,00	6.147.499.450.989,00	2.618.136.988.815,00	6.329.353.227.774,00	2.419.842.370,05	2.871.927.176,75	3.359.197.642,05	3.899.203.310,35	4.493.089.023,15	17.043.259.522,35
16.2.3.	Jumlah tenaga kerja terserap	4,3	8,73	21,68	6,49	6,34	9,51	6,00	6,00	6,00	6,00	33,51
17.	Kebudayaan (Bidang Kersos) :											

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
17.1.	Pengembangan Nilai Budaya :											
17.1.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
17.2.	Pengelolaan Kekayaan Budaya :											
17.2.1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	-	52 situs	52 situs	52 situs	52 situs	54 situs	54 situs	56 situs	58 situs	58 situs
17.3.	Pengelolaan Keragaman Budaya :											
17.3.1.	Jumlah Kelompok Seni	2334 sekaa/klp	2334 sekaa/klp	2334 sekaa/klp	2334 sekaa/klp	2334 sekaa/klp	2353 sekaa/klp	2359 sekaa/klp	2365 sekaa/klp	2371 sekaa/klp	2378 sekaa/klp	2378 sekaa/klp
17.3.3.	Cakupan Kajian Seni	46 sekaa	46 sekaa	58 sekaa	70 sekaa	86 sekaa	104 sekaa	110 sekaa	114 sekaa	118 sekaa	123 sekaa	123 sekaa
17.3.4.	Cakupan Fasilitasi Seni	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat
17.3.5.	Cakupan Gelar Seni	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	25 Kegiatan
17.3.6.	Misi Kesenian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
17.3.7.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	75 orang
17.3.8.	Cakupan Organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi
18.	Pemuda Dan Olah Raga :											
19.1.	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda :											
18.1.1.	Jumlah organisasi pemuda	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
18.1.2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	11	13	15	11	11	11	11	11	11	11
18.4.	Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga :											
18.4.1.	Jumlah organisasi olahraga	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
18.4.2.	Jumlah kegiatan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
18.4.3.	Jumlah prestasi olahraga	11 Cabor	11 Cabor	11 Cabor	11 Cabor	11 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor
18.5.	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga :											
18.5.1.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.5.2.	Jumlah Lapangan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
19.	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri (Bidang Stamonev):											
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang)	60	46	40	40	40	65	70	75	80	85	375
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah (orang)	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	5
19.4.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%)	92%	93%	94%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.5.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	33,01	33,18	33,47	31,71	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	155,9
19.6.	Jumlah kasus Penegakan PERDA	1712 pelanggaran	1660 pelanggaran	1608 pelanggaran	1560 pelanggaran	1500 pelanggaran	1000 pelanggaran	900 pelanggaran	800 pelanggaran	700 pelanggaran	600 pelanggaran	600 pelanggaran
19.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,55	0,65	0,7	0,8	0,9	0,9
20.	Otonomi Daerah :											
20.1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	16,66%	16,66%	33,33%	67,00%	67,00%	67,00%	83,33%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%
20.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK) (menit)	80,40%	88,14%	88,32%	96,33%	91,95%	92,05%	92,10%	92,15%	92,20%	92,25%	92,25%
20.3.	Unit pelayanan yang telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Layanan	2	3	5	7	41	30	30	30	30	30	30
20.4.	Masyarakat (unit)	22 Desa	32 Desa	42 Desa	54 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa
20.7.	Persentase SKPD memiliki dan menerapkan SOP/SPP (%)				5,66%	37,74%	26,00%	50,00%	73,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.7.1	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	34,27	55,31	65,92	65,92	69,12	76,20	76,80	77,40	78,20	80,00	80,00
20.8.	Status audit Keuangan BPK	WTP	WTP	OTW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.9.	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa dengan e-procurement melalui LPSE (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.10.	Tersusunnya LKPJ Bupati	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.11.	Tersusunnya LPPD Bupati	70 buku	70 buku	70 buku	70 buku	70 buku	47 buku	47 buku	47 buku	47 buku	47 buku	47 buku
20.12.	Persentase Desa tertib administrasi ADD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.13.	Persentase desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%)	100	98	97	95	92	92	92	92	92	92	92
20.14.	Inteprestasi evaluasi AKIP Kabupaten	C	CC	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A
20.16.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (trilyun rupiah)	1406	1868	2279	2720	2938	4.036	4.597	5.018	5.475	5.856	5.856

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
21.	Ketahanan Pangan :											
21.1.	Peningkatan Ketahanan Pangan :											
21.1.1.	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)	68,95	62,92	49,12	41,03	33,24	35	40	50	60	70	70
21.1.2.	Ketersediaan Energi Per Kapita (kcal/kap/hr)	2246,00	2145,00	2058,00	2160,00	2093,00	210,00	2150,00	2200,00	2225,00	2250,00	2250,00
21.1.3.	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	40,96	42,28	38,66	46,03	45,58	47	47	48	49	50	50
21.1.4.	Penguatan Cadangan Pangan (%)	68,45	62,96	49,12	41,03	33,24	35	40	45	50	55	55
21.1.5.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	93,88	95,25	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21.1.6.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	0	0	100	100	85	95	100	100	100	100	100
21.1.7.	Stor Pola Pangan Harapan (SPPH)	0	0	78,16	95,91	51	93,5	94	96	96,5	97	97
21.1.8.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	0	0	0	100	85	95	100	100	100	100	100
21.1.10.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
21.1.11.	Ketersediaan pangan utama (%)	68,95	62,92	49,12	41,03	33,24	35	40	50	60	70	70
21.1.12.	Konsumsi Energi Per Kapita (kcal/kap/hr)	0	0	2115	2167	2067	2125	2150	2175	2200	2225	2225
21.1.13.	Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	0	0	65	76,1	66,88	70	72,5	75	77,5	80	80
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bidang Litbang):											
22.1.	Meningkatnya kapasitas lembaga desa tentang perencanaan partisipatif	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
22.2.	Tersusunnya RPJMDes	43 desa	43 desa	43 desa	43 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
22.3.	Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan dan teknik pendataan profil desa	12 desa/kel.	24 desa/kel.	37 desa/kel.	47 desa/kel.	52 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.
22.4.	Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	12 desa/kel.	24 desa/kel.	37 desa/kel.	40 desa/kel.	42 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.
22.5.	Meningkatnya lembaga dalam penyusunan perencanaan yang responsif gender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.6.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa
22.7.	Meningkatnya LKM berprestasi	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel
22.8.	Terbangunnya infrastruktur desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
22.9.	Terbangunnya kantor desa yang layak	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
22.10.	Terbentuknya BUMDES	0	0	0	0	12 BUMDesa	13 BUMDesa	10 BUMDesa	8 BUMDesa	6 BUMDesa	9 BUMDesa	46 BUMDesa
23.	Statistik (Bidang Stamonev):											
23.1.	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.3.	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi	2,33	3,59	7,67	7,31	2,7						
23.4.	Sistem Informasi Profil Daerah											
23.5.	Buku "Kecamatan dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	Komunikasi Dan Informatika (Bidang Praswil):											
24.1.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :											
24.1.1.	Jumlah Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (pertahun	1196 adv	1646 adv	2064 adv	2472 adv	3036 adv	3600 adv	3650 adv	3700 adv	3750 adv	3800 adv	18500 adv
24.1.2.	Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari)	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari
24.2.	Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi :											
24.3.	Kerjasama informasi dan media massa :											
24.3.1.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.3.2.	Jumlah surat kabar nasional/lokal (media)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
24.3.3.	Jumlah Web site milik pemerintah daerah	43	43	62	62	62	62	62	62	62	62	62
25.	Perpustakaan (Bidang Litbang) :											
25.1.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan:											
25.1.1.	Jumlah perpustakaan	336	336	428	440	438	439	439	439	439	439	439

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
25.1.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	817	1024	4621	3507	1396	5100	5600	6200	6800	7500	31200
25.1.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	31118	34579	43684	50043	52633	65819	69969	74269	78769	83469	83469
26.	Pertanian :											
26.1.	Produktivitas Padi	42,78	49,66	56,49	57,27	36,19	47,4	47,41	47,42	47,43	47,44	47,44
26.2.	Produktivitas Jagung	12,93	12,53	13,65	14,48	15,12	15,10	15,15	15,18	15,20	15,20	15,2
26.3.	Produktivitas Kedelai	18,50	14,88	12,30	12,86	12,76	13,32	13,33	13,35	13,38	13,40	13,4
26.4.	Produktivitas K.Tanah	10,00	-	8,57	10,00	-	-	-	-	-	-	-
26.5.	Produktivitas K.Hijau	209,84	124,78	213,37	218,46	243,51	153,55	153,56	153,57	153,6	153,6	153,6
26.6.	Produktivitas Ubi Kayu	155,31	181,79	186,19	240,35	174,76	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,5
26.7.	Produktivitas Ubi jalar	235	228	227	226	362	398	414	430	447	465	2154
26.8.	Produksi Kakao	1954	2149	1977	1977	361,799	2388	2627	2685	2792	3071	13563
26.9.	Produksi kelapa	0	0	0	2057,609	0	0	0	0	0	0	0
28.10.	Produksi tebu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.11.	Produksi kapas	0	0	0	149,945	0	0	0	0	0	0	0
26.12.	Produksi kemiri	17	22	23	23	29	31,5	33	34,5	36	37,5	172,5
26.13.	Produksi cengkeh	30	32	61	77	93	58	58	58	58	58	58
26.14.	Cakupan bina kelompok petani (kelompok)	30 klp	33 klp	36 klp	39 klp	42 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	48 klp
26.15.	Jumlah komoditas unggulan yang dipasarkan keluar daerah (jenis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.16.	Kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian (kelompok)	-	1	4	17	-	6	11	10	10	10	10
26.17.	Persentase kepemilikan KIT penyuluhan (%)											
26.18.	Jumlah populasi sapi	48.049	49.051	38.128	37.862	30.771	31.079	31.235	31.391	31.548	31.706	31.706
26.19.	Jumlah populasi kambing	897	620	720	807	893	902	906	911	916	921	921
26.20.	Jumlah populasi itik	-	-	92.173	97.332	90.971	91.883	92.342	92.804	93.268	93.734	93.734
26.21.	Jumlah populasi ayam	1.361.246	1.092.246	1.102.948	1.197.465	1.208.581	1.220.697	1.226.801	1.232.935	1.239.099	1.245.294	1.245.294
26.25.	Angka Kesakitan Ternak	6.750	6.500	7.500	15.000	12.000	6.750	6.500	6.300	6.000	5.000	37.550
26.26.	Jumlah Ternak yang diberikan vaksin	21.000	21.000	22.000	24.000	30.000	38.000	42.000	45.000	47.000	50.000	258.000
26.27.	Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak	6.750	6.500	7.500	15.000	12.000	6.750	6.500	6.300	6.000	5.000	37.550
27.	Kehutanan :											
27.2.	Luas lahan kritis yang tertutupi di luar kawasan hutan (Ha)	1.683,66	642,68	1.500,50	599,53	33,15	100	100	100	100	100	500
27.3.	Luas lahan kritis yang tertutupi di luar kawasan hutan (Unit)	331.496,00	127.436,00	297.100,00	112.575,00	2.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000
27.6.	Tertanamnya bibit tanaman kehutanan dalam rangka penghijauan lingkungan	15044	23150	525	4000	1000	20000	22000	24000	26000	28000	120.000
27.9.	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan	8	8	8	8	40	0	0	0	0	0	-
27.10.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang dampak kebakaran	830 Orang	831 Orang	832 Orang	833 Orang	3.320 Orang	2.616 Orang	2.616 Orang	2.616 Orang	2.616 Orang	13.080 Orang	13.080 Orang
28.	Pariwisata :											
28.1.	Kunjungan wisata (orang)	2.756.579	2.892.019	3.148.443	3.681.342	3.934.384	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	5.105.126	5.105.126
28.2.	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW	30%	30%	42%	44%	55%	-	-	-	-	-	-
28.3.	Persentase kunjungan wisatawan ke wilayah Kab. Badung	9,6%	4,7%	8,1%	14,5%	6,4%	27%	28%	29%	30%	31%	31%
28.4.	Persentase desa wisata yang aktif	-	22%	44%	67%	100%	-	-	-	-	-	-
29.	Perikanan Kelautan:											
29.1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.551,40	4.632,40	4.765,10	6.112,50	6.173,90	6.423,33	6.551,79	6.682,83	6.816,48	6.952,81	33.427,24
29.2.	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Terbedayakan (KUB)	41	43	46	49	49	50	50	51	52	53	54
29.3.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	33.834,90	43.931,60	44.334,20	507,10	586,80	598,59	604,58	610,63	616,73	622,90	3.053,43
29.4.	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat sarana Produksi Budidaya (Pokdakan)	24	11	16	12	9	5	5	5	5		
29.5.	Jumlah Produksi Ikan Olahan (Ton)	3.420	3.780	4.140	4.500	4.860	5.056	5.157	5.260	5.365	5.472	26.310,00
29.6.	Jumlah Poklahsar yang berkembang (kelompok)	7	7	13	18	23	29	32	35	38	41	41

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
29.7.	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas) aktif	6	5	5	5	5	7	8	9	10	11	11
29.8.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (Unit)	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47
30.	Perdagangan :											
30.3.	Data Pengawasan UTTP	-	-	-	-	3500	400	400	400	400	2400	2400
30.4.1.	Unit Usaha	732	766	284	877	871	871	910	949	988	1027	1027
30.4.2.	Tenaga Kerja	3660	3830	1420	3560	4355	4330	4500	4670	4840	5010	5010
30.4.3.	Modal	85.104.534.660	524.853.101.211	252.413.559.153	161.170.291.869	117.060.303.908	228.120.358.160	239.526.376.068	250.932.393.976	262.338.411.884	273.744.429.792	273.744.429.792
30.5.1.	Unit Usaha	141	141	39	209	197	215	233	251	259	287	287
30.5.2.	Tenaga Kerja	1410	2115	702	5635	3940	4085	4180	4267	4304	4592	4592
30.5.3.	Modal	666.416.944.408	222.955.729.211	216.400.000.000	239.892.005.840	294.911.615.703	344.521.021.984	360.926.784.936	377.332.547.888	393.738.310.840	410.144.073.792	410.144.073.792
30.6.1.	Unit Usaha	10	8	2	14	3	4	6	8	10	12	12
30.6.2.	Tenaga Kerja	200	160	50	37	150	221	265	309	353	397	397
30.6.3.	Modal	538.659.294.408	100.991.986.327	170.000.000.000	397.646.017.794	124.747.132.665	158.784.759.216	198.480.949.020	238.177.138.824	277.873.328.628	17.569.518.432	17569518432
30.7.	Kontribusi Perdagangan dalam PDRB (%)	7,39	7,28	7,42	7,56	7,60	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,71
30.8.	Perdagangan	883	915	325	1102	1071	1770	1864	1214	1244	1300	1300
30.9.	Dagang Besar	10	8	2	13	3	7	7	7	7	7	7
30.10.	Dagang Menengah	141	141	39	377	197	758	785	200	210	220	220
30.11.	Dagang Kecil	732	766	284	712	871	1005	1072	1139	1205	1073	1073
30.12.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
31.	Perindustrian :											
31.1.	Perkembangan IKM				74,9	79,43	79,45	79,75	80,2	80,5	80,9	81,26
31.1.1.	Unit pelayanan yang telah dilakukan survei ikm			5	7	41	38	38	38	38	38	38
31.2.	Jumlah Unit Usaha (unit)	1055	1111	1148	1176	1205	132753	133025	1313	1340	1367	1367
31.3.	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	11282	11690	12393	12665	12937	1154646110	1154646110	133297	133569	133841	133841
31.4.	Nilai Produksi (000)	959049793	1001948167	1072840966	1093292252	1113743538	1154646110	1154646116	11175097396	1195548682	1215999968	1215999968
31.5.	Nilai Investasi (000)	4699752	4890528	4959392	492409765	133511884	143321310	148226023	153130736	158035449	162940162	162940162
31.6.	Sentra IK	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31.7.	KUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.8.	Kontribusi Perindustrian dalam PDRB	4,59	4,47	4,53	4,67	4,72	4,81	4,84	4,87	4,91	4,95	4,95
31.9.	Industri	815	859	904	297	948	978	1065	1152	1239	1326	1326
31.10.	Industri Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.11.	Industri Menengah	13	15	18	18	19	17	17	17	17	17	17
31.12.	Industri Kecil	802	844	886	909	929	961	1048	1135	1222	1309	1309
	Fokus Seni Budaya											
1	Jumlah klub olahraga	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
2	Jumlah gedung olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	ASPEK PELAYANAN UMUM											
	Fokus Layanan Urusan Wajib											
1.	Pendidikan :											
1.1.	Angka partisipasi kasar	115,01	129,23	117,73	120,37	118,89	100	100	100	100	100	100
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	99,95	99,96	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3.	Angka Partisipasi Murni											
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,87	103,67	98,62	99,12	99,98	100	100	100	100	100	100
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	91,28	101,62	91,59	92,1	109,95	100	100	100	100	100	100
1.4.	PAUD :											
1.4.1.	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	96,02	96,46	100,45	102,93	103,06	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.5.	Pendidikan Dasar 9 Tahun :											
1.5.1.	APK SD/MI (%)	110,04	117,84	112,31	113,16	113,57	100	100	100	100	100	100
1.5.2.	APM SD/MI (%)	96,87	103,67	98,62	99,12	99,98	100	100	100	100	100	100
1.5.3.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%)	100	94,6	97,91	96,99	99,37	100	100	100	100	100	100
1.5.5.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.6.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	36	37	38	39	80	85	87	90	95	100	100
1.5.7.	APK SMP/MTs (%)	122,57	137,63	125,12	128,14	123,16	100	100	100	100	100	100
1.5.8.	APM SMP/MTs (%)	91,28	101,62	91,59	92,19	109,95	100	100	100	100	100	100
1.5.9.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,01	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	99,97	99,99	99,99	100	100	100	100	100	100	100
1.5.11.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	48	49	50	55	80	85	87	90	95	100	100
1.6.	Pendidikan Non Formal :											
1.6.1.	Angka Kelulusan Paket A (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2.	Angka Kelulusan Paket B (%)	100	100	98	100	99	100	100	100	100	100	100
1.6.3.	Angka Kelulusan Paket C (%)	100	100	93	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.	Manajemen Pelayanan Pendidikan :											
1.7.1.	Persentase SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.2.	Persentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.8.	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan :											
1.8.1.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	82,50	89,19	92,50	94,40	91,22	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
1.8.2.	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	85,90	88,00	90,00	93,30	91,81	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00
1.1.	Pendidikan dasar:											
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	108,07	115,87	111,37	113,13	105,32	100	100	100	100	100	100
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	49	52	50	51	51	52	52	52	52	52	52
1.1.3.	Rasio guru/murid	58	57	57	59	60	40	40	40	40	40	40
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	29	29	28	28	27	33	34	35	36	37	37
1.2.	Pendidikan menengah:											
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	117,54	133,5	118,19	123,19	122,35	100	100	100	100	100	100
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	23	27	23	23	22	23	23	23	23	23	23
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	67	68	65	66	65	60	55	50	45	40	40
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	39	38	37	35	34	33	33	32	32	32	32
1.3.	Fasilitas Pendidikan:											
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	269	271	272	274	275	278	278	278	278	278	278
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85	87	87	91	93	97	97	97	97	97	97
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):											
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	320	320	320	320	338	350	365	370	380	390	390
1.5.	Angka Putus Sekolah:											
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0	0,12	0,06	0,01	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Angka Kelulusan:											
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99,97	99,99	99,99	100	100	100	100	100	100	100
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	99,98	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	94,6	97,91	96,93	99,37	100	100	100	100	100	100
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,27	94,89	98,44	103,49	95,93	100	100	100	100	100	100
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	61,04	62,56	80,32	81,61	91,81	95	96	97	98	100	100
2.	Kesehatan :											
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	80,8	53,2	59	60	60	58	56	54	52	50	50
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	14,7	14,8	14,9	15,9	1,23	1,33	1,44	1,45	1,71	1,86	1,86
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07	0,069	0,1	0,116	0,01	0,01	0,01	0,01	0,016	0,016	0,016
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	36,5	26,2	55,3	110	0,70	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	78,2	73,5	73,3	61,72	0,70	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60,3	54,9	80,6	72,99	74,41	75	77	78	80	80	80
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,09	92	95,7	99,72	98,68	92	93	94	95	96	96
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positive	8,49	43	45,2	51,8	45,6	59	61,5	66	66,5	69	69
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	105,87	104,3	96,77	93,86	100	100	100	100	100	100	100
2.14.	Jumlah puskesmas	12	12	13	13	13	14	15	16	17	17	17
2.15.	Jumlah pembantu puskesmas	53	54	54	54	54	54	57	60	60	60	60
3.	Pekerjaan Umum :											
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	62,79%	84,22%	89,07%	91,39%	91,39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	57	57,1	56,7	56,7	56,7	80	80	90	90	100	100
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk											
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	88,00%	86,00%	86,96%	82,77%	75,62%	87,43%	90,43%	93,43%	96,43%	100%	100%
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk											
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.7.	Rasio rumah layak huni	81.136	81.886	82.636	83.386	84.136	86.386	87.136	87.886	88.636	89.386	89.386
3.8.	Rasio permukiman layak huni	58,83%	62,39%	65,06%	65,06%	65,06%	96,35%	97,08%	97,81%	98,54%	99,27%	99,27%
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	565.981	628.744	628.744	628.744							
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)											
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	355.353	529.517	560.018	574.626	625.274	96,75%	98,00%	99,25%	100,00%	100,00%	100,00%
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	-	-	259,7495	39,15%	44,07%	44,07%	44,07%	44,07%	44,07%
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	-	-	259,7495	45,12%	45,12%	45,12%	45,12%	45,12%	45,12%
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota											
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	10.272,39	10.345,77	10.685,17	10.829,64	10860,59	96,45%	97,50%	98,50%	100,00%	100,00%	100,00%
3.18.	Lingkungan Pemukiman											
4.	Perumahan :											
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	64.025,50	63.025,50	83.002,67	86.667,00	97.066,83	92.313.550	93.318.050	94.824.800	96.934.250	97.637.400	97.637.400
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	86.519	868,580	89.035	105.154	105.154	87.823.435	90.836.935	93.850.435	96.863.935	100.450.000	100.450.000
4.5.	Rumah layak huni	85.636	85.636	85.636	85.636	85.636	86.386	87.136	87.886	88.636	89.386	89.386
5.	Perencanaan Pembangunan :											
5.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
5.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.4.	Penjabaran RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Perhubungan :											
6.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	372.750	1.552.142	1.307.679	1.279.597	695433	920000	966000	1.014.300	1.065.015	1.118.266	1.118.266
6.2.	Rasio ijin trayek	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
6.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	7.138	10.500	12.285	13.689	13655	15055	15808	16.598	17.428	18.300	18.300
6.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
6.5.	Angkutan darat	319322	308939	232568	461359	484426,95	560.785	588.824	618265,1847	649178,4439	681637,3661	715719,2344
6.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	7.150	7.464	8.909	10.316	10145	11834	12781	13.803	14.907	16.100	16.100
6.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	46 menit	46 menit	46 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit
6.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	37.500	37.500	37.500	37.500	37500	37500	37500	37.500	37.500	37.500	37.500
6.9.	Pemasangan Rambu-rambu	4861	4969	5088	5508	5553	6453	6753	7053	7353	7653	7953
7.	Lingkungan Hidup :											
7.1.	Persentase penanganan sampah	72,9	89,3	97,3	97,9							
7.2.	Persentase Penduduk berakses airminum	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
7.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	67,24%	71,32%	75,44%	80,29%	85,15%	89,03%	90,97%	92,91%	94,86%	96,80%	96,80%
7.4.	Pencemaran status mutu air	73,33	92,86	79,22	76,25	75,00	77	78	79	79	79	79
7.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air											
7.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
7.8.	Penegakan hukum lingkungan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pertahanan :											
8.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	-	67,6	73,75	80,16	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	18	22	24	28	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Penyelesaian izin lokasi	31,58%	45,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil :											
9.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	99%	99%	98%	99%	90,02%	92%	94%	95%	97%	100%	100%
9.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	70%	86%	90%	92%	84,33%	85%	87%	89%	90%	92%	92%
9.3.	Rasio pasangan berakte nikah	74%	77%	60%	10%	80%	85%	90%	93%	89%	95%	95%
9.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	700	800	900	920	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi											
9.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	99%	99%	98%	99%	90%	94%	95%	98%	99%	100%	100%
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :											
10.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	44,69%	45,12%	44,31%	46,56%	48,81%	51,06%	53,31%	55,56%	57,81%	60,06%	62,31%
10.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta											
10.3.	Rasio KDRT	0,5	0,071	0,044	0,048	0,044	0,048	0,044	0,048	0,044	0,048	0,044
10.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur											
10.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan											
10.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	6 Kasus	13 Kasus	12 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	0	0	0	0	0	0
10.7.	Persentase Penanggankasus KDRT yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :											
11.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,14	2,10	2,11	2,12	2,1	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
11.2.	Rasio akseptor KB	85,26	85,31	85,32	84,31	78,64	78,76	78,82	78,86	78,90	78,94	78,94
11.3.	Cakupan peserta KB aktif	82,21% (65.885)	85,46% (67.070)	85,57% (67.145)	88,91% (70.384)	88,91% (70.384)	89,02 (73623)	89,13 (76862)	89,24 (80101)	89,35 (83340)	89,46 (86579)	89,57 (89818)
12.	Ketenagakerjaan :											
12.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	2,36	1,63	2,2	3,28	0	0	0	0	0	0	0

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
12.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	51	54	54	62	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	77,8	72,92	73,04	73,05	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	1.251	1.396	1.312	1.128	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Tingkat pengangguran terbuka	2,3	1,6	0,77	0,48	34	0,335	0,33	0,325	0,32	0,31	0,31
13.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :											
13.1.	Persentase koperasi aktif	88,87	90,00	78,00	78,92	81,51	47.56%	56.01%	65.51%	75.72%	86.99%	100%
13.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	14.754	15.862	17.162	18.366	19.173	21,327	22,404	23,481	24,558	25,635	25,635
13.3.	Jumlah BPR/LKM	607	629	639	663	666	702	732	762	792	822	822
13.4.	Usaha Mikro dan Kecil	839	912	338	953	911	831	871	911	951	991	991
14.	Penanaman Modal :											
14.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	689	777	785	1.459	5.739	2.231	2.357	2.496	2.649	2.817	12.550
14.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3.173.814.437.239,00	7.180.810.126.088,00	6.147.499.450.989,00	2.618.136.988.815,00	6.329.353.277.774,00	2.419.842.370,05	2.871.927.176,75	3.359.197.642,05	3.899.203.310,35	4.493.089.023,15	17.043.259.522,35
14.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	4.33	8.73	21.68	6.49	6.34	9.514	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
14.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1.740,50	1.355,46	27,46	-1.467,29	1308,02		322,20	376,05	424,59	487,23	
15.	Kebudayaan :											
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
15.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	23 Situs	52 Situs	-	52 Situs	52 Situs	54 Situs	54 Situs	56 Situs	58 Situs	58 Situs
16.	Kepemudaan dan Olahraga :											
16.1.	Jumlah organisasi pemuda	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
16.2.	Jumlah organisasi olahraga	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
16.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	11	13	15	11	11	11	11	11	11	11
16.4.	Jumlah kegiatan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
16.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6.	Lapangan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
17.	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :											
17.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60	46	40	40	40	65	70	75	80	85	375
17.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	5
18.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :											
18.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,2	5,4	5,2	5,1							
18.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	33,01	33,18	33,47	31,71	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	155,9
18.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	1890
18.4.	Pertumbuhan ekonomi	7,07	7,64	6,82	6,97	6,27						
18.7.	Penegakan PERDA	105,23	113,43	104,88	106,88	104,48	75	80	85	90	95	95
18.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari
18.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	60%	65%	70%	75%	80%	55%	65%	70%	80%	90%	90%
18.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922
18.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	84,20%	84,20%	295,4%	295,4%	295,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	84,20%	84,20%	295,4%	295,4%	295,4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	80,40%	88,14%	88,32%	96,33%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	47 desa	48 desa	49 desa	50 desa	51 desa	52 desa	53 desa
18.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	79,9	80,9	81,9
19.	Ketahanan Pangan :											
19.1.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.2.	Ketersediaan pangan utama	68,95%	62,92%	49,12%	41,03%	33%	34%	40%	50%	60%	70%	70%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
20.	Pemberdayaan Masyarakat Desa :											
20.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok
20.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok
20.3.	Jumlah LSM	7	7	7	5	5	2	2	2	2	2	10
20.4.	LPM Berprestasi	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok
20.5.	PKK aktif	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok
20.6.	Posyandu aktif	572 Kelompok	572 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok
20.7.	Swadaya Masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat	93,50%	79,40%	89,30%	93,90%	94,30%						
20.8.	Pemeliharaan Pasca pemberdayaan masyarakat	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	63 Kelompok	64 Kelompok	65 Kelompok	66 Kelompok	67 Kelompok	68 Kelompok	69 Kelompok
21.	Statistik :											
21.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.	Kearsipan :											
22.1.	Pengelolaan arsip secara baku	30 SKPD	30 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	180 SKPD
22.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	40 Orang	40 Orang	104 Orang	132 Orang	129 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	824 Orang
23.	Komunikasi dan Informatika :											
23.1.	Jumlah jaringan komunikasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
23.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,000567697	0,00054038	0,000358234	0,000350091	0,000197037	0,000127551	0,0000995605	0,0000837943	0,0000680913	0,0000547912	0,0000547912
23.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.5.	Web site milik pemerintah daerah	43	43	62	62	62	62	62	62	62	62	62
23.6.	Pameran/expo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
24.	Perpustakaan :											
24.1.	Jumlah perpustakaan	336	336	428	440	438	439	439	439	439	439	439
24.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	817	1.024	4.621	3.507	2.336	5.100	5.600	6.200	6.800	7.500	31.200
24.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	31.118	34.579	43.684	50.043	52.633	65.819	69.969	74.269	78.769	83.469	83.469
	Fokus Layanan Urusan Pilihan											
1.	Pertanian :											
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62,88	63,2	64,61	62,91	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	12,91 M	13,43 M	14,21 M	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	666,32 M	693,76 M	744,55 M	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Cakupan bina kelompok petani	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp
1.7.	Jumlah Populasi Ternak	1.661.692	1.357.001	1.366.005	1.476.035	1.486.869	1.501.775	1.509.284	1.516.831	1.524.414	1.532.036	1.532.036
1.8.	Kelautan dan Perikanan											
1.8.1.	Produksi perikanan	38.386,30	48.563,50	49.099	6.619,60	6.724,65	5.335,96	5.389,32	5.443	5.497,62	5.552,60	27.219
1.8.2.	Konsumsi ikan	30,91	31,1	32,2	32,87	32,89	32,96	33,01	33,06	33,11	33,15	33,15
1.8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	150	169	167	167	149	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp
1.8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	4.467,9	4.570,30	4.748,40	6.094,70	6.137,81	4.737,32	4.784,69	4.832,54	4.880,86	4.929,66	24.165
2.	Kehutanan :											
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	331496	127436	297100	112575	2200	40000	40000	40000	40000	40000	240000
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral											
4.	Pariwisata											
4.1.	Kunjungan wisata	2.756.579	2.892.019	3.148.443	3.681.342	3934384	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500	4.862.025	5105126	5105126
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	5.948.208,92	7.186.658,79	8.807.667,89	10.815.279,76	28,16%	28,17%	28,36%	28,95%	28,97%	29,00%	29,00%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
4.3.	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW	30%	30%	42%	44%	55%	-	-	-	-	-	-
4.4.	Persentase DTW yang ditata	30%	30%	42%	44%	55%	64%	66%	69%	72%	72%	72%
4.5.	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	2.756.579	2.892.019	3.148.443	3.681.342	3.934.384	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	5.105.126	5.105.126
4.6.	Persentase kunjungan wisatawan ke wilayah Kab. Badung	9,6%	4,7%	8,1%	14,5%	6,4%	27%	28%	29%	30%	31%	31%
4.7.	Jumlah Desa wisata yang berbasis pertanian	-	2	2	2	3	1	1	1	1	1	6
4.8.	Persentase desa wisata yang aktif	-	22%	44%	67%	100%	-	-	-	-	-	-
5.	Kelautan dan Perikanan :											
5.1.	Produksi perikanan	38.386,30	48.563,50	49.099	6.619,60	6.724,65	5.335,96	5.389,32	5.443	5.497,62	5.552,60	27.219
5.2.	Konsumsi ikan	30,91	31,1	32,2	32,87	32,89	32,96	33,01	33,06	33,11	33,15	33,15
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	150	169	167	167	149	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	4.467,9	4.570,30	4.748,40	6.094,70	6.137,81	4.737,32	4.784,69	4.832,54	4.880,86	4.929,66	24.165
6.	Perdagangan :											
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,30%	10,30%	9,82%	8,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	128.296.174,45	64.119.363,27	57.770.469,90	63.675.447,62	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal											
7.	Perindustrian :											
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,58%	4,36%	4,21%	4,01%	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri											
7.3.	Pertumbuhan Industri.	54	41	50	22	-	-	-	-	-	-	-
	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
1.	Pertanian :											
1.1.	Nilai tukar petani	1,103	1	0,98	1,265	-	-	-	-	-	-	-
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
1.	Perhubungan :											
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,77	2,04	2,7	1,36	1,292	1	1	0,999724971	0,949738723	0,902251787	0,857139197
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	372.750	1.552.142	1.307.679	1.279.597	695433	920000	966000	1.014.300	1.065.015	1.118.266	1.118.266
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	334677	1447702	1176531	1156821	561527	98155	100118,1	102120,462	104162,8712	106246,1287	108371,0512
2.	Lingkungan Hidup :											
2.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
3.	Komunikasi dan Informatika :											
3.1.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	12,32%	12,06%	8,86%	0,0891	0,093555	0,108301607	0,113716687	0,119402522	0,125372648	0,13164128	0,138223344
	Fokus Iklim Berinvestasi											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :											
1.1.	Angka kriminalitas	0,11%	0,09%	0,13%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Jumlah demo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Lama proses perijinan											
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	9 Pajak dan 13 Retribusi	10 Pajak dan 14 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	3	20	4	5	5	5	5	5	5	25

BAB IX PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 berakhir, maka RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2016 dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada Tahun 2015.

RKPD masa transisi tersebut antara lain bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada Tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD Kabupaten Badung Tahun 2017 yang telah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

Sedangkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah pada periode berikutnya.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama (Tahun 2022) dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung periode berikutnya, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 dan RKP Tahun 2022.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Badung dengan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait;
- 2) Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung agar betul-betul melaksanakan program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- 4) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- 5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung;
- 6) Penyusunan RKPD Kabupaten Badung dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;

- 7) RKPD Kabupaten Badung harus menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- 8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Badung merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD;
- 9) Renja PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD;
- 10) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 setiap PD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
- 11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Badung menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan di masing-masing pimpinan PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Badung menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- 12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Kabupaten Badung yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung, berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali. Hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Badung untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

